

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



@ditjenperkeretaapian



djka.kemenhub.go.id

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan fungsi pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas pada RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing baik di wilayah perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Capaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta disusun rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025.

Jakarta, Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. **Rata-rata capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebesar 108,421%** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	99,621	100,379
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,793	101,417
		IK4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,797	101,766
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	9,125	9,339	102,345
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	20,555	29,727	144,622
Rata-rata Capaian Kinerja						108,404

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp635.821.710.744,- atau 9,69% dari alokasi sebesar Rp6.551.440.731.000,-. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2024 yaitu sebesar 15,76% serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 22,38%. Terkait PNBPD Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp737.279.659.005,- atau 59,16% dari target Tahun 2025 sebesar Rp 1.246.326.325.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA.....	1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	1-7
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN.....	1-11
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	2-1
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	2-3
2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	2-4
2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	2-14
2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	2-21
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	2-42
2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029.....	2-55
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	2-61
2.5 REALISASI ANGGARAN.....	2-64
2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA.....	2-64
2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA	2-67
2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	2-68
BAB 3 PENUTUP.....	3-1
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA.....	3-1
3.2 KESIMPULAN.....	3-8
3.3 REKOMENDASI	3-9

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.....	1-7
Tabel 1-2	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025.....	1-10
Tabel 1-3	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	1-11
Tabel 1-4	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	1-11
Tabel 2-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2-2
Tabel 2-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025.....	2-5
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025	2-8
Tabel 2-4	Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah	2-12
Tabel 2- 5	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025	2-15
Tabel 2- 6	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025.....	2-15
Tabel 2- 7	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025.....	2-16
Tabel 2-8	Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian.....	2-18
Tabel 2-9	Kategori Kinerja Nilai IKM.....	2-22
Tabel 2-10	Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Juni Tahun 2025	2-22
Tabel 2-11	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-23
Tabel 2-12	Perbandingan Nilai IKM	2-25
Tabel 2-13	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025..	2-27
Tabel 2-14	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-28
Tabel 2-15	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-36
Tabel 2-16	Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api	2-39
Tabel 2-17	Jumlah Angkutan Barang Kereta Api.....	2-40
Tabel 2-18	Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025.....	2-42
Tabel 2- 19	Realisasi PNBK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025	2-45
Tabel 2-20	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-48
Tabel 2-21	Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	2-53
Tabel 2-22	Realisasi PNBK Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2025.....	2-53
Tabel 2- 23	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025	2-65

Tabel 2-24	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025	2-66
Tabel 2-25	Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025	2-67
Tabel 2-26	Realisasi PNBK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025	2-68
Tabel 2-27	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025.....	2-63
Tabel 3-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya	3-1
Tabel 3-2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025	3-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	1-5
Gambar 1-2	Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja	1-6
Gambar 2-1	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025	2-8
Gambar 2-2	Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025	2-16
Gambar 2-3	Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara	2-19
Gambar 2-4	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-23
Gambar 2-5	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-28
Gambar 2-6	Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara	2-31
Gambar 2-7	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-36
Gambar 2-8	Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025.....	2-43
Gambar 2-9	Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025.....	2-49
Gambar 2- 10	Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan II 2025	2-56
Gambar 2- 11	Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel dan darat Periode Triwulan II 2025.....	2-57
Gambar 2- 12	Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan II 2025	2-57
Gambar 2- 13	Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Periode Triwulan II 2025.....	2-58
Gambar 2- 14	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Periode Triwulan II 2025.....	2-59
Gambar 2- 15	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan II 2025 ...	2-60
Gambar 2- 16	Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	2-60
Gambar 2- 17	Alokasi dan Realisasi Anggaran PSO Tahun 2025.....	2-61
Gambar 2- 18	Target dan Realisasi Angkutan PSO Tahun 2025	2-62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
- Lampiran 3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025
- Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025
- Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
- Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Dokumen Pendukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka implementasi SAKIP dimaksud, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan beberapa tahapan termasuk memenuhi komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah laporan monitoring kinerja setiap triwulan untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja. Laporan monitoring kinerja ini sangat diperlukan sebagai upaya memastikan pencapaian target kinerja pada akhir periode serta selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan/tindakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat informasi dan evaluasi pencapaian kinerja dengan dilengkapi identifikasi kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud:

1. Menyediakan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja yang juga mencakup gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung;
2. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja;
3. Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

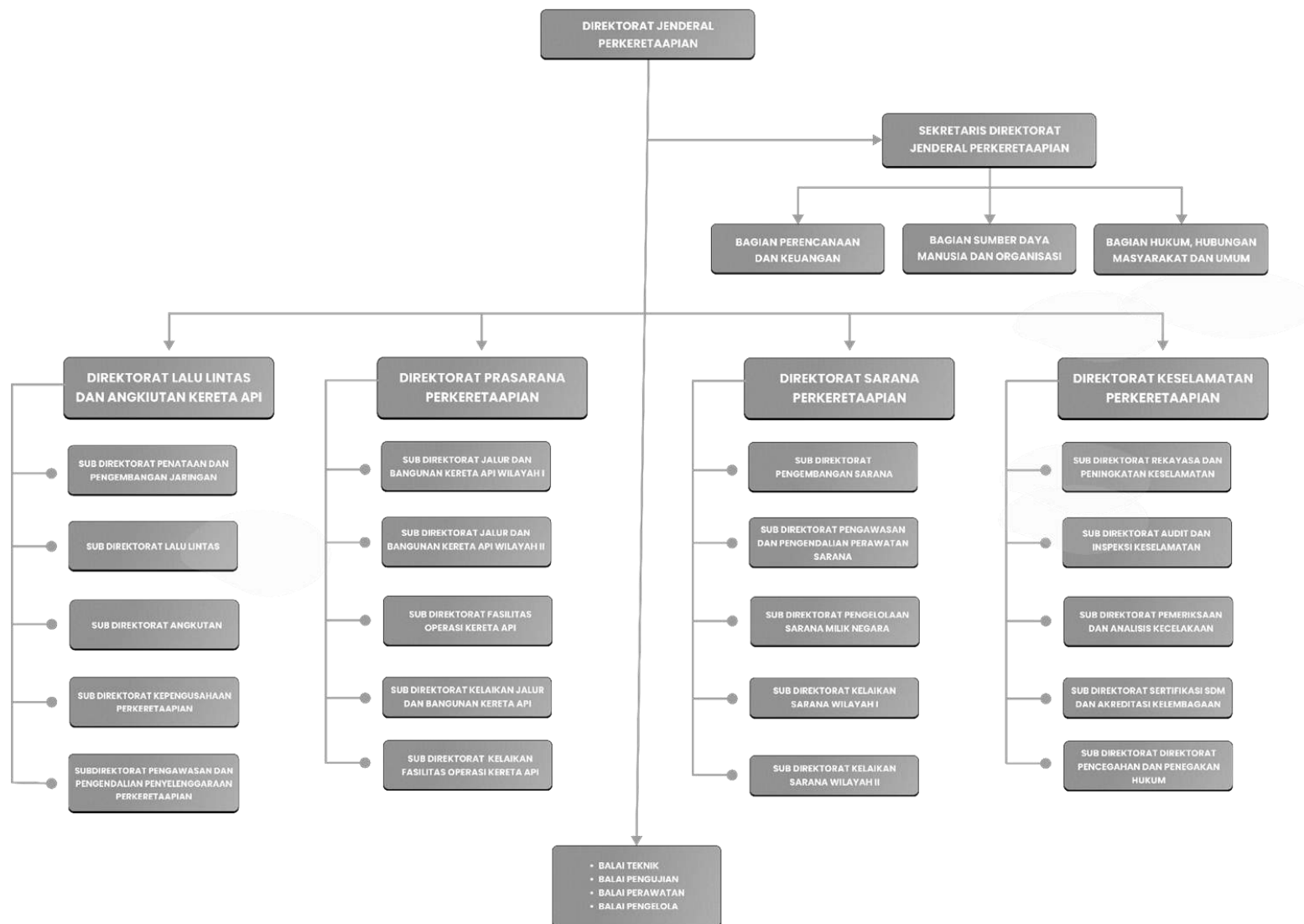
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);

- i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
- j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
- k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

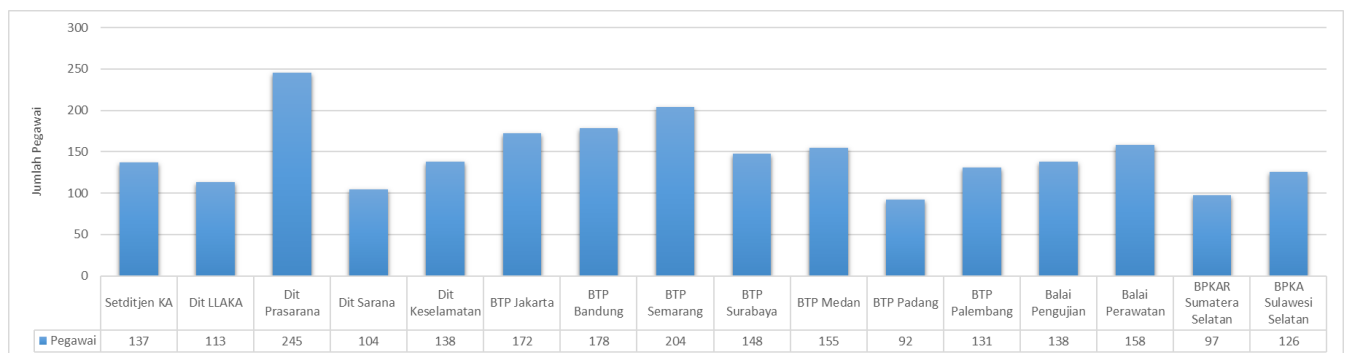
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 berjumlah 2.336 dengan rincian berupa 737 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.559 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian sasaran, indikator dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 termasuk uraian alokasi anggaran.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030 $\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan. $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right] \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang dan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA = $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang}}{2} + \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}}{2}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan	Target ditetapkan secara bertahap pe rtahun s.d Tahun 2029																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$	pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan RIPNAS 2030	
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ AKIP_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA PNBP_{DJKA} = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
	IK4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100*	96,100	96,100	96,100	96,100
	IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	%	19,000	4,465	9,125	14,785	14,785
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000

Catatan: Telah diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menyesuaikan baseline Tahun 2024 , namun masih menunggu persetujuan Menteri Perhubungan

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan pada Januari 2025 sebesar Rp5.119.295.134.000,00 dan pada bulan Juni alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat perubahan menjadi Rp.8.122.063.906.000,- Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 30 Juni 2025 (Rp)
1.	Program infrastruktur konektivitas	4.424.660.689.000	7.427.429.461.000,00
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000,00
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000,00
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.708.124.930.000,00
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	50.081.547.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	694.634.445.000	694.634.445.000,00
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.099.026.000,00
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	637.821.276.000,00
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000,00
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.149.348.000,00
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000,00
TOTAL		5.119.295.134.000	8.122.063.906.000,00

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 31 Juni 2025 (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000
SP2 Meningkatnya Keselamatan	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	2.716.185.741.000 (termasuk penunjang teknis)	2.758.206.477.000,00 (termasuk penunjang teknis)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 31Juni 2025 (Rp)
Transportasi Perkeretaapian	per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA		
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000,00
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api		
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	694.634.445.000,00
Jumlah		5.119.295.134.000	8.122.063.906.000,00

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dan Triwulan II dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk perbandingan/*benchmarking* kinerja.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran pada periode Triwulan II Tahun 2025 serta analisa efisiensi sumber daya.

Tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030. <i>Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan</i> Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$																									
2	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA = $\left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right] \times 100\%$																									
3	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							
4	IKP4 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$																									
5	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.																									

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
		$\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}} =$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang}}{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBPN_{DJKA} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBPN_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025.

2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Lokasi PKN, PKW dan Simpul Transportasi (pelabuhan, bandara, terminal tipe A) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sedangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lokasi-lokasi tersebut selanjutnya disandingkan dengan jaringan kereta api terhubung (*eksisting*) maupun yang akan terhubung dengan jaringan kereta api s.d periode Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dimana nilai tersebut masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Rincian target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2025 sebanyak 69 lokasi terdiri dari PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 52 lokasi, simpul bandara sebanyak 6 lokasi, simpul pelabuhan sebanyak 10 lokasi dan simpul terminal tipe A sebanyak 1 lokasi. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi meliputi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya mencakup rincian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu	√	√
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		69	69

Berdasarkan Tabel di atas, rasio konektivitas pada Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebesar 0,460 dengan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi), dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah} = \frac{69 \text{ Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{150 \text{ PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}$$

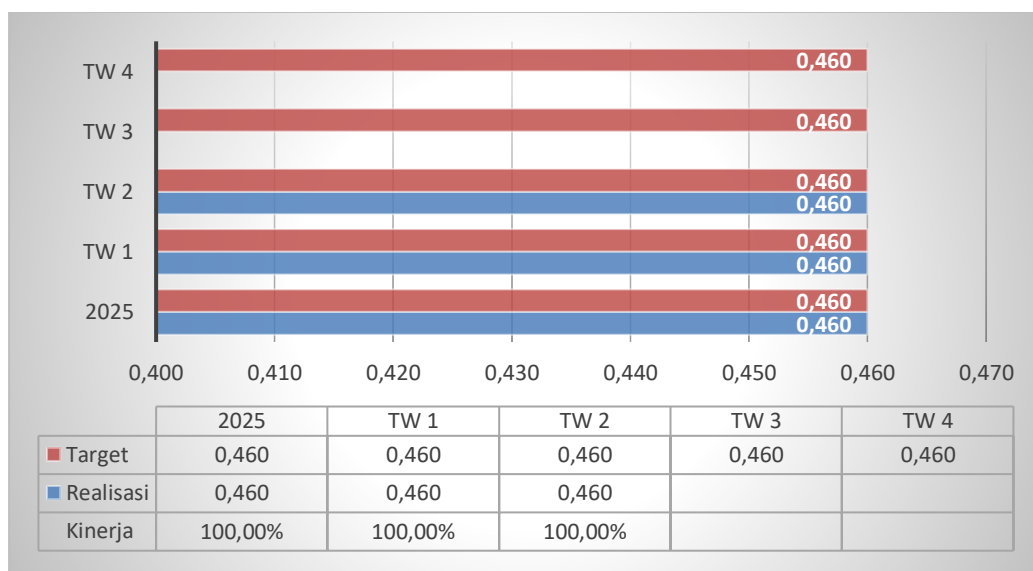
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,460, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II maupun Tahun 2025 sebesar 0,460. Pada periode Triwulan II Tahun 2025, realisasi kinerja dapat terpenuhi sesuai target dikarenakan target dan realisasi masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dimana belum terdapat penambahan pembangunan/ perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	-	-	100	100	-	-	100



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 mayoritas kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting.

Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain:

- a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian. Saat ini masih diperlukan pengujian kembali, BTP Medan sudah bersurat kepada Balai Pengujian pada tanggal 28 Mei 2025.
- b. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian.
- c. Dukungan konektivitas di wilayah IKN berupa penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Jalur KA Perkotaan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP-IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2) serta penyelenggaraan subsidi angkutan perintis Trem Otonom di IKN tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran (blokir).
- d. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 95,91%.
- e. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan/penetapan perencanaan teknis). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang pada tahun 2024 telah selesai pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). Pada tahun 2025, terhadap bidang yang belum dibebaskan diperlukan anggaran DPPT dan

penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis.

- f. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung pada Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk *frontage road* yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan pengusulan kembali pekerjaan *frontage road* menyesuaikan kemampuan fiskal yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2026. Sehingga pada tahun 2025 diperlukan:
- 1) KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung diperlukan usulan anggaran buka blokir BOBP untuk biaya panjar perkara pada 15 bidang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada lintasan segmen I. Selain itu 2 bidang milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunggu surat BPN Asahan untuk pembuatan penetapan lokasi;
 - 2) Pada segmen II KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung terdapat pengusulan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis.
- g. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *East-West Phase I* untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah serta pelelangan kegiatan pendukung/konsultan (*tender of assistance*) dengan progres pada akhir Maret 2025 telah selesai tahap verifikasi dokumen DPPT oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Barat.

Selain itu, juga terdapat beberapa usulan kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas yang didorong dengan skema pembiayaan alternatif namun masih dalam tahap koordinasi awal dan penyiapan dokumen perencanaan teknis, diantaranya pengembangan layanan kereta api *feeder* Stasiun MRT Lebak Bulus dan Stasiun LRT Harjamukti, pengembangan jalur KA mendukung Pelabuhan Patimban, pengembangan jalur KA mendukung BIJB Kertajati, serta reaktivasi jalur KA beberapa segmen di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

- a. Konsolidasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan perkeretaapian sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, diantaranya dengan koordinasi pihak internal (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian, dan lainnya) dan pihak eksternal (PT. KAI/BUPP/BUPS, Pemerintah Daerah).
- b. Konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- c. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Usaha terkait pembiayaan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

- a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.
- c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah bidang perkeretaapian dengan rasio konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai rasio konektivitas nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada rancangan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut,

transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio Triwulan I 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,627
2	Perkeretaapian	0,460

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api baru di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 69 titik dari jumlah 1.039 titik (6,64%) yang terhubung secara nasional (134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 603 Pelabuhan serta 302 Bandar Udara).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya:

- Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan *readiness criteria* salah satunya dokumen perencanaan yang masih berproses pada Direktorat teknis diantaranya
- Penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta *East – West*.
- Lanjutan beberapa kegiatan pendukung rasio konektivitas, diantaranya Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Medan-Binjai, Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA Antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta Tahap II, Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Solo Balapan-Kadipiro-Kaliworo) yang masih dapat dilaksanakan pada Tahun 2025.

- d. Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor *gathering*.
- e. Peninjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang dimungkinkan konektivitas dengan simpul transportasi seperti terminal tipe A dan lain-lain.
- f. Lanjutan kegiatan perencanaan teknis terhadap kegiatan yang menundukung indikator Rasio Konektivitas Antar Wilayah salah satunya penyusunan *Policy Brief* Studi Kelayakan Jalur KA akses menuju Pelabuhan Makassar *New Port* (MNP) dan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian Strategi/Kebijakan:*

- 1) Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta efisiensi anggaran.
- 2) Mempercepat penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian mendukung pengoperasian hasil pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pondok S5 (penetapan perencanaan teknis) dan perpanjangan perintis KA Aceh menuju Muara Satu (tindak lanjut hasil pengujian).

b. *Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:*

- 1) Pengusulan kebutuhan anggaran mendukung penyiapan lahan beberapa kegiatan pendukung konektivitas (relaksasi), diantaranya dukungan DPPT ulang dan pengusulan kembali penetapan lokasi pengadaan tanah antara Rantau Prapat – Kota Pinang.
- 2) Pengusulan kembali kegiatan pendukung konektivitas Tahun 2025 yang terdampak efisiensi pada RKA Tahun 2026, khususnya pemenuhan *readiness criteria* serta kegiatan studi Reviu Rencana

Induk Perkeretaapian Nasional guna penyesuaian target konektivitas pada RPJMN/Renstra Tahun 2025-2029.

2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan analisa mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan KA baik penumpang maupun barang pada periode tertentu. Kategori kecelakaan kereta api meliputi anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar. Selain itu, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan/perlintasan sebidang yang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api mengacu:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
 - a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
 - b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (*zero accident*) termasuk target pada periode triwulan dengan nilai tingkat keselamatan 100%. Namun realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah terjadi kecelakaan kereta api sebanyak 1 kejadian sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2- 5 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlok	2
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		2

Tabel 2- 6 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025

Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	-	-	-	-
	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-	-	-	-
	Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-
	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-	-	-	-
	Surabaya	-	-	-	-	-	-	-
	Jember	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Jawa		-	-	-	-	-	-	-
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	1	2
	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Sumatera		-	-	1	-	-	1	2
Jumlah (Jawa + Sumatera)		-	-	1	-	-	1	2

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan 1 kejadian kecelakaan kereta api dan jumlah keberangkatan sebanyak 261.332 KA, maka diperoleh Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA pada periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar 99,621% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

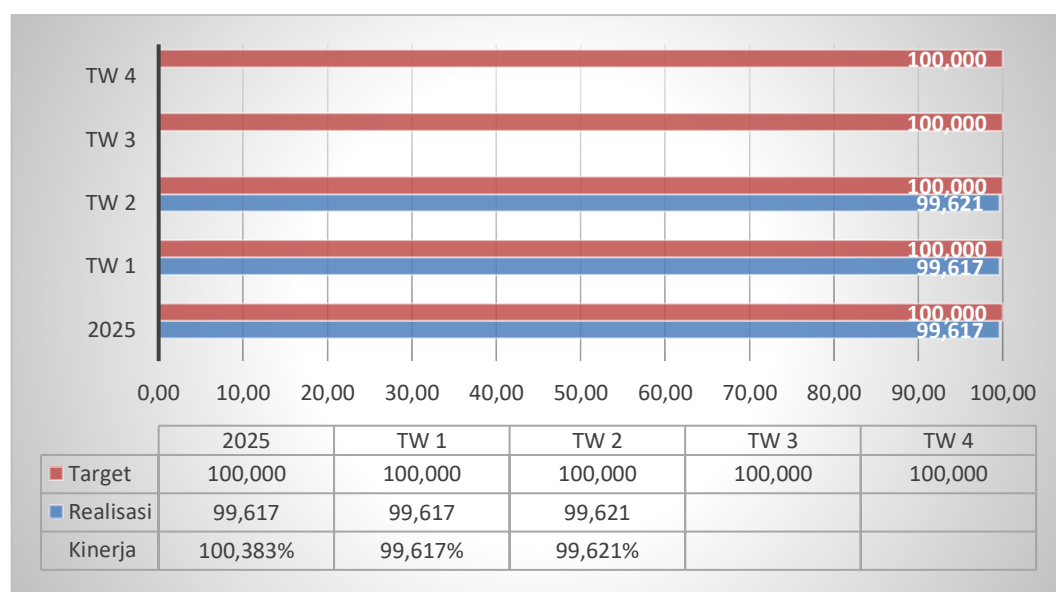
$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \frac{2}{527.972} \times 1.000 \right] \times 100\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Berdasarkan realisasi tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,617% dari target yang ditetapkan pada periode Triwulan II dan Tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 7 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100	100	100	100	100	99,617	-	-	-	99,617	99,621	-	-	99,621



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2025 terjadi dua kejadian anjlokkan yakni :

- KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan. Pada tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu pukul 22:30 WIB telah terjadi kecelakaan Anjlokkan Kereta Api KA 3100 (Barapati) Rangkaian Gerbong Barang nomor 458905 nomor urut 17 dari lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+9/0 Jalur II Emplasement Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah Divre III Palembang. Dampak kejadian kecelakaan KA tidak

terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional KA pada 10 KA dengan andil keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

- b. KA Barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 11.10 WIB telah terjadi anjlokkan 4 as pada rangkaian gerbong barang nomor 4212427 nomor urut 1 dari lokomotif. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya:

- a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan SDM perkeretaapian pada Triwulan II dengan rincian :
 - 1) Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 4.005 orang
 - 2) Pengujian Sarana Perkeretaapian sebanyak 5.560 unit
 - 3) Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 71 unit dan 107,747 Km
 - 4) Sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat
 - 5) Sertifikasi Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.689 sertifikat
 - 6) Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian sebanyak 23 sertifikat jalur dan bangunan serta 16 sertifikasi fasilitas operasi.

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

- a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 masih dalam tahap persiapan kontrak untuk kegiatan IO dan untuk kegiatan IM masih dalam tahap rekonsiliasi terkait aset dan assistensi data dukung;
- b. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta dukungan pengawasan terhadap perawatan dan pemantauan kondisi prasarana/sarana perkeretaapian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan inspeksi keselamatan serta *rampcheck*

dengan hubungan kerja Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Dan Sarana/Operator Perkeretaapian, serta termasuk relaksasi blokir efisiensi untuk kegiatan keselamatan transportasi perkeretaapian

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokkan) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data beberapa negara lain periode Tahun 2024 dengan data Indonesia periode Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan sama dengan Belgia, demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih lebih baik.

Tabel 2-8 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	498	0,0034
2	Belgia	8.298	1	0,0001
3	Indonesia	6.936	2	0,0003

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu beberapa sumber lain, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan KA dengan beberapa negara sebagaimana pada Gambar berikut.

NEGARA	Jumlah Kejadian Kecelakaan
Inggris Raya	0
Switzerland	5
Jepang	6
Indonesia	2*
Korea Selatan	20
Perancis	24
Jerman	24
India	33
Australia	168
Amerika Serikat	570

Sumber:
Eurostat (2021) Statistics of Rail accidents by type of accident
India Commission of Railway: Safety Annual Report 2021-22
U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration: DOT Open Data Catalogue
Office of the National Rail Safety Regulator: Rail Safety Report 2021-2022
Japan Transport Safety Board: Statistics (Railway)
South Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport: MOLIT Statistics System 2022

Keterangan: *) kinerja Indonesia Triwulan II 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024

Gambar 2-3 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

- a. Penanganan daerah rawan di wilayah Sumatera Selatan :
 - 1) Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian Rel oleh PT.KAI menggunakan Rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI;
 - 2) Penanganan daerah rawan oleh BTP Kelas II Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang.
- b. Koordinasi dengan KNKT, BTP Palembang, dan PT KAI (Persero) Divre 3 Palembang guna mengumpulkan data-data yang diduga berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan anjlokkan KA di emplasemen Banjarsari. Data-data yang telah diperoleh saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan apakah data tersebut merupakan faktor penyebab awal terjadinya kecelakaan atau justru merupakan dampak dari kecelakaan tersebut
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian Tahun 2025

- d. Kegiatan *roadshow* pemutakhiran, sinkronisasi data dan tinjauan lapangan dalam penerapan aplikasi e-perlintasan pada bulan Juli s.d Agustus 2025
- e. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Evaluasi dan penyesuaian program/kegiatan prioritas peningkatan keselamatan perkeretaapian pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai kebijakan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta ketersediaan sumber daya termasuk mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran;

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Usulan revisi relaksasi blokir efisiensi untuk kebutuhan anggaran terkait prioritas keselamatan transportasi perkeretaapian (penyelesaian pekerjaan infrastruktur dan perbaikan kerusakan prasarana yang tidak termasuk dalam komponen IMO)

c. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:

Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat semaksimal mungkin menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminimalkan risiko kecelakaan.

- b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga mengganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian

Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-9 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target kinerja nilai IKM Tahun 2025 dan periode Triwulan II sebesar 3,740. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2-10 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Juni Tahun 2025

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Dit LLAKA	3,73	3,94	3,81	3,83	-	3,66
Dit Prasarana	3,75	4,00	3,91	4,00	3,80	3,84
Dit Sarana	4,00	4,00	3,34	4,00	4,00	3,60
Dit Keselamatan	3,64	4,00	3,70	3,40	3,84	4,00
BPKAR Sumatera Selatan	3,58	3,58	3,57	3,58	3,57	3,58
BPKAR Sumatera Selatan -PPTB	3,97	3,94	4,00	3,97	-	3,89
Balai Pengujian	3,88	3,88	3,80	3,85	3,83	3,83
BPKA Sulawesi Selatan	3,37	3,28	3,38	3,43	3,46	3,30
Rata-rata per bulan	3,79	3,91	3,73	3,80	3,75	3,77
Rata-rata Triwulan II 2025	3,793					

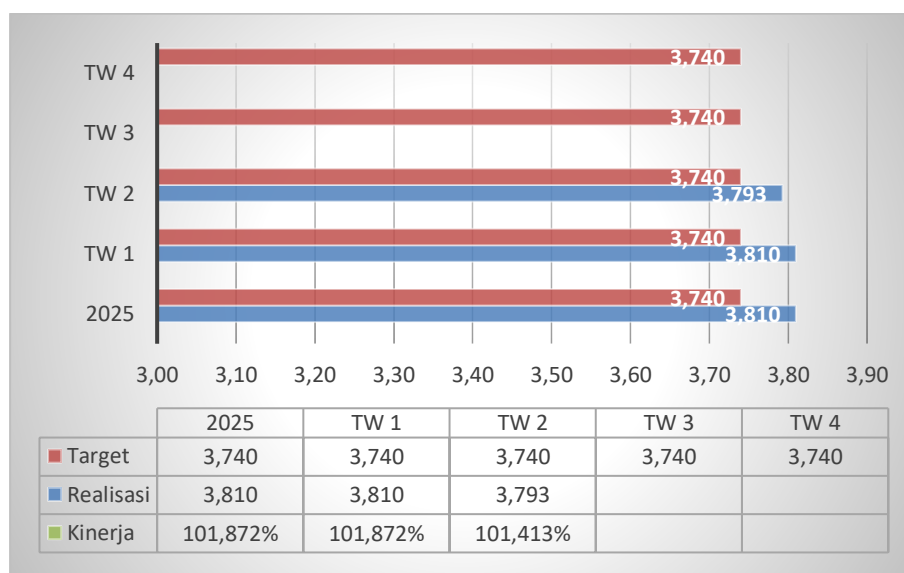
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 3,793. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,740 baik target tahunan maupun target triwulan, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,413%. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,810	3,793	-	-	101,872	101,413	-	-	101,413



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 dimana diperoleh nilai 3,793 atau dapat diinterpretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan menggunakan *google form*

pada beberapa unit kerja seperti Direktorat LLAKA, BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

- a. Hingga Triwulan II 2025 telah diterbitkan 16 Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 9 perizinan usaha/operasi.
- b. Telah dilaksanakan pelayanan sertifikasi yang dilaksanakan oleh unit kerja pusat yaitu
 - 1) Pelayanan Sertifikasi komponen Prasarana Perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikat.
 - 2) Pelayanan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.689 sertifikat sarana.
 - 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat sarana.
- c. Pelaksanaan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk petugas *customer service*, petugas piket, petugas keamanan dan petugas kebersihan LRT Sumatera Selatan pada 9-11 Juli 2025 di Stasiun Ampera.
- d. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.
- f. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.
 - 1) Pada Tahun 2025 direncanakan pengembangan fitur perizinan *online* pada aplikasi Portal Layanan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada triwulan II 2025 sudah berkontrak dan pada triwulan III 2025 direncanakan pembahasan Laporan Pendahuluan pada studi tersebut.

- 2) Penggunaan fitur perizinan *crossing* dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian pada aplikasi Portal Layanan Data Ditjen Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan sinkronisasi SSO.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses *link* survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian termasuk melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian).

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional selama Triwulan II Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-12 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,830
2	Ditjen Perkeretaapian	3,793

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dari Nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga perlu peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain:

- a. Diperlukan alternatif pelaksanaan kajian survei IKM Balai Perawatan KA dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran.
- b. Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps*.
- c. Penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

- 1) Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.
- 2) Menyusun laporan berkala/triwulan kepada PPTB Setjen Kementerian Perhubungan untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Diperlukan alternatif pelaksanaan kajian survei IKM Balai Perawatan KA dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran.

PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP)

Target *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 96,100%, baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.

Pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh jumlah realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu

sesuai jadwal sebanyak 516.339 KA dibandingkan dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 527.972 KA. Secara rinci realisasi perjalanan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	88.399	88.399	84.977	84.977	87.471	87.471	86.224	86.224	97,540%	97,540%
Feb	82.046	170.445	78.216	163.193	80.940	168.411	79.578	165.802	96,992%	97,276%
Mar	90.720	261.165	87.414	250.607	89.785	258.196	88.600	254.402	97,663%	97,410%
Apr	88.037	349.202	85.450	336.057	87.238	345.434	86.344	340.746	98,077%	97,578%
Mei	90.795	439.997	88.626	424.683	89.154	434.588	88.890	429.636	97,902%	97,645%
Jun	87.975	527.972	86.038	510.721	87.368	521.956	86.703	516.339	98,554%	97,797%

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu sebanyak 516.339 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 527.972 KA, maka diperoleh realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) sebesar 97,797%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

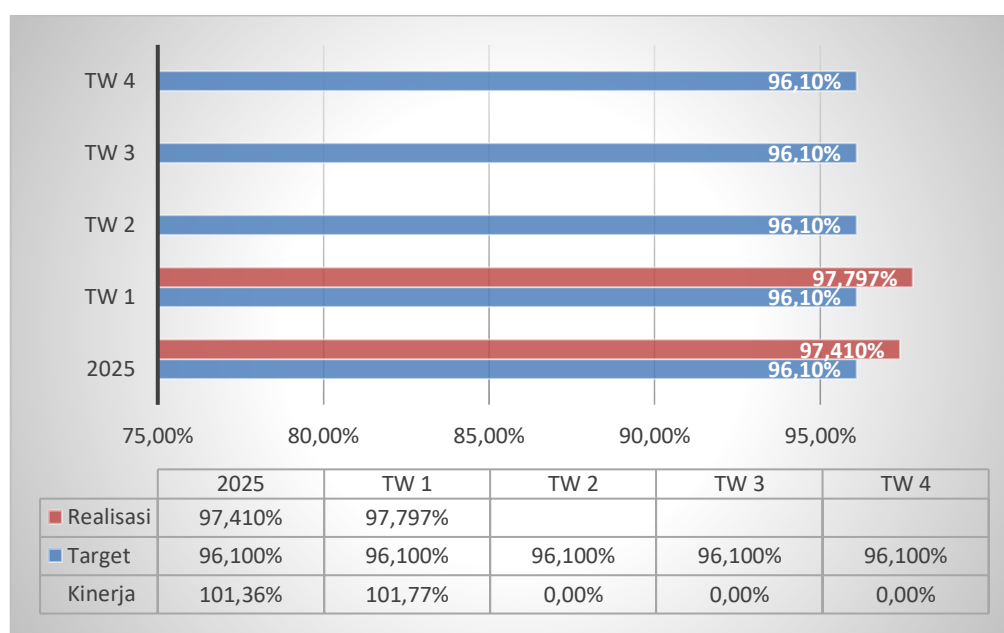
$$\begin{array}{l} \text{Persentase } \textit{On Time} \\ \textit{Performance} \text{ (OTP)} \\ \text{Transportasi Perkeretaapian} \end{array} = \frac{516.339 \text{ KA}}{527.972 \text{ KA}} \times 100\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Dengan realisasi OTP tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,766% dibandingkan dengan target Triwulan II dan target Tahun 2025 sebesar 96,100%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	97,410	97,797	-	-	101,258	101,766	-	-	101,766



Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2025 diantaranya:

- Terpenuhinya target perolehan *on time performance* pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,94%), LRT Jabodebek (99,66%), dan LRT Jabodebek (99,28%).
- Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung.

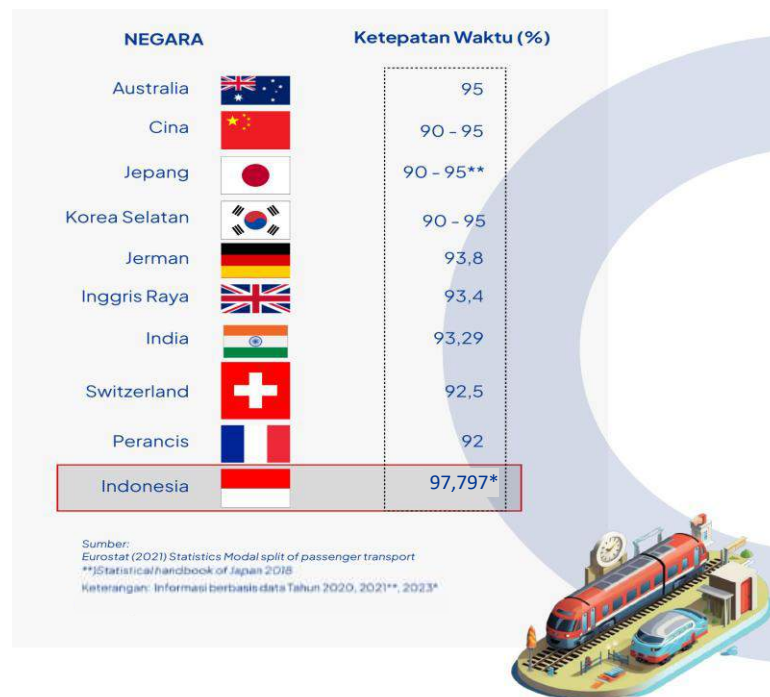
- c. Telah dilakukan perubahan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025) sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api.
- d. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran dan libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan *stakeholders* (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya.
- e. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir.

Selain itu, juga terdapat kendala/permasalahan selama Triwulan II seperti diantaranya gangguan operasional perjalanan kereta api yang didominasi oleh kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang, khususnya yang melibatkan kendaraan berukuran besar seperti truk dan alat berat yang mengakibatkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memicu keterlambatan perjalanan. Selain itu, masih terdapat kendala pada aspek pengelolaan jalur, termasuk pengaturan persilangan kereta, penambahan atau pelepasan rangkaian di stasiun antara, serta penyesuaian pola operasi yang belum optimal sehingga berdampak pada ketepatan waktu perjalanan. Sementara itu, faktor lingkungan seperti bencana banjir besar mengalami penurunan frekuensi dibandingkan Triwulan I, namun potensi gangguan akibat genangan air dan cuaca ekstrem tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, isu keselamatan di perlintasan sebidang serta kebutuhan peningkatan efektivitas pengendalian operasional teknis masih menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran dan keamanan layanan angkutan kereta api.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain koordinasi teknis dengan *stakeholders* (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Idul Adha yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. Selain itu, koordinasi pengamanan posko Angkutan Lebaran dan Idul Adha Tahun 2025 melalui pelaksanaan posko terpadu di kantor pusat dan daerah dengan mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya), serta penetapan dan pengelolaan GAPEKA dengan hubungan kerja badan usaha/operator perkeretaapian yang juga memperhatikan permintaan/masukan dari masyarakat serta Pemerintah Daerah.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport)* dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja 90-95%. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Keterangan: *) kinerja Indonesia Triwulan II 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024

Gambar 2-6 Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

Dengan capaian OTP Indonesia yang cukup tinggi sebesar 97,797% pada Triwulan II Tahun 2025 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi operasional, pengelolaan infrastruktur, dan manajemen layanan yang diterapkan oleh badan usaha/operator perkeretaapian dengan pembinaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan performa OTP yang tinggi.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

- Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan/lokasi taspas yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan.

- b. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA *elevated* Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- c. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya.
- d. Akan dilakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Gapeka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penyesuaian penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

- 1. Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar GAPEKA melalui Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- 2. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Memastikan kegiatan dan anggaran pembangunan/peningkatan fasilitas operasi perkeretaapian dapat dilaksanakan dan diselesaikan Tahun 2025 guna meningkatkan kehandalan perjalanan kereta api (wilayah Jabodetabek, Prupuk-Purwokerto dan Tegal-Pekalongan).

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
- b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan

mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan penumpang dan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang dan barang kereta api yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 19,00% dan sebesar 9,339% untuk periode Triwulan II Tahun 2025.

Untuk jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh sebanyak 262.891.369 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial (KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, priority, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif dan KA Wisata Ambarawa serta KA Bandara Soetta) sebanyak 19.795.995 penumpang.
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (non KRL Jabodetabek) sebanyak 8.731.884 penumpang.
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 190.738.693 penumpang.
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 2.548.111 penumpang.
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 21.053.245 penumpang.
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 598.071 penumpang.
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspress dan KA Srilelawangsa) sebanyak 3.448.622 penumpang.
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 13.040.403 penumpang.
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 2.936.345 penumpang.

Dengan realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 262.891.369 penumpang pada Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 9,339% (pembobotan 50%). Rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Pemenuhan Target} \\ \text{Angkutan} \\ \text{Penumpang Kereta} \\ \text{Api} \end{array} = \frac{\text{Jumlah angkutan penumpang s.d TW 2 2025}}{\text{Target angkutan penumpang 2025 – 2029}} \times 50\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Pemenuhan Target} \\ \text{Angkutan Penumpang} \\ \text{Kereta Api} \end{array} = \frac{262.891.369}{2.798.554.050} \times 50\% = 4,697 \%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Untuk jumlah barang terangkut dengan kereta api pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **33.321.703 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

- a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **3.866.318 ton**, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - 1) Peti kemas sebanyak 2.271.066 ton.
 - 2) BBM sebanyak 854.246 ton.
 - 3) Semen sebanyak 481.200 ton.
 - 4) Batu bara (belum ada realisasi).
 - 5) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 102.005 ton.
 - 6) Pupuk sebanyak 13.230 ton.
 - 7) Limbah B3 sebanyak 5.903 ton
 - 8) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 138.668 ton.
- b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **29.455.385 ton**, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - 1) Batu bara sebanyak 27.638.147 ton.
 - 2) Semen sebanyak 784.613 ton.
 - 3) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 276.735 ton.
 - 4) BBM sebanyak 447.383 ton.

- 5) Peti kemas sebanyak 159.204 ton.
- 6) Karet dan klinker sebanyak 115.425 ton.
- 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 30.408 ton.
- 8) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 3.470 ton.

Dengan realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 33.321.703 ton pada Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 4,642% (pembobotan 50%). Rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pemenuhan Target} \\ \text{Angkutan Barang} \\ \text{Kereta Api} \end{array} = \frac{\text{Jumlah angkutan barang s.d TW 2 2025}}{\text{Target angkutan barang 2025 - 2029}} \times 50\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pemenuhan Target} \\ \text{Angkutan Penumpang} \\ \text{Kereta Api} \end{array} = \frac{33.217.703}{358.912.917} \times 50\% = 4,642\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Dengan pemenuhan target angkutan kereta api penumpang (4,697%) dan angkutan kereta api barang (4,642%), maka diperoleh **Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api secara total sebesar %** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pemenuhan} \\ \text{Target Angkutan} \\ \text{Kereta Api} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA} \\ + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pemenuhan Target} \\ \text{Angkutan} \\ \text{Kereta Api} \end{array} = 4,697\% + 4,642\% = 9,339\%$$

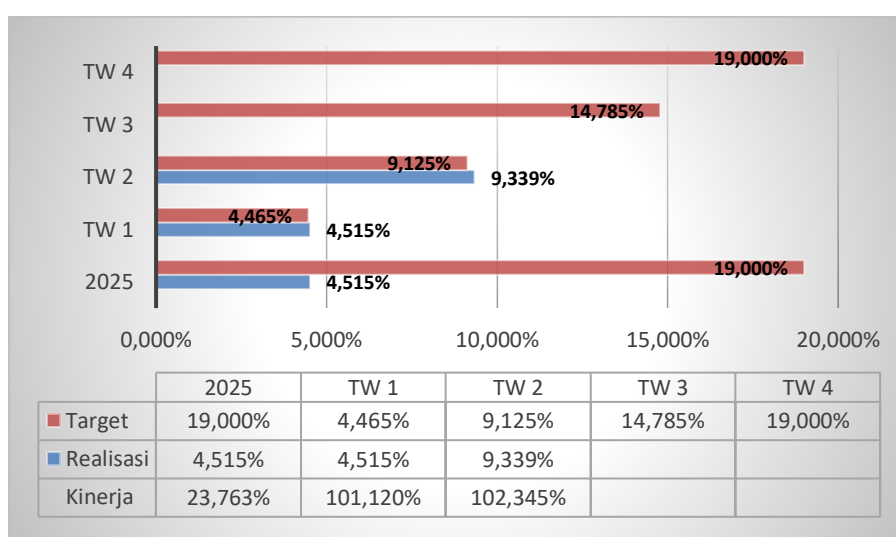
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api sebesar 9,339%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,35% terhadap target Triwulan II sebesar 9,125% dan capaian kinerja sebesar 49,15% terhadap

target Tahun 2025 sebesar 19,000%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-15 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,465	9,125	14,785	19,000	4,515	9,339	-	-	101,120	102,345	-	-	49,15



Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase pemenuhan target angkutan kereta api diantaranya:

Angkutan Penumpang:

- Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 166.432.692 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.032.790 penumpang.
- Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2.936.345 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.250 penumpang;

- c. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 13.040.406 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 93.471 penumpang;
- d. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 105%.
- e. Telah dilaksanakan angkutan perintis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian antara lain :
 - 1) KA Cut Meutia : Muara Satu - Kuta Blang telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/1/BTP-MDN/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 24.677 orang
 - 2) KA Lembah Anai : Lubuk Alung - Kayu Tanam telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/5/BTP-PDG/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 42.641 orang
 - 3) KA Bathara Kresna : Purwosari – Wonogiri telah berjalan dengan kontrak Kontrak Nomor: 001/KONT-PERINTIS/BTP-SMG/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 77.013 orang
 - 4) LRT Sumatera Selatan telah berjalan dengan kontrak Nomor 01/KP.LRT/BPKAR-SS/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 1.831.993 orang
- f. Meningkatnya *On Time Performance* (OTP) pada triwulan II 2025 sebesar 97,80% atau meningkat sebesar 0,39% dibanding triwulan I 2025 sebesar 97,41%;
- g. Adanya paket stimulus transportasi kereta api berupa diskon 30% pada momen libur sekolah (Juni–Juli 2025) untuk 12 KA ekonomi *stainless steel new generation* keberangkatan stasiun di wilayah KAI Daop 6 yang mendapatkan diskon tarif 30 persen pada periode libur sekolah 5 Juni hingga 31 Juli 2025 antara lain:
 - 1) KA Progo relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP)
 - 2) KA Lodaya relasi Solo Balapan - Bandung (PP)
 - 3) KA Lodaya Tambahan relasi Solo Balapan - Bandung (PP)
 - 4) KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP)
 - 5) KA Tambahan LPN - PSE relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP)
 - 6) KA Mataram relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP)
 - 7) KA Batavia relasi Solobalapan - Gambir (PP)

- 8) KA Jaka Tingkir relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP)
 - 9) KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan – Pasarsenen
 - 10) KA Tambahan PSE - SLO relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP)
 - 11) KA Majapahit relasi Pasarsenen - Malang (PP) via Sragen dan Solo Jebres
 - 12) KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP)
- h. Telah dilaksanakan inspeksi pabrikasi (on site)/ Factory Acceptance Test (FAT) pengadaan oleh PT. KAI untuk 11 Trainset China pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2022.

Angkutan barang:

- a. Realisasi Angkutan Barang Triwulan II Tahun 2025 sebesar 17.262.808 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 37.758 Ton. Dan juga bila dibandingkan dengan program yang ada di 2025, telah mencapai target.
- b. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada triwulan II mengakibatkan naiknya volume angkutan dari triwulan I, khususnya pada angkutan Batubara dan BBM.
- c. Lonjakan angkutan barang untuk komoditas batu bara dan pupuk;
- d. Peningkatan frekuensi perjalanan, menambah gerbong khusus (terutama di Sumatera Selatan)

Selain itu, disampaikan pula beberapa kegiatan pendukung berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang, diantaranya:

- a. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 84,71%.
- b. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I telah selesai dan telah dioperasikan pada 29 Juni 2025

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain penambahan frekuensi layanan kereta api dengan memperhatikan usulan dari badan usaha/operator perkeretaapian dan masukan/*demand* masyarakat.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang dan barang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada Tahun 2024-2025. Perbandingan jumlah angkutan penumpang dan barang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-16 Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	145.833.333	4.665
2	Malaysia	1.799	26.435.082	14.691
3	Singapura	271	15.789.000	58.198
4	Indonesia	6.936	43.815.228	6.317

Sumber No.1 : *Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)*

Sumber No.2 : *Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)*

Sumber No.3 : *Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)*

*) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya namun lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya namun lebih rendah dari Singapura dan Malaysia Malaysia. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Analisa kinerja angkutan barang dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-17 Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	6.033.333	193
2	Indonesia	6.936	5.553.617	801

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 193 Ton/Km per bulan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogres sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Rangkasbitung).
- Lanjutan Inspeksi pabrikasi *on site* maupun *online* pengadaan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 *trainset* impor dari China, 12 *trainset* baru produksi PT INKA termasuk assessment 2 *trainset* hasil retrofit oleh PT INKA dengan melibatkan tenaga ahli).
- Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029
- Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

- 1) Pengawasan intensif terhadap penerapan GAPEKA baru yang telah berlaku sejak 1 Februari 2025;
- 2) Integrasi data angkutan kereta api yang *update* dan valid untuk peningkatan pengawasan dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kemenhub, Portal Layanan DJKA).

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Usulan relaksasi anggaran untuk 14 Stasiun, OCC dan Gudang Pekkae untuk operasional kereta api di wilayah BPKA Sulawesi Selatan

c. *Penyesuaian/Penataan/Refocusing Organisasi:*

Penyesuaian tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan guna mengoptimalkan peran regulator dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perkeretaapian.

Adapun pencapaian persentase pemenuhan target angkutan kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya penggunaan kereta api yang mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
- b. Peningkatan investasi infrastruktur, dimana dengan tingginya permintaan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

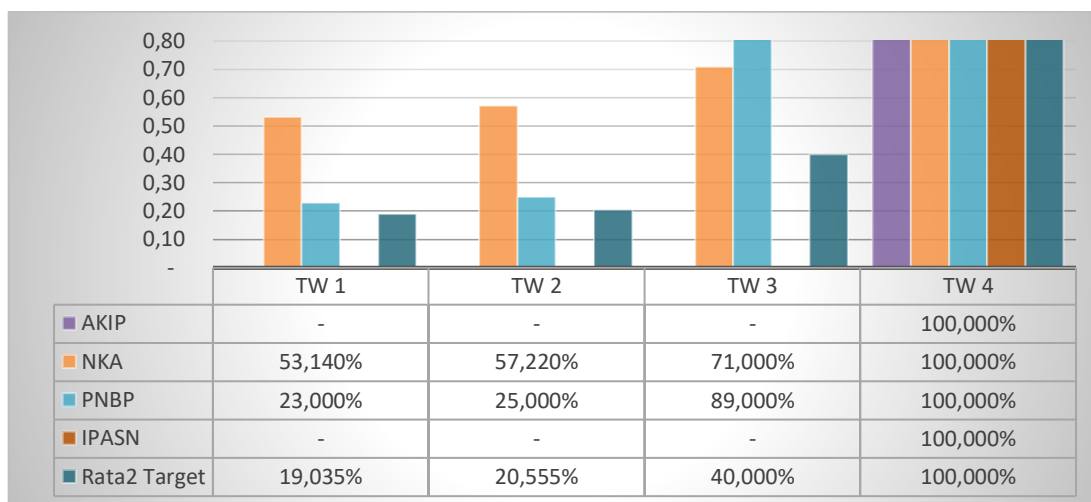
Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Persentase ini bisa digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata dari persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2025 dan sebesar 20,555% pada Triwulan II. Adapun uraian target sebagaimana Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-18 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	83,000	100
2	Nilai Kinerja Anggaran	43,043	53,140	46,348	57,220	57,510	71,000	81,000	100
3	Perolehan PNBPN	286,655M	23,000	311,582M	25,000	1.109,230M	89,000	1.246,326M	100
4	Indeks Profesional ASN	-	-	-	-	-	-	89,000	100
Rata-Rata Target		19,035%		20,555%		40,000%		100,000%	

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.



Gambar 2-8 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

Tingkat Pencapaian Nilai AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Komponen** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. **Sub-komponen** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. **Kriteria** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,000 dan pada Triwulan II 2025 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan I-III baik oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada Triwulan II 2025

belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai AKIP (***Tingkat Pencapaian = 0,000%***)

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 81,000 dan pada Triwulan II 2025 ditargetkan sebesar 46,348 (atau sebesar 57,220% dari target Tahun 2025). Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 48,400 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 7,450;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 89,340.

Dengan realisasi sebesar 48,40, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 56,494% dari target Tahun 2025 sebesar 81,000 (***Tingkat Pencapaian = 59,753%***).

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 dan

pada Triwulan II Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp311.581.581.250,00 atau sebesar 25,000%. Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp737.279.659.005,00.

Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 19 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.028.700.863.000	538.638.886.762	52,36
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	396.194.000	25,93
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	1.737.600.000	62,30
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.023.132.453.000	534.479.152.762	52,24
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	2.025.940.000	161,95
2	Pendapatan BLU	89.826.325.000	29.057.603.673	32,35
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	28.277.046.500	35,75
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	63.747.000	0,67
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	567.010.173	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	1.182.168.000	149.800.000	12,67
3	Pendapatan Non Fungsional	127.799.137.000	169.583.168.570	132,70
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	8.786.278	5,86
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	8.514.500.000	277,80
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	5.895.791.055	6,00
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	836.938.500	3,19
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.969.431.731	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	217.713.874	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	7.096	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	96.006.015.892	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	53.728.607.144	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.405.377.000	-
JUMLAH		1.246.326.325.000	737.279.659.005	59,16

Dengan realisasi sebesar Rp737.279.659.005,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan II Tahun 2025 sebesar 59,156% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 (***Tingkat Pencapaian = 59,156%***).

Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

Indeks Profesional ASN merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar birokrasi yang ideal seperti kompetensi, integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Pengukuran Indeks Profesional ASN akan menghasilkan gambaran tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesional ASN diukur melalui 4 kriteria/dimensi penilaian, yaitu:

1. **Kualifikasi (Bobot 25)**, berupa data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal;
2. **Kompetensi (Bobot 40)**, berupa data/informasi riwayat pengembangan kompetensi;
3. **Kinerja (Bobot 30)**, berupa data/informasi riwayat penilaian kinerja;
4. **Disiplin (Bobot 5)**, berupa data/informasi riwayat hukuman disiplin.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan Indeks Profesional ASN sebesar 89,000 dan pada periode Triwulan II 2025 belum ditetapkan target dimana menyesuaikan periode finalisasi penilaian dengan target ditetapkan realisasinya pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun pada periode Triwulan II Tahun 2025 saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi pada tanggal 26 Juni 2025, diperoleh nilai sementara indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,090 dari 100,000 atau kategori "Tinggi". Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan dari perolehan periode sebelumnya (Triwulan I) yakni sebesar 64,36 atau kategori "Rendah". Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai pada Triwulan I s.d Triwulan II serta rincian perolehan nilai sementara indeks profesional ASN per-unit kerja sebagai berikut:

Tabel 2- 20 Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Maret 2025)	Triwulan II (26 Juni 2025)
1	Kualifikasi	25	23,73	23,47
2	Kompetensi	40	18,74	28,93
3	Kinerja	30	17,48	25,16
4	Disiplin	5	4,99	4,99
Nilai IP ASN			64,36	82,09

Dengan demikian, pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat penetapan hasil pengukuran terhadap Tingkat Pencapaian Indeks Profesional ASN (**Tingkat Pencapaian = 0,000%**).

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Indeks Profesional ASN), maka diperoleh realisasi persentase pencapaian tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 29,727% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

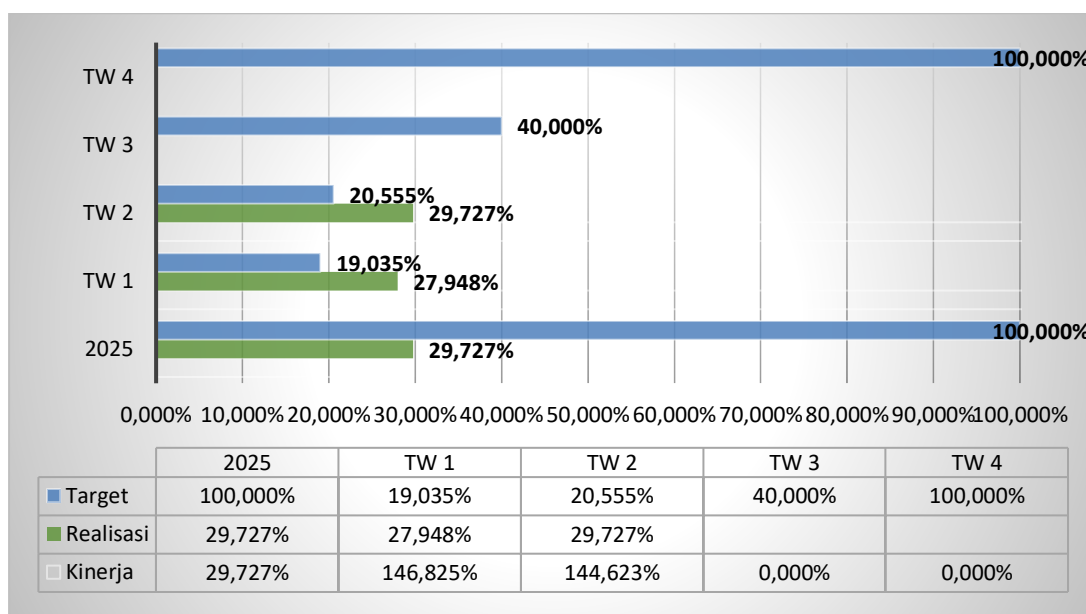
$$\begin{aligned} \text{\% Pencapaian Tata Kelola} &= (TP\ AKIPDJKA + TP\ NKADJKA + TP\ PNBP + TP\ ASNDJKA) / 4 \\ \text{Pemerintahan Direktorat} &= (0,000\% + 59,753\% + 59,156\% + 0,000\%) / 4 \\ \text{Jenderal Perkeretaapian} & \end{aligned}$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 144,623% terhadap target Triwulan II dan capaian kinerja sebesar 29,727% terhadap target Tahun 2025. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-21 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000	27,948	29,727	-	-	146,825	144,623	-	-	29,727



Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategis dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilakukannya pengukuran terhadap Nilai AKIP dan Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada Nilai Kinerja Anggaran dan realisasi PNBP telah mampu mendorong capaian IKP di atas target triwulan. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan capaian dengan optimalisasi dua komponen lainnya pada periode berikutnya. Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan

kinerja, serta penguatan kompetensi ASN perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya:

- a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif:
 - 1) Perencanaan dan penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai).
 - 2) Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja, Pohon Kinerja termasuk DIPA Tahun 2025 melalui e-SAKIP Reviu dan *website* Ditjen Perkeretaapian (*official*). Selain itu, telah dilakukan publikasi naskah teknokratik/rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029.
 - 3) Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan.
 - 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan.
 - 5) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan Direktorat, Balai dan Bagian dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis.

b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran:

- 1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran yang berdampak langsung pada penundaan hingga pembatalan kegiatan dan anggaran.
- 2) Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU) guna optimalisasi efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran.
- 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan *output* yang rutin dan tepat waktu.
- 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas meskipun pagu mengalami pemangkasan drastis.

c. Faktor optimalisasi PNBP melalui aset prasarana milik negara:

Persetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan BMN termasuk perolehan realisasi PNBP TAC Tahun 2024 turut mempengaruhi realisasi PNBP.

d. Faktor manajerial SDM:

- 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial.
- 2) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK).
- 3) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan.

- e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi/digitalisasi:
- 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, e-Kinerja, SILAKI, SAKTI, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian.
 - 2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan *input* oleh *admin* berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN maupun pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara Direktorat, Bagian dan Balai dalam proses penetapan target Perjanjian Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk melibatkan narasumber yang kompeten dari unit lain seperti Setjen Kemenhub, Inspektorat Jenderal Kemenhub, dan lainnya. Pada lingkup eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian ATR/BPN, dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja diantaranya pensertifikatan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, serta pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian dari 2 komponen penilaian yaitu Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBPN. Untuk 2 komponen lainnya (Nilai AKIP dan Indeks Profesional ASN) pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat realisasi kinerja sehingga tidak dilakukan perbandingan kinerja.

Untuk komponen Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBPN, dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (terkait NKA) dan OMSPAN (terkait PNBP). Adapun perbandinganya sebagai berikut:

**Tabel 2-22 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Periode Triwulan II 2025**

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	8,71	98,76	53,74
2	Inspektorat Jenderal	19,55	98,93	59,24
3	Ditjen Perhubungan Darat	4,75	95,23	49,99
4	Ditjen Perhubungan Laut	9,03	96,16	52,60
5	Ditjen Perhubungan Udara	6,01	98,86	52,44
6	Ditjen Perkeretaapian	7,45	89,34	48,40
7	Badan Kebijakan Transportasi	3,97	97,92	50,95
8	BPSDM Perhubungan	15,81	95,50	55,66
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	0,00	99,05	49,53

**Tabel 2-23 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Periode Triwulan II 2025**

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	2.358.848.532	67,20%
2	Inspektorat Jenderal	0	1.455	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.400.066.326.000	663.630.649.338	47,40%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.531.810.000	3.468.711.121.174	64,96%
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	1.228.595.002.472	66,96%
6	Ditjen Perkeretaapian	1.246.326.325.000	737.279.659.005	59,16%
7	Badan Kebijakan Transportasi	0	196.283.999	-
8	BPSDM Perhubungan	1.393.680.517.000	811.551.818.370	58,23%
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	13.770.000.000	5.089.909.268	36,96%

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih rendah dengan menduduki peringkat terakhir (ke-9) dari 8 unit kerja eselon I lainnya dengan realisasi sebesar 48,400. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan penilaian komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk percepatan penyerapan

anggaran dan penerapan/penggunaan SBK. Sedangkan terkait perolehan PNPB antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa perolehan PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat 4 dari 8 unit kerja eselon I lainnya dengan persentase capaian sebesar 59,156% (realisasi sebesar Rp737.279.659.005,00 dari target Tahun 2025). Hal tersebut didorong dengan pembayaran TAC Tahun 2024 dari badan usaha/operator perkeretaapian yang terbayarkan pada Triwulan I 2025.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini.
- b. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses *tagging* pada Rincian *Output* (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian *Output* (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.
- c. Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNPB sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- d. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya). Selain itu, juga diperlukan pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/uji kompetensi kenaikan

jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- 1) Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI dan e-Kinerja melalui pelatihan teknis dan evaluasi berkala.

c. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

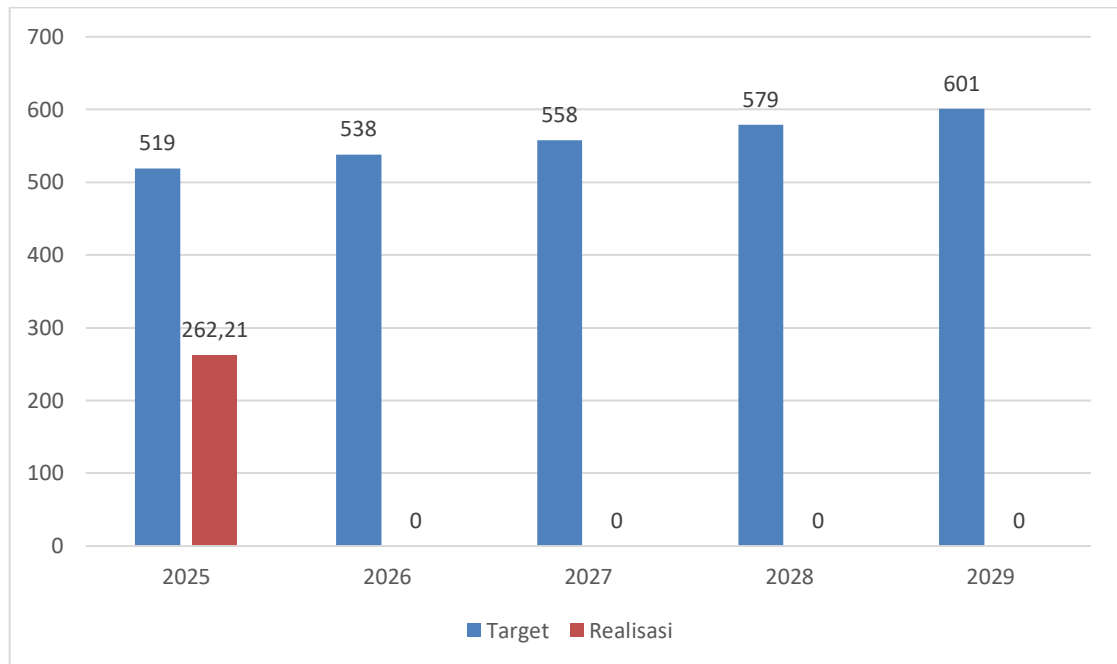
Penempatan pegawai yang kompeten pada unit pengelola data kinerja, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung kualitas data dan pelaporan termasuk penyusunan rencana pengembangan karier berbasis kompetensi.

2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029

A. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pengguna transportasi perkeretaapian, Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan diantaranya melalui Peningkatan Infrastruktur Konektivitas, Pengembangan KA Penumpang antar kota dan Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Sampai dengan Juli 2025 jumlah penumpang angkutan kereta api telah mencapai 262,21 juta orang (merupakan data sementara dikarenakan perlu adanya sinkronisasi dengan *stakeholder* terkait). Ini berarti sekitar 50,52% dari target Tahun 2025 sebesar 519 Juta

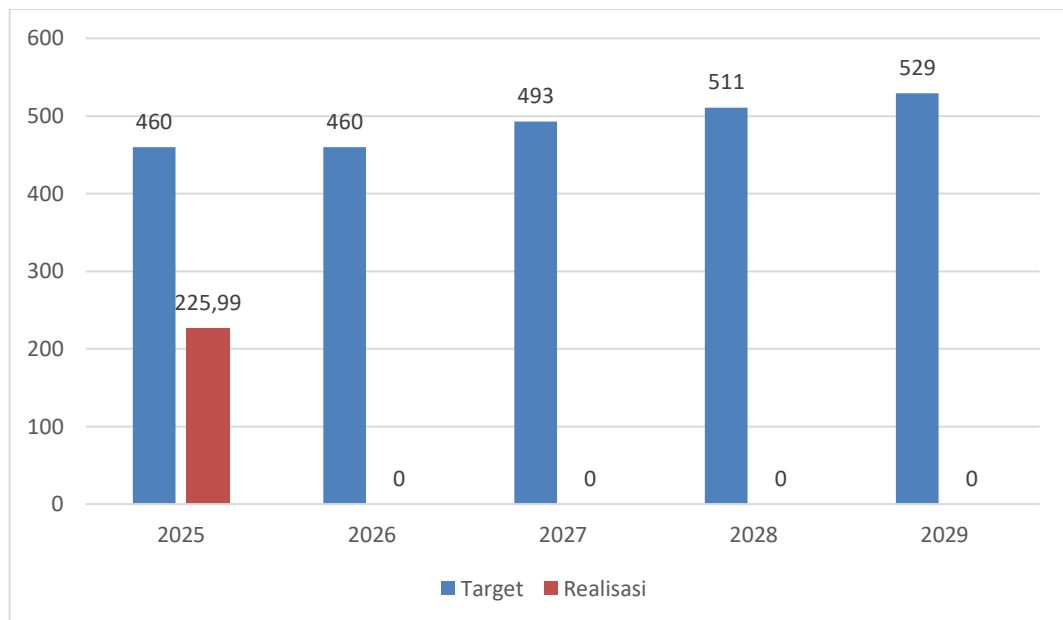
penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai kereta api sebagai moda transportasi utama yang aman dan nyaman.



Gambar 2- 10 Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan II 2025

B. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat

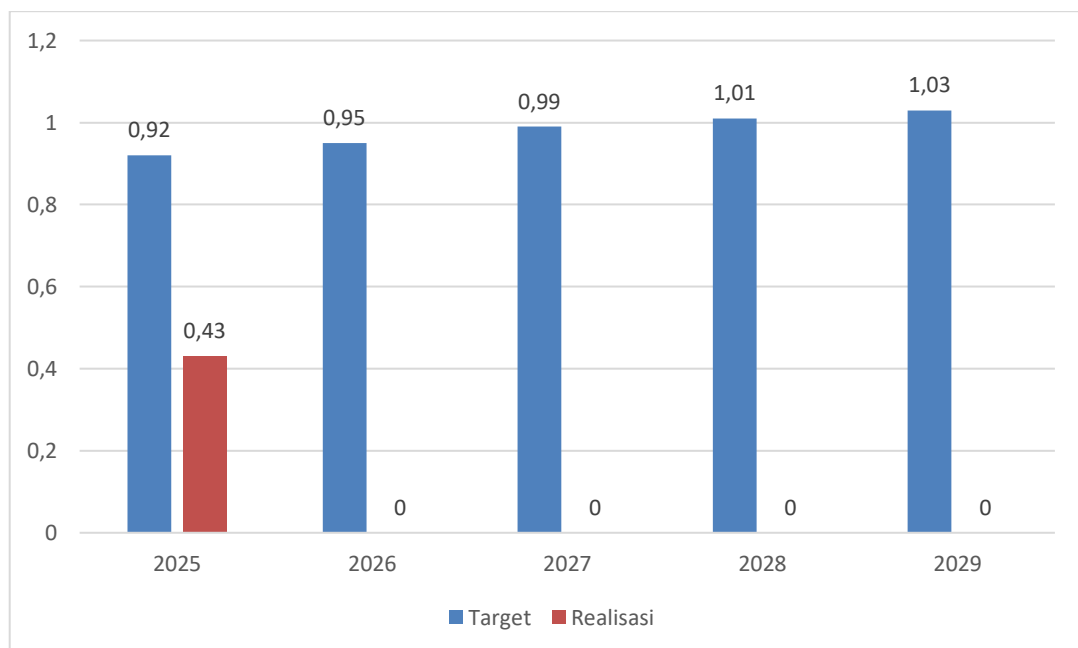
Target dan capaian pada Tahun 2025 – 2029 merupakan gabungan dari angkutan perkotaan berbasis rel dan darat dengan target tahunan sebesar 460 juta penumpang. Adapun realisasi jumlah penumpang angkutan perkotaan berbasis rel di 10 kota metropolitan mencapai 225,99 juta penumpang atau sekitar 49,13% dari target. Ini menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat perkotaan terhadap transportasi massal berbasis rel yang terus perlu diperkuat dari sisi layanan, frekuensi, dan integrasi. Ditjen Perkeretaapian akan terus berupaya untuk melayani Masyarakat dengan menyediakan fasilitas angkutan perkotaan yang memadai termasuk integrasi antar moda, kegiatan subsidi keperintisan dan PSO dan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalur Perkeretaapian di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.



Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat Periode Triwulan II 2025

C. Jumlah Perjalanan Kereta Api

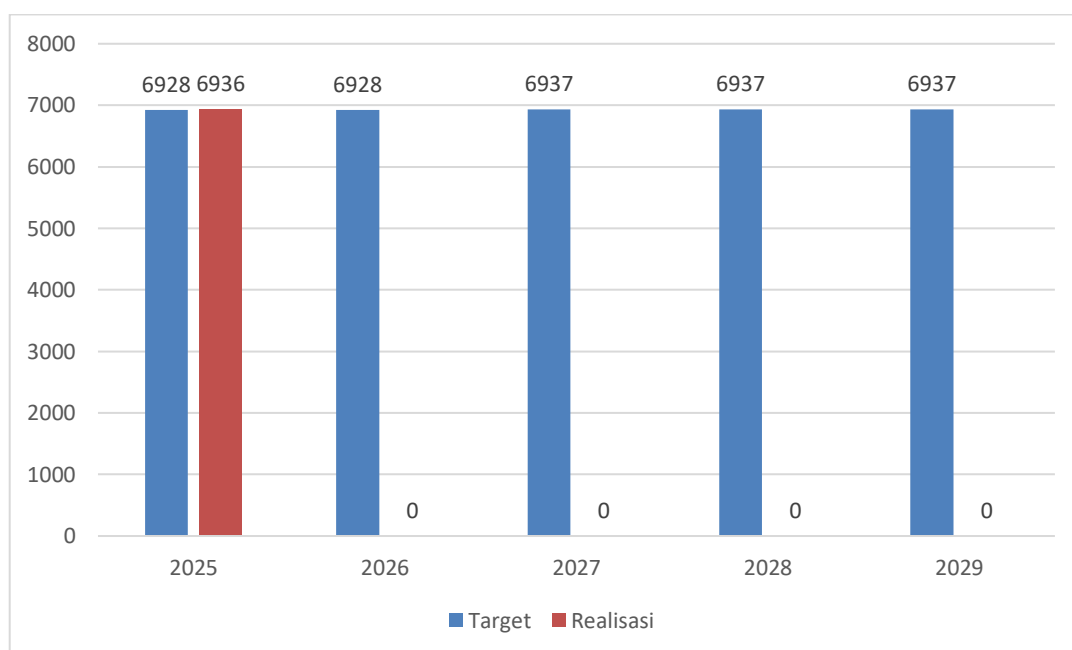
Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilisasi Masyarakat, layanan perjalanan kereta api yang telah disediakan Ditjen Perkeretaapian sebesar 0,43 juta perjalanan atau sebesar 46,74%, dari target Tahun 2025 sebesar 0,92 juta perjalanan. Diharapkan dengan peningkatan layanan, pengoptimalan kapasitas lintas dan optimalisasi sarana, target ini dapat dicapai hingga akhir tahun.



Gambar 2- 12 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan II 2025

D. Panjang Jalur KA yang Beroperasi

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan konektivitas nasional sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMN tahun 2025-2029, Ditjen Perkeretaapian memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai moda transportasi andalan baik wilayah perkotaan maupun antar kota. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029 telah terealisasi panjang jalur kereta api yang terbangun sepanjang 6.936 Km'sp di berbagai wilayah Indonesia dari target 6.928 Km'sp pada Tahun 2025 atau sebesar 100,. Telah dilakukan terobosan untuk mendorong peningkatan jumlah panjang jalur kereta api diantaranya melalui pengoptimalan pembiayaan SBSN serta koordinasi intensif dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait penyediaan lahan khususnya untuk Proyek Strategis Nasional.

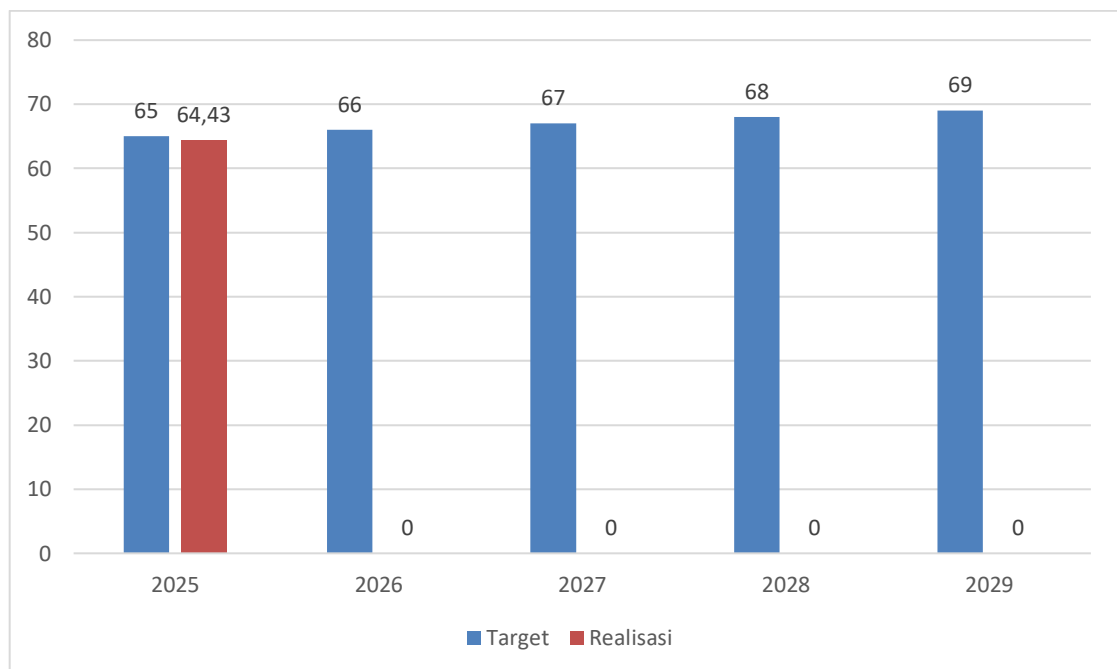


Gambar 2- 13 Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Periode Triwulan II 2025

E. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik

Ditjen Perkeretaapian berkomitmen mendukung program peningkatan kehandalan perjalanan kereta api diantaranya dengan upaya peningkatan sistem elektrifikasi pada jalur kereta api di wilayah Jawa dengan tujuan menciptakan transportasi umum yang efektif dan efisien. Selain itu dilakukan kegiatan lainnya berupa Peningkatan Sistem Persinyalan Mekanik ke Elektrik dengan tujuan untuk dapat meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian dan meningkatkan waktu tempuh perjalanan sehingga

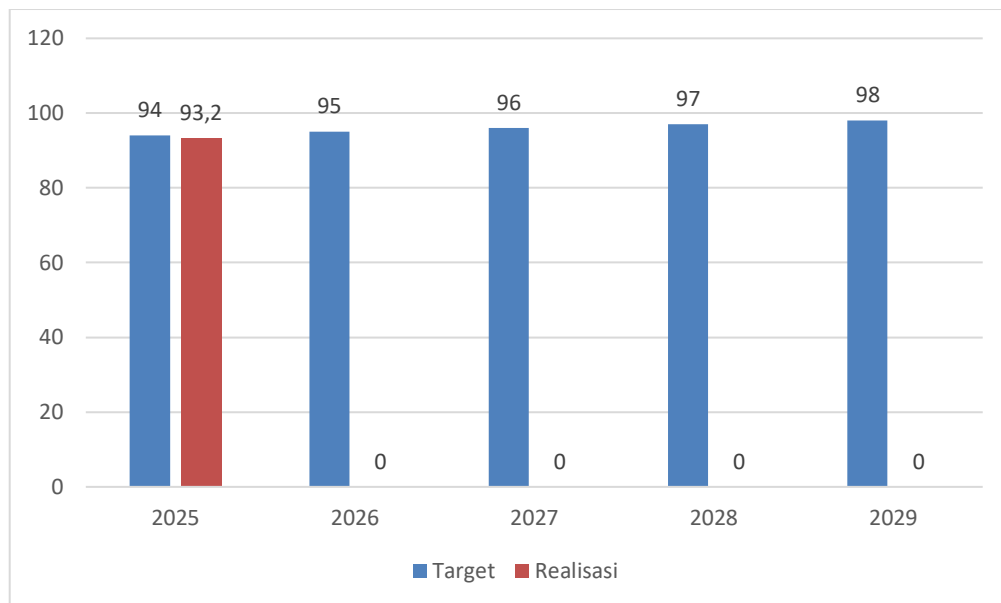
harapanya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih kendaraan dari angkutan pribadi menggunakan angkutan kereta api. Pada Tahun 2025 Ditjen Perkeretaapian telah melakukan kegiatan peningkatan sistem persinyalan elektrik dengan capaian 64,43% dari target Tahun 2025 sebesar 65%.



Gambar 2- 14 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Periode Triwulan II 2025

F. Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

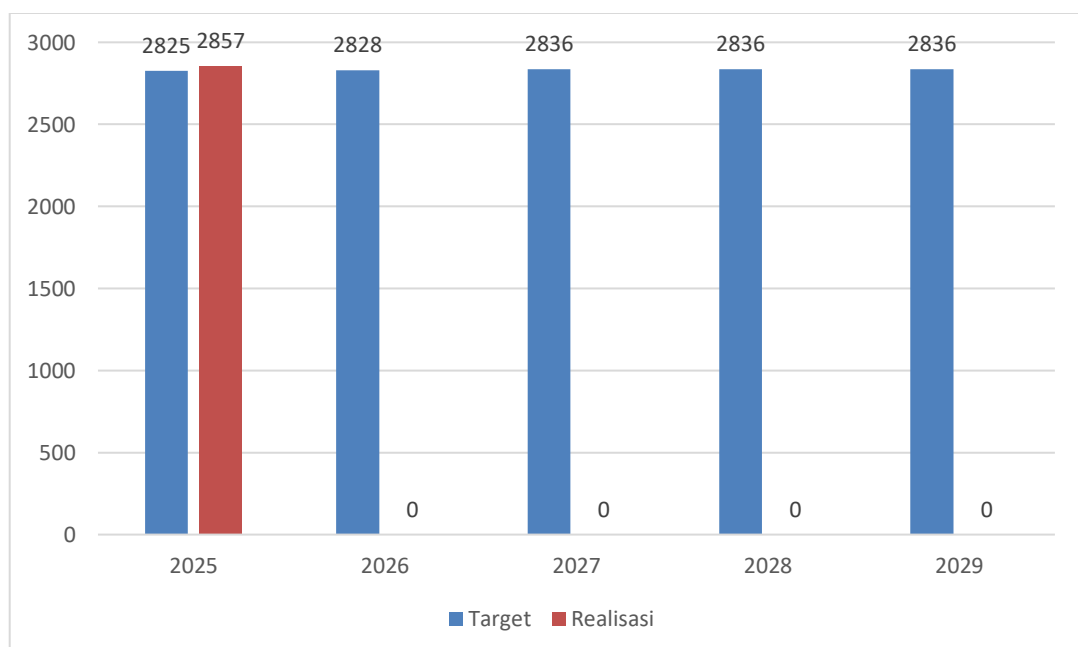
Dalam rangka menjamin keselamatan serta meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan kereta api diperlukan tindakan peningkatan dan perawatan jalur kereta api. Kondisi jalur kereta api menggunakan ukuran *Track Quality Index* (TQI) dalam menentukan titik petak atau koridor jalan rel yang diprioritaskan untuk ditingkatkan dan dirawat. Capaian kondisi jalur kereta api sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 pada Juli 2025 sebesar 93,20% dari target 94%.



Gambar 2- 15 Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan II 2025

G. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

Ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel sampai dengan Juli 2025 telah terealisasi/melayani sebanyak 2,857 penumpang dari target sebesar 2,825 penumpang atau sebesar 101,13%.



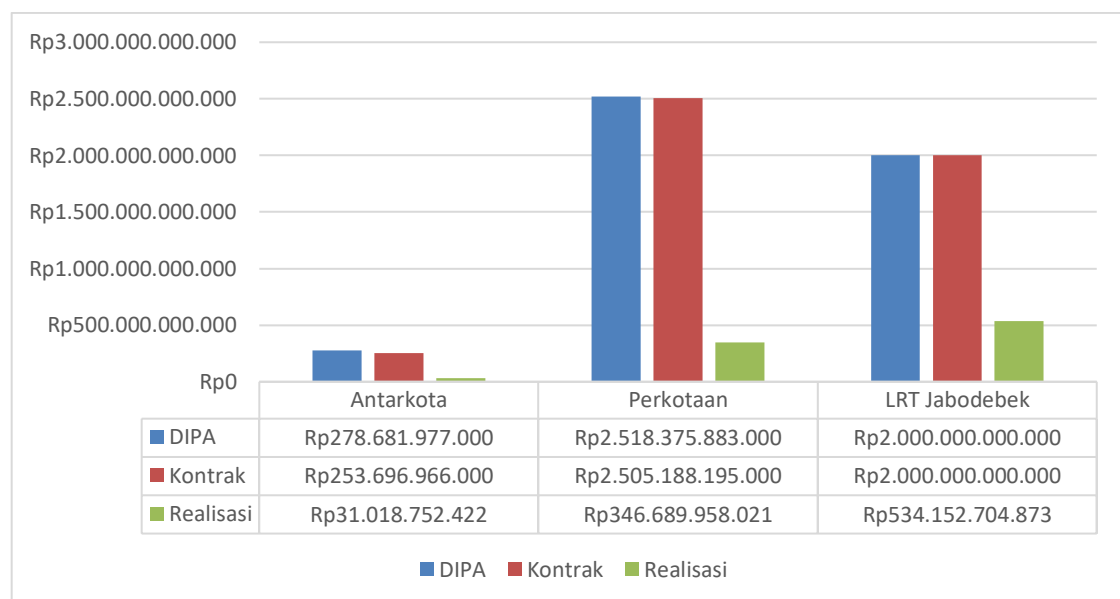
Gambar 2- 16 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

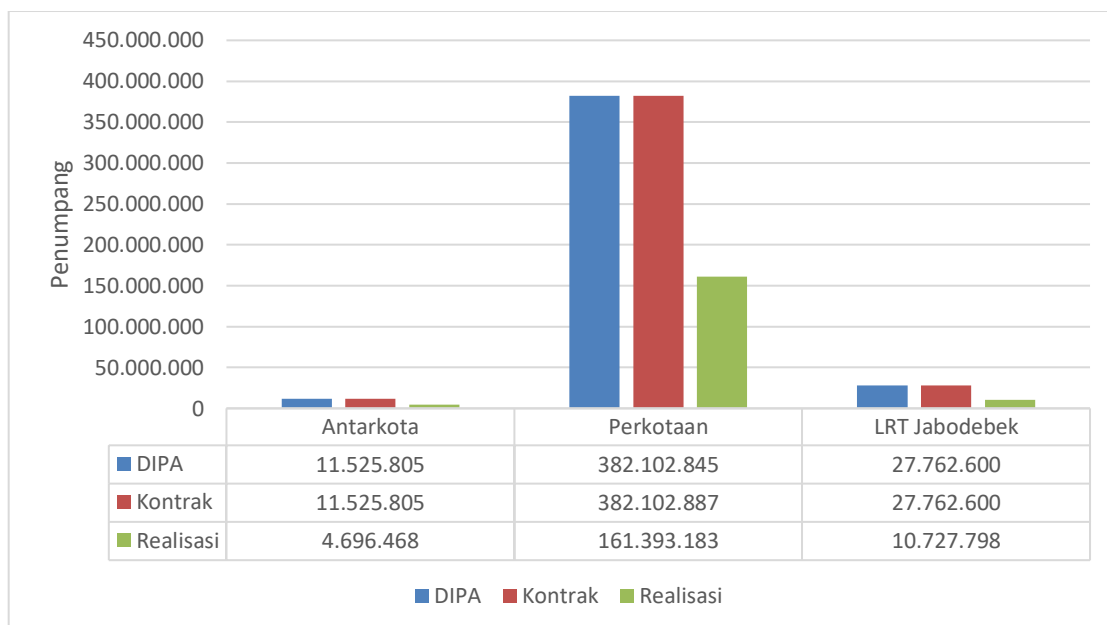
Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya diantaranya:

A. Penyelenggaraan *Public Service Obligations* (PSO) Tahun 2025

Nilai kontrak penyelenggaraan *Public Service Obligations* (PSO) Tahun 2025 sebesar Rp4.758.885.161.000 dari pagu pada DIPA sebesar Rp4.797.057.860.000 serta target penumpang sebanyak 421.391.250 orang. Hingga periode Triwulan II 2025, realisasi nilai anggaran mencapai Rp911.861.415.316 atau 19,16% dari nilai kontrak, sedangkan realisasi jumlah penumpang mencapai 176.817.449 orang atau 41,96% dari target kontrak.



Gambar 2- 17 Alokasi dan Realisasi Anggaran PSO Tahun 2025



Gambar 2- 18 Target dan Realisasi Angkutan PSO Tahun 2025

Pada segmen angkutan antarkota, nilai kontrak Tahun 2025 sebesar Rp253.696.966.000 dari pagu DIPA sebesar Rp278.681.977.000 serta target 11.525.805 penumpang. Realisasi nilai anggaran mencapai Rp31.018.752.422 (12,23%) dan realisasi jumlah penumpang mencapai 4.696.468 orang (40,75%). Sedangkan untuk angkutan perkotaan, nilai kontrak Tahun 2025 sebesar Rp2.505.188.195.000 dengan target 382.102.845 penumpang. Realisasi nilai anggaran tercatat sebesar Rp346.689.958.021 (13,84%) dan realisasi jumlah penumpang mencapai 161.393.183 orang (42,23%).

Untuk angkutan LRT Jabodebek, nilai kontrak sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan target 27.762.600 penumpang. Realisasi nilai anggaran mencapai Rp534.152.704.873 (26,71%) dan realisasi jumlah penumpang mencapai 10.727.798 orang (38,64%) dengan rincian realisasi Subsidi Sarana sebesar Rp107.638.820.796 dari kontrak Rp519.394.447.000 (20,72%) dan realisasi Subsidi Prasarana mencapai Rp426.513.884.077 dari kontrak Rp1.480.605.553.000 (28,81%).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa progres realisasi jumlah penumpang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi nilai anggaran. Kondisi ini memerlukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target pelayanan publik.

B. Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Tahun 2025

Terdapat 5 layanan kereta api perintis Tahun 2025 yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Realisasi angkutan penumpang kereta api perintis dari bulan Januari s.d Juni 2025 sebesar 2.548.111 penumpang dengan uraian per layanan sebagai berikut:

1. Pada Kereta Api LRT Sumatera Selatan (Bandara - DJKA) menunjukkan *volume* penumpang tertinggi secara konsisten di antara semua jalur. Pada bulan Januari terdapat 392.423 penumpang, kemudian terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 288.953 pada bulan Maret. Kemudian kembali mengalami lonjakan signifikan di April sebanyak 452.566 penumpang, menurun kembali di Mei sebanyak 369.690 penumpang dan kembali meningkat stabil di Juni sebanyak 395.151 penumpang. Total Penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 2.227.144 penumpang.
2. Pada Kereta Api Cut Meutia (Kutablang - Muara Satu) pada bulan Januari sebanyak 5.018 penumpang, kemudian meningkat pada bulan Februari sebanyak 8.291 penumpang, kemudian mengalami penurunan drastis hingga 299 penumpang pada bulan Maret. Meskipun ada sedikit peningkatan pada April sebanyak 5.630 penumpang dan Mei sebanyak 4.911 penumpang, jumlah penumpang kembali menurun pada Juni menjadi 2.780 penumpang. Total Penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 26.929 penumpang.
3. Pada Kereta Api Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau - Kayu Tanam) pada bulan Januari tercatat sebanyak 9.932 penumpang, kemudian pada bulan Februari sebanyak 7.270 penumpang dan bulan Maret sebanyak 6.363 penumpang. Kemudian terdapat peningkatan pada April sebanyak 10.783 penumpang. Pada bulan Mei jumlah penumpang sebanyak 8.293 penumpang dan pada Juni sebanyak 8.475 penumpang. Total Penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 51.116 penumpang.
4. Pada Kereta Api Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri) menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan konsisten. Dimulai pada Januari sebanyak 12.497 penumpang, meningkat di Februari sebanyak 17.931

penumpang, kemudian menurun sedikit pada Maret sebanyak 12.408 penumpang, meningkat kembali pada April sebanyak sekitar 17.214 penumpang. Kemudian pada Mei sebanyak 16.963 penumpang dan pada Juni menurun kembali sebanyak 16.890 penumpang. Total Penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 93.903 penumpang.

5. Pada Kereta Api Makassar-Parepare (Mandai-Garungkong/ Mangilu-Garungkong) pada bulan Januari terdapat 17.943 penumpang dan Februari sebanyak 17.935 penumpang. Setelah itu terjadi penurunan di Maret sebanyak 9.439 penumpang. Namun, pada bulan April, jumlah penumpang melonjak drastis mencapai 34.289 penumpang, dan terus meningkat pada Mei hingga 36.545 penumpang. Pada bulan Juni kembali menurun sebanyak 32.868 penumpang. Total Penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 149.019 penumpang.

Tabel 2-24 Realisasi Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Periode Triwulan II 2025

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
LRT Sumsel (Bandara-DJKA)	392.423	328.361	288.953	452.566	369.690	395.151	2.227.144
Cut Meutia (Kutablang-Muara Satu)	5.018	8.291	299	5630	4.911	2.780	26.929
Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau-Kayu Tanam)	9.932	7.270	6.363	10.783	8.293	8.475	51.116
Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri)	12.497	17.931	12.408	17.214	16.963	16.890	93.903
Makassar-Parepare (Mandai-Garungkong/ Mangilu-Garungkong)	17.943	17.935	9.439	34.289	36.545	32.868	149.019
Total	437.813	379.788	317.462	520.482	436.402	456.164	2.548.111

2.5 REALISASI ANGGARAN

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00 sedangkan untuk posisi akhir Triwulan II Tahun 2025 terdapat perubahan menjadi sebesar Rp 8.122.063.906.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun sebelumnya (TA. 2024) yang dilanjutkan ke TA. 2025 di 4 Satker sebesar Rp36.199.983.000,00 pada tanggal 20 Februari 2025;
2. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir sebesar Rp3.807.993.637.000,00 pada tanggal 21 Februari 2025 (tidak merubah pagu);
3. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa revisi administrasi ralat kode blokir sebesar Rp6.300.340.000,00 pada tanggal 16 Maret 2025 (tidak merubah pagu);
4. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 24 Maret 2025 berupa buka blokir catatan halaman IVA DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas (tidak merubah pagu) sebagai berikut:
 - a. Subsidi Perintis sebesar Rp96.186.766.000,00;
 - b. Mudik Gratis, Angkutan Lebaran, dan Nataru sebesar Rp10.548.315.000,00;
 - c. Kebutuhan IMO sebesar Rp2.130.635.381.000,00.
5. Revisi anggaran berupa revisi Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek bersumber dana SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke TA 2025 tersebar di 6 (enam) satker sebesar Rp2.951.685.352.000,00;
6. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Penggunaan Saldo Awai Kas sebesar Rp11.337.699.000,00.

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp 635.050.064.108,00,- (7,82%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 25 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan II	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	203.084.303.000	204.390.616.000	123.451.287.525	60,40	80.939.328.475	39,60

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan II	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
2	Belanja Barang	3.612.244.204.000	3.618.493.015.000	265.052.794.926	7,32	3.353.440.220.074	92,68
3	Belanja Modal	1.303.966.627.000	4.299.180.275.000	246.545.981.657	5,73	4.052.634.293.343	94,27
Total		5.119.295.134.000	8.122.063.906.000	635.050.064.108	7,82	7.487.013.841.892	92,18

Tabel 2-26 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan II	Nilai (Rp)	%
1.	Program infrastruktur konektivitas	4.424.660.689.000	7.427.429.461.000	438.856.593.750	7,11
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000	99.882.894.340	4,87
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000	263.279.365.079	10,06
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.708.124.930.000	72.082.522.678	2,66
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	50.081.547.000	3.611.811.653	7,21
2.	Program Dukungan Manajemen	694.634.445.000	694.634.445.000,00	196.193.470.358	28,24
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.099.026.000,00	1.578.206.157	7,14
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	637.821.276.000,00	192.838.564.186	30,23
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000,00	1.337.533.445	7,64
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.149.348.000,00	271.494.190	1,92
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000,00	167.672.380	5,47
TOTAL		5.119.295.134.000	8.122.063.906.000	635.050.064.108	9,69

Tabel 2-27 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan II	Nilai (Rp)	%
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000	99.882.894.340	4,87
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	2.716.185.741.000 (termasuk penunjang teknis)	2.758.206.477.000 (termasuk penunjang teknis)	75.694.334.331	2,74
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000	263.279.365.079	10,06
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api				
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api				
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	694.634.445.000,00	196.193.470.358	28,24
Jumlah		5.119.295.134.000	6.551.440.731.000	635.050.064.108	9,69

2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp737.279.659.005,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246.326.325.000,00 maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 59,16%. Rincian realisasi PNBP periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-28 Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.028.700.863.000	538.638.886.762	52,36
	e. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	396.194.000	25,93
	f. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	1.737.600.000	62,30
	g. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.023.132.453.000	534.479.152.762	52,24
	h. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	2.025.940.000	161,95
2	Pendapatan BLU	89.826.325.000	29.057.603.673	32,35
	e. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	28.277.046.500	35,75
	f. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	63.747.000	0,67
	g. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	567.010.173	-
	h. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	149.800.000	12,67
3	Pendapatan Non Fungsional	127.799.137.000	169.583.168.570	132,70
	l. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	8.786.278	5,86
	m. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	8.514.500.000	277,80
	n. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	5.895.791.055	6,00
	o. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	836.938.500	3,19
	p. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	q. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.969.431.731	-
	r. Pendapatan Denda Lainnya	-	217.713.874	-
	s. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	7.096	-
	t. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	96.006.015.892	-
	u. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	53.728.607.144	-
	v. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.405.377.000	-
JUMLAH		1.246.326.325.000	737.279.659.005	59,16

2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2.336 dengan rincian berupa 737 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.599 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai sehingga kebutuhan SDM Ditjen Perkeretaapian s.d 2029 sebesar 4.024 pegawai dan diperoleh efisiensi SDM sebesar 41,558%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Rasio SDM} = \frac{2.336}{4.024} = 0,5805$$

$$\text{Rasio Output*} = 1,00$$

$$\text{Efisiensi SDM} = 0,5805 \times 1,00 \times 100\% = 58,05\%$$

*) Rasio output diperoleh dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target Indikator Kinerja Program yang tercapai dengan capaian lebih dari 100%. Terdapat 2 pendekatan perhitungan analisis efisiensi anggaran, yang pertama pendekatan perbandingan antara capaian indikator kinerja program dengan sisa realisasi anggaran mengacu Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Triwulan II Tahun 2025. Pendekatan yang kedua mengacu perhitungan pada PMK No. 22/PMK.02/2021.

Realisasi Penyerapan Anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebesar 7,82% dari alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau sebesar Rp635.050.064.108 dan diperoleh efisiensi periode Triwulan II Tahun 2025 terhadap sasaran/indikator kinerja yang tercapai sebagaimana secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2-29 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Triwulan II 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga-ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,460	100,000	459.172.355.586	99.882.894.340	21,75%	359.289.461.246	Pada Sasaran Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diperoleh realisasi kinerja tercapai 100% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp359,29M.
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Rasio	100,000	99,621	99,621	617.286.609.553	75.694.334.331	12,26%	-	Pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Konektivitas, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,793	101,417	585.799.748.233	263.279.365.079	44,94%	322.520.383.154	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan, pada ketiga realisasi kinerja tercapai diatas 100% dengan adanya
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200	97,797	101,660					

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Triwulan II 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga-ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	4,465	9,339	49,153					sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp322,52M.
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	19,035	29,727	29,727	155.459.188.791	100.964.168.310	64,95%		Pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pemerintahan realisasi kinerja tercapai diatas 100% namun realisasi anggaran lebih dari RPD pada Triwulan II 2025 sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
Jumlah					1.817.717.902.163	539.820.762.060	29,70%	681.809.844.400 (37,51%)	

Tabel 2-30 Analisis Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2025 Berdasarkan Pendekatan PMK No. 22/PMK.02/2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 2	Capaian IKP (CIKP)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIKP	(AA x CIKP) - RA
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) x (7)	(11) = (10) - (9)
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000%	2.051.708.470.000	99.882.894.340	2.051.708.470.000	1.951.825.575.660
2	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,00	99,621	99,621%	2.758.206.477.000	75.694.334.331	2.747.752.874.452	2.672.058.540.121
3	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,793	101,417%	2.617.514.514.000	263.279.365.079	2.200.717.443.790	1.937.438.078.711
4	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,797	101,660%				
5	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	9,339	49,153%				
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	29,727	29,727%	694.634.445.000	196.193.470.358	206.493.981.465	10.300.511.107
						8.122.063.906.000	635.050.064.108	7.206.672.769.707	6.571.622.705.599

Nilai Efisiensi Ditjen Perkeretaapian

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Output Program} &= \frac{\Sigma((\text{Alokasi Anggaran Program} \times \text{Capaian Output Program}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\Sigma(\text{Alokasi Anggaran program})} \times 100\% \\ \text{Efisiensi Output Program} &= \frac{6.666.852.007.647}{8.122.063.906.000} \times 100\% = \mathbf{82,08\%}\end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan Pendekatan PMK No. 22/PMK.02/2021 diperoleh efisiensi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 6.666.852.007.647 atau sebesar 82,08%.

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I 2025) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	- Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan <i>readiness criteria</i>, penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Parepare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta <i>East – West</i>. - Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor <i>gathering</i> - Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta efisiensi anggaran. - Mempercepat penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian mendukung pengoperasian hasil pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pondok S5 (penetapan perencanaan teknis) dan perpanjangan perintis KA Aceh menuju Muara Satu (tindak lanjut hasil pengujian).	- Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan <i>readiness criteria</i> melalui penyelesaian/progress pembangunan prasarana perkeretaapian dengan progress sebagai berikut : - Kegiatan Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro sebesar 95,91%; - Persiapan pembangunan MRT Jakarta <i>East – West</i> dengan progress : - Dokumen <i>Loan Agreement</i> JICA telah ditandatangani oleh Dirjen PPR Kemenkeu dan <i>Chief Representative JICA Indonesia Office</i> pada tanggal 13 Mei 2024; <i>Loan Agreement</i> ADB: Telah dilaksanakan <i>pre fact – finding</i> untuk persiapan Loan ADB, sudah diusulkan kedalam <i>Greenbook</i> 2024 (target b penandatanganan LA Q4 tahun 2025) - Pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor <i>gathering</i> dengan kegiatan antara lain :

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		○ Rencana Pengembangan KA Perkotaan ○ Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Perkeretaapian Indonesia ○ Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyiapan Infrastruktur ○ Penjaminan Infrastruktur yang dapat difasilitasi oleh PT PII ○ Potensi Pendanaan dalam Pembangunan Infrastruktur oleh Bank Mandiri ○ <i>Urban Mobility</i>: Solusi Revolusioner untuk Transportasi Perkotaan Indonesia ○ <i>Suspended Monorail</i> ○ <i>Solar Powered Autonomous Podcar System</i> ▪ Telah dilaksanakan penyesuaian/update terhadap Rancangan Renstra Ditjen Perkeretaapian tahun 2025-2029 dengan penyesuaian antara lain: ○ Arah kebijakan dan target pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan; ○ Program dan kegiatan pada tahun 2025 (dampak efisiensi) termasuk penyesuaian terhadap target kinerja ▪ Percepatan penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana hasil pembangunan dengan progress sebagai berikut: ○ Perpanjangan layanan KA Krueng Geukeuh – Muara Satu progres penyelesaian temuan hasil pengujian dan pelaporan tindak lanjutnya. ○ Pengoperasian Rantauprapat – Pondok S5 progres penyelesaian sertifikasi kelaikan/penetapan perencanaan teknis.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	- Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025. - Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh. - Analisis penyebab kejadian anjlokkan pada Triwulan II Tahun 2025 untuk selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada <i>stakeholder</i> terkait agar tidak terjadi kembali pada periode berikutnya.	- Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025 dengan progress : - Persetujuan KAK dan RAB untuk kegiatan IO oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian; - Untuk KAK dan RAB untuk kegiatan IM masih dalam proses pembahasan dengan Dit Prasarana Perkeretaapian. - Audit SMKP dengan progress Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan Pada bulan Mei 2025 telah menyampaikan surat kepada Manager Unit Makasar-Parepare PT.KAI (Persero) dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) perihal Progress Tindak Lanjut Khusus SMKP Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Makassar – Parepare. Surat tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Manager Unit Makasar-Parepare PT.KAI (Persero) dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) pada bulan Juni 2025. Dengan ditindaklanjutnya 2 (dua) Hasil audit khusus SMKP tersebut maka realisasi pada TW II Tahun 2025 dapat tercapai. - Pada bulan Januari – Juni Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api yaitu kecelakaan anjlokkan kereta api pada emplasemen Stasiun Ujanmas dan emplasemen Banar Sari Divre III Palembang. - Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari – Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%
IKP3 Indeks Kepuasan	Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada	Kegiatan kajian terkait survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	pelayanan Balai Perawatan Perkeretaapian (proses kajian dan direncanakan implementasi survei IKM pada Triwulan III Tahun 2025). ▪ Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. ▪ Pemantauan dan percepatan penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.	(IKM) pada pelayanan Balai Perawatan Perkeretaapian terdampak efisiensi anggaran. ▪ Pada Triwulan II 2025 telah dilakukan pembahasan progres Laporan Pendahuluan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai <i>Superapps</i> pada 26 Juni 2025. ▪ Selama tahun 2025 telah terbit 12 perizinan online.
IKP4 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	▪ Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan/lokasi taspat yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan. ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. ▪ Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya. ▪ Memastikan kegiatan dan anggaran pembangunan/peningkatan fasilitas operasi perkeretaapian dapat dilaksanakan dan diselesaikan Tahun 2025 guna meningkatkan kehandalan perjalanan kereta api (wilayah Jabodetabek, Prupuk-Purwokerto dan Tegal-Pekalongan).	▪ Telah dilaksanakan monitoring perjalanan kereta api secara berkala sesuai dengan GAPEKA termasuk perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi taspat pada Pelaksanaan <i>Switch Over</i> (SO) Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) yang dilaksanakan satu hari sebelum dan satu hari setelah SO perjalanan KRL Serpong Line pada tanggal 28-29 Juni 2025 di Lintas Serpong Line. ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda KA dengan progres fisik s.d Juni 2025 sebagai berikut: ○ Segmen Solo Balapan-Kalioso sebesar 93,13% ○ Segmen Medan-Binjai sebesar 67% ▪ Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA dengan progress sebagai berikut: ○ Segmen Jember-Kalisat sebesar 70%. ○ Segmen Semarang-Gambringan (penggantian 2 jembatan BH 46 dan BH 59) progress 0% (direncanakan pelaksanaan dengan skema

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		kontrak tahun jamak dan masih proses persetujuan Menteri Perhubungan untuk usulan pagu 2026). ○ Segmen Cirebon-Kroya (penggantian 2 jembatan BH 1109 dan BH 1164) progress 0% (direncanakan pelaksanaan dengan skema kontrak tahun jamak dan masih proses persetujuan Menteri Perhubungan untuk usulan pagu 2026). ▪ Pembangunan/peningkatan fasilitas operasi dengan progress sebagai berikut: ○ Peningkatan sistem elektrifikasi Jabodetabek progress 95,66%. Peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi segmen Prupuk – Purwokerto dan Tegal – Pekalongan progress 0% karena saat ini dalam proses penetapan pemenang namun perlu dilakukan legal audit oleh Kejaksaan Agung
IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	▪ Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogres sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung). ▪ Pengawasan dan koordinasi terkait rencana penambahan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 trainset impor dari China, 12 trainset baru produksi PT INKA, 2 trainset hasil retrofit oleh PT INKA). ▪ Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029. ▪ Memastikan pembiayaan untuk kegiatan angkutan perintis di beberapa wilayah (lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Satu-KutaBlang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare) tetap tersedia sesuai	▪ Peningkatan stasiun Tanah Abang telah selesai 100% dan telah beroperasi pada tanggal 29 Juni 2025 dan stasiun Rangkasbitung progress 84,71% ▪ Pengawasan dan koordinasi terkait rencana penambahan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha telah dilaksanakan <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT) di Pabrik CRRC Qingdao Sifang pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2025 ▪ Telah menghadiri Rapat Penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029 oleh Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 26 Juni 2025 ▪ Telah dilaksanakan penyelenggaraan angkutan penumpang KA melalui skema perintis dengan jumlah angkutan penumpang Triwulan II sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kebutuhan/tidak terdampak efisiensi anggaran.	○ KA Cut Meutia : Muara Satu - Kuta Blang telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/1/BTP-MDN/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 26.929 orang ○ KA Lembah Anai : Lubuk Alung - Kayu Tanam telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/5/BTP-PDG/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 51.116 orang ○ KA Bathara Kresna : Purwosari – Wonogiri telah berjalan dengan kontrak Kontrak Nomor: 001/KONT-PERINTIS/BTP-SMG/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 93.903 orang ○ LRT Sumatera Selatan telah berjalan dengan kontrak Nomor 01/KP.LRT/BPKAR-SS/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 2.227.144 orang ○ KA Makassar-Parepare telah berjalan dengan kontrak Nomor 1.1/SP/P7-BPKASS/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan jumlah penumpang sebanyak 149.019 orang ○ KA Nurmala : Rantauprapat-Pondok S5 dan lintas Binjai - Besitang - Sei Liput masih dalam tahap penyiapan prasarana (KA Nurmala target pengoperasian pada Semester II 2025)
IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	▪ Finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mencakup sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian program/kegiatan yang terdampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025.	▪ Telah dilaksanakan <i>updating</i> dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mencakup sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian program/kegiatan/kerangka

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK). ▪ Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan aset/BMN yang potensial menjadi sumber perolehan PNBPN. ▪ Akselerasi proses legalisasi aset melalui sertifikasi tanah melalui sinergi/kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan. ▪ Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/fungsional dilengkapi sertifikat sebagai bukti kompetensi guna selanjutnya updating data kinerja dan kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.	pendanaan yang terdampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025 dan penyesuaian kegiatan strategis yang dibiaya non APBN ▪ Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mencakup evaluasi pelaksanaan anggaran, penyesuaian RPD, progress penyelesaian kegiatan SBSN dan perintis termasuk IMO yang diselenggarakan pada 26 s.d 28 Mei 2025 ▪ Proses persetujuan pemanfaatan aset/BMN yang potensial menjadi sumber perolehan PNBPN s.d Triwulan II sebanyak 3 sewa yang telah menghasilkan PNBPN dengan total perolehan nilai PNBPN Rp.719.660.000 ▪ Telah dilaksanakan proses sertifikasi tanah s.d bulan Juni 2025, telah terbit sebanyak 52 sertifikat dari target sebanyak 320 sertifikat atau capaian sebesar 16%, sedangkan untuk progress kegiatan dari pengukuran, pemberkasan sampai dengan panitia A sudah 80,1% ▪ Telah dilaksanakan pemantauan dan himbaun terhadap pembaharuan/<i>update</i> data kinerja dan kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK melalui Surat Sesditjen Perkeretaapian No. KP.001/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Himbaun Pemutakhiran Data Kepegawaian pada SIK

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

1. Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan dan layanan yang disampaikan kepada *stakeholder* terkait;

2. Pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi serta SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Rapat staf secara berkala/setiap minggu untuk memastikan target kinerja dapat dicapai sesuai target dan kegiatan pendukung dapat terlaksana dengan baik.
4. Arahan pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas, disiplin dan integritas pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 sebesar 108,421% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	99,621	100,379
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,793	101,417
		IK4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,797	101,766

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	9,125	9,339	102,345
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	20,555	29,727	144,622
Rata-rata Capaian Kinerja						108,421

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II 2025, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

- Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan *readiness criteria* salah satunya dokumen perencanaan yang masih berproses pada Direktorat teknis diantaranya.
- Penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West.
- Lanjutan beberapa kegiatan pendukung rasio konektivitas, diantaranya Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Medan-Binjai, Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA Antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta Tahap II, Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso) yang masih dapat dilaksanakan pada Tahun 2025.
- Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan *investor gathering*.

- e. Peninjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang dimungkinkan konektivitas dengan simpul transportasi seperti terminal tipe A dan lain-lain.
- f. Lanjutan kegiatan perencanaan teknis terhadap kegiatan yang menundukung indikator Rasio Konektivitas Antar Wilayah salah satunya penyusunan Policy Brief Studi Kelayakan Jalur KA akses menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

2. IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA:

- a. Penanganan daerah rawan di wilayah Sumatera Selatan :
 - 1) Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian Rel oleh PT.KAI menggunakan Rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI
 - 2) Penanganan daerah rawan oleh BTP Kelas II Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang
- b. Koordinasi dengan KNKT, BTP Palembang, dan PT KAI (Persero) Divre 3 Palembang guna mengumpulkan data-data yang diduga berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan anjlokkan KA di emplasemen Banjarsari. Data-data yang telah diperoleh saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan apakah data tersebut merupakan faktor penyebab awal terjadinya kecelakaan atau justru merupakan dampak dari kecelakaan tersebut
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tahun 2025
- d. Kegiatan *roadshow* pemutakhiran, sinkronisasi data dan tinjauan lapangan dalam penerapan aplikasi e-perlintasan pada bulan Juli s.d Agustus 2025
- e. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah

melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh.

3. IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

- a. Diperlukan alternatif pelaksanaan kajian survei IKM Balai Perawatan KA dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran.
- b. Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps.
- c. Penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.

4. IKP4 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

- a. Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan/lokasi taspat yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan.
- b. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- c. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya.
- d. Akan dilakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Gapeka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian

5. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

- a. Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogres sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Rangkasbitung).

- b. Lanjutan Inspeksi pabrikasi on site maupun online pengadaan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 trainset impor dari China, 12 trainset baru produksi PT INKA termasuk assessment 2 trainset hasil retrofit oleh PT INKA dengan melibatkan tenaga ahli).
- c. Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029
- d. Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.

6. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- a. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini.
- b. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian Output (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian Output (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.
- c. Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNBPN sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- d. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya). Selain itu, juga diperlukan pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan

jenjang/ perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	813.226.191.000
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	895.248.757.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.670.022.802.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	46.162.939.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.069.026.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	637.851.276.000
7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	17.498.737.000
8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	14.149.348.000
9. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.066.058.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian



MOHAMAD RISAL WASAL

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,460	813.226.191.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	-	-	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	11,53	11,53	11,53	23	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	20	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	62,140	63,570	63,570	63,570	64,54	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Dit Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.716.185.741.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	50,34	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,00	0,380	0,385	6,150	10,00	16,150	21,150	26,920	32,690	44,230	51,920	73,840	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	0,700	1,420	2,120	2,840	7,510	10,710	15,630	16,520	17,760	18,490	19,270	19,440	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	1,390	2,780	4,160	5,550	6,940	8,330	9,720	11,110	12,490	13,880	15,270	16,660	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	0,369	1,568	2,355	3,707	5,493	7,583	9,773	12,007	14,201	16,259	18,038	19,480	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,177	1,567	2,322	3,315	4,308	6,294	8,281	10,267	11,260	12,849	15,216	17,440	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	0,922	2,436	3,539	4,643	6,385	8,128	9,870	11,612	13,355	15,097	16,840	17,970	-	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	895.248.757.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	-	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	-	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,200	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handai)	62,670	62,670	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,57	63,40	63,92	63,92	65,27	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1,540	2,955	4,465	5,995	7,575	9,125	11,580	13,170	14,785	16,340	17,905	19,000	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	5,060	6,325	19,035	19,368	19,578	20,555	34,630	35,505	40,000	40,960	42,820	100	694.634.445.000	
				Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	-	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	Setditjen Perkeretaapian
				Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	Setditjen Perkeretaapian
				Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	23	54	55	56	57	60	65	70	75	80	90	100	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	19,240	22,300	53,140	54,470	55,310	57,220	59,250	62,020	71,000	73,840	79,280	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

USULAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allan Tandiono
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Juni 2025
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan	Anggaran Efektif	
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.505.062.251.000
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.250.259.374.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.331.113.312.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	18.024.752.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	4.072.234.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	363.966.942.000
7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	6.528.613.000
8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.292.986.000
9. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	650.650.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

Jakarta, Juni 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

DUDY PURWAGANDHI


ALLAN TANDIONO

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,460	813.226.191.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	-	-	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	11,53	11,53	11,53	23	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	20	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	62,140	63,570	63,570	63,570	64,54	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Dit Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.716.185.741.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	50,34	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,00	0,380	0,385	6,150	10,00	16,150	21,150	26,920	32,690	44,230	51,920	73,840	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	0,700	1,420	2,120	2,840	7,510	10,710	15,630	16,520	17,760	18,490	19,270	19,440	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	1,390	2,780	4,160	5,550	6,940	8,330	9,720	11,110	12,490	13,880	15,270	16,660	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	0,369	1,568	2,355	3,707	5,493	7,583	9,773	12,007	14,201	16,259	18,038	19,480	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,177	1,567	2,322	3,315	4,308	6,294	8,281	10,267	11,260	12,849	15,216	17,440	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	0,922	2,436	3,539	4,643	6,385	8,128	9,870	11,612	13,355	15,097	16,840	17,970	-	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	895.248.757.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	-	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	-	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,200	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handai)	62,670	62,670	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,57	63,40	63,92	63,92	65,27	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1,540	2,955	4,465	5,995	7,575	9,125	11,580	13,170	14,785	16,340	17,905	19,000	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	5,060	6,325	19,035	19,368	19,578	20,555	34,630	35,505	40,000	40,960	42,820	100	694.634.445.000	
				Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	-	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	Setditjen Perkeretaapian
				Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	Setditjen Perkeretaapian
				Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	23	54	55	56	57	60	65	70	75	80	90	100	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	19,240	22,300	53,140	54,470	55,310	57,220	59,250	62,020	71,000	73,840	79,280	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

Penjelasan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	• <i>Baseline</i> pada 2024: Jumlah lokasi yang terkoneksi dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS sebanyak 150 lokasi. • Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pembangunan jalur KA baru yang direncanakan selesai sehingga belum terdapat penambahan jumlah PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian. • Kegiatan pendukung mayoritas berupa penyiapan perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api baru/reaktivasi menuju PKN/PKW/KSN/simpul transportasi. • Target tetap (sesuai <i>baseline</i>).
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	99,410	99,617	100,000	100,000	100,000	• Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024 (angka <i>baseline</i> dihitung dengan metode baru). • Pada Tahun 2024 terdapat 5 kejadian kecelakaan kereta api, sedangkan pada Tahun 2025 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api, namun pada periode Triwulan I 2025 telah terjadi 1 kecelakaan kereta api. • Target tetap (target mandatori berupa <i>zero accident</i>).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,730	3,810	3,740	3,740	3,740	- Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) serta layanan kereta api yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). - Survei dilaksanakan baik menggunakan aplikasi maupun secara <i>manual</i> dengan survei langsung ke masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait dengan penilaian dari perhitungan rata-rata hasil survei per bulan (skala 1-4). Target tetap (ditargetkan lebih tinggi dari <i>baseline</i> 2024).
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,190	97,415	96,100	96,100	96,200	- Rata-rata kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang. Target berubah/ditingkatkan (ditargetkan lebih tinggi dari <i>baseline</i> 2024/<i>update</i> menyesuaikan <i>baseline</i> 2024 guna memenuhi kriteria penetapan target).
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	4,515	19,000	19,000	19,000	- Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024. - Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing ditargetkan 19,00% dari target angkutan KA periode Tahun 2025-2029 baik angkutan KA penumpang maupun KA barang. Target tetap (monitoring Triwulan I masih <i>on the right track</i>).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	27,948	100,000	100,000	100,000	- Pengukuran indikator kinerja tidak ada pada periode Renstra Tahun 2020-2024. - Target Tahun 2025 mencakup pemenuhan kinerja sebagai berikut: - Nilai AKIP: 83,00 - Nilai NKA: 84,00 (<i>update</i> menyesuaikan <i>baseline</i> 2024) - Target PNBP: 100,00% (Rp1.246.326.325.000,00) - Indeks Profesional ASN: 89,00 Target tetap (monitoring Triwulan I masih <i>on the right track</i>).

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

**KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	SASARAN : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		
1	Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan <i>readiness criteria</i> salah satunya dokumen perencanaan yang masih berproses pada Direktorat teknis diantaranya	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana • Balai terkait
2	Penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana • Balai terkait
3	Lanjutan beberapa kegiatan pendukung rasio konektivitas, diantaranya Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Medan-Binjai, Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA Antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta Tahap II, Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso) yang masih dapat dilaksanakan pada Tahun 2025.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
4	Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor <i>gathering</i> .	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
5	Peninjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang dimungkinkan konektivitas dengan simpul transportasi seperti terminal tipe A dan lain-lain.	Triwulan III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana • Balai terkait
6	Lanjutan kegiatan perencanaan teknis terhadap kegiatan yang menundukung indikator Rasio Konektivitas Antar Wilayah salah satunya penyusunan <i>Policy Brief</i> Studi Kelayakan Jalur KA akses	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.		
B.	SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA		
1	Penanganan daerah rawan di wilayah Sumatera Selatan : a. Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian Rel oleh PT.KAI menggunakan Rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI. b. Penanganan daerah rawan oleh BTP Kelas II Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
2	Koordinasi dengan KNKT, BTP Palembang, dan PT KAI (Persero) Divre 3 Palembang guna mengumpulkan data-data yang diduga berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan anjlokkan KA di emplasemen Banjarsari. Data-data yang telah diperoleh saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan apakah data tersebut merupakan faktor penyebab awal terjadinya kecelakaan atau justru merupakan dampak dari kecelakaan tersebut	Triwulan III Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan • Balai terkait
3	Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tahun 2025.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan
4	Kegiatan <i>roadshow</i> pemutakhiran, sinkronisasi data dan tinjauan lapangan dalam penerapan aplikasi e-perlintasan pada bulan Juli s.d Agustus 2025.	Triwulan III Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan
5	Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
C	SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		
1	Diperlukan alternatif pelaksanaan kajian survei IKM Balai Perawatan KA dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran.	Triwulan III Tahun 2025	Balai Perawatan KA
2	Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai <i>superapps</i> .	Triwulan II-IV Tahun 2025	Setditjen Perkeretaapian
3	Penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian - Balai terkait
D.	SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
1	Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspas yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan.	Triwulan III-IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Direktorat Keselamatan - Balai terkait
2	Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.	Triwulan III-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
3	Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya.	Triwulan III-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
4	Akan dilakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Gapeka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian	Triwulan III-IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Balai terkait
E.	SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api		
1	Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogres sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Rongkasbitung).	Triwulan III-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Lanjutan Inspeksi pabrikasi <i>on site</i> maupun online pengadaan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 <i>trainset</i> impor dari China, 12 <i>trainset</i> baru produksi PT INKA termasuk assessment 2 <i>trainset</i> hasil retrofit oleh PT INKA dengan melibatkan tenaga ahli).	Triwulan III Tahun 2025	• Direktorat Sarana
3	Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Setditjen Perkeretaapian
4	Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Setditjen Perkeretaapian • Balai terkait
F.	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1	Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini.	Triwulan III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian Output (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian Output (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNPB sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya). Selain itu, juga diperlukan pengelolaan jenjang karir terkait jabatan	Triwulan III-IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

LAMPIRAN III

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2025



LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,477,078,000	463,142,836,993	75.74%
3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,347,724,698,987	67.8%
4	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,237,441,326,000	794,959,257,408	64.24%
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,303,654,261,000	774,662,822,076	59.42%
6	MAHKAMAH AGUNG	12,685,481,999,000	7,332,045,744,144	57.8%
7	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,438,038,249,000	3,438,606,749,471	53.41%
8	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,614,516,000	260,767,807,056	52.72%
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	142,282,406,978,000	74,737,519,813,224	52.53%
10	KEMENTERIAN SOSIAL	80,791,894,299,000	42,414,993,189,143	52.5%
11	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	354,560,077,000	184,823,000,929	52.13%
12	KEMENTERIAN AGAMA	79,275,629,671,000	39,394,009,448,134	49.69%
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	95,997,915,991,000	46,851,185,616,938	48.8%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,088,219,063,964	47.46%
15	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,159,093,551,000	2,800,960,135,024	45.48%
16	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	977,779,738,000	441,422,342,461	45.15%
17	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	93,652,629,268	45.07%
18	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	105,373,198,000	45,901,286,910	43.56%
19	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,475,090,393,000	1,064,502,706,188	43.01%
20	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	56,498,241,761,000	24,051,111,687,740	42.57%
21	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	185,550,311,334	42.48%
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	626,396,579,000	261,602,506,752	41.76%
23	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	6,965,383,103,000	2,845,123,222,602	40.85%
24	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,042,221,000	6,493,223,158,910	40.68%
25	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	103,713,316,779	40.58%
26	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	575,250,397,379	40.5%
27	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,537,019,849,000	1,421,076,758,119	40.18%
28	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	388,303,881,423	40.06%
29	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	3,948,787,379,736	39.9%
30	BADAN PUSAT STATISTIK	5,721,249,143,000	2,272,957,609,362	39.73%
31	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,279,301,000	82,637,625,063	39.68%
32	KEMENTERIAN KESEHATAN	110,185,640,535,000	43,666,003,922,615	39.63%
33	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	1,497,578,812,000	593,266,786,594	39.62%
34	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	421,026,995,627	39.53%
35	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,428,252,086,000	9,653,945,724,577	39.52%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,464,360,885,000	2,155,569,036,983	39.45%
37	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	73,756,279,875	39.43%
38	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	87,976,461,470	39.3%
39	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	963,167,939,183	39.21%
40	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,488,668,000	127,366,909,973	38.77%
41	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	63,805,661,233	38.27%
42	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	61,212,515,680	37.98%
43	KEMENTERIAN PERTAHANAN	304,184,506,161,000	114,027,766,012,288	37.49%
44	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	109,760,883,224	37.36%
45	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	171,689,833,560	37.34%
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,465,129,883,000	917,580,209,780	37.22%
47	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,853,780,324,000	689,946,772,463	37.22%
48	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,848,562,191,000	2,164,360,875,771	37.01%
49	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	58,008,582,628	37.01%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	68,083,631,000	36.9%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	542,982,054,529	36.47%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	554,689,270,586	36.39%
53	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,281,288,000	97,479,175,552	36.33%
54	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	925,093,701,592	36.12%
55	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,425,521,662,000	1,925,331,218,900	35.49%
56	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	81,489,440,586	35.43%
57	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	3,529,066,578,722	35.42%

58	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,533,975,927,000	887,165,369,672	35.01%
59	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,606,498,000	96,215,372,907	34.41%
60	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,856,211,000	157,719,405,823	34%
61	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	296,725,845,674	33.73%
62	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	89,405,603,353	33.47%
63	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,626,016,603,000	4,500,263,887,313	33.03%
64	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	91,015,315,560	32.8%
65	KEMENTERIAN KOPERASI	473,310,018,000	152,550,090,801	32.23%
66	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,970,952,577,000	634,702,563,683	32.2%
67	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	226,765,308,119	31.42%
68	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,079,782,944,000	337,644,347,376	31.27%
69	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	119,367,970,893	30.38%
70	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	69,766,738,799	30.34%
71	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	90,103,062,791	29.97%
72	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	686,666,464,333	29.47%
73	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,808,528,593,000	1,409,929,971,963	29.32%
74	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8,073,325,181,000	2,338,319,089,285	28.96%
75	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	105,959,508,945	28.3%
76	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,444,977,952,000	665,594,139,620	27.22%
77	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,826,897,302,000	768,749,119,752	27.19%
78	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,232,274,044,000	9,210,046,858,666	26.14%
79	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,357,953,540,698	25.49%
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	13,398,663,249	25.05%
81	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,535,765,226,000	1,824,755,052,975	24.21%
82	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,600,725,000	1,191,595,297,912	23.52%
83	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	310,210,428,459	23.47%
84	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,389,595,539,000	14,158,342,384,786	22.69%
85	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,374,348,189,000	528,557,607,285	22.26%
86	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	44,235,104,887	22.17%
87	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	106,601,392,533	21.69%
88	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	277,533,392,000	56,368,298,479	20.31%
89	KEMENTERIAN PERTANIAN	29,422,740,766,000	5,835,123,907,366	19.83%
90	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	403,533,248,548	19.48%
91	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	1,025,767,183,976	19.45%
92	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	2,073,885,519,683	19.41%
93	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	113,769,791,284,000	21,940,925,148,514	19.29%
94	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	36,103,197,978	17.26%
95	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,395,534,826,000	870,483,352,559	13.61%
96	BADAN KEAMANAN LAUT	2,730,731,361,000	305,116,360,942	11.17%
97	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	103,025,984,114	10.82%
98	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	5,898,270,403,753	8.31%
99	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	75,483,598,537	3.98%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	-1,640,200	0%
101	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	-363,470,540	0%
102	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	-175,613,740	0%
103	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%



REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	166,724,094,000 89,884,191,331 (53.91%)	451,337,449,000 105,912,576,301 (23.47%)	62,218,116,000 4,805,066,096 (7.72%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	680,279,659,000 200,601,833,729 (29.49%)
		SISA	76,839,902,669	345,424,872,699	57,413,049,904	0	0	0	0	0	0	479,677,825,271
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	50,776,233,000 29,111,917,661 (57.33%)	63,366,947,000 13,500,426,842 (21.31%)	2,040,607,000 755,478,400 (37.02%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	116,183,787,000 43,367,822,903 (37.33%)
		SISA	21,664,315,339	49,866,520,158	1,285,128,600	0	0	0	0	0	0	72,815,964,097
3	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	810,737,460,000 413,911,282,299 (51.05%)	3,952,519,950,000 587,987,629,406 (14.88%)	1,193,664,981,000 92,468,716,256 (7.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,956,922,391,000 1,094,367,627,961 (18.37%)
		SISA	396,826,177,701	3,364,532,320,594	1,101,196,264,744	0	0	0	0	0	0	4,862,554,763,039
4	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,920,462,160,000 1,097,707,090,837 (57.16%)	4,920,868,799,000 1,446,089,440,391 (29.39%)	4,160,783,930,000 768,896,385,474 (18.48%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	11,002,114,889,000 3,312,692,916,702 (30.11%)
		SISA	822,755,069,163	3,474,779,358,609	3,391,887,544,526	0	0	0	0	0	0	7,689,421,972,298
5	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	1,174,063,422,000 635,587,385,011 (54.14%)	3,475,713,005,000 946,307,246,117 (27.23%)	1,534,361,533,000 210,798,084,731 (13.74%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,184,137,960,000 1,792,692,715,859 (28.99%)
		SISA	538,476,036,989	2,529,405,758,883	1,323,563,448,269	0	0	0	0	0	0	4,391,445,244,141
6	02208 Ditjen Perkeretaapian	PAGU REALISASI	205,469,616,000 123,451,287,525 (60.08%)	3,617,414,015,000 265,052,794,926 (7.33%)	4,299,180,275,000 246,545,981,657 (5.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,122,063,906,000 635,050,064,108 (7.82%)
		SISA	82,018,328,475	3,352,361,220,074	4,052,634,293,343	0	0	0	0	0	0	7,487,013,841,892
7	02211 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU REALISASI	47,087,041,000 24,269,958,691 (51.54%)	71,806,509,000 17,810,067,852 (24.80%)	2,459,864,000 657,404,850 (26.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	121,353,414,000 42,737,431,393 (35.22%)
		SISA	22,817,082,309	53,996,441,148	1,802,459,150	0	0	0	0	0	0	78,615,982,607



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	397,175,956,000 197,941,506,323 (49.84%)	2,292,953,084,000 747,644,308,632 (32.61%)	165,858,488,000 10,689,488,123 (6.44%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,855,987,528,000 956,275,303,078 (33.48%)
		SISA	199,234,449,677	1,545,308,775,368	155,168,999,877	0	0	0	0	0	0	1,899,712,224,922
9	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,957,550,000 22,465,867,384 (59.19%)	152,415,175,000 31,314,609,037 (20.55%)	2,857,785,000 76,700,000 (2.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 53,857,176,421 (27.87%)
		SISA	15,491,682,616	121,100,565,963	2,781,085,000	0	0	0	0	0	0	139,373,333,579
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,810,453,532,000 2,634,330,487,062 (54.76%)	18,998,394,933,000 4,161,619,099,504 (21.91%)	11,423,425,579,000 1,335,693,305,587 (11.69%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	35,232,274,044,000 8,131,642,892,154 (23.08%)
		SISA	2,176,123,044,938	14,836,775,833,496	10,087,732,273,413	0	0	0	0	0	0	27,100,631,151,846



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	48,171,430,000 4,207,434,635 (8.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	48,171,430,000 4,207,434,635 (8.73%)
		SISA	0	43,963,995,365	0	0	0	0	0	0	0	43,963,995,365
2	467005 BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU REALISASI	5,468,646,000 4,865,405,483 (88.97%)	338,301,112,000 80,703,651,390 (23.86%)	24,453,540,000 9,990,000 (0.04%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	368,223,298,000 85,579,046,873 (23.24%)
		SISA	603,240,517	257,597,460,610	24,443,550,000	0	0	0	0	0	0	282,644,251,127
3	467006 BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU REALISASI	15,573,003,000 8,248,254,768 (52.97%)	377,785,088,000 155,252,076,147 (41.10%)	99,066,347,000 24,502,999,438 (24.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	492,424,438,000 188,003,330,353 (38.18%)
		SISA	7,324,748,232	222,533,011,853	74,563,347,562	0	0	0	0	0	0	304,421,107,647
4	467309 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU REALISASI	10,730,405,000 8,276,717,776 (77.13%)	406,233,254,000 9,743,502,892 (2.40%)	1,241,021,399,000 138,185,704,840 (11.13%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,657,985,058,000 156,205,925,508 (9.42%)
		SISA	2,453,687,224	396,489,751,108	1,102,835,694,160	0	0	0	0	0	0	1,501,779,132,492
5	467321 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU REALISASI	15,865,434,000 10,936,663,109 (68.93%)	703,158,968,000 7,877,501,932 (1.12%)	1,362,542,824,000 32,049,120,136 (2.35%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,081,567,226,000 50,863,285,177 (2.44%)
		SISA	4,928,770,891	695,281,466,068	1,330,493,703,864	0	0	0	0	0	0	2,030,703,940,823
6	467337 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU REALISASI	11,933,665,000 7,719,564,992 (64.69%)	195,376,810,000 7,524,644,116 (3.85%)	282,746,645,000 49,307,496,755 (17.44%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	490,057,120,000 64,551,705,863 (13.17%)
		SISA	4,214,100,008	187,852,165,884	233,439,148,245	0	0	0	0	0	0	425,505,414,137
7	467345 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU REALISASI	17,028,649,000 8,183,874,884 (48.06%)	145,459,553,000 10,087,324,834 (6.93%)	683,917,433,000 43,573,042,592 (6.37%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	846,405,635,000 61,844,242,310 (7.31%)
		SISA	8,844,774,116	135,372,228,166	640,344,390,408	0	0	0	0	0	0	784,561,392,690

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

8	467352 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU REALISASI	8,196,883,000 5,091,973,128 (62.12%)	98,013,017,000 8,287,995,450 (8.46%)	2,647,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	108,856,900,000 13,379,968,578 (12.29%)
		SISA	3,104,909,872	89,725,021,550	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	95,476,931,422
9	467364 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU REALISASI	11,342,346,000 7,198,027,237 (63.46%)	255,576,774,000 2,991,268,860 (1.17%)	29,154,208,000 23,860,000 (0.08%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	296,073,328,000 10,213,156,097 (3.45%)
		SISA	4,144,318,763	252,585,505,140	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	285,860,171,903
10	467373 BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	12,677,701,000 7,909,659,440 (62.39%)	62,544,991,000 5,465,501,109 (8.74%)	1,998,085,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,220,777,000 13,375,160,549 (17.32%)
		SISA	4,768,041,560	57,079,489,891	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	63,845,616,451
11	467385 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	17,163,087,000 8,176,385,546 (47.64%)	81,851,036,000 11,943,108,014 (14.59%)	26,874,629,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	125,888,752,000 20,119,493,560 (15.98%)
		SISA	8,986,701,454	69,907,927,986	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	105,769,258,440
12	467462 PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	142,786,186,000 11,893,361,667 (8.33%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	142,786,186,000 11,893,361,667 (8.33%)
		SISA	0	130,892,824,333	0	0	0	0	0	0	0	130,892,824,333
13	467478 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	61,110,370,000 6,467,636,249 (10.58%)	243,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	61,353,370,000 6,467,636,249 (10.54%)
		SISA	0	54,642,733,751	243,000,000	0	0	0	0	0	0	54,885,733,751
14	467484 PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	44,086,820,000 7,462,402,525 (16.93%)	464,442,816,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	508,529,636,000 7,462,402,525 (1.47%)
		SISA	0	36,624,417,475	464,442,816,000	0	0	0	0	0	0	501,067,233,475
15	467504 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	69,754,600,000 51,888,727,308 (74.39%)	110,547,069,000 13,447,763,219 (12.16%)	13,119,553,000 15,873,000 (0.12%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,421,222,000 65,352,363,527 (33.79%)
		SISA	17,865,872,692	97,099,305,781	13,103,680,000	0	0	0	0	0	0	128,068,858,473



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

16	467515 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	9,735,197,000 9,993,885,452 (102.66%)	546,411,537,000 5,660,246,156 (1.04%)	66,952,796,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	623,099,530,000 15,654,131,608 (2.51%)
		SISA	-258,688,452	540,751,290,844	66,952,796,000	0	0	0	0	0	0	607,445,398,392
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	205,469,616,000 138,489,139,123 (67.40%)	3,617,414,015,000 349,015,419,195 (9.65%)	4,299,180,275,000 287,668,086,761 (6.69%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	8,122,063,906,000 775,172,645,079 (9.54%)
		SISA	66,980,476,877	3,268,398,595,805	4,011,512,188,239	0	0	0	0	0	0	7,346,891,260,921



LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22,099,026,000	1,907,456,352	8.63%	0	18,026,792,000	2,164,777,648
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637,601,276,000	218,911,630,509	34.33%	18,658,519,972	273,854,334,000	126,176,791,519
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17,498,737,000	1,409,365,395	8.05%	4,613,871,500	10,970,124,000	505,376,105
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14,369,348,000	288,426,890	2.01%	499,500,000	12,856,362,000	725,059,110
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	3,066,058,000	168,416,380	5.49%	0	2,415,408,000	482,233,620
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	2,617,514,514,000	326,205,973,656	12.46%	327,201,279,936	367,255,140,000	1,596,852,120,408
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2,708,124,930,000	87,143,730,945	3.22%	74,789,033,758	366,046,789,000	2,180,145,376,297
8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2,051,708,470,000	201,693,105,936	9.83%	421,857,299,493	546,646,219,000	881,511,845,571
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	50,081,547,000	5,539,167,517	11.06%	1,259,782,690	28,138,187,000	15,144,409,793
Jumlah		8,122,063,906,000	843,267,273,580	10.38%	848,879,287,349	1,626,209,355,000	4,803,707,990,071
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							



LAPORAN PAGU DANA PER SUMBER DANA

No.	Kode Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	A RUPIAH MURNI	4,518,485,603,000	498,337,493,827	11.03%	196,232,971,260	1,365,831,347,000	2,458,083,790,913
2	B PINJAMAN LUAR NEGERI	148,519,217,000	0	0.00%	0	55,139,651,000	93,379,566,000
3	D PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	12,574,035,000	514,216,180	4.09%	2,314,482,692	5,477,793,000	4,267,543,128
4	F BADAN LAYANAN UMUM	78,326,730,000	8,385,380,997	10.71%	0	57,470,473,000	12,470,876,003
5	I HIBAH LUAR NEGERI	5,237,190,000	0	0.00%	0	5,237,190,000	0
6	S SALDO AWAL BLU	14,426,672,000	0	0.00%	0	0	14,426,672,000
7	T SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	3,344,494,459,000	336,030,182,576	10.05%	650,331,833,397	137,052,901,000	2,221,079,542,027
Jumlah		8,122,063,906,000	843,267,273,580	10.38%	848,879,287,349	1,626,209,355,000	4,803,707,990,071
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							

LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI PERIODE APRIL- JUNI 2025



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: April, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4			Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
							Target Output		%	Volume	Target Anggaran		%				Volume	Realisasi Output/Realisasi Anggaran	
							Volume	%			Volume	%						Volume	%
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	-	-	0.46	-	271.075.397.000	5.13	0.46	3.406.983.320	100%	1.26%	Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 mayoritas kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueung Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km/sp dengan lebar spoor 1.435 mm b. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarakalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian. c. Dukungan konektivitas di wilayah IKN berupa penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Jalur KA Perkotaan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP-IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2) serta penyelenggaraan subsidi angkutan perintis Trem Otonom di IKN tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran (blokir). d. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai –Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 87%. e. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauaprat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauaprat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelainan/penetapan perencanaan teknis). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran UMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). f. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai dilaksanakan, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan pengusulan kembali pekerjaan frontage road menyesuaikan kemampuan fiskal yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2026. g. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah serta pelelangan kegiatan pendukung/konsultan tender of assistance).	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya: a. Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan readiness criteria, penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West. b. Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBL/pemantlaan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor gatharing.	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	-	74	3.84	5.19	-	-	-	-	-	-	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	-	92	4	4.35	-	-	-	-	-	-	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	-	742	61.43	8.28	-	-	-	-	-	-	-	Dit Prasarana Perkeretaapian			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	-	792	66.67	8.42	-	-	-	-	-	-	-	Dit Sarana Perkeretaapian			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelainan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	905.395.247.000	5.13	99.617	42.892.719.876	99.62%	4.74%	Sampai dengan Bulan April 2025 telah terjadi 1 kejadian kecelakaan kereta api dan jumlah keberangkatan sebanyak 261.332 KA, maka diperoleh Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA sebesar 99,617%. Analisa kegagalan disebabkan karena kejadian anjlok KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan. Pada tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu pukul 22:30 WIB telah terjadi kecelakaan Anjlok Kereta Api KA 3100 (Barapati) Rangkaian Gerbong Barang nomor 458905 nomor urut 17 dari lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+90J Jalur II Emplasement Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah Divre III Palembang. Dampak kejadian kecelakaan KA tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional KA pada 10 KA dengan andil keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian s.d April 2025 diantaranya: a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelainan prasarana, sarana dan SDM perkeretaapian. b. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis persiapan angkutan lebaran dengan operator (PT. KAI, PT. KCI, PT. MRT, LRT dan PT. KCI) terkait kesiapan sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian; c. Pelaksanaan inspeksi keselamatan guna mendukung keselamatan perjalanan KA dalam rangka mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025 di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian antara lain Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2025. Inspeksi keselamatan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang menjadi prioritas risiko dan bahaya tinggi dalam penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan data Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko (IBPR) yang dibuat oleh operator penyelenggara perkeretaapian. Data IBPR wajib ada berdasarkan PM 69 tahun 2018 tentang SMK* bahwa operator penyelenggara perkeretaapian wajib melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh (fasilitas operasi, jalur dan bangunan, pengoperasian, dan lainnya) serta dilakukan update berkala untuk memastikan penyelenggaraan perkeretaapian berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. d. Pelaksanaan pemeriksaan kelainan dan kesiapoperasian (ramcheck) sarana perkeretaapian guna mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2025 pada tanggal 24 Februari s.d 14 Maret 2025 sebanyak 2.051 unit (naik 0,7% YoY 2024 sebesar 2.037 unit) meliputi lokomotif sebanyak 197 unit, kereta ditarik lokomotif sebanyak 1.696 unit, KRL sebanyak 60 unit dan Kereta Rel Diesel sebanyak 98 unit. e. Penempatan kereta penolong, crane dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian sehingga apabila terdapat kecelakaan KA dapat segera dilakukan penanganan dan evakuasi agar jalur KA dapat segera dilalui.	Upaya peningkatan kinerja terhadap Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: a. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025. b. Lanjutan pelaksanaan audit SMK* terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh. c. Analisis penyebab kejadian anjlok pada Triwulan I Tahun 2025 untuk selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada stakeholder terkait agar tidak terjadi kembali pada periode berikutnya.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelainan Prasarana Perkeretaapian)	-	567	47.67	8.41	-	-	-	-	-	-	-	Dit Prasarana Perkeretaapian			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output Volume	%	Target Anggaran Volume	%	Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelakuan Sarana Perkeretaapian)	-	279	6.15	2.2	-	-	-	-	-	-			Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	910	91	10	-	-	-	-	-	-			Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	-	126	2.84	2.25	-	-	-	-	-	-			Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	-	102	5.55	5.44	-	-	-	-	-	-			Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	-	106	3.707	3.5	-	-	-	-	-	-			Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelakuan Sarana Perkeretaapian)	-	89	3.315	3.72	-	-	-	-	-	-			Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelakuan Prasarana Perkeretaapian)	-	104	4.643	4.46	-	-	-	-	-	-			Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	298.416.252.333	5.13	3.81	83.917.181.632	101.87%	28.12%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata nilai IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Januari s.d April Tahun 2025 dimana diperoleh nilai 3,810 atau dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik Pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan menggunakan google form pada beberapa unit kerja seperti Direktorat LLAKA, BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: a. Pengesahan terhadap pembaharuan/penyusunan SOP berdasarkan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai dasar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan unit kerja. b. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. c. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. d. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi kelakuan sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian termasuk melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian).	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain: a. Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Balai Perawatan Perkeretaapian (proses kajian dan direncanakan implementasi survei IKM pada Triwulan III Tahun 2025). b. Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengkomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. c. Pemantauan dan percepatan penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	-	36	3.71	10.31	-	-	-	-	-	-			Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	-	36	3.7	10.28	-	-	-	-	-	-			Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	-	36	3.89	10.81	-	-	-	-	-	-			Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	-	36	3.86	10.72	-	-	-	-	-	-			Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	-	36	3.86	10.72	-	-	-	-	-	-			Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	-	36	3.58	9.94	-	-	-	-	-	-			Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	-	36	3.23	8.97	-	-	-	-	-	-			Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	-	1152	96.1	8.34	-	-	-	-	-	-	Realisasi On Time Performance Transportasi Perkeretaapian pada periode Januari s.d April 2025 sebesar 97,415% yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 254.576 KA dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 261.332 KA Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2025 diantaranya: a. Terpenuhinya target perolehan on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti LRT Jabodetabek (99,28%), LRT Sumatera Selatan (99,57%), MRT Jakarta (99,98%) dan LRT Jakarta (99,99%). b. Telah dilakukan perubahan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025) sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api. c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT, KAI, PT, MRT, PT, KCI, PT, KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. d. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir. Analisa kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain koordinasi teknis dengan stakeholders (PT, KAI, PT, MRT, PT, KCI, PT, KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi tumpul yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan. b. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/lembatan kendaraan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya.	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output Volume	%	Target Anggaran Volume	%	Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	-	1140	95.42	8.37	-	-	-	-	-	-			Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	-	1140	95.02	8.34	-	-	-	-	-	-			Di Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handai)	-	756	63.4	8.39	-	-	-	-	-	-			Di Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4	118	5.995	5.08	-	-	4.515	-	75.31%	-	Realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api s.d April 2025 sebesar 4,515% yang diperoleh dari penjumlahan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA (50%) dan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA (50%) dengan rincian sebagai berikut : a. realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 127.048.469 penumpang s.d April Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 2,270% (pembobotan 50%) b. realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 16.114.092 ton s.d April 2025 Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 2,245% beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain : Angkutan Penumpang a. Peningkatan jumlah perjalanan kereta api antar kota dibandingkan periode sebelumnya yaitu semula 226 perjalanan/hari menjadi 246 perjalanan/hari dengan diterapkannya GAPEKA Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Februari 2025, termasuk penambahan kereta api perkotaan (diantaranya penambahan frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek mulai Maret 2025 menjadi 366 KA untuk Weekday dan 270 KA saat Weekend). b. Penambahan 16 layanan kereta api baru termasuk perpanjangan layanan existing sejak ditetapkan GAPEKA baru diantaranya: 1) KA Batara Kresna (rute Purwasari–Wonorejo dengan rangkaian baru jenis kereta diesel); 2) KA Jayakarta (rute Surabaya Gubeng–Pasar Senen); 3) KA Singasari (rute Bilar–Pasar Senen); 4) KA Dharmawangsa (rute Surabaya Pasarturi–Pasar Senen); 5) KA Mataram (rute Solo Balapan–Pasar Senen). c. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat, diantaranya melalui peningkatan akses dan layanan feeder yang terintegrasi di stasiun KA (diantaranya stasiun di wilayah Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, Kereta Cepat Jakarta – Bandung). d. Pelaksanaan pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), diantaranya dalam mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pemeriksaan di 239 stasiun (naik 27,1% YoY 2024 sebanyak 188 stasiun) dan 139 rangkaian kereta api (naik 21,9% YoY 2024 sebanyak 114 rangkaian kereta api). e. Dukungan sosialisasi angkutan kereta api melalui media sosial untuk meningkatkan pengguna kereta api. f. Peningkatan realisasi angkutan penumpang khususnya pada layanan KRL Jabodetabek sebanyak 82.114.334 penumpang (rata-rata penumpang per hari weekday sebanyak 1.017.929 penumpang), Kereta Cepat Jakarta - Bandung sebanyak 1.353.760 penumpang (rata-rata penumpang per hari sebanyak 15.042 penumpang), LRT Jabodebek sebanyak 6.351.283 penumpang (rata-rata penumpang per hari sebanyak 89.876 penumpang). Angkutan barang: a. Penyelenggaraan angkutan motor gratis (motis) menggunakan kereta api guna mendukung Angkutan Lebaran Tahun 2025 dengan realisasi 7.609 motor dan 12.553 penumpang. b. Realisasi angkutan barang periode Triwulan I Tahun 2025 secara umum belum memenuhi program Tahun 2025, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 terdapat peningkatan 2% (Triwulan I Tahun 2025 sebesar 16.114.092 ton, Triwulan I Tahun 2024 sebesar 15.830.337 ton). c. Koordinasi pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogres sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangsasbitung). b. Pengawasan dan koordinasi terkait rencana penambahan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 trainset impor dari China, 12 trainset baru produksi PT INKA, 2 trainset hasil retrofit oleh PT INKA). c. Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029.	Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	27	379	19.368	5.11	231.544.815.000	5.13	27.948	-	144.3%	-	Realisasi s.d April 2025 pada Indikator Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar 27,948%, yang diperoleh dari penjumlahan dari penilaian AKIP, NKA, PNPB, Indeks Profesional ASN. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif; 1) Kelengkapan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja diantaranya tersusunnya Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan SOP yang sistematis dan terdokumentasi baik. Adapun terkait dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 saat ini dalam tahap penyusunan kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk penyusunan kegiatan terkait dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. Selanjutnya direncanakan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025. 2) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan Direktorat, Balai dan Bagian dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis. 3) Penyelarasan kinerja individu dan organisasi melalui integrasi target Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja dengan SKP masing-masing pegawai guna mendukung prinsip akuntabilitas personal dan kolektif. b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran: 1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran yang berdampak langsung pada penundaan hingga pembatalan kegiatan dan anggaran. 2) Efektivitas dan ketepatan perencanaan anggaran termasuk penyusunan dan revisi DIPA, penyusunan RPD, dan pelaporan output yang rutin dan tepat waktu. 3) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas meskipun pagu mengalami pemangkasan drastis. c. Faktor optimalisasi PNPB melalui aset prasarana milik negara: Persetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan BMN termasuk perolehan realisasi PNPB TAC Tahun 2024 turut mempengaruhi realisasi PNPB. d. Faktor manajemen SDM: Ketersediaan dan pemanfaatan SDM yang profesional, dimana penurunan nilai IP ASN memperlihatkan pentingnya pelatihan, validasi kompetensi, dan kelengkapan data ASN yang update. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi/digitalisasi: 1) Ketepatan dan keterbacaan pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, e-Kinerja, SILAKI, SAKTI, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian. 2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN maupun pelaporan keuangan.	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mencakup sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyusunan program/kegiatan yang berdampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. b. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK). c. Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan aset/BMN yang potensial menjadi sumber perolehan PNPB. d. Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/functional dilengkapi sertifikat sebagai bukti kompetensi guna selanjutnya updating data kinerja dan kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.	Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	110	5	4.55	-	-	-	-	-	-			Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-			Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-			Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-			Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	-	785	56	7.13	-	-	-	-	-	-			Setdijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	-	704	54.47	7.74	-	-	-	-	-	-			Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono
NIP. 198801182025211023



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Mei, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5			Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
							Target Output		Target Anggaran	%	Realisasi Output		Realisasi Anggaran				Capaian Output	
							Volume	%			Volume	%					Volume	Volume
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapiian	-	-	0.46	-	338.844.246.250	6.41	0.46	65.374.631.435	100%	19.29%	Pada Tahun 2025 belum diartikan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perjanjangan prasarana perkeretaapiian baru menghubungkan PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapiian pada Tahun 2025 mayoritas kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapiian eksisting. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapiian yang berproses antara lain: 1. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueang Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km tp dengan lebar spoor 1.435 mm 2. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Maarakalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapiian. 3. Dukungan konektivitas di wilayah IKN berupa penyajian dokumen perencanaan teknis (Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Jalur KA Perkotaan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP-IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2) serta penyelenggaraan subsidi angkutan perintis Trem Oncom di IKN tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran (blokir). 4. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapiian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai -Palano yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 87%. 5. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok SS – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok SS (penyelesaian sertifikasi kelengkapan/perencanaan teknis). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok SS – Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). 6. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai dilaksanakan, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan pengusulan kembali pekerjaan frontage road menyesuaikan kemampuan fiskal yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapiian Tahun 2025-2026. 7. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah serta pelelangan kegiatan pendukung/konsultan tender of assistance).	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya: 1. Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapiian, diantaranya pemenuhan readiness criteria, penyelesaian pembangunan prasarana pendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West. 2. Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapiian melalui pembiayaan alternatif/KPBL/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor gathering.	Dit. Prasarana Perkeretaapiian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit. Sarana Perkeretaapiian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapiian	
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapiian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian)	-	74	3.84	5.19	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapiian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapiian)	-	92	4	4.35	-	-	-	-	-	-	Pada bulan Mei 2025, tidak terdapat rencana aksi pemenuhan dokumen penyelenggaraan kerja sama bidang perkeretaapiian	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapiian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61	742	61.43	8.28	-	-	61.43	-	-	100%	-	Sampai dengan bulan Mei tahun 2025 Dokumen Teknis BED / DED: 1. BED St. Padalarang - Telah dilaksanakan lanjutan pemeriksaan Gambar Basic Enginering Design pada tanggal 28 Januari - 4 Februari 2025, dan telah disampaikan hasil pemeriksaan kepada konsultan untuk dilakukan perbaikan - telah dilakukan pembahasan antara Direktorat Prasarana Perkeretaapiian, Konsultan, dan tim inklusif pada tanggal 14 maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan perbaikan atas pemeriksaan Direktorat Prasarana Perkeretaapiian dan masukan dari tim inklusif. 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Telah disampaikan hasil perbaikan BED dari konsultan pada tanggal 5 Maret 2025, selanjutnya dilakukan pengecekan perbaikan BED oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapiian terhadap hasil perbaikan BED dari Konsultan. 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600/900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - akan dilakukan pembahasan antara Direktorat Prasarana Perkeretaapiian dan konsultan pada bulan april 2025 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Akan dilakukan asistensi pada bulan April 2025. 5. DED Jembatan Lintas kayu Tanam - Akan dilakukan pengesahan pada bulan Juni 2025.	1. BED St. Padalarang - Akan dilakukan asistensi dokumen gambar Basic Engineering Design Stasiun Padalarang pada Bulan April 2025 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Akan dilakukan pembahasan antara Direktorat Prasarana Perkeretaapiian dan konsultan pada bulan april 2025 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600/900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - akan dilakukan pembahasan pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 bulan Mei 2025 akan dilaksanakan proses pengesahan pada bulan Juni 2025. 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Akan dilakukan asistensi pada bulan April 2025. 5. DED Jembatan Lintas kayu Tanam - Akan dilakukan pengesahan pada bulan Juni 2025	Dit Prasarana Perkeretaapiian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapiian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapiian)	66	792	66.67	8.42	-	-	66.67	-	-	100%	-	Tidak terdapat kegiatan dalam DIPA PKR TA 2025, capaian berdasarkan baseline capaian renstra 2020-2024	Dit Sarana Perkeretaapiian	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran				
							Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelainan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	1.131.744.058.750	6.41	99.904	53.474.345.771	99.9%	4.72%	Sampai dengan Bulan Mei 2025 tidak terjadi kejadian kecelakaan kereta api namun secara kumulatif kecelakaan terjadi satu kali (pada bulan Maret 2025) dan jumlah keberangkatan sebanyak 522.664 KA, maka diperoleh Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA sebesar 99,904%. Analisa kegagalan disebabkan karena kejadian anjlokkan KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan: Pada tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu pukul 22:30 WIB telah terjadi kecelakaan Anjlokkan Kereta Api KA 3100 (Barapati) Rangkaian Gerbong Barang nomor 458905 nomor urut 17 dan lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+90 Jalur II Emplasemen Stasiun Ujan Mas (Ujan) wilayah Divre III Palembang. Dampak kejadian kecelakaan KA tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional KA pada 10 KA dengan andi keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian s.d Mei 2025 diantaranya: 1. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelainan prasarana, sarana dan SDM perkeretaapian. 2. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis persiapan angkutan lebaran dengan operator (PT. KAI, PT. KCI, PT. MRT, LRT dan PT. KCIC) terkait kesiapan sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian; 3. Pelaksanaan inspeksi keselamatan guna mendukung keselamatan perjalanan KA dalam rangka mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025 di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian antara lain Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2025. Inspeksi keselamatan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang menjadi prioritas risiko dan bahaya tinggi dalam penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan data Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko (IBPR) yang dibuat oleh operator penyelenggara perkeretaapian. Data IBPR wajib ada berdasarkan PM 69 tahun 2018 tentang SMKP bahwa operator penyelenggara perkeretaapian wajib melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh (fasilitas operasi, jalur dan bangunan, pengoperasian, dan lainnya) serta dilakukan update berkala untuk memastikan penyelenggaraan perkeretaapian berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. 4. Pelaksanaan pemeriksaan kelainan dan kesiapoperasian (rampcheck) sarana perkeretaapian guna mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2025 pada tanggal 24 Februari s.d 14 Maret 2025 sebanyak 2.051 unit (naik 0,7% YoY 2024 sebesar 2.037 unit) meliputi lokomotif sebanyak 197 unit, kereta ditarik lokomotif sebanyak 1.696 unit, KRL sebanyak 60 unit dan Kereta Rel Diesel sebanyak 98 unit. 5. Penempatan kereta penolong, crane dan gerbong dari di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian sehingga apabila terdapat kecelakaan KA dapat segera dilakukan penanganan dan evaluasi agar jalur KA dapat segera dilalui.	Upaya peningkatan kinerja terhadap Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (MO) Tahun 2025. 2. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh. 3. Analisis penyebab kejadian anjlokkan pada Trivulan I Tahun 2025 untuk selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada stakeholder terkait agar tidak terjadi kembali pada periode berikutnya.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelainan Prasarana Perkeretaapian)	-	567	47.67	8.41	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelainan Sarana Perkeretaapian)	-	279	10	3.58	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	910	91	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	-	126	7.51	5.96	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	-	102	6.94	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	-	106	5.493	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelainan Sarana Perkeretaapian)	-	89	4.308	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelainan Prasarana Perkeretaapian)	-	104	6.385	6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetaan, pemantauan dan evaluasi GAFIKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	373.020.315.417	6.41	3.81	170.947.382.031	101.87%	45.83%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Januari s.d Mei Tahun 2025 dimana diperoleh nilai 3.810 atau dapat diinterpretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan menggunakan google form pada beberapa unit kerja seperti Direktorat LLAKA, BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: 1. Pengesahan terhadap pembahasan/penyusunan SOP berdasarkan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai dasar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan unit kerja. 2. Kemandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. 3. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. 4. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi kelainan sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan faktor/keberhasilan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian termasuk melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian).	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain: 1. Persiapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Balai Perawatan Perkeretaapian (proses kajian dan direncanakan implementasi survei IKM pada Trivulan III Tahun 2025). 2. Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengkomodifikasi layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. 3. Pemantauan dan percepatan penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	-	36	3.71	10.31	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	-	36	3.7	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	-	36	3.89	10.81	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	-	36	3.86	10.72	-	-	-	-	-	-	-	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	-	36	3.86	10.72	-	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5			Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output	%	Volume	Target Anggaran	%	Volume	Volume			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	-	36	3.58	9.94	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	-	36	3.23	8.97	-	-	-	-	-	-	-	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	-	1152	96.1	8.34	-	-	-	-	-	Realisasi On Time Performance Transportasi Perkeretaapian pada periode Januari s.d Mei 2025 sebesar 97,415% yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 254.576 KA dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 261.332 KA. Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2025 diantaranya: 1. Terpenuhinya target perolehan on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti LRT Jabodebek (99,28%), LRT Sumatera Selatan (99,57%), MRT Jakarta (99,98%) dan LRT Jakarta (99,99%). 2. Telah dilakukan perubahan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta – Bandung (terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025) sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api. 3. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT, KAI, PT, MRT, PT, KCI, PT, KCI) terkait persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. 4. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir. Analisa kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain koordinasi teknis dengan stakeholders (PT, KAI, PT, MRT, PT, KCI, PT, KCI) terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: 1. Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/baranjir/longsor/amblesan/lokasi buspal yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan. 2. Lanjutkan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. 3. Lanjutkan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	-	1140	95.42	8.37	-	-	-	-	-			Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	-	1140	95.02	8.34	-	-	-	-	-			Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal)	-	756	63.4	8.39	-	-	-	-	-			Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4	118	7.575	6.42	-	-	4.515	-	59.6%	Realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api s.d Mei 2025 sebesar 4,515% yang diperoleh dari penjumlahan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA (50%) dan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA (50%) dengan rincian sebagai berikut: 1. Realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 127.048.469 penumpang s.d Mei Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 2,270% (pembobotan 50%) 2. Realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 16.114.092 ton s.d Mei 2025 Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategi Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 2,245% beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain: - Angkutan Penumpang a. Peningkatan jumlah perjalanan kereta api antar kota dibandingkan periode sebelumnya yaitu semula 226 perjalanan/hari menjadi 246 perjalanan/hari dengan diterapkannya GAPEKA Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Februari 2025, termasuk penambahan kereta api perkotaan (diantaranya penambahan frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek mulai Maret 2025 menjadi 366 KA untuk Weekday dan 270 KA saat Weekend). b. Penambahan 16 layanan kereta api baru termasuk perpanjangan layanan existing sejak ditetapkan GAPEKA baru diantaranya: 1) KA Batara Kresna (rute Purwasari–Wonogiri dengan rangkaian baru jenis kereta diesel); 2) KA Jayakarta (rute Surabaya Gubeng–Pasar Senen); 3) KA Singasari (rute Blitar–Pasar Senen); 4) KA Dharmawangsa (rute Surabaya Pasarturi–Pasar Senen); 5) KA Mataram (rute Solo Balapan–Pasar Senen). 3. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat, diantaranya melalui peningkatan akses dan layanan feeder yang terintegrasi di stasiun KA (diantaranya stasiun di wilayah Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, Kereta Cepat Jakarta – Bandung). 4. Pelaksanaan pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), diantaranya dalam mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pemeriksaan di 239 stasiun (naik 27,1% YoY 2024 sebanyak 188 stasiun) dan 139 rangkaian kereta api (naik 21,9% YoY 2024 sebanyak 114 rangkaian kereta api). 5. Dukungan sosialisasi angkutan kereta api melalui media sosial untuk meningkatkan pengguna kereta api. 6. Peningkatan realisasi angkutan penumpang khususnya pada layanan KRL Jabodetabek sebanyak 82.114.334 penumpang (rata-rata penumpang per hari weekday sebanyak 1.017.929 penumpang), Kereta Cepat Jakarta – Bandung sebanyak 1.353.760 penumpang (rata-rata penumpang per hari sebanyak 15.042 penumpang), LRT Jabodebek sebanyak 6.351.283 penumpang (rata-rata penumpang per hari sebanyak 89.876 penumpang). Angkutan barang: a. Penyelenggaraan angkutan motor gratis (mots) menggunakan kereta api guna mendukung Angkutan Lebaran Tahun 2025 dengan realisasi 7.609 motor dan 12.553 penumpang. b. Realisasi angkutan barang periode Triwulan I Tahun 2025 secara umum belum memenuhi program Tahun 2025, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 terdapat peningkatan 2% (Triwulan I Tahun 2025 sebesar 16.114.092 ton, Triwulan I Tahun 2024 sebesar 15.830.337 ton). c. Koordinasi pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan stasiun kereta api agar berprogress sesuai jadwal penyelesaian dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung). 2. Pengawasan dan koordinasi terkait rencana penambahan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 trainset impor dari China, 12 trainset baru produksi PT INKA, 2 trainset hasil retrofit oleh PT INKA). 3. Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran				
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapain & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapain)	27	379	19.578	5.17	289.431.018.750	6.41	27.948	-	142.75%	-	Realisasi s.d Mei 2025 pada Indikator Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Perkeretaapain sebesar 27,948%, yang diperoleh dari penjumlahan dari penilaian AKIP, NKA, PNPB, Indeks Profesional ASN. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif: 1) Kelengkapan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja diantaranya tersusunnya Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan SOP yang sistematis dan terdokumentasi baik. Adapun terkait dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 saat ini dalam tahap penyusunan kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk penyusunan kegiatan terkait dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. Selanjutnya direncanakan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapain Tahun 2025-2029 ditetapkan pada Trivulan III Tahun 2025. 2) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan Direktorat, Balai dan Bagian dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis. 3) Penyelesaian kinerja individu dan organisasi melalui integrasi target Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja dengan SKP masing-masing pegawai guna mendukung prinsip akuntabilitas personal dan kolektif. b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran: 1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran yang berdampak langsung pada penundaan hingga pembatalan kegiatan dan anggaran. 2) Efektivitas dan ketepatan perencanaan anggaran termasuk penyusunan dan revisi DIPA, penyusunan RPD, dan pelaporan output yang rutin dan tepat waktu. 3) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi lokal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas meskipun pagu mengalami pemangkasan drastis. c. Faktor optimalisasi PNPB melalui aset prasarana milik negara: Penetapan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan BMN termasuk perolehan realisasi PNPB TAC Tahun 2024 turut mempengaruhi realisasi PNPB. d. Faktor manajemen SDM: Ketersediaan dan pemanfaatan SDM yang profesional, dimana penurunan nilai IP ASN memperlihatkan pentingnya pelatihan, validasi kompetensi, dan kelengkapan data ASN yang update. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi/digitalisasi: 1) Ketepatan dan ketelitian pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, e-Kinerja, SILAKI, SAKTI, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian. 2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN maupun pelaporan keuangan.	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: 1. Finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mencakup sinkronisasi/penyusunan kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian program/kegiatan yang berdampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. 2. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK). 3. Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan aset/BMN yang potensial menjadi sumber perolehan PNPB. 4. Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/fungsional dilengkapi sertifikat sebagai bukti kompetensi guna selanjutnya updating data kinerja dan kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapain (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapain)	-	110	5	4.55	-	-	-	-	-	-		Setdijen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100.000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapain (Indeks Profesional ASN)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-		Setdijen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100.000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapain yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapain)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		Setdijen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100.000	Tenwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapain (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapain)	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-		Setdijen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapain (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapain)	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-		Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapain (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapain)	-	785	57	7.26	-	-	-	-	-	-		Setdijen Perkeretaapain	
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapain (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapain)	-	704	55.31	7.86	-	-	-	-	-	-		Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapain	

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN


Allan Tandiono

NIP. 198801182025211023



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juni, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
							Target Output Volume	Target Anggaran Volume	Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output Volume	Capaian Anggaran Volume					
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	-	-	0,46	-	406.613.095,500	7,69	0,46	99.882.994,340	100%	24,56%	Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah pada Juni 2025 belum ada penambahan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu sepanjang 8 Km so yang telah selesai 100% telah dilaksanakan rangkaian proses pengujian kelakan prasana perkeretaapian. Pada Tahun 2024 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain: a. Kegiatan koordinasi untuk mendukung konektivitas PKW Sawahlunto melalui penyelesaian reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Proesi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen Gambar teknis (as built drawing) dan Shop Drawing. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasana yang belum diserahkan yaitu Detail Engineering Design dan Spesifikasi Teknis. Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang Panjang dan Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KA dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban. Selain itu, BTP Padang juga telah melakukan self assessment pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis. b. Pekerjaan lanjutan pembangunan Intas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung c. Kegiatan pendukung konektivitas jalur KA Makassar – Parepare diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung di beberapa stasiun (Stasiun Mandi, Stasiun Labakkang, Stasiun Marang, Stasiun Tanete Rilau). d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok SS – Kotapinang. e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya pelaksanaan Proof Of Concept (POC) pada Agustus s.d Oktober 2024 dan dilakukan evaluasi terkait kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN. Pada Tahun 2024 juga sedang disusun regulasi teknis terkait Tren Otomom untuk mendukung peningkatan konektivitas.	Dit. Prasana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit. Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	23	74	3,84	5,19	-	-	23,07	-	600,78%	-	Sampai dengan bulan Juni 2025 telah terpenuhi 2 dokumen perencanaan yaitu : 1. Dokumen Persetujuan Penetapan Trase MRT Jakarta Fase B2 (Kota – Ancol) 2. Dokumen Hasil Evaluasi Trase Jalur KA Mass Rapid Transit Est West Line (Cikarang-Balaraja)	a. Melakukan percepatan penyusunan format policy brief bidang perkeretaapian b. Melakukan koordinasi intens dengan stakeholder dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan oleh badan usaha atau pemerintah daerah c. Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait evaluasi dokumen permohonan dalam pengusulan penetapan dan persetujuan trase kereta api	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	12	92	8	8,7	-	-	12	-	150%	-	Sampai dengan bulan Juni 2025, telah terpenuhi 1 dokumen penyelesaian kerja sama yaitu Dokumen evaluasi pada dokumen Feasibility Study	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka percepatan guna terciptanya target kegiatan yang diharapkan.	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasasana)	61	742	61,43	8,28	-	-	61,43	-	100%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat 5 DED yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progress sampai dengan bulan Mei tahun 2025 Dokumen Teknis BED / DED 1. BED St. Padalarang - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap gambar teknis oleh Direktorat Prasasana Perkeretaapian dengan Konsultan, perbaikan gambar telah diberikan kepada kantor Perencanaan Teknis Prasasana Perkeretaapian (PPK) 2. pada 28 Mei 2025, dengan catatan perbaikan : 1) Masukan dari tim inspektif telah diakomodir konsultan, namun masih terdapat perbaikan gambar minor terkait belum sesuai-nya beberapa keterangan, kejelasan ukuran, takah, serta guiding block yang belum sesuai peraturan 2) Masukan penambahan perhitungan area parkir pada laporan akhir 3) Secara keseluruhan untuk gambar desain telah selesai 90% dan untuk gambar desain yang masih perlu dilakukan pengecekan sampai dengan Juni masih dilakukan pemeriksaan oleh direktorat prasana perkeretaapian 2. BED Beaufikasi St. Klaten Tahap II - Konsultan telah mengkomodir catatan perbaikan gambar teknis dan telah menyerahkan hasil perbaikan ke direktorat prasana perkeretaapian pada tanggal 25 Juni 2025 - saat ini sedang dilakukan proses pengecekan gambar teknis hasil perbaikan 3. DED Pengangan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600/900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Konsultan telah mengkomodir catatan perbaikan pada gambar teknis bagian jalan rel - Proses persetujuan di Direktorat Prasasana Perkeretaapian untuk gambar desain jalan rel 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Telah dilaksanakan koordinasi pemeriksaan gambar teknis antara direktorat prasana perkeretaapian dengan konsultan terkait studi DED pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung elektrifikasi KA antara padalarang - cicalengka pada tanggal 10 Juni 2025 melalui zoom dengan hasil perbaikan : 1. penambahan gambar layout penempatan tempat sampah 2. pada potongan, ditambahkan detail struktur tangga agar lebih detail 3. pendetailan struktur potongan pagar 4. diameter plat lantai 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam: Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pekerjaan DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Antara Lubuk Alung - Kayu Tanam pada tanggal 20 Mei 2025 secara luring di Ruang Rapat lantai 14 Gedung Karya Kementerian Perhubungan dengan hasil sebagai berikut : 1. Pelaksana Swakelola telah melakukan perhitungan pada desain struktur atas jembatan rencana, mengacu pada SH 1725-2016 dan mencantumkan ke dalam buku laporan perhitungan teknis termasuk pemodelan dari aplikasi yang di gunakan; 2. Pelaksana swakelola agar menambahkan satu buku laporan penyelesaian laporan terkait justifikasi perhitungan pembebanan; 3. Sampai dengan akhir bulan Juni 2025 telah selesai dilakukan penyusunan buku perhitungan pembebanan dan akan dilakukan pengecekan ulang dan persetujuan oleh direktorat prasana perkeretaapian sebelumnya	1. BED St. Padalarang - akan dilakukan pengesahan di bulan Juli 2. BED Beaufikasi St. Klaten Tahap II - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilakukan asistensi pada bulan Juli 3. DED Pengangan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600/900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - akan dilakukan asistensi pada bulan Juli akan dilakukan pengesahan di bulan Agustus 4. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - akan dilakukan pengesahan di bulan Juli 5. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - akan dilakukan asistensi gambar pada bulan Juli - akan dilakukan pengawasan perbaikan 6. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas pada konsep Renstra 2025-2029 dan pemisahan antara dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas dan pelayanan dengan menambahkan indikator persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang pelayanan prasana perkeretaapian	Dit. Prasana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	66	792	66,67	8,42	-	-	66,67	-	100%	-	Tidak terdapat kegiatan dalam DIPA POK TA 2025, capaian berdasarkan baseline capaian renstra 2020-2024	Memantau pengesahan rekomendasi kebijakan yang sudah selesai tahun sebelumnya	Dit. Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelakan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8,33	1.358.092.870,500	7,69	99,528	72.082.522,678	99,53%	5,31%	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan KA baik penumpang maupun barang pada periode tersebut. Kategori kecelakaan kereta api mencakup anjlok, terguling, tabrakan KA dengan KA dan tabrakan Jumlah kejadian kecelakaan s.d Juni 2025 sebanyak 1 kejadian (anjlok) pada 15 Maret 2025 di area Dure Il Palembang) dan jumlah keberangkatan KA (penumpang dan barang) sebanyak 258.366 KA sehingga diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian sebesar 99,51%. Analisis Keberhasilan/kegiatan Pencapaian Target Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja di diantaranya : a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan Tahun 2025 karena dalam tahap usulan revisi relaksasi boker anggaran; b. Masih terdapat fasilitas operasi yang digunakan dengan kondisi tidak memenuhi unsur teknis; c. Proses dalam pengoperasian sistem penyiaran mekanik dan elektrik tidak dilaksanakan dengan baik termasuk kurangnya pengawasan dan perawatan sistem penyiaran dan telekomunikasi; d. Keterbatasan anggaran untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan rencana alarm/lingkungan/amblesan.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya : a. Lanjutan peningkatan sistem penyiaran untuk wilayah Jabodetabek, lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto, lintas Cirebon-Semarang segmen Tegay-Pekalongan dan Segmen Kertosono - Talan Lintas Kertosono - Kotagaya. b. Lanjutan peningkatan jalur KA segmen Jember-Kalisat lintas Surabaya-Banyuwangi. c. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian. d. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasana kereta api (IMO). Selain itu, disusunkan juga beberapa hal penyusunan terhadap strategikebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya : a. Penyusunan strategikebijakan; 1) Diperlukan kajian awal untuk strategiis penerapan pengawasan kelakan prasana dan sarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi didukung dengan uji coba pada segmen tertentu. 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Perawatan dan Pemeriksaan Jalur KA. b. Penyusunan Aktivitas/Anggaran: Usulan revisi relaksasi boker efisiensi untuk kegiatan IMO dan usulan perjanjian MYC untuk kegiatan peningkatan jalur KA c. Penyusunan penempatan jabatan/pegawai: Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk inspekti dan monitoring keselamatan bersama dengan Inspektur Prasasana dan Sarana Perkeretaapian serta penempatan/penggunaan inspektur ke unit kerja terkait guna mendukung. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA diharapkan dapat seminimal mungkin untuk menghasilkan outcome sebagai berikut: a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminimalkan risiko kecelakaan. b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat. c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga mengganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berdampak luas dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output	Volume	%	Target Anggaran	%	Realisasi Output	Volume	%	Realisasi Anggaran	%			
							Target Output	Volume	%	Target Anggaran	%	Realisasi Output	Volume	%	Realisasi Anggaran	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelakasan Prasarana Perkeretaapian)	48	567	47.67	8.41	-	-	-	48.411	-	-	101.55%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat target Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelakasan Prasarana Perkeretaapian sebesar 50,340 % yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan realisasi bulan Juni sebesar 48,411% dengan target triwulan II sebesar 47,670% dengan progres sampai dengan bulan Juni tahun 2025 yaitu : 1. Subdit Kelakasan Jalur dan Bangunan KA -Telah terbit 7 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton Monodok Untuk Jalur KA Ballasted Lebar Jalur Rel 1067 mm Produk PT Wijaya Karya Beton. Tbk pada tanggal 21 Januari 2025 b. Telah terbit 4 Sertifikat Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Stasiun Kereta Api(Kampung Jurat dan Pauh Lima) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kereta Api Padang - Bukit Putus - Pauh Lima Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I di Padang pada tanggal 20 Februari 2025 c. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton (Jalur Kereta Api Ballasted) untuk Lebar Jalur Rel 1067 mm Belan Gandar 18 Ton Produk PT Balon Kurnia Abadi Menggunakan Sistem Penambat Elastic Rail Clip Tipe Material 60S2MN Produk PT Dibaya Upiaya Persada pada tanggal 14 februari 2025 d. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 73 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pengawasan dan Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monodok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalur Rel 1435 mm Produk PT Wijaya Karya Beton Tbk 2. Subdit Kelakasan Fasilitas Operasi KA -Telah terbit 16 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. 4 sertifikat Uji Pertama, JPL, Solo-Wonorejo nomor: KP-DJKA 6 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 b. Sertifikat Uji Pertama Radio Telekomunikasi JABODETABEK nomor: KP DJKA tanggal 9 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 c. 3 Sertifikasi Uji Berkala Listrik Ariran Bawah APMS Bandara Internasional Soekarno - Hatta : KP-DJKA 33 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025 d. 2 Sertifikat Uji Pertama JPL 172a Dan JPL 173 antara Stasiun Hauppurg - Stasiun Cicalengka di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Nomor KP-DJKA 48 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025	1. Subdit Kelakasan Jalur dan Bangunan KA - akan disusun konsep SK dan Sertifikasi Pondasi Cina dan Jakpro - akan dilakukan koordinasi dengan subdit terkait dengan Sertifikasi Jalur KA Rel Lingkar (Rail Loop) pada Train Loading Station (TLS) 5 Hasil Pekerjaan Uji PT Bukit Asam Tbk 2. Subdit Kelakasan Fasilitas Operasi KA - akan dilakukan monitoring terhadap target sertifikasi kelakasan fasilitas operasi KA - akan dilakukan usulan revisi anggaran untuk pemenuhan pengawasaan pengujian tahun 2025	Di Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelakasan Sarana Perkeretaapian)	4	279	16.15	5.79	-	-	-	4.74	-	-	29.35%	-	Capaian bulan Juni sebanyak 617 sertifikat, dengan rincian 321 sertifikat dan Subdit Kelakasan Sarana Wilayah I dan 296 sertifikat dari Subdit Kelakasan Sarana Wilayah II.	Koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian	Di Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Ramphcek)	100	910	91	100	-	-	-	100	-	-	109.89%	-	Berdasarkan hasil pelaksanaan ramphcek sarana angkutan lebaran tahun 2025, sarana yang dilakukan ramphcek sebesar 84,4% (2051 unit) dari target 2431 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 83 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator, sehingga capaian untuk sarana perkeretaapian sesuai hasil ramphcek adalah sebesar 100%.	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan ramphcek yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil ramphcek angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan ramphcek selanjutnya.	Di Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	7	126	10.71	8.5	-	-	-	7.98	-	-	74.51%	-	sampai dengan bulan Juni 2025 telah diterbitkan sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat	Direktoral Keselamatan akan berkoordinasi kepada para stakeholder terkait dengan permohonan penerbitan sertifikasi baru maupun perpanjangan	Di Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimantapkan)	11	102	8.33	8.17	-	-	-	11.11	-	-	133.37%	-	PT. KAI dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti hasil audit SMKP yang disampaikan melalui surat masing-masing	Direktoral Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan audit SMKP selanjutnya pada PT. CRI, PT. LRT, dan PT. KCC	Di Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	7	106	7.583	7.15	-	-	-	7.583	-	-	100%	-	Pelaksanaan Pengujian SDM Perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan berdasarkan timeline pada periode selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelakasan Sarana Perkeretaapian)	6	89	6.294	7.07	-	-	-	6.294	-	-	100%	-	Pengujian Sarana Perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan berdasarkan timeline pada periode selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100.000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelakasan Prasarana Perkeretaapian)	8	104	8.128	7.82	-	-	-	8.128	-	-	100%	-	Pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan berdasarkan timeline pada periode selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (subdi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	447.624.378.500	7.69	3.82	263.279.365.079	102.14%	58.82%	-	-	Capaian IKM Bulan Juni 2025 merupakan data sementara tanpa memperhatikan survey manual yang dilakukan oleh BPKAR Sumsel dan BPKA Subsel. a. Pemantauan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. b. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penanaman jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei IKM melalui form untuk mempermudah pengisian responden. c. Kehadiran SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.	1. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya d. masing-masing unit kerja. b. Optimalisasi pemantauan sistem TIK/digitalisasi berbasis integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu dengan pemberian layanan bidang perkeretaapian (perjanjian, sertifikasi, pengujian, lainnya).	Di LLAKA, Di Prasarana Perkeretaapian, Di Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	-	3.79	-	-	102.16%	-	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat LLAKA bulan Juni 2025 memperoleh nilai sebesar 3,79 atau mendapatkan kategori predikat sangat baik dengan persentase kinerja triwulan dan kinerja tahunan sebesar 102%. Berikut hasil kualitatif penilaian pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.	1. Upaya Penyesuaian Strategi Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. 2. Upaya Penyesuaian Advokasi a. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dilaksanakan setiap bulan. b. Melakukan distribusi pengisian kuesioner secara manual kepada Stakeholder guna meningkatkan jumlah responden dan penilaian terhadap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	-	3.78	-	-	102.16%	-	Pada pelaksanaan survey periode Januari s.d. Juni 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,78 dengan kategori predikat sangat baik dengan persentase kinerja triwulan dan kinerja tahunan sebesar 102%. Berikut hasil kualitatif penilaian pada Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori sangat baik.	Berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya	Di Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.61	-	-	-	3.84	-	-	98.71%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,890, dari hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan pemantauan SKM periode Bulan Juni 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari : 1. Januari : Nilai IKM sebesar 3,745 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 2. Februari : Nilai IKM sebesar 4 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 3. Maret : Nilai IKM sebesar 3,812 dari 6 responden pengguna jasa pelayanan 4. April : Nilai IKM sebesar 3,812 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 5. Mei : Nilai IKM sebesar 3,8 dari 3 responden pengguna jasa pelayanan 6. Juni : Nilai IKM sebesar 3,855 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan Sehingga sampai dengan periode Bulan Juni tahun 2025 nilai rata-rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,882 dari 27 responden dengan target Bulan Juni sebesar 3,870 sehingga capaian Bulan Juni sebesar 100,31% Penggunaan aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan oleh Divisi SSC oleh Direktorat lalu lintas dan angkutan pada tahun 2025 (novasi kinerja)	1. Pelaksanaan Survey IKM Periode Juli 2025 2. Akan dilakukan pembahasan trial and error untuk Aplikasi perizinan	Di Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelol Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.86	10.72	-	-	-	3.76	-	-	97.41%	-	Direktoral Keselamatan Perkeretaapian berkoordinasi dan berupaya untuk menggap peran serta SDM operator yang telah melaksanakan proses sertifikasi agar mengusi survey kepuasan masyarakat	Melakukan pemantauan berkala terkait rata-rata penilaian IKM sehingga capaian IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mencapai target	Di Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	-	3.85	-	-	99.74%	-	Survey IKM terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat, dengan hasil dari Bulan Januari - Juni 2025 adalah 3,85	Melaksanakan kegiatan berdasarkan timeline pada periode selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelol Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	-	3.58	-	-	100%	-	Sesuai target	rapat pembahasan	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPAIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelol Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	-	3.37	-	-	104.33%	-	IKM juni sebesar 3,37	Meningkatkan SPM stasiun	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	-	97.415	-	-	101.37%	-	a. Data capaian OTP bulan Maret 2025 merupakan data sementara karena data masih dalam proses pengolahan. b. Kinerja On Time Performance baik pada LRT Jabodetabek, c. Hasil dari Peningkatan jalur kereta api telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya lintas Padang - Bukit Putus - Pauluhima, Cikampek-Crebon, Kertajaya-Angjaringan, Maas-Cilacap, Solo-Wonorejo dan Kisan-Mambangmudu. d. Meningkatkan nilai TQI Kategori I dan II hampir pada setiap wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) berlatas pada BTP Bandung dan BTP Surabaya sehingga batas kecepatan laju kereta api dapat meningkat e. Peningkatan pengawasan perjalanan kereta api diantaranya pada momen penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan pengawasan intensif baik oleh Posko Terpadu maupun Posko di daerah f. Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan ketertambatan KA dapat diminimalisir terutama akan ketertambatan dari operasional persilangan penambatan/ pelepasan sarana/alamnya. g. Peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang sebagai pemantauan gangguan operasional perjalanan kereta api dan mendukung pencapaian OTP. h. Koordinasi dengan operator perkeretaapian dalam penanganan kejadian dalam perjalanan kereta api, sehingga gangguan operasional KA yang terjadi dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketepatan waktu, termasuk pemantauan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.	a. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember - Kalsat, Semarang - Gambirang, Cirebon - Kroyak) guna meningkatkan keselamatan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghidangi gangguan perjalanan kereta api. b. Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalogo, Medran - Binjalilevati) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/tamblesan dimana terdapat tapak yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api. d. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Natalu Tahun 2025.	Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	104	1140	95.42	8.37	-	-	-	104	-	-	108.99%	-	Trenpelayanan target program perjalanan KA bulan Juni 2025 (data sementara) yaitu 104% dengan realisasi perjalanan ka penumpang dari ka barang sebanyak 80.35% ka dengan jumlah sampai Juni (data sementara) adalah sebanyak 4329.997 ka dari jumlah target 422.985 ka.	1. Upaya Penyesuaian Aktivitas a. Menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Capexa dan Perjalanan di Luar Capexa. b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Capexa secara berkala setiap 3 bulan sekali. 2. Upaya Penyesuaian Kebijakan Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transporasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	93	1140	95.02	8.34	-	-	-	93.199	-	-	96.08%	-	Telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode I pada tanggal 28 - 30 April 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KA dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 93.199% dengan panjang jalur 5553,676 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5958,955 Km terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (Iyangan) dengan panjang 3502,818 Km b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 2050,858 Km 2. Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori II dan IV sebesar 6,801% dengan panjang jalur 405,279 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5985,955 Km terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori IV (waspada) dengan panjang 304,893 Km d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 14,386 Km 3. Dari hasil pengukuran periode IV 2024 dan periode I 2025 terdapat penurunan kategori sebagai berikut: Kategori I dari II periode IV sepanjang 5664,892 Km atau 95,42% dan pada periode I memurun menjadi sepanjang 5553,676 Km atau 93,199%. Kategori II dari II periode IV sepanjang 599,945 Km atau 4,548% dan pada periode I meningkat menjadi sepanjang 405,279 Km atau 6,801%. Telah dilaksanakan pengukuran TQI periode II pada Bulan Mei dan akan dilanjutkan pada bulan Juni 2025.	Akan dilaksanakan rapat monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi dari pengukuran TQI periode II tahun 2025 di Bulan Juli 2025. 98.08 %	Di Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Output	Volume	Target Anggaran	Volume	Realisasi Output	Volume	Realisasi Anggaran	Volume	Capaian Output			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapain (Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handai)	64	756	63.4	8.39	-	-	64.43	-	-	101.62%	-	ada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat target peningkatan sistem persinyalan yang termasuk dalam kategori Fasilitas Operasi dengan teknologi Handai sebesar 65,27 yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progres sampai dengan bulan Mei Tahun 2025. a. Telah dilakukan audiensi dengan PT. KAI terkait Evaluasi Dokumen Teknis Fasilitas Operasi pada Pembangunan Prasarana Perkeretaapain Umum Segmen 1 Lintas Lahat - Kertapati Sumatera Selatan pada tanggal 6 Februari 2025 dengan hasil akan dilakukan perbaikan gambar teknis sesuai dengan kondisi di lapangan b. Proses izin pembangunan pada bidang Asop dalam tahap evaluasi dokumen teknis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan perbaikan pada keserasamaan gambar sinyal dan cable plan dan 27 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan penambahan gambar tipikal layout ER c. Hasil perbaikan asistensi tanggal 27 Maret 2025 sudah disampaikan dan tidak ada koreksi lanjut c. Telah dilakukan pembatasan internal terkait penggunaan container untuk bangunan ER e. Proses tindak lanjut pengesahan menunggu Justifikasi Teknis penggunaan container untuk bangunan ER yang pada saat ini PT KAI masih dalam proses memastikan perlu atau tidaknya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung untuk ER dengan PUPR	Di Prasarana Perkeretaapain dan Balai Teknik Perkeretaapain
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapain	4	118	9.125	7.73	-	-	4.515	-	-	49.48%	-	Ujaya memperhatikan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Pelaksanaan angkutan perintis lintas Purwosari-Wonorejo, Muara Satu-Kuta Bangk, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare. b. Rencana penambahan sarana KRL baru pada 2025 antara lain : +11 transit impor dari China - 12 transit baru produksi PT INKA - 2 transit hasil retrofit dari PT INKA c. Langkah kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung). Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyusunan terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya: a. Penyusunan strategi/kebijakan: Pemberlakuan GAPEKA baru pada 1 Februari 2025 b. Penyusunan aktivitas dan anggaran: Revisi revisasi lobi efisiensi untuk kegiatan angkutan perintis di beberapa wilayah antara lain : Lintas Purwosari-Wonorejo, Muara Satu-KutaBangk, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare. c. Penyusunan/Pemilihan/Refocusing organisasi: Perubahan organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA yang dengan adanya penambahan Subdirektori Subdirektori Perkeretaapain dan Penguasaan Penyelenggaraan Perkeretaapain melalui Pemindahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	Di Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapain, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapain & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapain)	27	379	20,555	5.42	347.317.222.500	7,69	27,948	196.193.470.358	135.97%	56.49%	-	Ujaya untuk memperhatikan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah, antara lain: a. Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyusunan kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyusunan rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. b. Melakukan publikasi berkala dokumen kinerja pada aplikasi kinerja (e-SAKIP Revisi, e-Performance, SILAKI) dan eksekutif (website Diogen Perkeretaapain). c. Meningkatkan ketepatan revisi DIPDA dan akurasi Halaman III DIPDA dengan penerapan standar biaya keluaran (SBK). d. Meningkatkan kualitas pelaporan realisasi output pada SAKTI secara berkala. e. Mempercepat proses pensertifikasi aset tanah melalui sinergi dengan ATR/BPN dan aparat pemerintah daerah. f. Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan BMN yang potensial menjadi sumber PNBK. g. Melakukan sinkronisasi dan updating data kinerja serta kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK. h. Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/inkubasi/fungsional dan mengungkap sertifikat sebagai bukti kompetensi. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyusunan terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyusunan strategi/kebijakan: 1) Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyusunan kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyusunan rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. 2) Akselerasi proses pengalihan aset melalui percepatan sertifikasi tanah bekerja sama dengan ATR/BPN dan DJKN. b. Penyusunan aktivitas dan anggaran: 1) Penyusunan kebijakan efisiensi anggaran yang berfokus pada output prioritas dan berdampak langsung. 2) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI dan e-Kinerja melalui pelatihan teknis dan evaluasi berkala. c. Penyusunan kegiatan/penempatan pegawai: 1) Penempatan pegawai yang kompeten pada unit pengelola data kinerja, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung kualitas data dan pelaporan. 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, inkubasi fungsional/teknis, dan penyusunan rencana pengembangan karier berbasis kompetensi.	Setidgen Perkeretaapain
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapain (Indeks Profesional ASN)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan indeks profesional ASN sebesar 89,00 dan pada periode Triwulan I 2025 belum ditetapkan target, adapun target direncanakan akan direalisasikan pada periode Triwulan IV 2025. Hingga Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi kinerja masih dalam proses optimisasi nilai kinerja profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapain dengan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIASN BKN. Namun demikian, pada 7 Maret 2025 telah disampaikan nilai sementara indeks profesional ASN sebagaimana surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.1111/157/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Posisi 7 Maret 2025 dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapain masih dalam kategori "Rendah" atau indeks sebesar 64,36 dari 100.	Setidgen Perkeretaapain

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran	%	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%									
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100.000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Dijen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk menilai sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan belum terdapat informasi lanjut mengenai timeline dan penilaian tingkat kematangan layanan publik dan akan ditargetkan dapat selesai pada periode Triwulan IV Tahun 2025.	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain: 1. Pengembangan PLD Dijen Perkeretaapian sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis/modul layanan lainnya dengan optimisasi arsitektur sistem dan fitur guna dukungan manajemen dan teknis. 2. Pengembangan dan pemeliharaan modul layanan pada PLD Dijen Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penyesuaian standar arsitektur sistem. 3. Pelaksanaan monitoring progres kegiatan TIK secara berkala dan berkesinambungan melalui PLD Sekjen Kementerian Perhubungan, termasuk pendampingan melalui koordinasi dan pembahasan kemajuan kegiatan TIK dengan mengikutsertakan Pustadit Kementerian Perhubungan. 4. Koordinasi dan pendampingan tahapan clearance terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 berjalan sesuai dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi. 5. Pelaksanaan penataan domain pada aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.	Setidjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	Nilai	100.000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dijen Perkeretaapian)	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan nilai keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 90.00 dan pada periode Triwulan I 2025 belum ditetapkan target, adapun target direncanakan akan direalisasikan pada periode Triwulan IV 2025. Hingga Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi karena masih dalam proses penilaian. Namun, berbagai upaya telah mulai dilakukan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Beberapa di antaranya meliputi pembuatan konten informasi pada situs web resmi, peningkatan kualitas dan frekuensi komunikasi melalui media sosial, serta penguatan kapasitas unit pengelola layanan informasi publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.	Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal antara lain: 1. Pelaksanaan webinar teknis dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dengan turut mengundang perwakilan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai pembina dan pengawas terkait keterbukaan informasi publik; 2. Pelaksanaan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub guna pemantauan serta dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Setidjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Dijen Perkeretaapian)	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target Nilai AKIP Setidjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83.650 dan pada Triwulan I 2025 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan II baik oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut sesuai rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: 1. Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2025 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Dijen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Lanjutkan penyusunan dokumen Rencana Strategis Setidjen Perkeretaapian periode Tahun 2025-2029 dengan melibatkan Bagian/Direktorat/Balai di lingkungan Dijen Perkeretaapian serta stakeholder terkait (Pemda, operator dll) sehingga dokumen perencanaan sinkron antar stakeholder. 3. Penyusunan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Setidjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4. Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Kerja Termasuk Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya dan penyusunan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Dijen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dijen Perkeretaapian)	59	785	60	7.64	-	-	59.89	-	99.82%	-	Realisasi PNBP s.d juni 2025 sebesar Rp. 746.389.569.617 dari target sebesar Rp. 1.246.326.325.000.00 atau capaian sebesar 59,89%	Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya: 1. Diperlukan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga akan dibentuk Tim Efektif Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. 2. Diperlukan inventarisasi data penetapan status penggunaan (PSP) di lingkungan Dijen Perkeretaapian. 3. Terhadap target Program Percepatan Pensertifikasi BMN perlu dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikasi BMN masing-masing balai.	Setidjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	%	100.000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Dijen Perkeretaapian)	47	704	57.22	8.13	-	-	47.03	-	82.19%	-	Sampai dengan bulan Juni 2025 NKA sebesar 47.03 yang diperoleh dari 50% NK Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran : 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 4.72 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 89.34	Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja nilai kinerja anggaran antara lain: 1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPB). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada aplikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Sakter/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dijen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Dijen Perkeretaapian

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono

NIP. 198801182025211023

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	BTP Kelas I Medan	1	3	5	3	2	2	1	1	0	0	9	9	0,50
	Provinsi Aceh		Banda Aceh	Lhokseumawe			Lhokseumawe (NAD)							
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Langsa										
				KSN Danau Toba										
				Pematang Siantar										
				Tebingtinggi Kisaran										
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)					
			Pekanbaru											
2	BTP Kelas II Padang	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau						
				Bukit Tinggi										
				Payakumbuh										
				Sawahlunto										
	Provinsi Bengkulu													
3	BTP Kelas II Palembang	2	1	6	0	1	3	1	0	0	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi											
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuklinggau		Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin							
				Muara enim										
				Baturaja										
				Prabumulih										
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Lahat										
				Kotabumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung)							
						Bakauheni (Lampung)								
4	BTP Kelas I Jakarta	3	0	2	1	2	3	1	1	1	0	9	5	0,64
	Provinsi Banten	Serang		Rangkasbitung	Pandeglang	Merak (Banten)	Tanjung Lesung (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	Panimban (Banten)	Kampung Rambutan (Jakarta)				
						Bojanegara (Banten)								
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek				Tanjung Priok (DKI Jakarta)	Kali Baru (DKI Jakarta)							
	Provinsi Jawa Barat													
				Cikampek										
5	BTP Kelas I Bandung	2	0	4	2	0	2	0	1	0	0	6	5	0,55
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon		Sukabumi	Kadipaten		Cirebon (Jawa Barat)		Kertajati (Jawa Barat)					
	Bandung Raya		Indramayu	Pangandaran		Patimban (Jawa Barat)								
				Tasikmalaya										
				Cikampek-Cikopo										
6	BTP Kelas I Semarang	4	4	7	11	2	3	2	3	0	0	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)					
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Mas (Jawa Tengah)								
	Surakarta			Cepu	Magelang									
				Purwokerto	KSN Borobudur									
				kebumen										
				klaten										
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman						Kulonprogo (Yogyakarta)				
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang											
			Perkotaan Banjarmasin,Banjara baru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)					
				Palangkaraya		Balikpapan (Kalimantan Timur)								

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG LOKASI	BLM TERHUBUNG LOKASI	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG			
8	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	1	5	2	5	1	2	0	1	0	0	4	13	0,24
	Sulawesi Selatan	Maminasata		Pangkajene	Parepare	Garongkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)					
				Barru	Watampone									
					Bulukumba									
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)							
	Gorontalo		Gorontalo											
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso									
	Sulawesi Barat		Mamuju											
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka									
	DITJEN PERKERETAAPIAN	16	18	36	34	10	19	6	10			69	81	0,460
		Jumlah PKW/PKN/PSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030										150		

Jakarta, April 2025
DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

Ir. HENGKI ANGKASAWAN
NIP 196701081993031001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH
KEBERANGKATAN KA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA
10110

TEL: 0813 6001 3838

WEBSITE: <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0103/K2.2/VII/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di
Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : Juli 2025

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0264/K2/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 104,28%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 95,60%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:
 - 1) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
 - 2) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
 - 3) Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d. Juni 2025.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 97,80%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 96,20%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama April s.d. Juni 2025 pada MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,85%), dan LRT Jabodebek (99,66%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Bulan Juni 2025 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.



 Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 0103/K2.2/VII/2025

Tanggal : Juli 2025

I. Capaian Kinerja Tahun 2025

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.001	6.398	88.399	88.399	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.088	5.958	82.046	170.445	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.165	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.908	6.129	88.037	349.202	105,62%	103,61%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.026	6.769	90.795	439.997	105,62%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.259	87.975	527.972	105,59%	104,28%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,6%	86.209	678.868	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,6%	83.562	762.430	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.347	848.777	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,6%	83.428	932.205	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,6%	86.684	1.018.889	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.399	88.399	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.046	170.445	5.646	75.294	80.940	168.411	4.361	73.655	78.216	163.193	79.578	165.802	96,99%	97,28%
	Maret	96,2%	90.720	261.165	5.740	84.045	89.785	258.196	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.037	349.202	5.857	81.381	87.238	345.434	4.970	80.480	85.450	336.057	86.344	340.746	98,08%	97,58%
	Mei	96,2%	90.795	439.997	5.491	83.663	89.154	434.586	5.445	83.181	88.626	424.683	88.890	429.636	97,90%	97,85%
	Juni	96,2%	87.975	527.972	6.113	81.255	87.368	521.956	5.278	80.760	86.038	510.721	86.703	516.339	98,55%	97,80%
TW 3	Juli	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	September	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	November	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:



: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan II 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 72/K53/VII/2025

Yth : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal : Penyampaian Data Kecelakaan Pelaporan Kinerja Triwulan
II Tahun 2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/2/22/KI/DJKA/2025 pada tanggal 1 Juli 2025 perihal Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 :

A. Rincian kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April – Juni 2025).

NO	TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	LOKASI KEJADIAN	KORBAN	TIM INVESTIGASI
1.	Senin, 23 Juni 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokkan	Emplasemen Banjarsari	Nihil	DJKA / KNKT

* Detail Kejadian Terlampir

B. Rekapitulasi Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April – Juni 2025).

NO	JENIS KECELAKAAN	JUMLAH KECELAKAAN	JUMLAH KORBAN		
			LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL
1.	Tabrakan antar KA	0	0	0	0
2.	KA Terguling	0	0	0	0
3.	KA Anjlok	1	0	0	0
4.	KA Terbakar	0	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0

C. Penyebab Kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April - Juni 2025).

NO	JENIS KECELAKAAN	JUMLAH KECELAKAAN	PENYEBAB			
			SARANA	PRASARANA	SDM	MASIH DALAM ANALISIS
1.	Tabrakan antar KA	0	0	0	0	0
2.	KA Terguling	0	0	0	0	0
3.	KA Anjlok	1	0	0	0	1
4.	KA Terbakar	0	0	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0	1

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur, kami ucapkan terimakasih.



Riovano
NIP 198509062010121003

LAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN

1. Ringkasan Kejadian

a.	Hari/ tanggal Kejadian	:	Senin, 23 Juni 2025
b.	Jam kejadian	:	11.10 WIB
c.	Nomor dan Nama KA	:	KA 3335f Barasimpang
d.	Data Lokasi Kejadian Kecelakaan		
	1)	Kilometer Jalur Kereta Api	: Km 407+7/8
	2)	Petak Jalur Kereta Api	: Emplasemen Banjarsari (Bji)
	3)	Lintas Pelayanan	: Lahat – Muara Enim
	4)	Wilayah operasi	: Divisi Regional III Palembang
	5)	Penyelenggara Perkeretaapian	: PT Kereta Api Indonesia (Persero)
	6)	Wilayah Kerja BTP	: BTP Kelas I Palembang
	7)	Kecamatan, Kota/Kab.	: Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat
	8)	Koordinat	: 3°40'35"S , 103°41'54"E
e.	Jenis Kecelakaan	:	Anjlokkan
f.	Kronologi Kejadian Kecelakaan	:	
	• Pada pukul 09.40 WIB, KA 3335f berhenti luar biasa (BLB) untuk bersilang dengan KA 3886 di Stasiun Banjarsari dan baru diberangkatkan kembali pada pukul 11.10 WIB. Sesuai Gapeka 2025, KA 3335f seharusnya berjalan langsung di Stasiun Banjarsari pada pukul 17.22 untuk menuju ke Stasiun Merapi. • Pukul 11.10 WIB, rangkaian KA 3335f mengalami anjlokkan 4 as di Km 407+7/8 di Emplasemen Banjarsari saat berjalan menuju Stasiun Merapi. • Pada pukul 11.13 WIB, PPKA Banjarsari melakukan <i>emergency call</i> dikarenakan adanya debu tebal di belakang lokomotif KA 3335f. • Anjlokkan terjadi pada GD 4212427 yang merupakan gerbong pertama di belakang lokomotif CC 2061502 (lokomotif kedua) pada rangkaian KA 3335f.		

2. Data Faktual

a.	Data Prasarana KA		
	1)	Jumlah Jalur	: 3 Jalur
	2)	Tipe Rel	: R54

3)	Jenis Bantalan	:	Beton
4)	Jenis Penambat	:	Elastis E-Clip (pandrol)
5)	Titik Awal Naik (TAN)	:	Km 407+785 (sebelum wesel 5)
6)	Titik Awal jatuh (TAJ)	:	Km 407 +790 (sebelum wesel 5)
7)	Titik Berhenti KA	:	Km 407+824 (wesel 5)
8)	Topografi	:	Perkebunan
9)	Kecamatan, Kota/Kab.	:	Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat
10)	Keterangan tambahan	:	
		a) Stasiun Banjarsari telah memiliki Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 lintas Lahat – Kertapati Sumatera Selatan kepada PT kereta Api Indonesia (Persero) dengan pengesahan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP – DJKA 151 Tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang berlaku selama 5 tahun. Dalam detail perizinan tersebut, tercantum pula Pembangunan Emplasemen dan Container Yard Stasiun Banjarsari. Container yard digunakan untuk tempat bongkar-muat kontainer modifikasi bagi KA angkutan batu bara. Pemberian izin Pembangunan ini diberikan sesuai dengan: - Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Segmen I Wilayah Lahat Sampai Kertapati di Provinsi Sumatera Selatan Nomor HK.201/1/24/DJKA/2023 pada tanggal 29 September 2023; - Surat <i>Executive President of Strategic Business Planning and Investment</i> PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KI.102/1/11/KA-2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Undangan Rapat Konsinyering Evaluasi Dokumen Teknis Izin Pembangunan untuk Prasarana Perkeretaapian Umum Wilayah Segmen 1 Lintas Lahat s.d. Kertapati Wilayah Divre III Palembang - Berita Acara Nomor BA-K32DJKA 1 Tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Evaluasi Dokumen Teknis Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Wilayah Segmen 1 Lintas Lahat sampai dengan Kertapati Divre III Palembang; - Surat a.n. <i>Managing Director of Business Development and Institutional Relations</i> PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KI.102/I/1/KA-2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Pengajuan Kembali Izin Pembangunan	

		Prasarana Perkeretaapian yang Masuk dalam Ruang Lingkup Perjanjian Konsesi Tahun 2023.			
		b) <i>Detailed design</i> Stasiun Banjarsari, yang merupakan bagian dokumen perancangan gambar desain memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun (denah, tapak , dan potongan) dengan skala gambar. DED Pembangunan <i>Longsiding</i> Emplasemen Banjarsari antara Lahat - Muarenim sudah disahkan pada tahun 2019 oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil <i>Review Detail Engineering Design</i> tanggal 19 Desember 2018 yang diajukan oleh Direktur Pengelolaan Prasarana PT. Kereta Api Indonesia (Persero);			
		c) Pengujian pertama setelah selesainya pembangunan <i>longsiding</i> emplasemen Banjarsari dan <i>container yard</i> belum dilakukan.			
d.	Data Sarana KA		:		
	1)	Nomor dan Nama KA	:	KA 3335f Bara Simpang	
	2)	Susunan rangkaian	:		
				1. CC 2061607 2. CC 2061502 3. GD 4212427 - anjlok 4 as 4. GD 420718 5. GD 4212102 6. GD 4212305 7. GD 4212359 8. GD 4214026 9. GD 4212256 10. GD 4212338 11. GD 4214082 12. GD 4213182 13. GD 4214029 14. GD 4214024 15. GD 4214053 16. GD 4212342 17. GD 4212511 18. GD 4213178 19. GD 4211213 20. GD 4212316	33. GD 4211217 34. GD 4211211 35. GD 4212451 36. GD 4212306 37. GD 4211218 38. GD 4211241 39. GD 4212248 40. GD 4214052 41. GD 4212457 42. GD 4211245 43. GD 4214030 44. GD 4214067 45. GD 4212477 46. GD 4212308 47. GD 4211173 48. GD 4212320 49. GD 4212255 50. GD 4211228

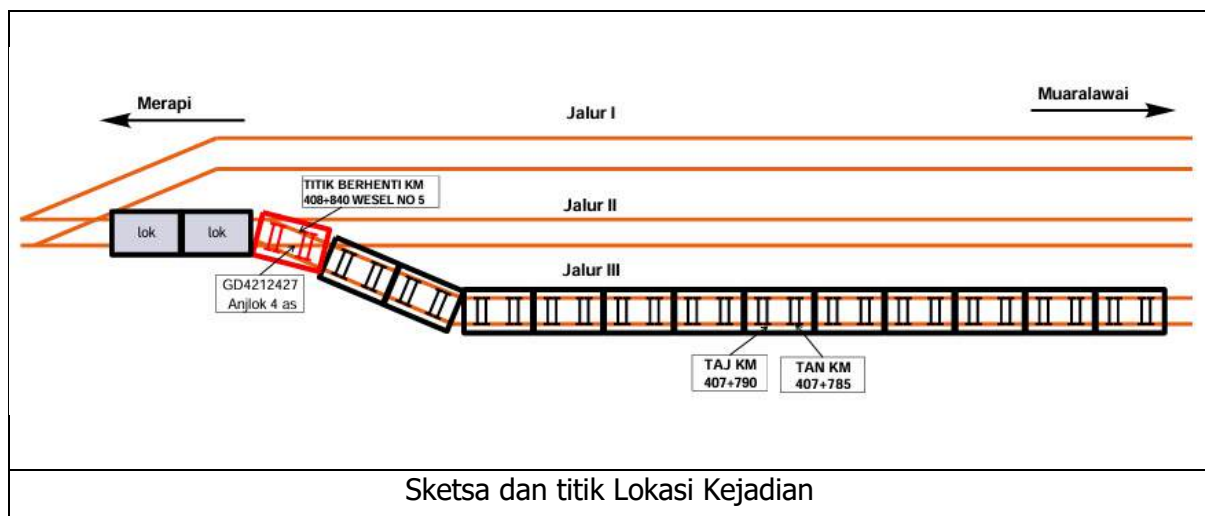
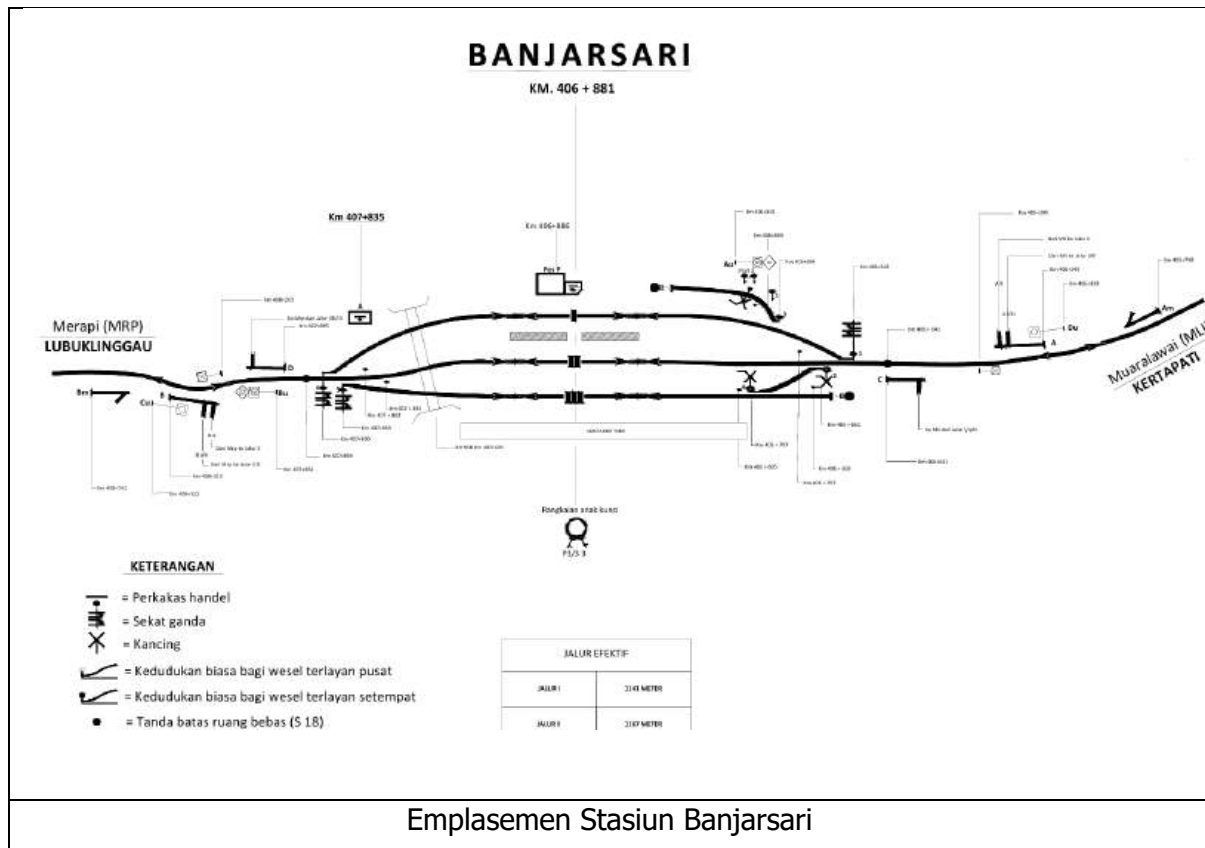
				21. GD 4212309 22. GD 4211244 23. GD 4212258 24. GD 4211234 25. GD 4211238 26. GD 4212226 27. GD 4213172 28. GD 421177 29. GD 4212317 30. GD 4212243 31. GD 4212300 32. GD 4214062	51. GD 4214005 52. GD 4211134 53. GD 4214022 54. GD 4214025 55. GD 4212480 56. GD 4211221 57. GD 4211209 58. GD 4214014 59. GD 4214008 60. GD 4212514 61. GD 4212313 62. GD 4214060
	3)	Keterangan tambahan	:		
		a) Telah dilakukan uji berkala tahunan terhadap GD 4212427 pada tanggal 21 November 2024 dan dinyatakan Telah Sesuai oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (BA Nomor: 374/BA/BP-UJI/SAR-II/IX/2024) serta telah diterbitkan sertifikat kelaikan terhadap sarana oleh Direktur Sarana Perkeretaapian dengan Nomor KA.405/5b-06933/DJKA/12/XI-2024. b) Pengujian statis dilaksanakan di Depo Gerbong Simpang, PUG Kertapati, dan Stasiun Serdang pada tanggal 18 s.d. 21 November 2024, item pengujian yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengujian dimensi; b. Pengujian ruang batas sarana; c. Pengujian berat; d. Pengujian pengereman; e. Pengujian keretakan; dan f. Pengujian pembebanan. c) Pengujian dinamis dilaksanakan di Lintas Stasiun Simpang s.d. Stasiun Serdang (PP) pada tanggal 19 s.d 21 November 2024, item pengujian yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengujian pengereman; b. Pengujian temperatur; c. Pongujian getaran; dan d. Pengujian pembebanan.			

		d) Sertifikat Uji Berkala terhadap GDB 4212427 diberikan sesuai dengan hasil Perawatan/Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024 Balai Yasa Lahat.		
d.	Data Operasional		:	
		-		
e.	Data SDM			
	1)	Masinis	:	Kresna Listiawan
		NIPP	:	61797
		Kompetensi	:	Awak Sarana Perkeretaapian
		Tingkat	:	ASP Manual Muda
		Kodifikasi Sertifikat	:	ASP.030192.04402
		Masa berlaku	:	5 April 2026
				 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KECAKAPAN Nama : KRESNA LISTIAWAN Tempat/Tgl. Lahir : PALEMBANG, 03 - 01 - 1992 Kategori : AWAK SARANA PERKERETAAPIAN Bidang : --- Tingkat : ASP MANUAL MUDA Unit Kerja : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Tanggal Berlaku s.d : 05 - 04 - 2026 Kodifikasi Sertifikat : ASP.030192.04402 ASP Balai Sertifikasi Elektronik JUMARDI Pembinas Utama Muda (IV/0) 198903081989031002
	2)	Asisten Masinis	:	Ivan Nur Hidayat
		NIPP	:	74409
		Kompetensi	:	Awak Sarana Perkeretaapian
		Tingkat	:	ASP Manual Pertama
		Kodifikasi Sertifikat	:	ASP.191102.51137
		Masa berlaku	:	21 Desember 2027
				 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KECAKAPAN Nama : IVAN NUR HIDAYAT Tempat/Tgl. Lahir : KEDIRI, 19 - 11 - 2002 Kategori : AWAK SARANA PERKERETAAPIAN Bidang : --- Tingkat : ASP MANUAL PERTAMA Unit Kerja : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Tanggal Berlaku s.d : 21 - 12 - 2027 Kodifikasi Sertifikat : ASP.191102.51137 ASP Balai Sertifikasi Elektronik JUMARDI Pembinas Utama Muda (IV/0) 198903081989031002
h.	Tindak Lanjut		:	

- Pukul 11.20 WIB, berkoordinasi dengan petugas Sarana Banjarsari
- Pukul 11.43 WIB, petugas sarana tiba di lokasi
- Pukul 12.55 WIB, dilakukan langsiran untuk melepas lokomotif dari rangkaian KA 3335f
- Pukul 12.55 WIB s/d 13.08 WIB, dilakukan langsiran KA 3883 dari jalur I ke jalur II Emplasemen Stasiun Banjarsari untuk persiapan langsiran lokomotif rangkaian KA 3335f dari jalur III
- Pukul 13.10 WIB s/d 13.15 WIB, langsiran lokomotif dari jalur I ke jalur III Stasiun Banjarsari
- Pukul 13.15 s/d 13.18 WIB, langsiran untuk melepas gerbong datar GD 4212427 yang anjlok dari rangkaian KA 3335f
- Pukul 14.10 WIB, dilakukan pengangkatan GD 421247 yang anjlok (estimasi 60 menit)
- Pukul 15.00 WIB, selesai pengangkatan 2 as di gerbong GD 421247
- Pukul 15.24 WIB, selesai pengangkatan keseluruhan as yang anjlok di gerbong GD 421247



Lokasi Kejadian Anjlok KA 3335f di Km 407+7/8 emplasemen Banjarsari



3. Dampak Kejadian Kecelakaan

a. Gangguan Operasional Kereta Api

KA terganggu sejumlah 6 rangkaian KA, yaitu:

1. KA 3335 (Barasimpang) di Stasiun Banjarsari pukul 09:40 s/d evakuasi sarana selesai.
2. KA 3883 (Baraserdang) di Stasiun Banjarsari pukul 10:27 s/d 17.00 evakuasi sarana selesai.

3. KA S9 (Bukit Serelo) di Stasiun Muaraenim pukul 11:46 s/d 13:10, andil keterlambatan 84 menit dan KA S9 (Bukit Serelo) tiba di Stasiun Banjarsari pukul 13:35 s/d 13:37, andil keterlambatan 2 menit
4. KA S10 (Bukit Serelo) di Stasiun Lahat pukul 12:25 s/d 13:36, Andil keterlambatan 71 menit
5. KA 3563 (Simpangrapi) di Stasiun Muaralawai pukul 11:10 s/d 15:46, Andil keterlambatan 276 menit
6. KA 3332 (Barasimpang) di Stasiun Merapi pukul 11:41 s/d 14:34, Andil keterlambatan 113 menit

b. Prasarana Kereta Api



Titik awal naik KA 3335f di Km 407+785 emplasemen Banjarsari



Titik awal jatuh KA 3335f di Km 407+790 emplasemen Banjarsari

c. Sarana Kereta Api :





d. Korban Jiwa :

Tidak Ada

4. Indikasi Faktor Penyebab

a.	Prasarana
	1) Riwayat Perawatan Jalur 3 (arah Stasiun Merapi) : • 25 Februari 2025 dilakukan pemecokan menggunakan mesin KPJR, MTT, dan CSM; • 29 Maret 2025 dilakukan kegiatan angkat listering. 2) Kondisi Fisik Lokasi Kejadian : • Pada lokasi amblesan terdapat ganjal kayu pada Jalur 3, km 407+7/8, (diduga untuk mengatasi amblesan); • Perbedaan elevasi antara Jalur 2 dan Jalur 3 menuju wesel 5; • Ditemukan Lengkung semu yang memasuki area wesel 5 dari Jalur 3 tidak sesuai ketentuan dalam Permenhub Nomor PM 60 tahun 2012 tentang Persyaratan teknis jalur kereta api.
b.	Sarana
	Kemungkinan penyebab dari sisi sarana masih dalam proses pemeriksaan dan analisis, belum dapat disimpulkan kontribusinya terhadap kejadian.
c.	Kepatuhan Pelaporan Risiko
	Ditemukan kurangnya kepatuhan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang dalam menyampaikan laporan 10 prioritas risiko tinggi IBPR setiap bulan kepada BTP Palembang, hal ini menghambat identifikasi dini terhadap potensi risiko.
d.	Kesimpulan Sementara
	Indikasi awal mengarah pada kondisi prasarana yang tidak sesuai standar (amblesan, perbedaan elevasi, dan lengkung semu), kegiatan pemeriksaan dan analisis lanjutan masih berjalan untuk menentukan faktor – faktor yang berkontribusi lainnya.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



@ditjenperkeretaapian



djka.kemenhub.go.id

Survei

Survei

IKM/ IPK

IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Juni 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Mei 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

<

>

1 - 20 dari ?

Copy

Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.38/17.50

99.30/1003.97/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.17/17.50

98.13/1003.93/4

Responden

8

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

IKM/ IPK

Survei

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Informasi

Persyaratan

Prosedur/Alur

Waktu Penyelesaian

Tarif/Biaya

Sarana Prasarana

Respon

Konsultasi dan Pengaduan

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungli

Calo

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

Survei

17.38/17.50

99.30/100

3.97/4

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Informasi

Persyaratan

Prosedur/Alur

Waktu Penyelesaian

Tarif/Biaya

Sarana Prasarana

Respon

Konsultasi dan Pengaduan

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Informasi

Konsultasi dan Pengaduan

Respon

Sarana Prasarana

Tarif/Biaya

Waktu Penyelesaian

Persyaratan

Prosedur/Alur

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Selisih	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Selisih	Lokus Provinsi/ Wilayah	Selisih	Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
Informasi	17.50	16.79	0.71	17.15	0.35	16.89	0.61	17.15
Persyaratan	17.17	16.79	0.38	17.04	0.13	16.86	0.31	17.04
Prosedur/Alur	17.50	16.82	0.68	17.18	0.32	16.86	0.64	17.18
Waktu Penyelesaian	17.50	16.76	0.74	17.17	0.33	16.81	0.69	17.17
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	17.13	0.37	16.86	0.64	17.13
Sarana Prasarana	17.50	16.74	0.76	17.14	0.36	16.84	0.66	17.14
Respon	17.17	16.82	0.35	17.01	0.16	16.88	0.29	17.01
Konsultasi dan Pengaduan	17.17	16.78	0.39	16.99	0.18	16.82	0.35	16.99

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

Survei

17.17/17.50

98.13/100

3.93/4

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungli

Calo

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Diskriminasi

Calo

Kecurangan

Pungli

Gratifikasi

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Selisih	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Selisih	Lokus Provinsi/ Wilayah	Selisih	Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
Diskriminasi	17.17	16.88	0.29	17.06	0.11	16.83	0.34	17.06
Kecurangan	17.17	16.87	0.30	17.06	0.11	16.83	0.34	17.06
Gratifikasi	17.17	16.88	0.29	17.05	0.12	16.82	0.35	17.05
Pungli	17.17	16.92	0.25	17.06	0.11	17.01	0.16	17.06
Calo	17.17	16.86	0.31	17.08	0.09	16.88	0.29	17.08

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

Survei

PERANGKAT

Android

Apple iPhone

Samsung

PENYEDIA INTERNET (ISP)

Survei

Penyedia Internet (ISP)

Departemen Luar Negeri Indonesia

PT. Telekomunikasi Selular

PT. Telekomunikasi Selular

Excelcomindo Pratama (Network Access Provider)

BROWSER

Survei

Safari

Chrome

OPERATING SYSTEM

Survei

Android

iOS

PROFIL RESPONDEN

Survei

PENCACAHAN

Survei

Self Enumerator

Pengguna Aplikasi

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

Survei

Tidak

Ya

PERBAIKAN

Survei

Kualitas Sarana Prasarana

Sistem Informasi dan Pelayanan Publik

Tidak ada yang perlu diperbaiki

JENIS KELAMIN

Survei

Perempuan

USIA

Survei

Usia

18-20 Tahun

41-50 Tahun

204 Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Ver. 7.2.0

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- < >
- 1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK APRIL 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

14.88/17.50

85/100 3.40/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.40/17.50

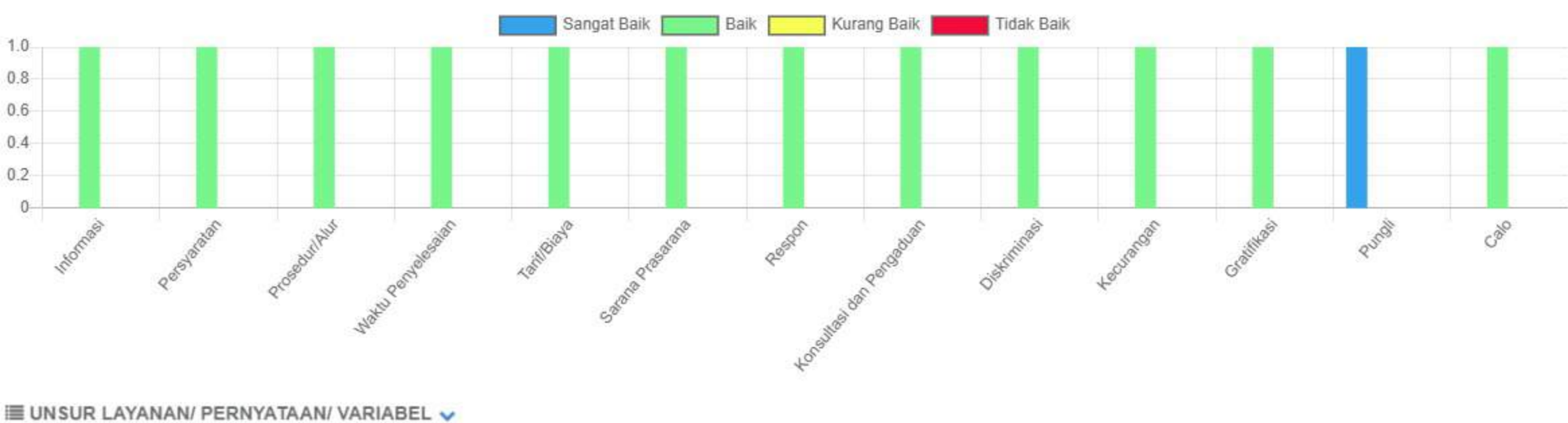
88/100 3.52/4

Respon

1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

14.88/17.50

85/100

3.40/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	14.88	16.79	-1.91	16.63	-1.75	16.89	-2.01	16.63
Persyaratan	14.88	16.79	-1.91	16.63	-1.75	16.86	-1.98	16.63
Prosedur/Alur	14.88	16.82	-1.94	16.63	-1.75	16.86	-1.98	16.63
Waktu Penyelesaian	14.88	16.76	-1.88	16.63	-1.75	16.81	-1.93	16.63
Tarif/Biaya	14.88	16.80	-1.92	16.73	-1.85	16.86	-1.98	16.73
Sarana Prasarana	14.88	16.74	-1.86	16.63	-1.75	16.84	-1.96	16.63
Respon	14.88	16.82	-1.94	16.73	-1.85	16.88	-2	16.73
Konsultasi dan Pengaduan	14.88	16.78	-1.90	16.63	-1.75	16.82	-1.94	16.63

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.40/17.50

88/100

3.52/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



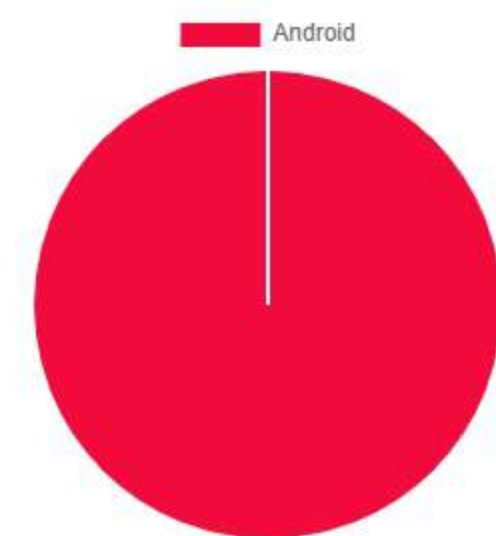
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

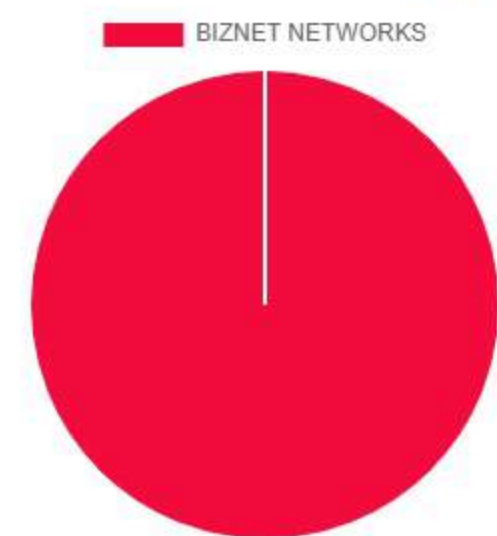
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	14.88	16.88	-2	16.63	-1.75	16.83	-1.95	16.63
Kecurangan	14.88	16.87	-1.99	16.63	-1.75	16.83	-1.95	16.63
Gratifikasi	14.88	16.88	-2	16.73	-1.85	16.82	-1.94	16.73
Pungli	17.50	16.92	0.58	17.39	0.11	17.01	0.49	17.39
Calo	14.88	16.86	-1.98	16.73	-1.85	16.88	-2	16.73

PENGUNAAN PERANGKAT

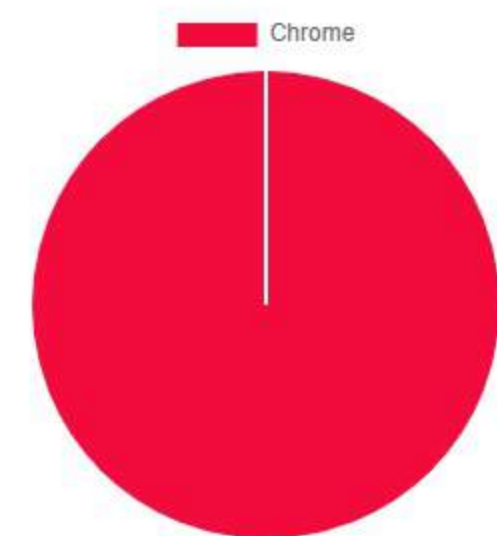
PERANGKAT



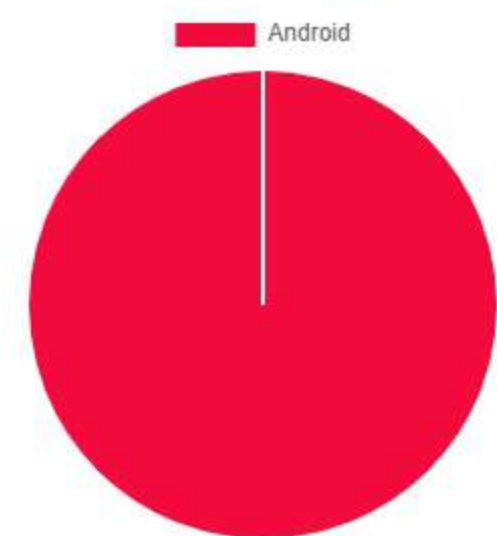
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

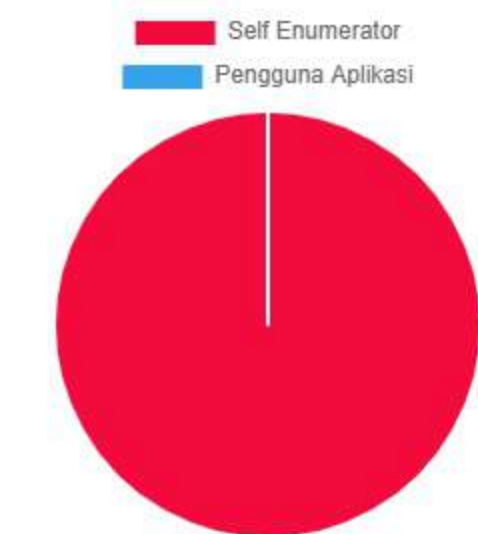


OPERATING SYSTEM

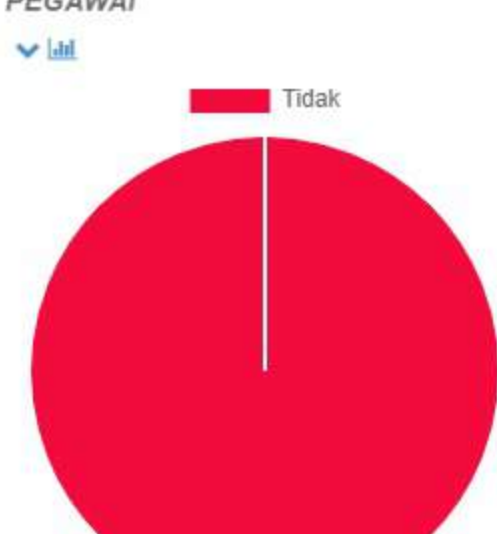


PROFIL RESPONDEN

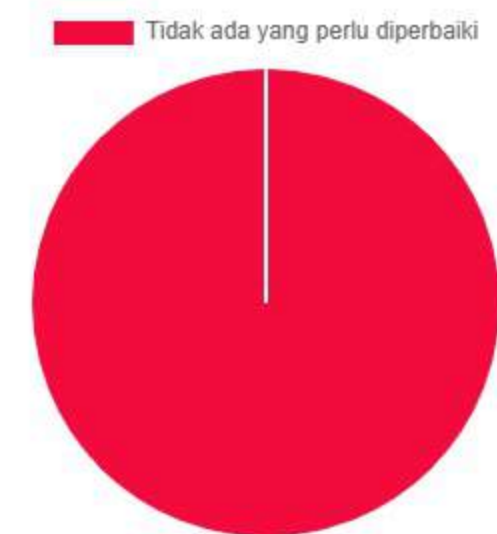
PENCACAHAN



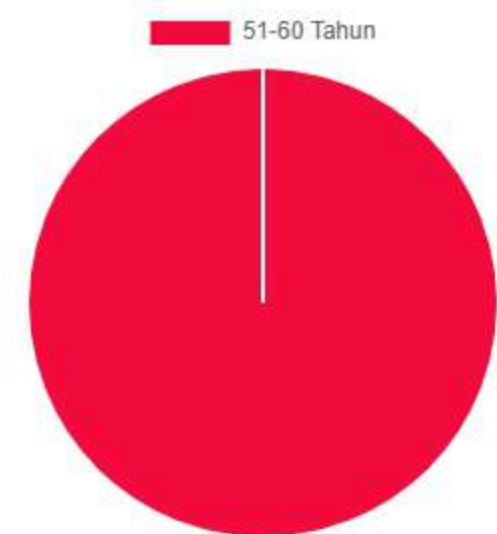
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



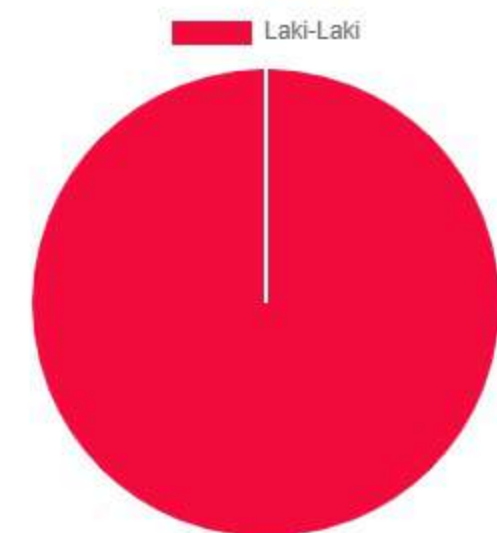
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Survei

-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025

SURVEI IKM-IPK APRIL 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50

100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100 4/4

Responden

4

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



SURVEI IKM-IPK APRIL 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50

100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100 4/4

Responden

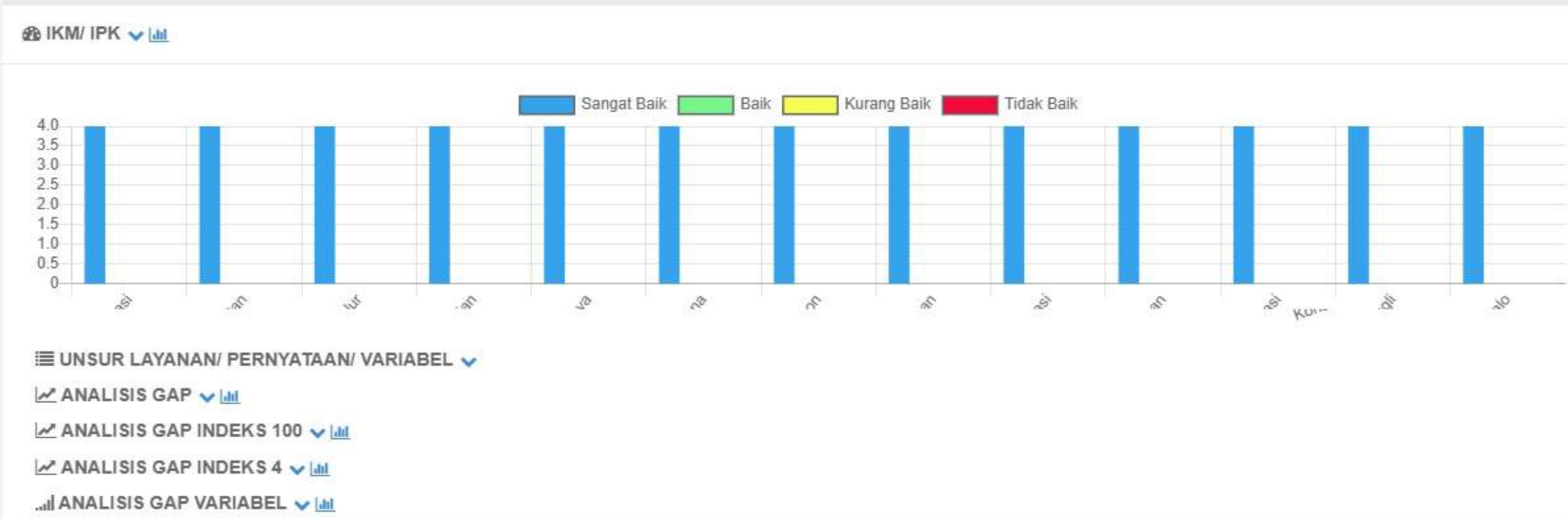
4

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Lokus Provisi/ Wilayah

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Provisi/ Wilayah
Informasi	17.50	16.79	0.71	16.63	0.87
Persyaratan	17.50	16.79	0.71	16.63	0.87
Prosedur/Alur	17.50	16.82	0.68	16.63	0.87
Waktu Penyelesaian	17.50	16.76	0.74	16.63	0.87
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	16.73	0.77
Sarana Prasarana	17.50	16.74	0.76	16.63	0.87
Respon	17.50	16.82	0.68	16.73	0.77
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.78	0.72	16.63	0.87

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100

4/4

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Lokus Provisi/ Wilayah

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Provisi/ Wilayah
Diskriminasi	17.50	16.88	0.62	16.63	0.87
Kecurangan	17.50	16.87	0.63	16.63	0.87
Gratifikasi	17.50	16.88	0.62	16.73	0.77
Pungli	17.50	16.92	0.58	17.39	0.11
Calo	17.50	16.86	0.64	16.73	0.77

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

OPERATING SYSTEM

Apple iPhone

Samsung

Penyedia Internet (ISP)

Chrome

Safari

Android

iOS

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN

USIA

JENIS KELAMIN

Self Enumerator

Pengguna Aplikasi

Tidak

Profesionalisme SDM

Tidak ada yang perlu diperbaiki

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Ver. 7.2.0

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

-
-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- < >
- 1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK MEI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.63/17.50

95/100 3.80/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.33/17.50

99/100 3.96/4

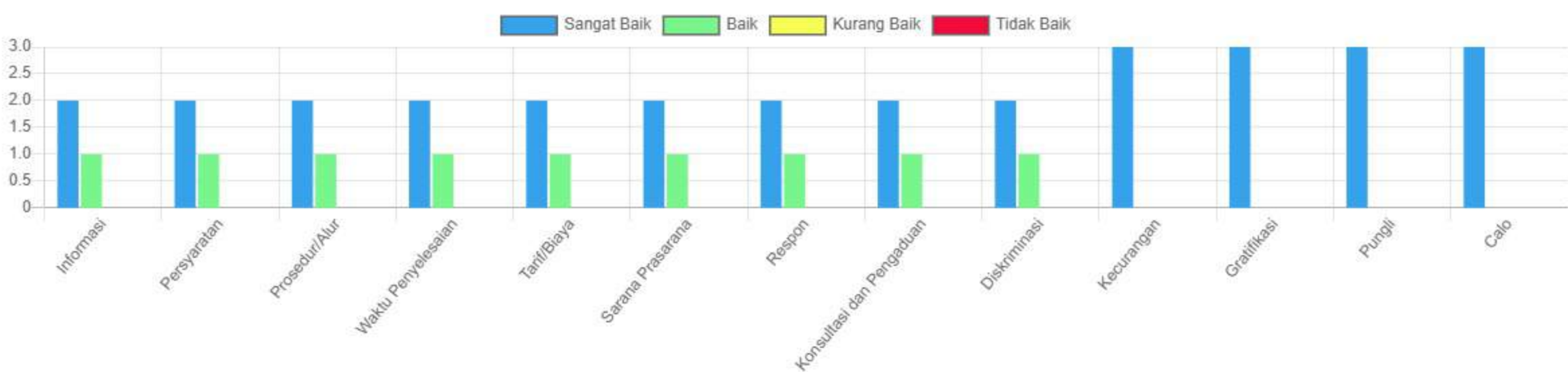


Responden

3

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



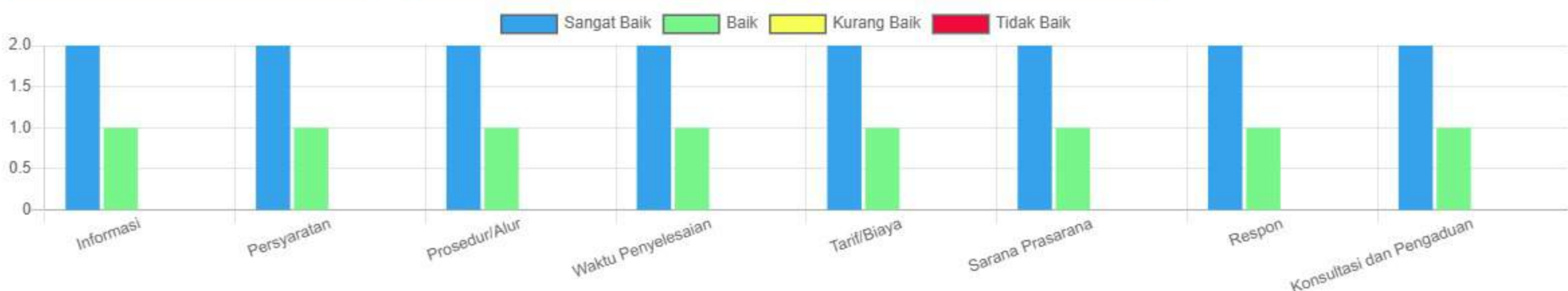
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.63/17.50

95/100

3.80/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Locus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	16.63	16.77	-0.14	16.86	-0.23	16.92	-0.29	16.86
Persyaratan	16.63	16.80	-0.17	16.86	-0.23	16.90	-0.27	16.86
Prosedur/Alur	16.63	16.79	-0.16	17.03	-0.40	16.96	-0.33	17.03
Waktu Penyelesaian	16.63	16.78	-0.15	17.03	-0.40	16.88	-0.25	17.03
Tarif/Biaya	16.63	16.80	-0.17	17.03	-0.40	16.97	-0.34	17.03
Sarana Prasarana	16.63	16.74	-0.11	16.86	-0.23	16.94	-0.31	16.86
Respon	16.63	16.80	-0.17	17.21	-0.58	16.95	-0.32	17.21
Konsultasi dan Pengaduan	16.63	16.73	-0.10	16.86	-0.23	16.91	-0.28	16.86

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.33/17.50

99/100

3.96/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



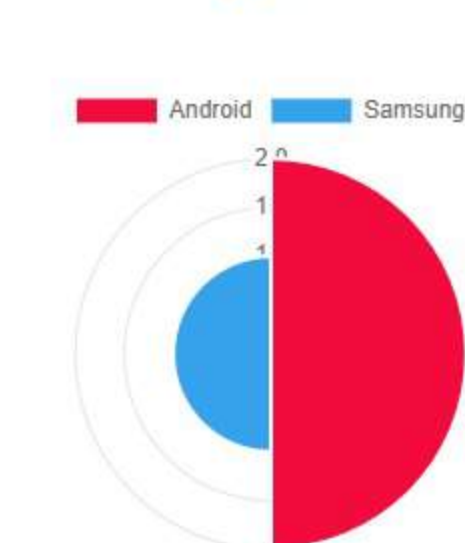
Variabel	Indeks Locus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	16.63	16.87	-0.24	17.03	-0.40	17.05	-0.42	17.03
Kecurangan	17.50	16.89	0.61	17.50	0	17.11	0.39	17.50
Gratifikasi	17.50	16.89	0.61	17.50	0	17.13	0.37	17.50
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.33	0.17	17.19	0.31	17.33
Calo	17.50	16.88	0.62	17.50	0	17.14	0.36	17.50

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

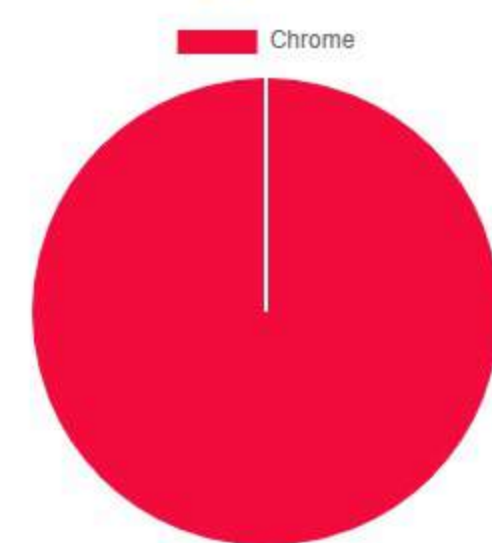
PERANGKAT



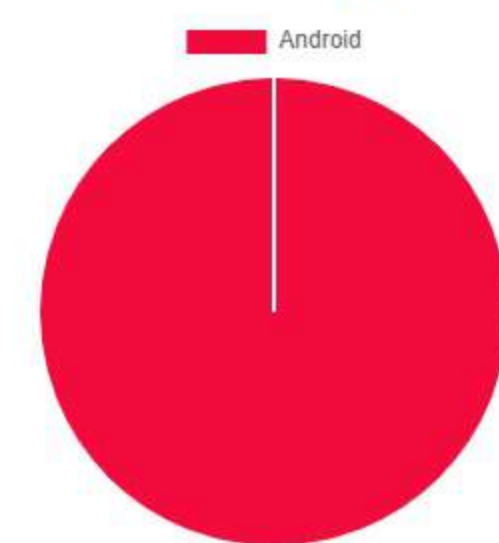
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

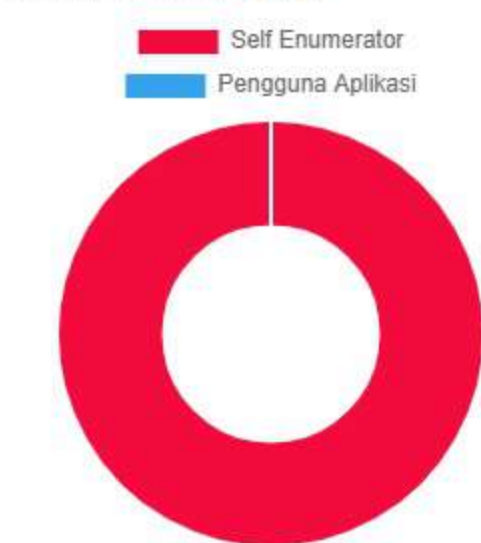


OPERATING SYSTEM

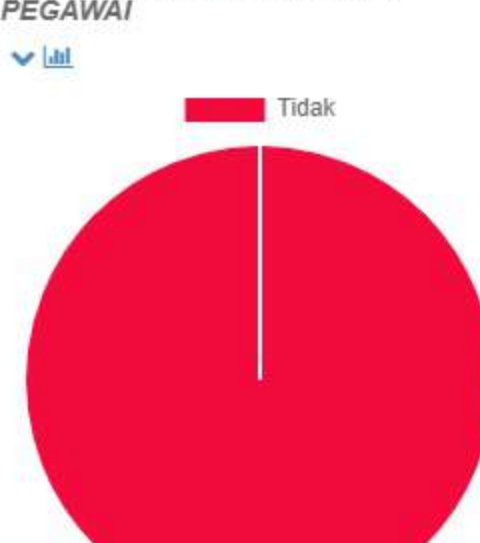


PROFIL RESPONDEN

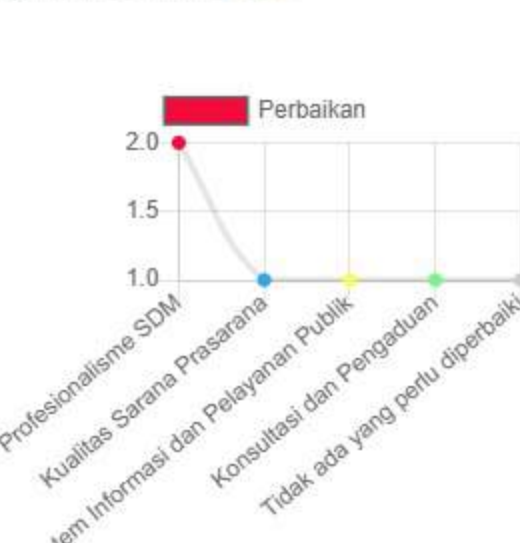
PENCACAHAN



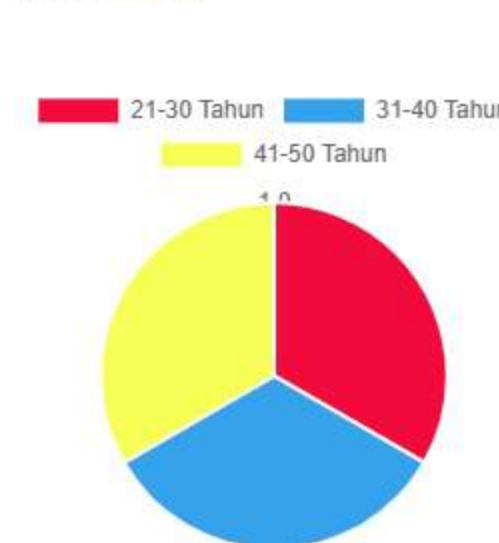
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



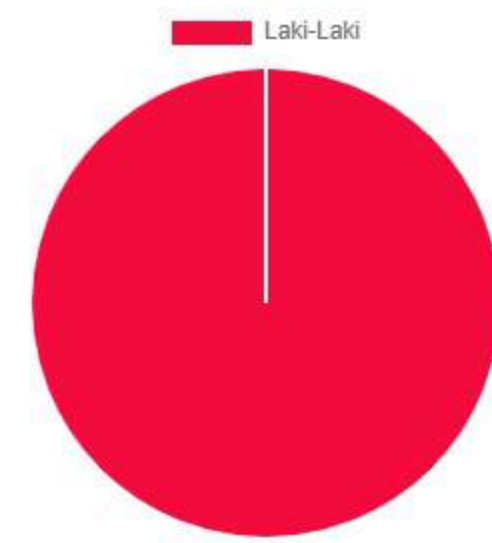
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Juni 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Mei 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK MEI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50

100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100 4/4

Responden

2

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK

Variable	Score
Informasi	2.0
Persyaratan	2.0
Prosedur/Akur	2.0
Waktu Penyelesaian	2.0
Tarif/Biaya	2.0
Sarana Prasarana	2.0
Respon	2.0
Konsultasi dan Pengaduan	2.0
Dakimnisi	2.0
Kecurangan	2.0
Gratifikasi	2.0
Pungli	2.0
Calo	2.0

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50

100/100

4/4

Variable	Score
Informasi	2.0
Persyaratan	2.0
Prosedur/Akur	2.0
Waktu Penyelesaian	2.0
Tarif/Biaya	2.0
Sarana Prasarana	2.0
Respon	2.0
Konsultasi dan Pengaduan	2.0

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Variable	Indeks Lokus	Wilayah Bebas dari Korupsi	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah
Informasi	17.50	16.77	0.73	16.86	0.64
Persyaratan	17.50	16.80	0.70	16.86	0.64
Prosedur/Akur	17.50	16.79	0.71	17.03	0.47
Waktu Penyelesaian	17.50	16.78	0.72	17.03	0.47
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	17.03	0.47
Sarana Prasarana	17.50	16.74	0.76	16.86	0.64
Respon	17.50	16.80	0.70	17.21	0.29
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.73	0.77	16.86	0.64

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100

4/4

Variable	Score
Diskriminasi	2.0
Kecurangan	2.0
Gratifikasi	2.0
Pungli	2.0
Calo	2.0

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Variable	Indeks Lokus	Wilayah Bebas dari Korupsi	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah
Diskriminasi	17.50	16.87	0.63	17.03	0.47
Kecurangan	17.50	16.89	0.61	17.50	0
Gratifikasi	17.50	16.89	0.61	17.50	0
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.33	0.17
Calo	17.50	16.88	0.62	17.50	0

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

OPERATING SYSTEM

Android

Apple iPhone

PT. Telekomunikasi Selular

Chrome

Safari

Android

iOS

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN

USIA

JENIS KELAMIN

Self Enumerator

Pengguna Aplikasi

Tidak

Tidak ada yang perlu diperbaiki

31-40 Tahun

Laki-Laki

Perempuan

204 Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Ver. 7.2.0

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Juni 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Mei 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK JUNI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.75/17.50

95.74/100

3.83/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.88/17.50

96.48/100

3.86/4



Responden

329

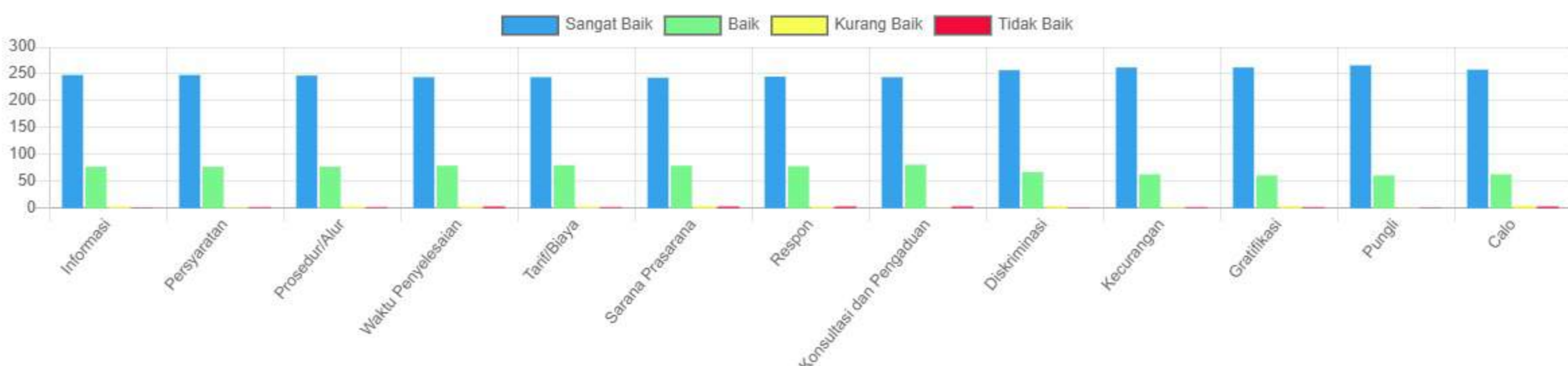
Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)



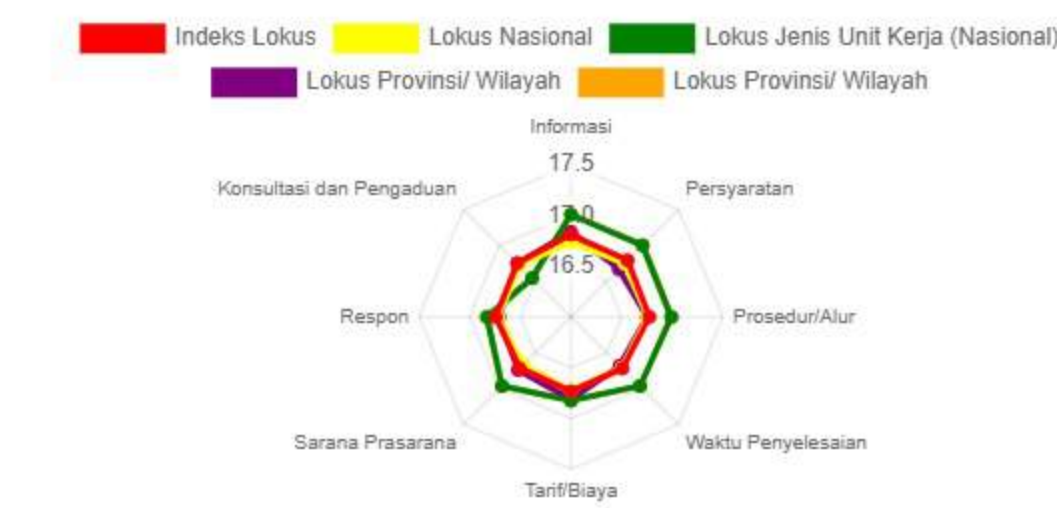
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	16.81	16.74	0.07	17.01	-0.20	16.84	-0.03	17.01
Persyaratan	16.79	16.75	0.04	17	-0.21	16.67	0.12	17
Prosedur/Alur	16.77	16.76	0.01	16.99	-0.22	16.75	0.02	16.99
Waktu Penyelesaian	16.72	16.71	0.01	16.96	-0.24	16.68	0.04	16.96
Tarif/Biaya	16.73	16.72	0.01	16.83	-0.10	16.81	-0.08	16.83
Sarana Prasarana	16.72	16.67	0.05	16.96	-0.24	16.74	-0.02	16.96
Respon	16.74	16.72	0.02	16.83	-0.09	16.71	0.03	16.83
Konsultasi dan Pengaduan	16.75	16.72	0.03	16.54	0.21	16.75	0	16.54

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)



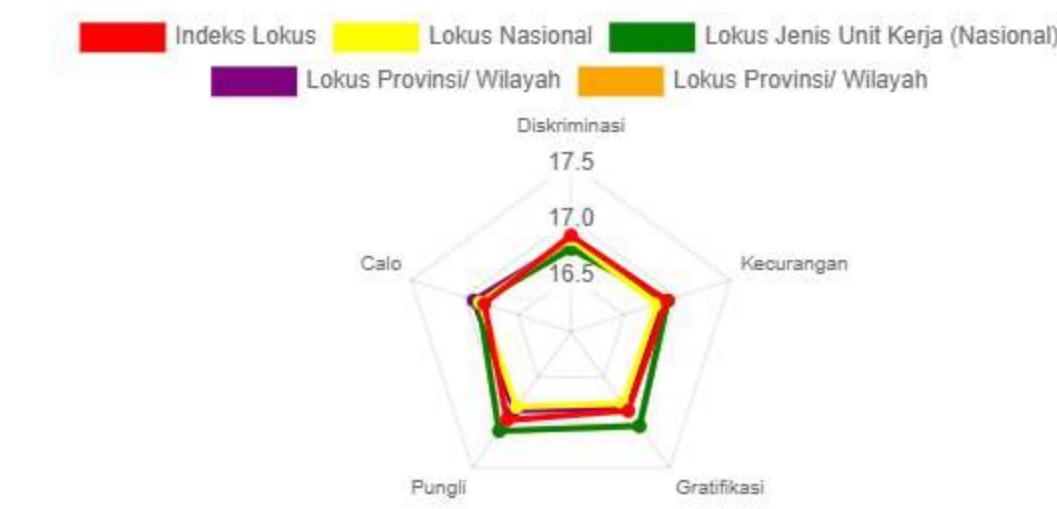
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



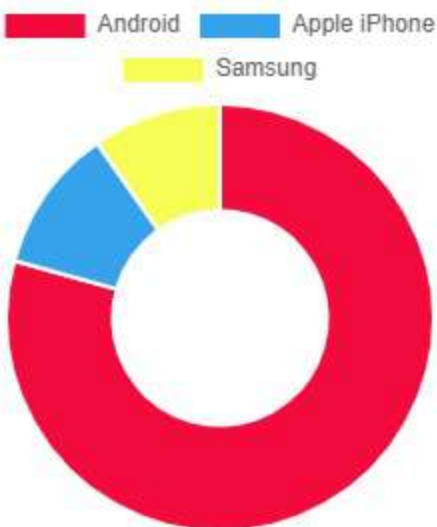
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

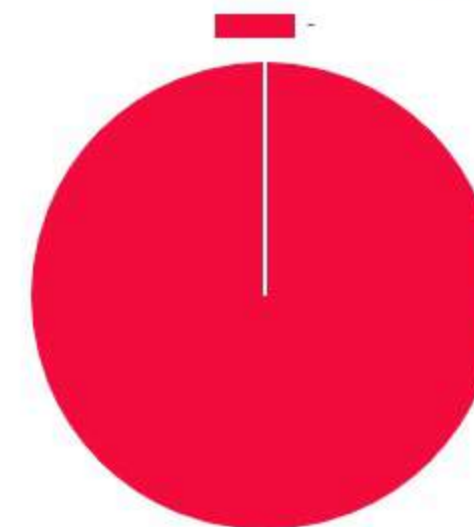
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	16.86	16.83	0.03	16.74	0.12	16.81	0.05	16.74
Kecurangan	16.90	16.81	0.09	16.91	-0.01	16.84	0.06	16.91
Gratifikasi	16.87	16.79	0.08	17.04	-0.17	16.85	0.02	17.04
Pungli	16.97	16.83	0.14	17.09	-0.12	16.87	0.10	17.09
Calo	16.81	16.85	-0.04	16.87	-0.06	16.91	-0.10	16.87

PENGUNAAN PERANGKAT

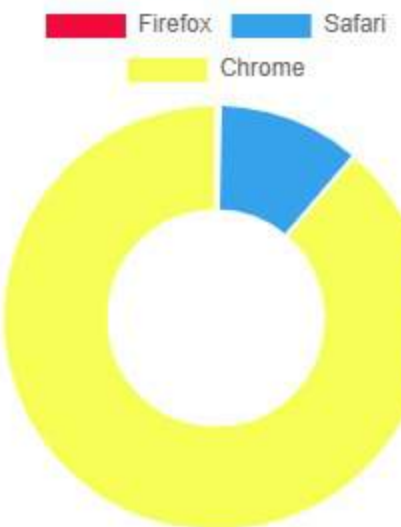
PERANGKAT



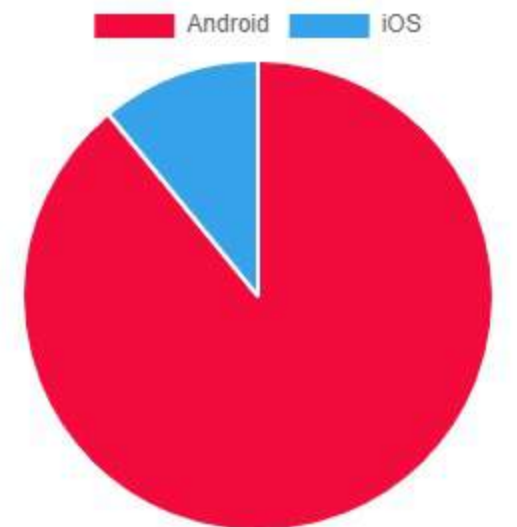
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

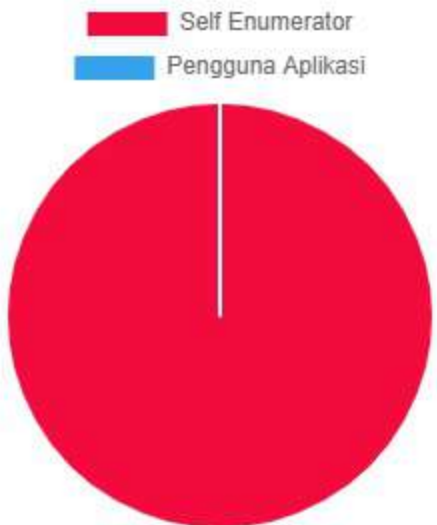


OPERATING SYSTEM

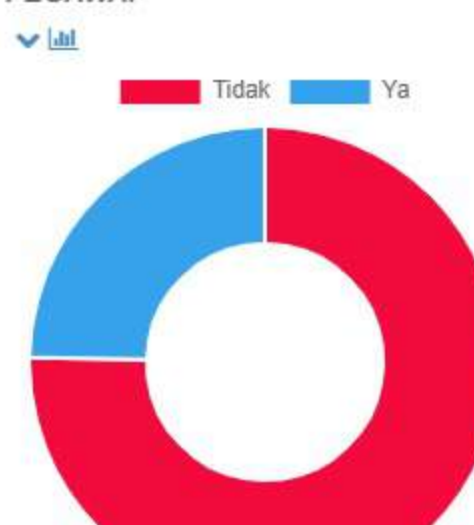


PROFIL RESPONDEN

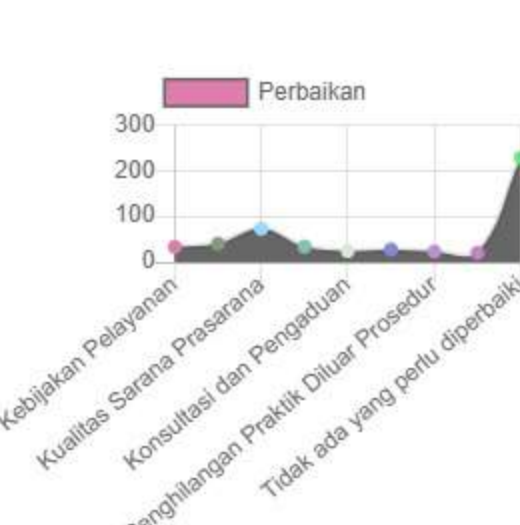
PENCACAHAN



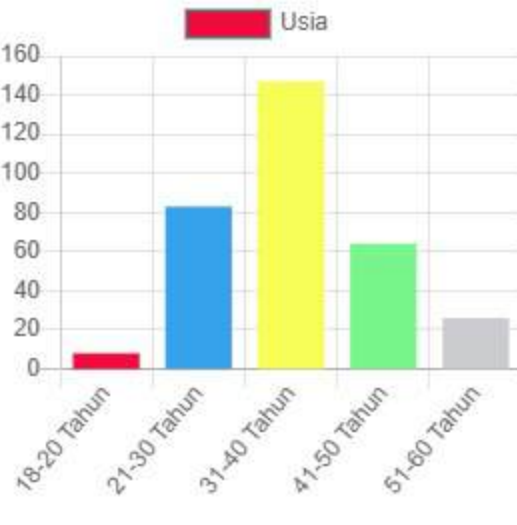
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



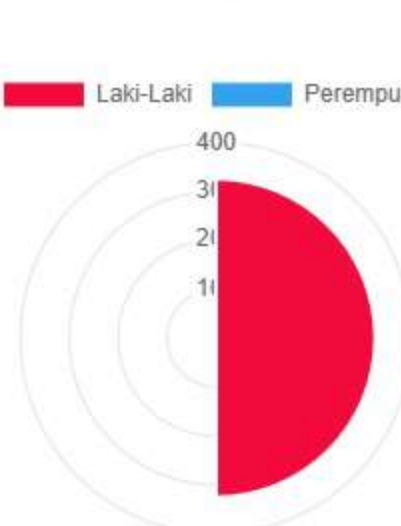
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Juni 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Mei 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK JUNI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.78/17.50

95.88/1003.84/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/1004/4

Responden

5

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

IKM/ IPK

Variable	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Informasi	4	1	0	0
Persyaratan	5	0	0	0
Prosedur/Alur	4	1	0	0
Waktu Penyelesaian	4	1	0	0
Tarif/Biaya	4	1	0	0
Sarana Prasarana	4	1	0	0
Respon	4	1	0	0
Konsultasi dan Pengaduan	4	1	0	0
Diskriminasi	5	0	0	0
Kecurangan	5	0	0	0
Gratifikasi	5	0	0	0
Pungli	5	0	0	0
Calo	5	0	0	0

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.78/17.50

95.88/100

3.84/4

Variable	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Informasi	4	1	0	0
Persyaratan	5	0	0	0
Prosedur/Alur	4	1	0	0
Waktu Penyelesaian	4	1	0	0
Tarif/Biaya	4	1	0	0
Sarana Prasarana	4	1	0	0
Respon	4	1	0	0
Konsultasi dan Pengaduan	4	1	0	0

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Variable	Indeks Lokus	Wilayah Bebas dari Korupsi	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah
Informasi	16.98	16.74	0.24	16.54	0.44
Persyaratan	17.50	16.75	0.75	16.72	0.78
Prosedur/Alur	16.98	16.76	0.22	16.54	0.44
Waktu Penyelesaian	16.98	16.71	0.27	16.52	0.46
Tarif/Biaya	16.45	16.72	-0.27	16.46	-0.01
Sarana Prasarana	15.40	16.67	-1.27	16.18	-0.78
Respon	16.98	16.72	0.26	16.52	0.46
Konsultasi dan Pengaduan	16.98	16.72	0.26	16.57	0.41

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100

4/4

Variable	Indeks Lokus	Wilayah Bebas dari Korupsi	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah
Diskriminasi	17.50	16.83	0.67	16.77	0.73
Kecurangan	17.50	16.81	0.69	16.72	0.78
Gratifikasi	17.50	16.79	0.71	16.72	0.78
Pungli	17.50	16.83	0.67	16.78	0.72
Calo	17.50	16.85	0.65	16.77	0.73

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Variable	Indeks Lokus	Wilayah Bebas dari Korupsi	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah
Diskriminasi	17.50	16.83	0.67	16.77	0.73
Kecurangan	17.50	16.81	0.69	16.72	0.78
Gratifikasi	17.50	16.79	0.71	16.72	0.78
Pungli	17.50	16.83	0.67	16.78	0.72
Calo	17.50	16.85	0.65	16.77	0.73

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

Personal Computer

Android

Samsung

PENYEDIA INTERNET (ISP)

-

BROWSER

Chrome

Firefox

OPERATING SYSTEM

Android

Windows 10

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

Self Enumerator

Pengguna Aplikasi

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

Tidak

PERBAIKAN

Perbaikan

USIA

31-40 Tahun

41-50 Tahun

JENIS KELAMIN

Laki-Laki

34 Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Ver. 7.2.0

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK JUNI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.75/17.50

90/100 3.60/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.75/17.50

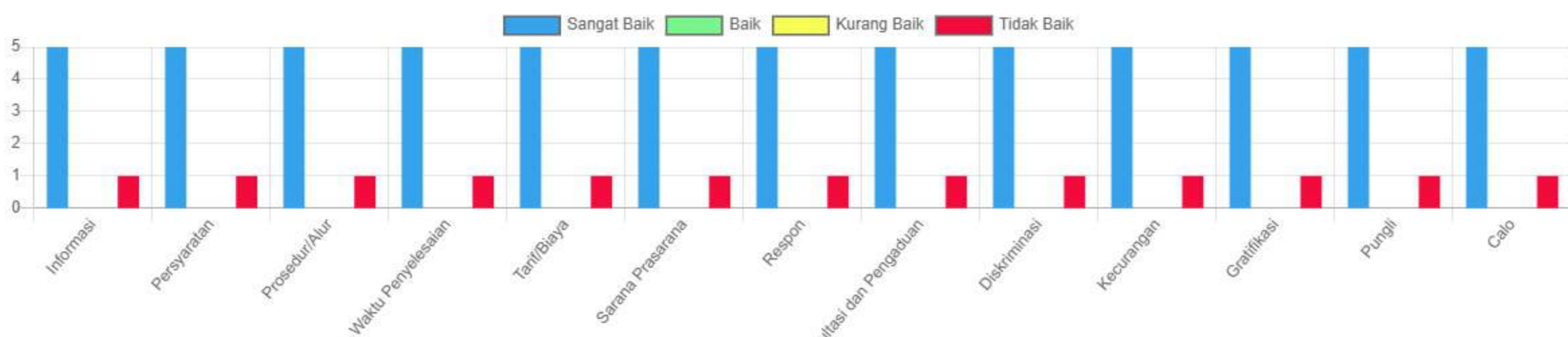
90/100 3.60/4

Responden

6

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



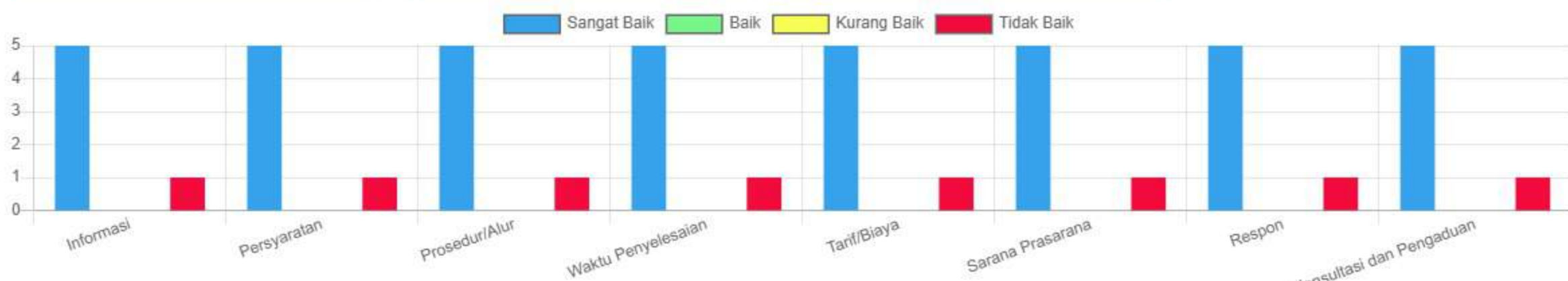
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.75/17.50

90/100

3.60/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	15.75	16.74	-0.99	16.54	-0.79	16.84	-1.09	16.54
Persyaratan	15.75	16.75	-1	16.72	-0.97	16.67	-0.92	16.72
Prosedur/Alur	15.75	16.76	-1.01	16.54	-0.79	16.75	-1	16.54
Waktu Penyelesaian	15.75	16.71	-0.96	16.52	-0.77	16.68	-0.93	16.52
Tarif/Biaya	15.75	16.72	-0.97	16.46	-0.71	16.81	-1.06	16.46
Sarana Prasarana	15.75	16.67	-0.92	16.18	-0.43	16.74	-0.99	16.18
Respon	15.75	16.72	-0.97	16.52	-0.77	16.71	-0.96	16.52
Konsultasi dan Pengaduan	15.75	16.72	-0.97	16.57	-0.82	16.75	-1	16.57

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

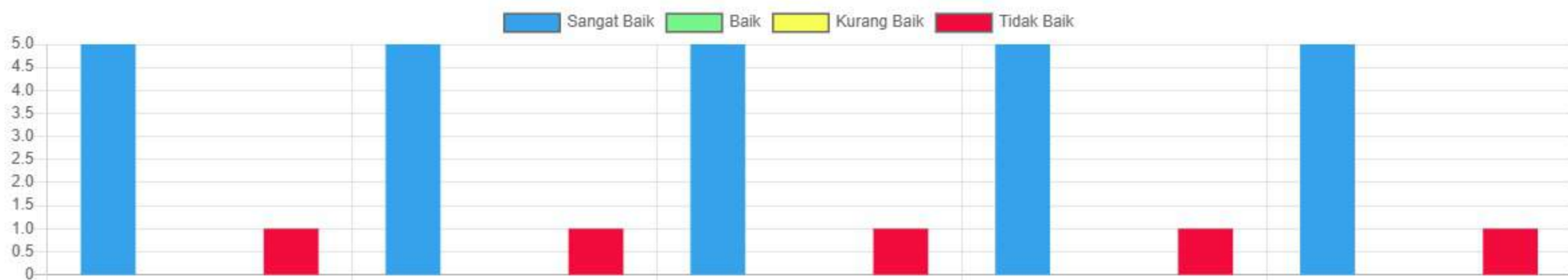
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.75/17.50

90/100

3.60/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	15.75	16.83	-1.08	16.77	-1.02	16.81	-1.06	16.77
Kecurangan	15.75	16.81	-1.06	16.72	-0.97	16.84	-1.09	16.72
Gratifikasi	15.75	16.79	-1.04	16.72	-0.97	16.85	-1.10	16.72
Pungli	15.75	16.83	-1.08	16.78	-1.03	16.87	-1.12	16.78
Calo	15.75	16.85	-1.10	16.77	-1.02	16.91	-1.16	16.77

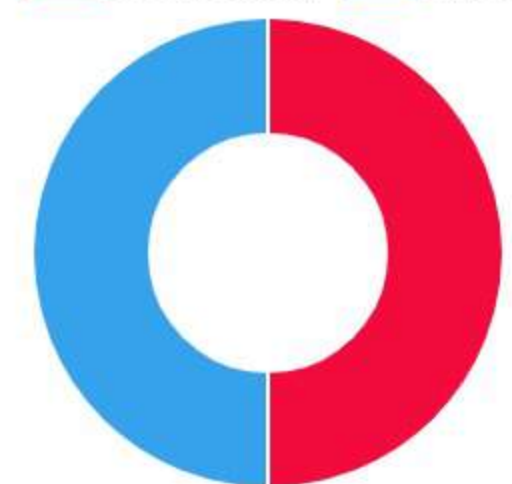
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

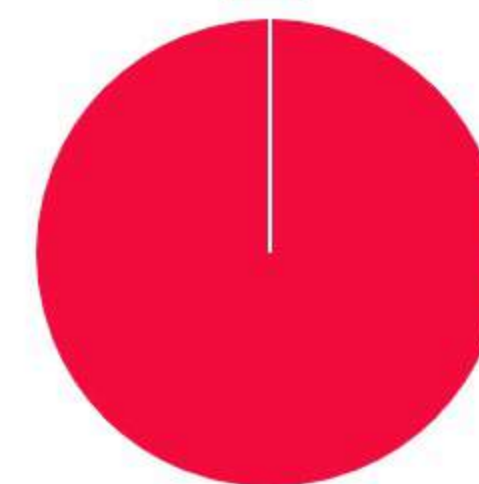
PERANGKAT

Personal Computer Android



PENYEDIA INTERNET (ISP)

-



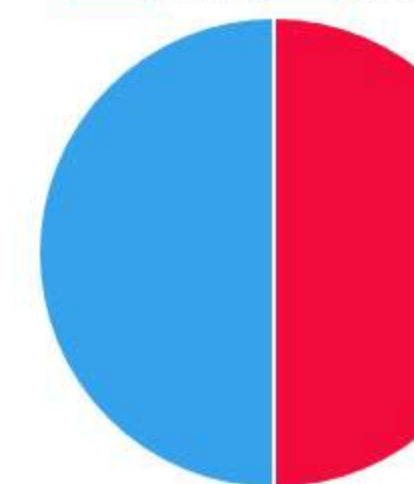
BROWSER

Chrome



OPERATING SYSTEM

Android Windows 10



PROFIL RESPONDEN

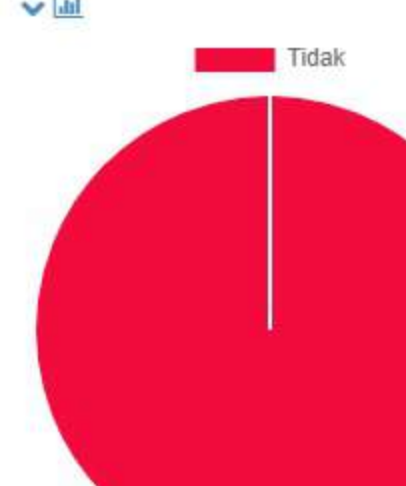
PENCACAHAN

Self Enumerator Pengguna Aplikasi



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

Tidak



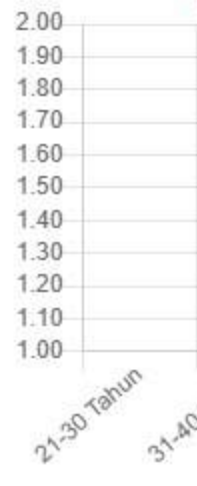
PERBAIKAN

Profesionalisme SDM Tidak ada yang perlu diperbaiki



USIA

Usia



JENIS KELAMIN

Laki-Laki Perempuan





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN**

Jl. Palantikang
Kabupaten Maros 90516
Depo Kereta Api Maros

TELP: (0411) 4832272

Email: bpka_sulsel@dephub.go.id
bpka.sulsel@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor: **145/K3-BPKASS/VII/2025**

Yth : Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
Dari : Plh Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana & Prasarana Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Data Dukung Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api
Sulawesi Selatan
Tanggal : 11 Juli 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor: 341/K1-BPKASS/VI/2025 tentang Undangan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja TW II dan Sosialisasi KP DJKA Nomor 43 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025. Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 pada unit kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Bersama ini terlampir kami sampaikan rekomendasi peningkatan kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Upaya Keberhasilan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	1. Melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan terhadap Penumpang; 2. Melakukan Reservasi untuk pembelian tiket H-7 sebelum keberangkatan; dan 3. Melakukan reservasi pemesanan rombongan melalui Sosial Media.
2.	Presentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat Waktu	1. Melakukan Evaluasi dari Tindak Lanjut Kendala Pengoperasian KA oleh Operator agar memicu peningkatan pengoperasian KA. 2. Diperlukan metode pemantauan KA secara realtime yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan validasi atas pelaporan pelaksanaan GAPEKA (data sekunder) yang didapatkan setiap bulan.
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Melakukan Peningkatan Kualitas Layanan yang ramah dan profesional; 2. Melakukan peningkatan fasilitas baik di kereta ataupun di stasiun.

Selanjutnya, terlampir data dukung angkutan penumpang, realisasi perjalanan Kereta Api dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rizqi Prastyo
NIP. 19940818 202012 1 005

Lampiran Nota Dinas:

Nomor : 145/K3-BPKASS/VII/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN II TA. 2025

No	Realisasi Jumlah KA Penumpang Tahun 2025												Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	17.943	17.935	9.453	34.289	36.545	32.868							

JUMLAH KEDATANGAN KERETA API TEPAT WAKTU (OTP)

No	Bulan	Realisasi Kelambatan Perjalanan KA		Total Perjalanan (Dat/Ber)	OTP / Bulan (%)
		Keberangkatan	Kedatangan		
1.	Januari	3	16	186	94.89%
2.	Februari	3	3	162	98.15%
3.	Maret	1	3	186	98.92%
4.	April	13	18	180	91,39%
5.	Mei	5	3	186	97,85%
6.	Juni	3	1	180	98,89%
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				
Total		28	44	1080	580,09%
Rata-rata OTP Januari - Juni		96,68%			

Lampiran Nota Dinas:

Nomor : 145/K3-BPKASS/VII/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025												Rata-rata
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	3.37	3.28	3.38	3.43	3.46	3.30							3.37

Rizqi Prastyo

NIP. 1994 0818 202012 1 005

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Responden 1	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	2
Responden 2	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4
Responden 3	Perempuan	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	1	2	3	2	3	4	1	3	3	3	2
Responden 4	Perempuan	> 46 Tahun	PNS	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
Responden 5	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 6	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	2	4	4	2	3	3	3	4	3	3	4
Responden 7	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 8	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2
Responden 9	Perempuan	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4
Responden 10	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
Responden 11	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4
Responden 12	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	1
Responden 13	Perempuan	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4
Responden 14	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Responden 15	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4
Responden 16	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 17	Laki-laki	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 18	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4
Responden 19	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 20	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4
Responden 21	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	4	2	1	3	3	2
Responden 22	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4
Responden 23	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 24	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4
Responden 25	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	1
Responden 26	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	3	4	4	2	3	4	1	3	4	4	4
Responden 27	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 28	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	3	3	3	1	3	4	3	1
Responden 29	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 30	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	4	4	4	3	3	3	1	3	4	3	1
Responden 31	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 32	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 33	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
Responden 34	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
Responden 35	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 36	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Responden 37	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 38	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	2	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4
Responden 39	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
Responden 40	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 41	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 42	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
Responden 43	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
Responden 44	Laki-laki	> 46 Tahun	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 45	Perempuan	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 46	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	4	4	3	1	4	3	4	4	3	4
Responden 47	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 48	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2
Responden 49	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4
Responden 50	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	1
Responden 51	Perempuan	15 - 25 Tahun	PNS	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4
Rata-rata				3.549	3.3529	3.5882	3.5686	3.1961	3.3333	3.5686	3.1569	3.3725	3.6078	3.4706	3.5098
NILAI IKM APRIL				3.4395											

Rumus Nilai IKM =
$$\frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{(\text{Jumlah Responde} \times \text{Jumlah Pertanyaan})}$$

=
$$\frac{(181+171+183+182+163+170+182+161+172+184+177+179)}{(51 \times 12)}$$

= **3.43**

Keterangan:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.000 - 2.5996	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	Kurang Baik
3	3.064 - 3.532	Baik
4	3.532 - 4	Sangat Baik

Dokumentasi



Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Responden 1	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4
Responden 2	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 3	Perempuan	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3
Responden 4	Perempuan	> 46 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 5	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
Responden 6	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 7	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 8	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 9	Perempuan	26 - 45 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 10	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 11	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 12	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4
Responden 13	Perempuan	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 14	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 15	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4
Responden 16	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 17	Laki-laki	26 - 45 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 18	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 19	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 20	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	1
Responden 21	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Responden 22	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4
Responden 23	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4
Responden 24	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	2	3	3	3	3	2	4	2	2	3	4	1
Responden 25	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 26	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3
Responden 27	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 28	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 29	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4
Responden 30	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
Responden 31	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 32	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4
Responden 33	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 34	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4
Responden 35	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rata-rata				3.5714	3.3429	3.5714	3.4	3.2857	3.4	3.5429	3.4	3.3714	3.5429	3.5143	3.6286
NILAI IKM				3.4643											

Rumus Nilai IKM =
$$\frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{(\text{Jumlah Responde} \times \text{Jumlah Pertanyaan})}$$

$$= \frac{(125+117+125+119+115+119+124+119+118+124+123+127)}{(35 \times 12)}$$

$$= 3.46$$

Keterangan:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.000 - 2.5996	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	Kurang Baik
3	3.064 - 3.532	Baik
4	3.532 - 4	Sangat Baik

Dokumentasi



Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Responden 1	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 2	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Responden 3	Perempuan	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Responden 4	Perempuan	> 46 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 5	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 6	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 7	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 8	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	1
Responden 9	Perempuan	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 10	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3
Responden 11	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 12	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 13	Perempuan	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 14	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1
Responden 15	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	1
Responden 16	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 17	Laki-laki	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4
Responden 18	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4
Responden 19	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 20	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1
Responden 21	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 22	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Responden 23	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4
Responden 24	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 25	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
Responden 26	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
Responden 27	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Responden 28	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 29	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 30	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	1	4	3	1	4	3	3	3	3	3	1
Responden 31	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1
Responden 32	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Lainnya	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4
Responden 33	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4
Responden 34	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Responden 35	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4
Responden 36	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
Responden 37	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 38	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	3	2	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4
Responden 39	Laki-laki	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Responden 40	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 41	Perempuan	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1
Responden 42	Perempuan	15 - 25 Tahun	Wiraswasta	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
Responden 43	Perempuan	> 46 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4
Responden 44	Laki-laki	> 46 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Responden 45	Perempuan	26 - 45 Tahun	Wiraswasta	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4
Responden 46	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Pelajar / Mahasiswa	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4
Responden 47	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4
Responden 48	Laki-laki	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	1
Responden 49	Perempuan	26 - 45 Tahun	PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Responden 50	Perempuan	15 - 25 Tahun	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rata-rata				3.44	3.28	3.46	3.48	3.1	3.34	3.38	3.28	3.22	3.38	3.38	2.96
NILAI IKM JUNI				3.3083											

Rumus Nilai IKM =
$$\frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{(\text{Jumlah Responde} \times \text{Jumlah Pertanyaan})}$$

$$= \frac{(172+164+173+174+155+167+169+164+161+169+169+148)}{(50 \times 12)}$$

$$= 3.3$$

Keterangan:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.000 - 2.5996	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	Kurang Baik
3	3.064 - 3.532	Baik
4	3.532 - 4	Sangat Baik

Dokumentasi



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2025																
URAIAN	JAN	FEB	MAR	TW I	APR	MEI	JUN	TW II	JUL	AGT	SEPT	TW III	OKT	NOV	DES	TW IV
JUMLAH RESPONDEN	376	375	369	1120	376	372	372	1120								
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-100)	89,70	89,68	89,47	89,62	89,58	89,47	89,57	89,54								
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK								
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-4)	3,58	3,58	3,57	3,58	3,58	3,57	3,58	3,58								
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK								



Megawaty
NIP. 198605052009042002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

PERSENTASE *ON TIME PERFORMANCE* (OTP) TRANSPORTASI KERETA API

[HTTPS://TINYURL.COM/DAKUNGOTPTWII2025DJKA](https://tinyurl.com/dakungotptwii2025djka)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA
10110

TEL: 0813 6001 3838

WEBSITE: <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0103/K2.2/VII/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di
Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : Juli 2025

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0264/K2/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 104,28%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 95,60%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:
 - 1) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
 - 2) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
 - 3) Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d. Juni 2025.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 97,80%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 96,20%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama April s.d. Juni 2025 pada MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,85%), dan LRT Jabodebek (99,66%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Bulan Juni 2025 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.



 Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 0103/K2.2/VII/2025

Tanggal : Juli 2025

I. Capaian Kinerja Tahun 2025

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.001	6.398	88.399	88.399	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.088	5.958	82.046	170.445	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.165	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.908	6.129	88.037	349.202	105,62%	103,61%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.026	6.769	90.795	439.997	105,62%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.259	87.975	527.972	105,59%	104,28%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,6%	86.209	678.868	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,6%	83.562	762.430	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.347	848.777	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,6%	83.428	932.205	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,6%	86.684	1.018.889	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.399	88.399	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.046	170.445	5.646	75.294	80.940	168.411	4.361	73.655	78.216	163.193	79.578	165.802	96,99%	97,28%
	Maret	96,2%	90.720	261.165	5.740	84.045	89.785	258.196	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.037	349.202	5.857	81.381	87.238	345.434	4.970	80.480	85.450	336.057	86.344	340.746	98,08%	97,58%
	Mei	96,2%	90.795	439.997	5.491	83.663	89.154	434.586	5.445	83.181	88.626	424.683	88.890	429.636	97,90%	97,85%
	Juni	96,2%	87.975	527.972	6.113	81.255	87.368	521.956	5.278	80.760	86.038	510.721	86.703	516.339	98,55%	97,80%
TW 3	Juli	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	September	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	November	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	96,2%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:



: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan II 2025

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Analisis Keberhasilan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,60%	104,28%	Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh: a. Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat <i>weekday</i> dan 270 KA saat <i>weekend</i>; b. Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat <i>weekday</i> dan 102 KA saat <i>weekend</i>; dan c. Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d. Juni 2025
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,20%	97,80%	Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama April s.d. Juni 2025 pada MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,94%), dan LRT Jabodebek (99,66%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	a. Telah dilakukan rapat pembahasan rencana penyesuaian perjalanan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 8 Surabaya. Akan dilakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Gapeka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara harian atau berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.;

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			b. Telah dilakukan Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dalam rangka mitigasi kelambatan perjalanan kereta api dan evaluasi Pelaksanaan <i>Switch Over</i> Stasiun Tanahabang.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,40%	104,28%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,20%	97,80%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;



 Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Lampiran Surat
 Nomor : 241 /ND/42-3/DJKA/2025
 Tanggal : 21 Juli 2025

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT TRIWULAN II TAHUN 2025

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2025												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	339.670	315.175	372.014	424.133	358.737	352.146							2.161.875
KA Ekonomi Jarak Sedang	595.501	530.652	531.125	635.461	594.000	620.005							3.506.744
KA Ekonomi Jarak Dekat	412.566	388.181	282.766	477.812	417.602	408.912							2.387.839
KRD Ekonomi	112.895	97.339	73.050	141.247	125.801	125.094							675.426
KA Ekonomi Lebaran	-	-	-	-	-	-							-
TOTAL	1.460.632	1.331.347	1.258.955	1.678.653	1.496.140	1.506.157							8.731.884
	Triwulan I		4.050.934	Triwulan II		8.731.884	Triwulan III		Triwulan IV				-

2. KA Komersial

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.065.697	900.285	880.660	1.276.568	1.021.793	1.232.848							6.377.851
Bisnis	100.989	89.043	84.960	114.097	83.843	102.566							575.498
Ekonomi	1.777.800	1.384.033	1.477.159	2.173.426	1.665.434	2.239.426							10.717.278
Lokal Eksekutif	38.067	23.852	24.355	35.970	30.735	33.560							186.539
Lokal Bisnis	12.900	-	-	-	-	-							12.900
Lokal Ekonomi	92.243	107.603	111.488	149.921	141.964	162.383							765.602
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-							-
Priority	15.896	10.056	10.256	20.993	17.936	22.775							97.912
TOTAL	3.103.592	2.514.872	2.588.878	3.770.975	2.961.705	3.793.558							18.733.580
	Triwulan I		8.207.342	Triwulan II		18.733.580	Triwulan III		Triwulan IV				-

3. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	392.423	328.361	288.953	452.566	369.690	395.151							2.227.144
Cut Meutia	5.018	8.291	299	5.630	4.911	2.780							26.929
Lembah Anai	9.932	7.270	6.363	10.783	8.293	8.475							51.116
Bathara Kresna	12.497	17.931	12.408	17.214	16.963	16.890							93.903
Tanete Rilau - Palanro	17.943	17.935	9.439	34.289	36.545	32.868							149.019
Jumlah	437.813	379.788	317.462	520.482	436.402	456.164							2.548.111
	Triwulan I		1.135.063	Triwulan II		2.548.111	Triwulan III			Triwulan IV			

PT Kereta Commuter Indonesia

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2024												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	27.936.405	27.204.191	26.973.738	27.552.083	28.561.308	28.204.967							166.432.692
KRL Yogyakarta	712.152	608.843	543.808	858.689	849.235	840.963							4.413.690
KA Lokal Wilayah I	380.881	345.130	288.934	413.893	383.710	394.123							2.206.671
KA Lokal Wilayah II	1.552.573	1.422.530	1.359.801	1.754.750	1.594.782	1.573.892							9.258.328
KA Lokal Wilayah VI	86.973	79.276	72.011	113.743	94.481	100.965							547.449
KA Lokal Wilayah VII	1.335.245	1.232.033	1.122.288	1.411.818	1.383.247	1.395.232							7.879.863
TOTAL	32.004.229	30.892.003	30.360.580	32.104.976	32.866.763	32.510.142							190.738.693
	Triwulan I		93.256.812	Triwulan II		190.738.693	Triwulan III			Triwulan IV			

2. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	177.466	168.836	170.864	188.693	177.206	179.350							1.062.415
Jumlah	177.466	168.836	170.864	188.693	177.206	179.350							1.062.415
	Triwulan I		517.166	Triwulan II		1.062.415	Triwulan III			Triwulan IV			

PT Railink

1. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	148.567	120.258	121.988	167.910	151.297	155.167							865.187
KA Srelelawangsa K3 Premium (MDN - BIJ - KBG)	206.465	192.715	166.787	214.780	203.328	203.190							1.187.265
KA Srelelawangsa Woojin (MDN-BIJ)	9.949	21.043	21.570	23.804	23.718	23.423							123.507
KA Srelelawangsa (MDN-ARB)	94.677	82.337	72.184	97.468	89.028	86.907							522.601
Jumlah	459.658	416.353	382.529	503.962	467.371	468.687							2.698.560
	Triwulan I		1.268.540			2.698.560	Triwulan III		Triwulan IV				

2. KA KOMERSIAL

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta Ekspres	81.149	81.644	68.330	98.807	77.799	85.587							493.316
Srelelawangsa (MDN - ARB - KNM)	46.379	42.157	39.920	46.943	41.706	39.641							256.746
Jumlah	127.528	123.801	108.250	145.750	119.505	125.228							750.062
	Triwulan I		359.579	Triwulan II		750.062	Triwulan III		Triwulan IV				

Ket.

Untuk KA Srelelawangsa pada lintas/relasi MDN-ARB-KNM, terdapat 2 jenis kombinasi layanan yaitu PSO dan Komersial, namun demikian penjualan tetap sebagai satu KA yang sama yaitu KA Srelelawangsa.

KA Srelelawangsa dengan relasi MDN-ARB dan ARB-KNM adalah penumpang yang sama dikarenakan menggunakan KA yg sama.

- KA Srelelawangsa Relasi Medan - Araskabu: PSO

- KA Srelelawangsa Relasi Araskabu - Kualanam: Komersial

PT MRT Jakarta

MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	3.579.538	3.483.799	3.219.035	3.268.690	3.692.387	3.809.796							21.053.245
Jumlah	3.579.538	3.483.799	3.219.035	3.268.690	3.692.387	3.809.796							21.053.245
	Triwulan I		10.282.372	Triwulan II		21.053.245	Triwulan III		Triwulan IV				

PT LRT Jakarta

LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	100.593	92.439	90.223	101.463	107.151	106.202							598.071
Jumlah	100.593	92.439	90.223	101.463	107.151	106.202							598.071
	Triwulan I		283.255	Triwulan II		598.071	Triwulan III			Triwulan IV			

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi LRT Jabodebek

LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	2.146.859	2.147.665	2.056.759	2.083.391	2.293.124	2.312.605							13.040.403
Jumlah	2.146.859	2.147.665	2.056.759	2.083.391	2.293.124	2.312.605							13.040.403
	Triwulan I		6.351.283	Triwulan II		13.040.403	Triwulan III			Triwulan IV			

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Kereta Whoosh

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Kereta Whoosh *)	530.974	476.579	346.207	498.795	528.831	554.959							2.936.345
Jumlah	530.974	476.579	346.207	498.795	528.831	554.959							2.936.345
	Triwulan I		1.353.760	Triwulan II		2.936.345	Triwulan III			Triwulan IV			

*) Masih menggunakan data harian, surat penyampaian data volpen secara resmi dari PT. KCIC belum ada

Jumlah Penumpang terangkut Tahun Anggaran 2025

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	44.128.882	42.027.482	40.899.742	44.865.830	45.146.585	45.822.848		-	-	-	-	-
Jumlah	Triwulan I		127.056.106	Triwulan II		262.891.369	Triwulan III		-	Triwulan IV		-

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	138.431	126.130	143.650	152.789	147.537	145.709						
2	PUPUK	3.810	1.380	1.590	2.340	4.110	-						
3	SEMEN	91.520	89.720	67.280	63.800	85.240	83.640						
4	BATUBARA	-	-	-	-	-	-						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	-	-	-	-	-	-						
6	PETIKEMAS	326.728	353.534	423.161	346.704	431.073	389.866						
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	-	-						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	19.761	20.020	18.668	15.219	14.155	14.182						
9	LIMBAH B3	-	-	-	1.869	2.396	1.638						
10	LAINNYA	9.696	9.713	16.421	21.239	38.748	42.851						
TOTAL		589.946	600.497	670.770	603.961	723.259	677.886						
		Triwulan I		1.861.213	Triwulan II		2.005.106	Triwulan III			Triwulan IV		

*Tidak ada kontrak pengangkutan dengan angkutan pupuk pada bulan Juni

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	72.937	68.703	77.743	82.880	71.985	73.135						
2	PUPUK	-	-	-	-	-	-						
3	SEMEN	159.959	161.079	138.996	120.346	103.200	101.033						
4	BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	4.671.292	5.077.312	4.628.933						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	45.308	50.514	24.813						
6	PETIKEMAS	28.684	30.358	34.136	26.986	26.280	12.760						
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	58.425	57.000						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	630	720	745	690	357	328						
9	LIMBAH B3	-	-	-	-	-	-						
10	LAINNYA	1.850	2.000	2.433	19.200	2.675	2.250						
TOTAL		4.917.613	4.542.919	4.737.151	4.996.703	5.390.748	4.900.251						
		Triwulan I		14.197.683	Triwulan II		15.257.702	Triwulan III			Triwulan IV		

3. Jumlah Barang terangkut TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	211.368	194.832	221.393	235.669	219.522	218.844						
2	PUPIK	3.810	1.380	1.590	2.340	4.110	-						
3	SEMEN	251.479	250.799	206.276	184.146	188.440	184.673						
4	BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	4.671.292	5.077.312	4.628.933						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	45.308	50.514	24.813						
6	PETIKEMAS	355.412	383.892	457.297	373.690	457.353	402.626						
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	58.425	57.000						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	20.391	20.740	19.413	15.909	14.512	14.510						
9	LIMBAH B3	-	-	-	1.869	2.396	1.638						
10	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	11.546	11.714	18.854	40.439	41.423	45.101						
TOTAL		5.507.559	5.143.416	5.407.921	5.570.664	6.114.007	5.578.137						
		Triwulan I		16.058.896	Triwulan II		17.262.808	Triwulan III			Triwulan IV		



Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR KP-DJKA 10 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP (rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan lainnya) serta pelaksanaan pengukuran, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SAKIP termasuk capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen serta pengukuran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan dipandang mampu sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1710);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

- 1) Memberikan arahan kepada Tim dalam penyusunan dokumen serta pengukuran, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Menetapkan target dan hasil evaluasi capaian kinerja;
- 3) Mengesahkan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

b. Tim Penyusun :

- 1) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Menyusun dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan reviu/perubahan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Mengkoordinasikan persiapan pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala;
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta mengevaluasi data/informasi kinerja sebagai bahan untuk pengukuran, monitoring dan evaluasi (per bulan dan triwulan) terhadap target dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian kinerja serta pengisian aplikasi pelaporan kinerja (*e-performance*, *e-SAKIP* reviu, *e-Monev*

Bappenas, Sistem Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan aplikasi lainnya);

- 4) Menginventarisasi dan memetakan kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) periode selanjutnya ;
- 6) Melaksanakan penilaian mandiri terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 7) Melaksanakan evaluasi uraian dan perhitungan indikator kinerja dan target apabila diperlukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
 NOMOR KP- DJKA 10 Tahun 2025
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 (SAKIP) DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

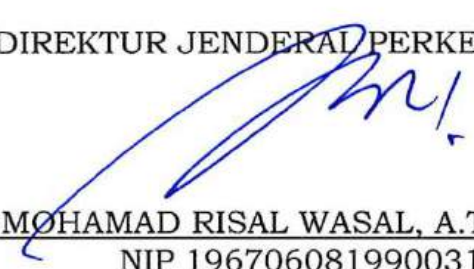
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

NO	POSISI	URAIAN
I.	PENANGGUNG JAWAB	Direktur Jenderal Perkeretaapian
II.	TIM PENYUSUN	
A.	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2. Direktur Prasarana Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian 2. Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA 3. Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA 4. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian 5. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Direktorat Prasarana Perkeretaapian 6. Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian 7. Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO	POSISI	URAIAN
		8. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Kepala Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Rencana, Bagian Perencanaan
		12. Koordinator Kelompok Program, Bagian Perencanaan
		13. Koordinator Kelompok Perbendaharaan dan Barang Milik Negara, Bagian Keuangan
		14. Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum
		15. Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum, Bagian Hukum
		16. Koordinator Kelompok SDM dan Organisasi, Bagian SDM dan Umum
		17. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		18. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
III.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
A.	Ketua	Direktur Sarana Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	Direktur Keselamatan Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1. Kepala Bagian SDM dan Umum
		2. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		3. Kepala Subdirektorat Angkutan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		4. Kepala Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		5. Kepala Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	POSISI	URAIAN
		6. Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		7. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan
		12. Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran, Bagian Keuangan
		13. Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran, Bagian Keuangan
		14. Koordinator Kelompok Humas dan KSLN, Bagian Hukum
		15. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Bagian SDM dan Umum
		16. Koordinator Kelompok Rumah Tangga, Bagian SDM dan Umum
		17. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuhub.go.id

Nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan
Laporan Monitoring Kinerja
Triwulan I Tahun 2025

Jakarta, 28 Mei 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan penyelesaian Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan perhitungan rata-rata persentase perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I dengan target kinerja Triwulan I masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (%)
1	Balai Perawatan Perkeretaapian	106,24
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	103,68
3	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	103,49
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,72
5	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	101,40
6	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	101,02
7	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	100,86

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (%)
8	Direktorat Sarana Perkeretaapian	99,98
9	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	99,74
10	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	98,40
11	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	97,42
12	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	97,30
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,93
14	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	73,62
15	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	69,73
16	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	- *

Keterangan:

*) Sampai dengan 22 Mei 2025, BTP Padang belum menyampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

**) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-*Performance*) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, Kertas Kerja Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian *reward and punishment* terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
- Penyajian Informasi Kinerja (30%);
- Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKE	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

Keterangan:

*) Sampai dengan 22 Mei 2025, BTP Padang belum menyampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

**) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan I 2025 (posisi 21 Mei 2025).

***) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

1. Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Triwulan I Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.

2. Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
3. Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik dalam pemenuhan laporan monitoring kinerja triwulan maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja terkait ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya

NIP 197312311998031003



LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

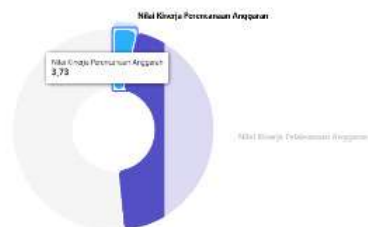
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,477,078,000	463,142,836,993	75.74%
3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,347,724,698,987	67.8%
4	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,237,441,326,000	794,959,257,408	64.24%
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,303,654,261,000	774,662,822,076	59.42%
6	MAHKAMAH AGUNG	12,685,481,999,000	7,332,045,744,144	57.8%
7	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,438,038,249,000	3,438,606,749,471	53.41%
8	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,614,516,000	260,767,807,056	52.72%
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	142,282,406,978,000	74,737,519,813,224	52.53%
10	KEMENTERIAN SOSIAL	80,791,894,299,000	42,414,993,189,143	52.5%
11	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	354,560,077,000	184,823,000,929	52.13%
12	KEMENTERIAN AGAMA	79,275,629,671,000	39,394,009,448,134	49.69%
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	95,997,915,991,000	46,851,185,616,938	48.8%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,088,219,063,964	47.46%
15	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,159,093,551,000	2,800,960,135,024	45.48%
16	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	977,779,738,000	441,422,342,461	45.15%
17	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	93,652,629,268	45.07%
18	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	105,373,198,000	45,901,286,910	43.56%
19	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,475,090,393,000	1,064,502,706,188	43.01%
20	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	56,498,241,761,000	24,051,111,687,740	42.57%
21	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	185,550,311,334	42.48%
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	626,396,579,000	261,602,506,752	41.76%
23	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP	6,965,383,103,000	2,845,123,222,602	40.85%
24	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,042,221,000	6,493,223,158,910	40.68%
25	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	103,713,316,779	40.58%
26	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	575,250,397,379	40.5%
27	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,537,019,849,000	1,421,076,758,119	40.18%
28	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	388,303,881,423	40.06%
29	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	3,948,787,379,736	39.9%
30	BADAN PUSAT STATISTIK	5,721,249,143,000	2,272,957,609,362	39.73%
31	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,279,301,000	82,637,625,063	39.68%
32	KEMENTERIAN KESEHATAN	110,185,640,535,000	43,666,003,922,615	39.63%
33	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	1,497,578,812,000	593,266,786,594	39.62%
34	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	421,026,995,627	39.53%
35	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,428,252,086,000	9,653,945,724,577	39.52%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,464,360,885,000	2,155,569,036,983	39.45%
37	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	73,756,279,875	39.43%
38	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	87,976,461,470	39.3%
39	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	963,167,939,183	39.21%
40	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,488,668,000	127,366,909,973	38.77%
41	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	63,805,661,233	38.27%
42	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	61,212,515,680	37.98%
43	KEMENTERIAN PERTAHANAN	304,184,506,161,000	114,027,766,012,288	37.49%
44	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	109,760,883,224	37.36%
45	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	171,689,833,560	37.34%
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,465,129,883,000	917,580,209,780	37.22%
47	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,853,780,324,000	689,946,772,463	37.22%
48	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,848,562,191,000	2,164,360,875,771	37.01%
49	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	58,008,582,628	37.01%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	68,083,631,000	36.9%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	542,982,054,529	36.47%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	554,689,270,586	36.39%
53	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,281,288,000	97,479,175,552	36.33%
54	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	925,093,701,592	36.12%
55	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,425,521,662,000	1,925,331,218,900	35.49%
56	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	81,489,440,586	35.43%
57	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	3,529,066,578,722	35.42%

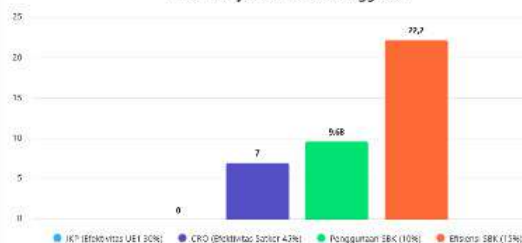
58	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,533,975,927,000	887,165,369,672	35.01%
59	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,606,498,000	96,215,372,907	34.41%
60	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,856,211,000	157,719,405,823	34%
61	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	296,725,845,674	33.73%
62	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	89,405,603,353	33.47%
63	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,626,016,603,000	4,500,263,887,313	33.03%
64	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	91,015,315,560	32.8%
65	KEMENTERIAN KOPERASI	473,310,018,000	152,550,090,801	32.23%
66	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,970,952,577,000	634,702,563,683	32.2%
67	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	226,765,308,119	31.42%
68	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,079,782,944,000	337,644,347,376	31.27%
69	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	119,367,970,893	30.38%
70	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	69,766,738,799	30.34%
71	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	90,103,062,791	29.97%
72	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	686,666,464,333	29.47%
73	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,808,528,593,000	1,409,929,971,963	29.32%
74	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8,073,325,181,000	2,338,319,089,285	28.96%
75	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	105,959,508,945	28.3%
76	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,444,977,952,000	665,594,139,620	27.22%
77	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,826,897,302,000	768,749,119,752	27.19%
78	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,232,274,044,000	9,210,046,858,666	26.14%
79	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,357,953,540,698	25.49%
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	13,398,663,249	25.05%
81	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,535,765,226,000	1,824,755,052,975	24.21%
82	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,600,725,000	1,191,595,297,912	23.52%
83	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	310,210,428,459	23.47%
84	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,389,595,539,000	14,158,342,384,786	22.69%
85	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,374,348,189,000	528,557,607,285	22.26%
86	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	44,235,104,887	22.17%
87	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	106,601,392,533	21.69%
88	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	277,533,392,000	56,368,298,479	20.31%
89	KEMENTERIAN PERTANIAN	29,422,740,766,000	5,835,123,907,366	19.83%
90	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	403,533,248,548	19.48%
91	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	1,025,767,183,976	19.45%
92	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	2,073,885,519,683	19.41%
93	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	113,769,791,284,000	21,940,925,148,514	19.29%
94	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	36,103,197,978	17.26%
95	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,395,534,826,000	870,483,352,559	13.61%
96	BADAN KEAMANAN LAUT	2,730,731,361,000	305,116,360,942	11.17%
97	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	103,025,984,114	10.82%
98	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	5,898,270,403,753	8.31%
99	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	75,483,598,537	3.98%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	-1,640,200	0%
101	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	-363,470,540	0%
102	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	-175,613,740	0%
103	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%

Ditjen Perkeretaapian

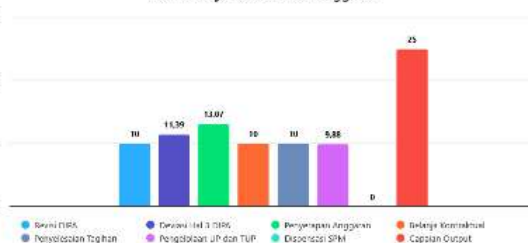
Nilai Kinerja Anggaran



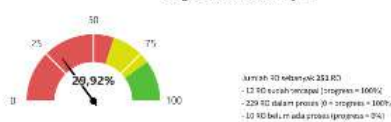
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



Data Anomaly

Kendali	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Kend 1	PCRD dipergunakan times-up lebih dari realisasi anggaran	0	0
Kend 2	PCRD dipergunakan lebih rendah dari case realisasi anggaran	0	0
Kend 3	PCRD 100% namun capaian tidak (NABO) tepat	0	0
Kend 4	PCRD 100% namun capaian tidak (NABO) tidak mencapai target/nilai minimal	0	0

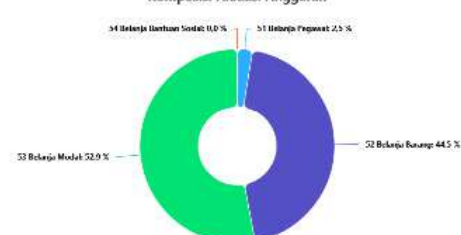
Pagu dan Realisasi Anggaran



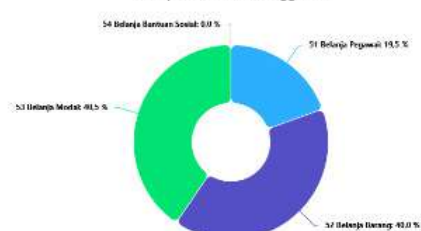
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Beban Pegawai	205.460.610,00	136.097.032,988	67,36 %
52 Beban Bangun	3.674.434.010,00	284.521.091,232	7,87 %
53 Beban Modal	6.299.180.275,00	287.665.068,761	6,09 %
77 Beban Dikawatir Sosial	0	0	0,00 %

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

[illegible]

Impor markah...Materi Video Editor - ...Dokumen Persetujuan...COMMUNITY - Logo[2025] KONSEP SURAT...My Drive - Google Dri...Checklist Data Dukun...ceklis data dukung.xls...

MONEV

DITJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Sarker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	011.06.40802	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0,00	97,64	48,82
2	011.06.46706	BALAI PENGELOLA KERETA API BUNGAN SUMATRA SELATAN	25,03	95,89	60,46
3	011.06.46709	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	7,20	90,76	48,98
4	011.06.46739	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	93,29	46,65
5	011.06.46732	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	3,13	85,86	44,50
6	011.06.46737	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	4,17	92,76	48,47
7	011.06.46734	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	89,29	44,65
8	011.06.46733	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	11,69	85,07	48,38
9	011.06.46744	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	10,14	83,40	46,77
10	011.06.46735	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	54,50	96,46	75,48
11	011.06.46728	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	6,90	94,83	50,87
12	011.06.46742	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PERINCATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	99,78	49,89
13	011.06.46748	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	0,00	90,98	45,49
14	011.06.46746	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	0,00	91,65	45,83
15	011.06.46764	KANTOR PUSAT BIROKRASI JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	95,42	47,71
16	011.06.46718	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANGUNG	0,00	77,52	38,76

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Selanjutnya

16:56

16/07/2025

Impor markah...Materi Video Editor - ...Dokumen Persetujuan...COMMUNITY - Logo[2025] KONSEP SURAT...My Drive - Google Dri...Checklist Data Dukun...ceklis data dukung.xls...

RolePilih TA (2025)Logout

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entriCari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	622.06	Unit Perencanaan	7,45	89,34	48,40

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

SebelumnyaSelanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 2025-07-16 16:57:35

16:5716/07/2025



REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	166,724,094,000 89,884,191,331 (53.91%)	451,337,449,000 105,912,576,301 (23.47%)	62,218,116,000 4,805,066,096 (7.72%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	680,279,659,000 200,601,833,729 (29.49%)
		SISA	76,839,902,669	345,424,872,699	57,413,049,904	0	0	0	0	0	0	479,677,825,271
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	50,776,233,000 29,111,917,661 (57.33%)	63,366,947,000 13,500,426,842 (21.31%)	2,040,607,000 755,478,400 (37.02%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	116,183,787,000 43,367,822,903 (37.33%)
		SISA	21,664,315,339	49,866,520,158	1,285,128,600	0	0	0	0	0	0	72,815,964,097
3	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	810,737,460,000 413,911,282,299 (51.05%)	3,952,519,950,000 587,987,629,406 (14.88%)	1,193,664,981,000 92,468,716,256 (7.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,956,922,391,000 1,094,367,627,961 (18.37%)
		SISA	396,826,177,701	3,364,532,320,594	1,101,196,264,744	0	0	0	0	0	0	4,862,554,763,039
4	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,920,462,160,000 1,097,707,090,837 (57.16%)	4,920,868,799,000 1,446,089,440,391 (29.39%)	4,160,783,930,000 768,896,385,474 (18.48%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	11,002,114,889,000 3,312,692,916,702 (30.11%)
		SISA	822,755,069,163	3,474,779,358,609	3,391,887,544,526	0	0	0	0	0	0	7,689,421,972,298
5	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	1,174,063,422,000 635,587,385,011 (54.14%)	3,475,713,005,000 946,307,246,117 (27.23%)	1,534,361,533,000 210,798,084,731 (13.74%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,184,137,960,000 1,792,692,715,859 (28.99%)
		SISA	538,476,036,989	2,529,405,758,883	1,323,563,448,269	0	0	0	0	0	0	4,391,445,244,141
6	02208 Ditjen Perkeretaapian	PAGU REALISASI	205,469,616,000 123,451,287,525 (60.08%)	3,617,414,015,000 265,052,794,926 (7.33%)	4,299,180,275,000 246,545,981,657 (5.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,122,063,906,000 635,050,064,108 (7.82%)
		SISA	82,018,328,475	3,352,361,220,074	4,052,634,293,343	0	0	0	0	0	0	7,487,013,841,892
7	02211 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU REALISASI	47,087,041,000 24,269,958,691 (51.54%)	71,806,509,000 17,810,067,852 (24.80%)	2,459,864,000 657,404,850 (26.73%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	121,353,414,000 42,737,431,393 (35.22%)
		SISA	22,817,082,309	53,996,441,148	1,802,459,150	0	0	0	0	0	0	78,615,982,607



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	397,175,956,000 197,941,506,323 (49.84%)	2,292,953,084,000 747,644,308,632 (32.61%)	165,858,488,000 10,689,488,123 (6.44%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,855,987,528,000 956,275,303,078 (33.48%)
		SISA	199,234,449,677	1,545,308,775,368	155,168,999,877	0	0	0	0	0	0	1,899,712,224,922
9	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,957,550,000 22,465,867,384 (59.19%)	152,415,175,000 31,314,609,037 (20.55%)	2,857,785,000 76,700,000 (2.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 53,857,176,421 (27.87%)
		SISA	15,491,682,616	121,100,565,963	2,781,085,000	0	0	0	0	0	0	139,373,333,579
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,810,453,532,000 2,634,330,487,062 (54.76%)	18,998,394,933,000 4,161,619,099,504 (21.91%)	11,423,425,579,000 1,335,693,305,587 (11.69%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	35,232,274,044,000 8,131,642,892,154 (23.08%)
		SISA	2,176,123,044,938	14,836,775,833,496	10,087,732,273,413	0	0	0	0	0	0	27,100,631,151,846

Laporan Target dan Realisasi PNPB Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : -
PERIODE PELAPORAN : Januari - Juni
TAHUN PELAPORAN : 2025

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000	534.350.000	534.350.000
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57.865	57.865
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000	0	9.656.675.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000	0	0
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	196.114.994
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	0	149.800.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	20
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	411.467.566	5.673.389.313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000	0	0
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000	92.150.000	92.150.000
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	26.043.191
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.942.687	12.942.687
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.320.745.000	1.320.745.000
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000	5.308.776.020	5.308.776.020
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	9.777.090
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.407.742.731
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.519.271.310
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	179.604.290	179.604.290
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	28
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.306.552	26.025.155.616
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.646.963.520	6.819.149.244
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	55.160.000	55.160.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	836.938.500
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	8.514.500.000	8.514.500.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	313.455.221
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	15.753.979.203
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.915.961.725
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	80.658.000	80.658.000

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.711
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.750.849.507
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	601.213.418	4.170.656.860
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	27.216.000	29.472.000
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	291
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	182.725.000	6.635.405.475
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	160.628.389	160.628.389
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	662.409.527
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	172
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.027.492.418
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65.423.960	21.772.028.250
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000	8.537.664	8.786.278
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	248.614	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000	295.695.000	295.695.000
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	234.546.858	234.546.858
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	840.000.175	840.000.175
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000	0	18.620.371.500
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000	0	63.747.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	370.895.179
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000	534.479.152.762	534.479.152.762
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000	231.000.000	231.000.000
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	209.898.464	224.474.096
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	32.465.912	32.465.912
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24.000.000	892.620.908
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8.349.000	8.349.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	1.170.150.000	1.170.150.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	1.382.410.430
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.749.923.435
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1	10.029.216.300

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000	33.100.000	33.100.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000	1.794.940.000	1.794.940.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	33.426.363
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	138.354.315	173.803.275
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68.016.649	68.016.649
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	506.357.035	506.357.035
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	5.643.672	5.643.672
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	197.290.118	197.290.118
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	317.435.813	317.435.813
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.561
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28.800.170	6.483.759.170
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	420.735.555	420.735.555
Total		1.246.326.325.000	561.080.544.544	737.279.659.005



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER ESELON1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	Kode Es. 1 Nama Es. 1	Pagu	Realisasi		Persentase
			Perpajakan	PNBP	Realisasi
10	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	3,510,000,000	0	2,358,848,532	67.20%
11	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	1,455	0.00%
12	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1,400,066,326,000	0	663,630,649,338	47.40%
13	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5,339,531,810,000	0	3,468,711,121,174	64.96%
14	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1,834,852,348,000	0	1,228,595,002,472	66.96%
15	02208 Ditjen Perkeretaapian	1,246,326,325,000	0	746,558,265,617	59.90%
16	02211 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	196,283,999	0.00%
17	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1,393,680,517,000	0	811,551,818,370	58.23%
18	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	13,770,000,000	0	5,089,909,268	36.96%

DITJEN PERKERETAAPIAN					
	Rata2 Nilai IP ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin
	82,09	23,47	28,93	25,16	4,99
	dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5
UNIT KERJA	RATA-RATA TOTAL	RATA-RATA KUALIFIKASI	RATA-RATA KOMPETENSI	RATA-RATA KINERJA	RATA-RATA DISIPLIN
Balai Perawatan Perkeretaapian	89,70	23,79	35,22	26,80	4,96
Direktorat Sarana Perkeretaapian	87,28	22,83	30,34	29,33	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	86,17	24,58	31,73	25,05	5,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	84,63	23,29	31,02	25,88	4,97
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	83,64	23,77	31,75	24,10	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	86,35	23,60	30,12	27,98	5,00
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	84,13	23,32	29,41	26,85	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	82,44	23,76	29,47	24,66	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	81,92	23,08	27,95	26,17	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	81,53	24,13	28,11	24,52	5,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	79,98	23,53	27,00	25,00	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	79,83	23,78	28,04	23,53	5,00
Balai Pengujian Perkeretaapian	79,70	21,87	26,79	26,26	5,00
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	76,63	23,15	25,71	22,97	4,98
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	75,18	23,31	24,94	22,73	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	78,61	23,82	28,07	22,69	5,00



Indriati, SE, MM
NIP 198106072005022001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 Jakarta, 28 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Merit
Terkait Manajemen Kinerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.406/1/9/STJ/2025 tanggal 14 Mei 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Merit Terkait Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hasil evaluasi sistem merit terkait Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 April 2025 sebagaimana berikut:

1. Nilai IP ASN posisi tanggal 19 Mei 2025 Kementerian Perhubungan masih dalam kategori “Sedang”, dengan detail sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
22,76	22,61	23,77	5,00	74,13
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

dan posisi untuk lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam kategori “Sedang”, dengan detail sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
23,98	23,67	24,11	5,00	76,76
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

2. Berdasarkan Kegiatan Evaluasi Sistem Merit Terkait Manajemen Kinerja perlu ditindaklanjuti antara lain:

- a. Setiap Unit Eselon I perlu terus meningkatkan rataan nilai IPASN di unit kerja lingkup kewenangannya. Hal yang dapat dilakukan adalah memastikan penilaian kinerja tahunan yang telah tersampaikan ke SIASN, serta terus melakukan pembaruan data Kompetensi pada aplikasi SIK yang selanjutnya diteruskan untuk integrasi dengan SIASN;

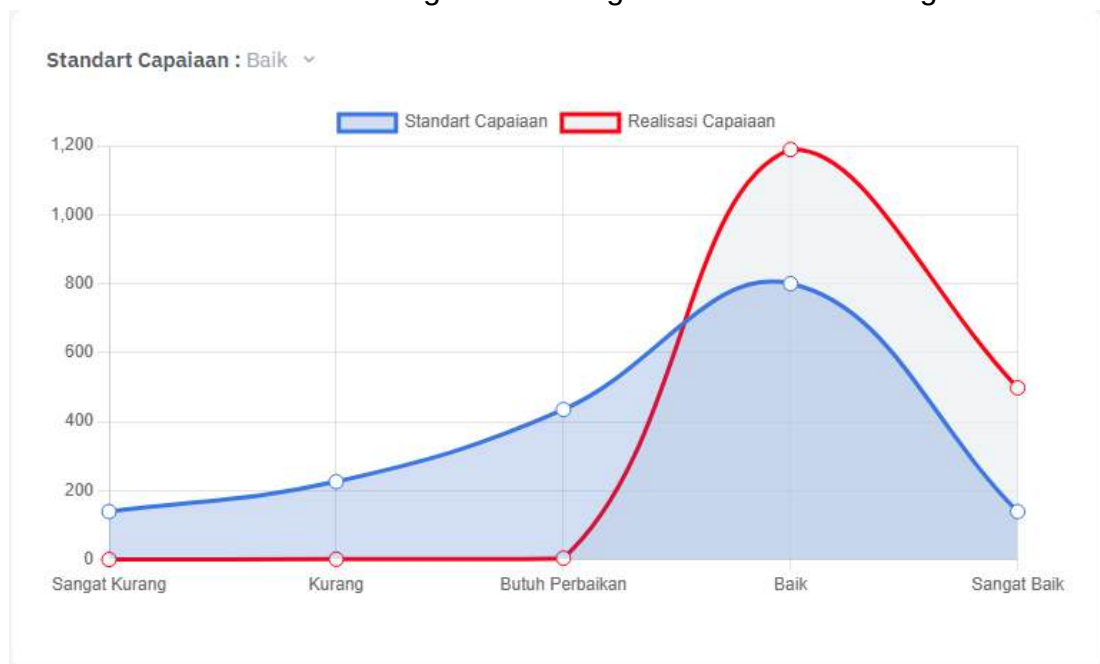
b. Berdasarkan....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

b. Berdasarkan penilaian kinerja tahun 2024 posisi tanggal 19 Mei 2025, terdapat 5 pegawai dengan penilaian dibawah “Baik” dan belum melakukan integrasi DEK Tahunan ke SIASN dengan rincian:

- Butuh Perbaikan : 4 Orang
- Kurang : 0 Orang
- Sangat Kurang : 0 Orang
- DEK Tahunan belum diintegrasikan dengan SIASN : 143 Orang



Selanjutnya kepada pegawai tersebut perlu dilakukan pembinaan dan monitoring kinerja agar kinerjanya membaik di tahun 2025. Selanjutnya tiap unit kerja melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja dengan cara sebagai berikut:

- Pegawai melakukan pembinaan kinerja berupa bimbingan kerja dan konseling kinerja;
- Guna meningkatkan kompetensi Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja bisa mengikuti pelatihan mengenai manajemen kinerja dan kepemimpinan;
- Pejabat Penilai Kinerja juga dapat melakukan pembinaan kinerja (bimbingan kinerja dan konseling kinerja) kepada pegawai yang memiliki permasalahan kinerja.

3. Informasi materi sosialisasi dan rekaman youtube dapat diakses pada tautan berikut :

Materi : <https://lnk.dephub.go.id/EvaluasiKinerjaMeritKemenhub>

Youtube : <https://www.youtube.com/live/5z8m9D2Zwco?si=L1JrbmlvpIQMhiQO>

Sehubungan....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk segera melaksanakan pemutakhiran data kinerja pada aplikasi Ekinerja serta memonitor pengisian data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Detail data tersebut dapat di unduh pada tautan https://bit.ly/IPASN_DJKA2024.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2025

Tanggal: 28 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya

NIP 197312311998031003

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025

Jakarta, 1 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 8 s.d 9 Juli 2025

Pukul : Rincian Jadwal Terlampir

Tempat : Yuan Garden Hotel dan Aplikasi *Zoom Meeting (Hybrid)*

Acara : 1. Pembahasan Progres Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA)
2. Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pimpinan Rapat : Sesditjen Perkeretaapian / Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas (narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Lampiran II Surat Undangan
 Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025
 Tanggal : 1 Juli 2025

**JADWAL KEGIATAN
 MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA
 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 8 Juli 2025		
09.30 – 12.00	Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas	Narasumber: Bappenas Peserta: Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja Direktorat Prasarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA	Peserta: Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Surabaya - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. BTP Jakarta 2. BTP Bandung 3. BTP Semarang 4. BTP Surabaya 5. Direktorat teknis 6. Setditjen
Rabu, 9 Juli 2025		
09.30 – 12.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja BTP Medan, BTP Padang, BTP Palembang, BPKAR Sumsel - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. BTP Medan 2. BTP Padang 3. BTP Palembang 4. BPKAR Sumsel 5. Direktorat Teknis 6. Setditjen
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja Balai Pengujian, Balai Perawatan, BPKA Sulsel, Setditjen Perkeretaapian - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. Balai Pengujian 2. Balai Perawatan 3. BPKA Sulsel 4. Direktorat teknis 5. Setditjen
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
15.30 – 17.30	Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit Eselon I <i>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</i>	

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

No. ST : ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025

Lokasi : Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II
TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JULI 2025

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/22/K1/DJKA/2025 tanggal 1 Juli 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Yuar Garden Jakarta
2. Tanggal : Selasa-Rabu/ 8-9 Juli 2025
3. Peserta Rapat:
 - a. Perwakilan Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas (narasumber);
 - b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
 - h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - o. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - p. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian materi “Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas” oleh narasumber;
 - b. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 per unit kerja;
 - c. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025.
2. **Pemaparan dari Direktorat Sistem dan Manajemen Resiko Bappenas** terkait Monitoring Capaian Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi E-Monev di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan:
 - a. Terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas masih banyak unit kerja yang capaian Triwulan II per 7 Juli 2025 masih belum mencapai target.
 - b. Masih terdapat target dengan angka 0 (kemungkinan karena RO Renja tidak terisi):
 - 1) Status pelaksanaan masih banyak yang tidak diisi/kosong;
 - 2) Rata-rata capaian realisasinya masih di bawah rata – rata;
 - 3) Penyerapan anggaran termonitoring rendah karena banyak masih di tahap persiapan.
 - c. Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian:
 - 1) Di versi sebelumnya terdapat kategori "tidak ada masalah" namun saat ini diperbaharui menjadi "masalah terselesaikan", serta terdapat beberapa pilihan kategori masalah sehingga unit kerja dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan;
 - 2) Pada saat pengisian komponen, terdapat verifikasi yang akan dilakukan oleh Biro, dimana ketika isian sudah diverifikasi maka tidak bisa diubah. Terdapat simbol ceklis jika belum terverifikasi akan berwarna kuning dan bila sudah terverifikasi ditandai dengan checklist seperti gambar berikut:

NO	BULAN	STATUS PELAKSANAAN		NO	REALISASI RISK		REALISASI ANGGARAN		STATUS PENGEMERATAN	Revisi
		KATGOORI	% (jumlah)		NO (Bulan)	NO (Juli)	RUPAI	% (Percent)		
1	JAN	Perencanaan	1 %	0	0	0	0	0.00%	0	0
2	FEB	Perencanaan	8 %	0	0	0	0	0.00%	0	0
3	MAR	Perencanaan	25 %	0	0	0	3,403,790,000	77.05%	0	0
4	APR	Perencanaan	70 %	0	0	0	0	0.00%	0	0
5	MAY	Perencanaan	72 %	0	0	0	0	0.00%	0	0
6	JUNE	Perencanaan	75 %	0	0	0	0	0.00%	0	0

- d. Sesi diskusi terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas:
 - 1) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada output kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan

tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

- 2) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
- 3) Saat ini mekanisme e-Monev mengharuskan agar semua unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melengkapi isian komponen dan rincian *output* karena ada keterhubungan antar level satuan kerja. Tujuannya untuk pemantauan berjenjang sehingga progress/kendala satker dapat diketahui dan dibantu, sehingga apabila masih terdapat tanda belum tuntas, Setditjen Perkeretaapian perlu melakukan *followup* ke masing-masing unit kerja;
- 4) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang *diinput* menjadi data riil;
- 5) Pada menu pengisian RO Renja saat ini mekanisme progresnya secara otomatis terisi dengan perhitungan kumulatif komponen dari masing-masing satker terkait. Oleh sebab itu diharapkan pengisian komponen agar menjadi perhatian;
- 6) Pada akun Eselon I Ditjen Perkeretaapian, apabila terdapat kegiatan milik Satker Balai yang sudah terisi maka fungsi dan peran Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebatas pemantauan;
- 7) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
 - a) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
 - b) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
 - c) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
- 8) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat pada aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;

- 9) Apabila terdapat kendala pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas biasanya karena kendala integrasi dengan KRISNA dan aplikasi SAKTI Kemenkeu;
- 10) Saat ini pada aplikasi e-Monev sudah terintegrasi antara realisasi anggaran dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu, sedangkan realisasi *output* untuk penetapan targetnya harus dimasukkan di awal tahun dengan cermat karena apabila sudah dilakukan verifikasi tidak bisa dirubah/diedit.

3. Penyampaian paparan terkait pelaporan kinerja Triwulan II unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025



- b. Posisi saat ini telah dilaksanakan Hasil Evaluasi Internal Implementasi SAKIP DJKA Tahun 2025 dimana nilai DJKA sebesar 83,94 dengan predikat A. Adapun hasil evaluasi unit kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	A
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	A
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	BB
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	A
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	A
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	A
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35	A
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20	BB
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	A

13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	A
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	BB
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	A

c. Terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a) Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
- b) Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
- c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria on the right track termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja;
- d) Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
 - Reviu terhadap Laporan Kinerja;
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.
- e) Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran;
- f) Telah dilakukan Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode TW II 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Unit Kerja	Hasil Evaluasi Internal Unit Kerja				Hasil Evaluasi AKIP Internal Eselon I			
		Jumlah	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Tuntas	Proses	Belum
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
2	Direktoria Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	9	9	-	-	9	9	-	-
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	10	10	-	-	10	10	-	-
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	12	12	-	-	12	11	1	-
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	10	10	-	-	10	10	-	-
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	7	7	-	-	7	7	-	-
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	7	7	-	-	7	7	-	-
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	11	11	-	-	11	8	3	-
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	10	10	-	-	10	10	-	-
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	10	10	-	-	10	10	-	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	10	10	-	-	10	9	1	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	11	11	-	-	11	11	-	-
Jumlah		144	144	0	0	144	138	6	0

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:

- a.) Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian (Setditjen Perkeretaapian);
- b) Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Setditjen Perkeretaapian, Dit. Keselamatan);
- c) Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (Dit. Sarana);
- d) Persentase rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan (Dit. Keselamatan);
- e) Persentase pemenuhan target angkutan kereta api (BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BPKA Sulsel);
- f) Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (Balai Pengujian);
- g) Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (Balai Pengujian);

Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:

- a) Mendorong percepatan penyelesaian rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang sedang berproses;
- b) Koordinasi intensif untuk memastikan penyelesaian pengadaan sarana perkeretaapian milik negara (railways crane);
- c) Mendorong Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk berperan aktif memantau sertifikat SDM operator perkeretaapian serta tindak lanjut rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah diterbitkan agar segera dapat ditindaklanjuti;
- d) Pemantauan pemenuhan SPM berkala untuk memastikan layanan angkutan KA penumpang terselenggara dengan baik. Untuk mendukung angkutan barang perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder agar meningkatkan minat penggunaan angkutan KA;
- e) Revisi Perjanjian kinerja dengan memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran (dampak efisiensi) termasuk penyesuaian target kinerja

tahunan maupun target triwulan pada rencana aksi akibat anomali capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan agar memenuhi kriteria on the right track.

11)Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

4. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA

a. Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja TW I Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitoring Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi). Rata-rata kepatuhan Triwulan I 2025 sebanyak 90,60%.

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, kertas kerja evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian reward and punishment terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
- 2) Penyajian Informasi Kinerja (30%);
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

- b. Selain itu telah dilakukan Pemantauan Pengisian Aplikasi e-Sakip Reviu dengan hasil sementara per 4 Juli sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Data Kinerja																	
		Rencana Strategis 2020-2024	Naskah Teknokratik Renstra 2025-2029	RKT 2025	PK 2024			PK 2025		LMCK Triwulan	LKIP 2024	DIPA 2025	TL LHE 2024	Monitoring Rencana Aksi 2025					
					Awal	Revisi	Revisi II	Awal	Rev I	TW IV				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun
1	Setditjen Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Direktorat LLAKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Direktorat Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Direktorat Sarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Direktorat Keselamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	BTP Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	BTP Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	BTP Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BTP Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	BTP Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	BTP Padang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	BTP Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	BPKAR Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	BPKA Sulawesi Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Agar unit kerja segera melengkapi data dukung terkait termasuk dokumen Revisi PK dan Monitoring Rencana Aksi s.d periode TW II 2025, selain itu pada Balai Perawatan agar segera melakukan upload data dukung TL LHE 2024 dan pada BPKA Sulawesi Selatan agar upload DIPA 2025.

- c. Diharapkan agar unit kerja segera melakukan pengisian monitoring rencana aksi pada aplikasi SILAKI.

Gambar 4.10: Pengisian Monitoring Rencana Aksi (Silaki)

No	Unit Kerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DIREKTORAT PRASARANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	DIREKTORAT SARANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DIREKTORAT REGULASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN YOGYAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN SURABAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN SEMARANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN MEDAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	BALAI TEKNIK PERKERETAAPAIAN PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- d. Diharapkan agar unit kerja segera melengkapi monitoring capaian output pada aplikasi Monev Kemenkeu.

No	Kode Satker	Nama Satker	Partisipasi Satker*)						Monitoring Capaian Output**)						Keterangan
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	
1	445572	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	467005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lengkap
5	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lengkap
6	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lengkap
7	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	467373	Balai Perawatan Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lengkap
11	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	467462	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan KA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	467478	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	467484	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
15	467504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

- e. Outline dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan:



- f. Terkait penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja, diharapkan agar unit kerja memperhatikan kembali terkait kelengkapan laporan sesuai dengan Catatan Hasil Evaluasi Berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2025.
- g. Pada struktur prioritas nasional terkait kebijakan sektor transportasi terdapat 3 Indikator Program Prioritas dan 2 Kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:

- h. Adapun target Indikator RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

ProP - Peningkatan Jalur Kereta Api • Indikator 1: Jalur KA yang Dibangun • Indikator 2: Jalur KA yang Terkonstruksi Simpul Transportasi dan Koridor Logistik ProP - Peningkatan Pemeliharaan, Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana KA Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan • Indikator 1: Pemeliharaan Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana KA • Indikator 2: Peningkatan Prasarana Kereta Api • Indikator 3: Pemeliharaan Perawatan Kereta Api • Indikator 4: Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian • Indikator 5: Peningkatan Stasiun KA Antar Kota • Indikator 6: Peningkatan Fasilitas • Indikator 7: Peningkatan Perawatan • Indikator 8: Peningkatan Rawan Bencana di Jalur KA • Indikator 9: Peningkatan atas Keterpaduan Layanan ProP - Peningkatan Layanan Nonkomersial Kereta Api (Perintis/PSO) • Indikator 1: Layanan Perintis Kereta Api ProP - Tata Kelola Perkeretaapian • Indikator 1: Jumlah Kelembagaan Mendukung Tata Kelola Konktivitas Kereta Api	BTP/BPKA, DIREKTORAT TEKNIS TERKAIT
ProP - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel • Indikator 1: Jaringan KA Perkotaan Dibangun • Indikator 2: Efisiensi Jalur KA Perkotaan • Indikator 3: Layanan KA Perkotaan Perintis • Indikator 4: Stasiun KA Perkotaan yang Ditingkatkan • Indikator 5: KA Perkotaan yang dikembangkan ProP - Pengembangan dan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan • Indikator 1: Peningkatan Perencanaan Pengembangan Sistem Perkotaan	BTP/BPKA, DIREKTORAT TEKNIS TERKAIT

5. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025:

- a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025:

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW II	KINERJA TW II	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	23,00	3,84	7,69	11,53	23,00	7,69	100,00	33,33
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	8,00	100,00	40,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	*104,02	108,81	108,81
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	36,00	5,00	10,00	24,00	36,00	10,00	100,00	27,00
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,79	102,26	102,26
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	19,00	4,29	8,91	13,80	19,00	*7,76	87,01	41,77
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	19,00	4,64	9,34	14,09	19,00	*6,73	86,43	35,76
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKK.8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83,50	-	-	-	83,50	-	-	-

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
	IKK.10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	83,00	50,00	50,00	50,00	83,00	49,89	99,78	60,11
	IKK.11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	83,00	50,00	60,00	70,00	83,00	52,35	87,26	63,07
	IKK.12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	76,50	-	-	-	76,50	-	-	-

- 2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 6 dokumen dan target jumlah dokumen pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen. Terpenuhinya 2 Dokumen dari 2 target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dokumen Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota-Ancol);
 - b) Dokumen Hasil Evaluasi atas Permohonan Penyesuaian *Alinyemen Trase MRT East West Line Phase 1 Stage 1*.
- 3) Pada IKK Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 5 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen dengan rincian:
 - a) Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi;
 - b) Dokumen Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa.
- 4) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA, realisasi frekuensi sampai Bulan Mei 2025 adalah sebanyak 439.997 KA dari target triwulan II sebanyak 422.985 KA.
- 5) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 15 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 4 dokumen. Terpenuhinya 4 Peraturan bidang lalu

lintas dan angkutan kereta api dari target 4 Peraturan pada Triwulan II Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

- a) KM 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;
 - b) KM 6 Tahun 2025 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;
 - c) KP-DJKA 18 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - d) KP-DJKA 19 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Commuter Indonesia;
- 6) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA, capaian kinerja sebesar 3,79 dengan capaian kinerja triwulan dan tahunan sebesar 102,26% yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat LLAKA telah memperoleh kategori Sangat Baik dengan jumlah responden sebanyak 90 orang per Juni 2025.
- 7) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 7,69% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,01% dan capaian kinerja tahunan sebesar 41,77% dengan realisasi penumpang per Mei 2025 adalah sebesar 217.069.049 orang dari target jumlah penumpang Tahun 2025 adalah sebesar 519.616.302 orang dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 249.486.471 orang.
- 8) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 6,73% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 72,11% dan capaian kinerja tahunan sebesar 35,76% dengan realisasi angkutan barang per Mei 2025 adalah sebesar 24.322.422 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 33.731.907 ton.

- 9) Pada IKK Nilai AKIP, progress pemenuhan nilai AKIP sampai Triwulan II Tahun 2025:
- a) Telah dilakukan Penilaian LKIN Tahun 2024 sebagai bentuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 - b) Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat LLAKA Tahun 2025, PK ASN Tahun 2025, SKP ASN 2025, dan dokumen RKT Direktorat LLAKA Tahun 2025;
 - c) Telah dilakukan publikasi laporan kinerja pada E-Sakip Reviu, SILAKI, dan Website Direktorat LLAKA tepat waktu;
 - d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
- 10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA, progress pemenuhan tingkat penerapan Manajemen Risiko sampai Triwulan II Tahun 2025:
- a) Telah disusun Piagam Manajemen Risiko Direktorat LLAKA Tahun 2025;
 - b) Telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Direktorat LLAKA;
 - c) Telah disusun Laporan Pemantauan RTP Triwulan I Tahun 2025;
 - d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Tingkat Penerapan MR Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
- 11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 48,89 dengan capaian kinerja triwulan 99,78% dan kinerja tahunan 60,11%.
- a) Nilai Perencanaan Kinerja 0 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran 48,89;
 - b) Nilai Pagu Efektif 2025 sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp30,104.611.000 dengan realisasi keuangan sampai pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.778.080.876 dengan realisasi fisik 33,91%.
- 12) Pada IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 52,35% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,26% dan capaian kinerja tahunan sebesar 52,35%. Total penerimaan PNBP hingga Triwulan II Tahun 2025

adalah Rp535.859.713.678 dari target tahunan sebesar Rp1.023.542.453.000.

13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, progress pemenuhan nilai Arsip sampai Triwulan II Tahun 2025:

- a) Telah disusun Laporan Arsip Aktif Tahun 2024;
- b) Telah dilakukan penataan arsip aktif pada Subdit Lalu Lintas.

b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline/ Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Tw II	Realisasi Kinerja Tw II	Capaian Tahunan	Capaian Tw II
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	61,430	64,540	61,430	61,430	95,179%	100,000%
Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,020	95,020	95,020	93,199	98,084%	98,084%
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	64,430	65,270	64,430	64,430	98,714%	100,000%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,870	3,890	3,870	3,882	99,794%	100,310%
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	47,670	50,340	47,670	48.411	96,168%	101,554%
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	86,900	90,480	86,900	87,059	96,219%	100,182%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	82,10	83,200	-	-	-	-

Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	15,000	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	95,41	85,760	48,000	45,830	53,439%	95,479%
	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	99,02	100,000	75,9	75,168	75,168%	99,035%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	79,000	-	-	-	-

2) Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana, progress sampai dengan triwulan II tahun 2025 Dokumen Teknis BED/DED sebagai berikut:

- a) BED St. Padalarang - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap gambar teknis oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan, gambar hasil perbaikan yang mengakomodir catatan catatan telah diserahkan kembali;
- b) BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan gambar teknis dan telah menyerahkan hasil perbaikan ke direktorat prasarana perkeretaapian pada tanggal 25 juni 2025, saat ini sedang dilakukan proses pengecekan gambar teknis hasil perbaikan;
- c) DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan pada gambar teknis bagian jalan rel, saat ini sedang proses persetujuan;
- d) DED Balai Yasa KRL Cicalengka- Telah dilaksanakan koordinasi pemeriksaan gambar teknis antara direktorat prasarana perkeretaapian

dengan konsultan terkait studi DED pada tanggal 10 juni 2025 melalui zoom;

- e) DED Jembatan Lintas kayu Tanam - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut pada tanggal 20 Mei 2025 secara luring di Ruang Rapat lantai 14 Gedung Karya Kementerian Perhubungan.

3) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, Target tahun 2025 sesuai dengan target Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak terdapat perubahan sebesar 95,020%, Progres sampai dengan bulan triwulan II tahun 2025 yaitu telah dilakukan pengukuran jalur KA periode I tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode I pada tanggal 28 - 30 April 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil:

- a) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 93,20% dengan panjang jalur 5553,676 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5958,955 Km;
- b) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 6,801% dengan panjang jalur 405,279 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5985,955 Km;
- c) Realisasi Periode I Tahun 2025:

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur	Jalur Terukur Periode I Tahun 2025	Persentase Dibandingkan Panjang Jalur		Persentase Dibandingkan Panjang Terukur	
			Km	Km	Km		Km	
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam	5.958,955	5.958,955	5.553,676	93,199	5.553,676	93,199
	Kategori 2	Kondisi : Nyaman						
		Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam						
		Kondisi : Aman						
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam	5.958,955	5.958,955	405,279	6,801	405,279	6,801
	Kategori 4	Kondisi : waspada						
		Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam						
		kondisi : Bahaya						

4) Pada IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal, target peningkatan sistem persinyalan yang termasuk dalam kategori Fasilitas Operasi dengan teknologi Handal sebesar 65,27 yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progres sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Telah dilakukan audiensi dengan PT. KAI terkait Evaluasi Dokumen Teknis Fasilitas Operasi pada Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 Lintas Lahat - Kertapati Sumatera Selatan pada

tanggal 6 Februari 2025 dengan hasil akan dilakukan perbaikan gambar teknis sesuai dengan kondisi di lapangan;

- b) Proses izin pembangunan pada bidang fasop dalam tahap evaluasi dokumen teknis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan perbaikan pada keseragaman gambar sinyal dan cable plan dan 27 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan penambahan gambar tipikal layout ER;
 - c) Hasil perbaikan asistensi tanggal 27 Maret 2025 sudah disampaikan dan tidak ada koreksi lanjutd. Telah dilakukan pembahasan internal terkait penggunaan container untuk bangunan ER;
 - d) Proses tindak lanjut pengesahan menunggu Justifikasi Teknis penggunaan container untuk bangunan ER yang pada saat ini PT KAI masih dalam proses memastikan perlu atau tidaknya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk ER dengan PUPR.
- 5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sampai dengan periode Bulan Juni Tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,882 dari 27 responden dengan target Bulan Juni sebesar 3,870 sehingga capaian Bulan Juni sebesar 100,31%. Penggunaan aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan sinkronisasi SSO diharapkan dapat dilaunching dan digunakan pada tahun 2025 (inovasi kinerja).
- 6) Pada IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target sebesar 50,340 % yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan realisasi bulan Juni sebesar 48.411% (target Triwulan II sebesar 47,670%). Progres sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebagai berikut:
- a) Telah terbit 7 Sertifikat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA;
 - b) Telah terbit 16 Sertifikat Kelaikan Fasilitas Operasi KA.
- 7) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian, sesuai dengan penetapan revisi PK tahun 2025 tidak terdapat perubahan

terget, yaitu target kinerja tahunan sebesar 90,480% dan realisasi TW II 2025 sebesar 87,059%. Progres TW II 2025 antara lain:

- a) Telah Terbit KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian tanggal 26 Maret 2025;
 - b) Pada Revisi PM 60 Tahun 2012, belum bisa dilakukan pembahasan dikarenakan masih terkendala efisiensi anggaran dan akan dilakukan pengajuan revisi anggaran untuk pembahasan lanjutan;
 - c) Pada Standar Pedoman TQI, telah dilakukan konsultasi publik hasil penyusunan pedoman TQI, seluruh operator telah menyetujui draft namun masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan PT KAI dan PT CRI dikarenakan terdapat beberapa perbedaan;
 - d) Pada Revisi PM 44 Tahun 2018, telah dilakukan pembahasan internal terhadap lampiran revisi PM 44 Tahun 2018 namun masih diperlukan perbaikan kembali;
 - e) Pada Pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api, berdasarkan hasil evaluasi untuk penyusunan draft pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api masih perlu dilakukan kajian dengan tenaga ahli terkait dan perlu dilakukan penambahan anggaran untuk kegiatan kajian pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api.
- 8) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilaksanakan antara lain:
- a) Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/1/13/ITJEN/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah dilakukan Wawancara Penilaian Manajemen Risiko dalam rangka Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b) Telah dilaksanakan pembahasan Komunikasi dan Konsultasi/pembahasan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;

- c) Telah dilakukan Penetapan Selera risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian;
 - d) Telah ditetapkan dokumen Piagam Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 Januari 2025;
 - e) Telah dikomunikasikan kepada seluruh pengelola risiko perihal rencana penanganan risiko melalui Nota Dinas Pemilik Risiko agar para pengelola risiko melaksanakan kegiatan penanganan risiko tahun 2025;
 - f) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko dan didapatkan nilai 24,5 level Managed.
- 9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, realisasi belanja Satker sampai dengan periode Bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp. 7.372.941.676 (1,450%). Kendala utama disebabkan terdapat kebijakan penghematan anggaran. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Monev Kemenkeu sebesar 45,83 dengan rincian:
- a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 0;
 - b) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 45,83.
- 10) Pada IKK PNBPN, terdapat perubahan target nominal semula Rp.908.250.000 menjadi Rp. 2.812.286.448 progress sampai dengan bulan Juni tahun 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 155.200.000,- sehingga jumlah PNBPN kumulatif sampai dengan bulan Juni sebesar Rp. 2.113.936.448.
- 11) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan penetapan revisi perjanjian kinerja telah ditetapkan target sebesar 79,00. Selain itu telah dilakukan Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

c. Direktorat Sarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II
IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,67	30	66,67	66,67	100	30	-	-
IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,7	3,4	3,78	102,16	3,7	3,82	103,24
IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,84	61,39	3,85	4,74	123,11	28,39	28,31	99,71
IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,12	37,03	45,12	0	-	-	-	-
IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18	71,01	3,6	1,8	50	71,01	28,2	39,71
IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91	100	91	100	109,89	100	100	100
IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25	81,25	0	0	-	-	-
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	15	15	15		-	-	-	-
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,7	86,7	20,08	50	592,23	25,64	45,49	177,41
IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100	25	73,43	293,72	77,43	82,87	107,025
IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	79,57	79,57	0	0	-	-	-

- 2) IKK 1 belum target di TW II dikarenakan tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 terkait rekomendasi kebijakan bidang fasilitas asarana perkeretaapian.
- 3) Pelaksanaan survey dalam mencapai IKK 2 dilakukan pada bulan Jan – Jun 2025 secara agregat memperoleh nilai 3,82 dalam skala 4 dengan 29 responden.
- 4) Capaian pemenuhan IKK 3 bulan Juni sebanyak 3.689 sertifikat, dengan rincian 2.249 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1.440 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
- 5) IKK 4 NSPK belum ada realisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga penyusunan NSPK tidak dapat dilaksanakan.
- 6) Realisasi IKK 5 TW II 2025 sebesar 28,2%. Pengoprasian SMN yang dibiayai dibebankan ke anggaran sebanyak 2 unit, lainnya terdapat pelaksanaan kegiatan tanpa menggunakan anggaran pengoprasian menjadi non komersial dan komersial.
- 7) IKK 6 sudah dilakukan rampcheck dengan realisasi 100%. Kegiatan rampcheck tersebut dilaksanakan pemeriksaan kelaikan dan kesiapan operasional sarana dalam rangka Hari Libur Idul Adha dan Libur Sekolah.
- 8) Terkait nilai AKIP pada IKK 7 target pada TW IV sebesar 81,25 dengan upaya yang telah dilakukan sekarang yaitu:
 - a) SK Penyelenggaraan SAKIP;
 - b) PK dan PK berjenjang;
 - c) Laporan PNBPN.
- 9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
 - a) Sudah tersusun SK Satgas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025;
 - b) Sudah tersusun SK Tim PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.
- 10) Realisasi IKK 9 dengan nilai 45,49% dengan rincian:
 - a) Penyerapan: 17,42%;
 - b) Konsistensi: 18,20%;
 - c) CRO: 15,11%;

d) Efisiensi: 15,05%;

e) Nilai efisiensi: -

11)PNBP pada IKK 10 hingga bulan Juni sebesar Rp 1.422.000.000.

12)IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 79,75.

13)Pada pengisian aplikasi, Dit. Sarana mengalami kendala di E-performance sama seperti BTP Kelas I Bandung karena ada perubahan dan terdapat indikator yang hilang. Sudah bisa approve tadi pagi tetapi ada kendala lagi di app silaki di indikator pemenuhan SMN tertulis “tidak ada kegiatan pendukung”, masih dicari tau penyebabnya. Saran: untuk segera di infokan kepada user untuk dicek.

14)SNM kegiatan pengadaan belum dilakukan, untuk terkait pengadaan barang yang berjalan dimungkinkan barang sampai pada bulan Agustus.

15)NKA perhitungan dengan rumus lama, diperlukan update pada aplikasi emonev Kemenkeu.

16)IKK sertifikasi telah memenuhi tetapi anomali. Dipastikan anomali alasannya seperti apa/justifikasinya seperti apa dikarenakan sudah dilakukan pengganti PK.

17)Masukan: penyempurnaan resntra sebelum Kepditjen dimasukan indikator perawatan sarana pada IKK 5.

18)Terkait dengan nilai AKIP: Semua kegiatan pendukung yang tidak di monitoring rencana aksi dapat di evaluasi, dikarena yg dievaluasi pada indikatornya saja.

19)Rencana aksi diikuti pada 2024 sehingga terdapat anomali. Selanjutnya akan di koordinasikan lagi terkait dengan rencan aksi.

d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Keselamatan Perkeretaapian:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. II	Realisasi Tw. II	Capaian Tw. II
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	IKK.1 Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	16,66 (3)	0,00	11,11	100,00

	IKK.2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	15,78 (15)	3,16	5,26	166,45
	IKK.3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	5,00 (1)	0,00	5,00	100,00
	IKK.4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	19,44 (7.000)	10,71	7,98	74,50
	IKK.5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	88,88 (48)	88,88	88,88	100,00
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	IKK.6 Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%	15,00 (3)	5,00	5,00	100,00
	IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,86	3,86	3,76	97,40
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,67	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	85,61	50,00	48,82	97,64
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	100,00	51,03	41,10	80,54
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	66,00	-	-	-

2) Pada IKK SMKP, target pada TW II Tahun 2025 sebesar 0%, maka dengan ditindaklanjutinya 2 hasil audit khusus SMKP tahun 2024 maka realisasi pada TW 2 tahun 2025 sebesar 11,11 % dan capaian kinerja TW 2 sebesar 100,000 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 66,69 %. Kedepannya akan dilakukan Audit SMKP kepada PT. CRI, LRT Jabodebek dan PT. KCIC untuk mendukung tercapainya target IKK yang telah ditetapkan pada tahun 2025 oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

- 3) Pada IKK Rekomendasi peningkatan keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan, sampai dengan TW II 2025 terdapat 5 Rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian sehingga realisasi pada TW II sebesar 5,26 % dari target yang ditetapkan 3,16 % dan capaian kinerja TW II sebesar 166,45% . Akan dilakukan monitoring terhadap penyelenggara perkeretaapian untuk menindaklanjuti rekomendasi peningkatan keselamatan yang belum ditindaklanjuti.
- 4) Pada IKK Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian, telah terjadi 1 Juni 2025 telah terjadi pelanggaran di bidang perkeretaapian berupa kendaraan Truk kontainer No. POL B 9470 MP melintas di JPL 449 Km 363+9/0 petak jalan Stasiun Kawunganten dan Stasiun Jeruklegi Kawunganten, Cilacap Jawa Tengah, kemudian truk kontainer tersebut masuk jalur kereta api untuk berputar balik namun kendaraan tersangkut selama kurang lebih selama 30 menit. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2025 telah dilakukan rapat dengan pihak terkait dan di buat kan berita acara pembahasan tindak lanjut terkait pelanggaran tersebut dan surat pernyataan permohonan maaf serta tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut oleh pelaku.
- 5) Pada IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sampai dengan Juni 2025, telah tercapai 2.873 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada TW II 2025 adalah 10,71 dengan realisasi sebesar 7,98 dan target TW II 2025 belum tercapai. Target pada TW II Tahun 2025 belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapian (operator dan dinas perhubungan) belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
- 6) Pada IKK Pemenuhan NSPK terdapat revisi Perjanjian Kinerja terhadap IKK Pemenuhan NSPK, target yang semula 9 NSPK menjadi 48 NSPK dikarenakan penghitungan target 2025 adalah baseline tahun sebelumnya ditambah dengan target tahun berjalan (39 NSPK + 9 NSPK = 48 NSPK). Direktorat Keselamatan mengusulkan pembahasan RPM dengan unit kerja terkait sehingga diharapkan RPM tersebut dapat disahkan menjadi PM pada Tahun 2025.

- 7) Pada IKK Persentase rekomendasi Teknis Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja 2025 dengan target IKK Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti sebesar 15,00% dan target pada TW II sebesar 5,00 % dengan realisasi pada TW II 2025 sebesar 5,00% sehingga target pada TW II 2025 tercapai dengan capaian kinerja tahunan sebesar 100,00%.
- 8) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai kualitas pelayanan pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 3,4 dari skala 4 sehingga nilai IKM TW II tahun 2025 sebesar 3,76 dari target TW II sebesar 3,86 dan capaian kinerja TW II 2025 sebesar 97,40%. Akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat pada aplikasi yang telah disediakan sehingga target TW selanjutnya dapat tercapai.
- 9) Pada IKK AKIP, target sebesar 83,67 dan telah dilakukan penilaian AKIP oleh tim penilai dari Balai Pengujian pada bulan Juni 2025 dengan nilai sementara sebesar 84,10.
- 10) Pada IKK Manajemen Risiko, telah dilakukan pemantauan serta pengisian data dukung oleh masing masing unit kerja untuk penyusunan laporan pemantauan MR periode TW II Tahun 2025.
- 11) Pada IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi kinerja TW II 2025 sebesar 48,82 % sehingga target TW II 2025 belum tercapai dikarenakan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target dan terdapat deviasi pada halaman 3 DIPA. Akan dilakukan revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman 3 DIPA.
- 12) Pada IKK PNBK, realisasi sebesar 41,10 dan target pada TW II belum tercapai karena penyelenggara perkeretaapian operator perkeretaapian belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
- 13) Pada IKK Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, telah dilaksanakan pemanfaatan aplikasi Srikandi untuk persuratan dan kearsipan, melakukan pemberkasan arsip Aktif Tahun

2024, serta persiapan menyiapkan kelengkapan audit internal arsip Dit. Keselamatan Tahun 2025.

14) Pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu:

- a) Kecelakaan anjlokkan kereta api tanggal 15 Maret 2025 pada emplasemen Stasiun Ujanmas Divre III Palembang;
- b) Kecelakaan anjlokkan kereta api tanggal 23 Juni 2025 pada emplasemen Banar Sari Divre III Palembang.

15) Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%.

e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Jakarta:

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2025	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN TRIWULAN II			KINERJA TRIWULAN II		
						PAGU EFEKTIF	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KIPP Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	100,00%
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	- Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Pembangunan fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	96,14%
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.381.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	*6,65%	*70,90%
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	- Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	964.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	100,00%

1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KIPP Penertiban Lahan Jalur KA Lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	100,00%
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	-Peningkatan Stasiun Rangkasbitung -Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I -Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III -Penyusunan dokumen perencanaan -Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	96,14%
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	-Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	-Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.281.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	*6,65%	*70,90%
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	-Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	-Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian -Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	364.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	100,00%

- 2) Pada IKK 1 sudah terhubung 9 dan belum terhubung 5, dengan upaya yang dilakukan untuk peningkatan IKK 1 pada tahun 2025 yaitu Pemetaan penertiban lahan lintas Rangkasbitung – Pandeglang, dan mengusulkan kembali pada RKA 2026 Penertiban Lahan Rangkasbitung Labuan (Segmen I) yang terdampak efisiensi tahun 2025.
- 3) Presentase TQI masih menggunakan pengukuran periode 1 2025 dan data tersebut menggunakan data TW I dari PT.KAI, sedangkan TW II masih dalam proses pengukuran.
- 4) Terkait IKK 3 total sinyal 64 9 (elektrik 63, dan mekanik 1).
- 5) Terkait dengan IKK 4 data bulan Juni masih menunggu data dari Dit.LLAKA. Untuk sementara dapat yang di dapatkan realisasi kumulatif angkutan pnp s.d. Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2025 adalah 176.094.332 Orang (3,86%) dan angkutan barang 1.090.338 Ton (2,79%) total keseluruhan 6,65% dengan Capaian Triwulan II (s.d Mei 2025) 70,90%.
- 6) Jumlah kejadian di perlintasan sebidang pada TW II 2025 sebanyak 7 kejadian dengan jumlah kumulatif s.d TW II 2025 sebanyak 16 kejadian dan target 2025 sebanyak 26 kejadian.
- 7) Terkait IKK 6, pada BTP Kelas I Jakarta tidak terdapat kecelakaan pada TW II 2025. Jumlah keberangkatan KA s/d Mei yaitu 325.421 perKA.
- 8) Nilai AKIP pada IKK 7 akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 81,2. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP tersebut berupa:
 - a) Telah Menyusun LMCK TW I 2025;
 - b) Telah disusun PK Revisi 2025;

- c) Telah mengisi capaian kinerja di *e-performance*;
 - d) Telah mengisi emonev Bappenas;
 - e) Akan menyusun LMCK TW II 2025.
- 9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
- a) Telah disusun Laporan MR Triwulan I 2025;
 - b) Telah disusun SK maturitas SPIP 2025;
 - c) Proses penyusunan Laporan MR Triwulan II 2025.
- 10) NKA ada kemungkinan tidak akan tercapai dikarenakan jika ada salah satu kegiatan, salah satunya manggarai yang anggarannya cukup besar belum bisa terlaksana pada tahun ini. Untuk realisasi penyerapan anggaran masih kecil pada aplikasi Spanint.kemenkeu yaitu sebesar 9,31%.
- 11) IKK 10 realisasi PNBP Pada TW II sebesar 5.308.776.020 dengan kumulatif s.d Juni 2025 sebesar 20.266.213.299. Revisi target PNBP tahun 2025 22.596.213.299. PNBP dinaikkan karena sebelumnya anomali, sekarang sudah tercapai.
- 12) IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 89. Upaya yang telah dan akan dilakukan:
- a) BTP Jakarta telah bersurat terkait usulan pemusnahan arsip inaktif;
 - b) Telah dibuat SK Tim Pengelola Arsip 2025;
 - c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
 - d) Melaksanakan penerimaan dokumen fisik dan scan dari satker perawatan periode 2023-2024;
 - e) Melaksanakan penerapan aplikasi srikandi (sistem kearsipan terintegrasi) di lingkungan UPT DJKA.
- 13) Progress pengisian aplikasi sudah dilakukan pengisian pada aplikasi e-Monev, e-performance, SILAKI ada beberapa yang masih menunggu revisi PK.
- 14) Rasio konektivitas menghubungkan Pandeglang sudah masuk renstra sampai konstruksi 2025 – 2029 dapat ditambahkan untuk penilaian tersebut.

- 15)Terkait dengan TQI ada penurunan dikarenakan IM masih dalam koordinasi dengan PT. KAI. TQI yang nilainya turun bisa dimasukkan prioritas perawatan untuk berkoordinasi PT KAI.
- 16)Perlu diidentifikasi penurunan 91 ke 87 di lintas mana. Kalo di BTP sumsel perawatan jalur selain di capaian kegiatan peningkatan. Bisa diusulkan melalui kegiatan IM, diharapkan salah satu IM selain untuk keselamatan bisa juga untuk meningkatkan TQI khususnya bagi yang mengalami penurunan kualitas.
- 17)Terkait dengan pembayaran IMO, diperlukannya identifikasi pada TW IV 2024 dan TW II apakah ada yang belum diukur dengan PT KAI? Anrisipasi untuk kedepannya pada TW III dan TW IV 2025 agar tidak ada penurunan nilai TQI.
- 18)Revisi PK mungkin sebagian bisa menjaga on the right track nya karena masih banyak TW II yang tidak on the right track takutnya dengan perkembangan evaluasi itjen yang berubah harus diantisipasi. Realisasi per wilayah harus dijaga.
- 19)Terkait batas wilayah yang bersebelahan dengan BTP Bandung perlu dikonfirmasi, karena masih ada data yang timpang.
- 20)Terkait penurunan angkutan barang dikarenakan pengaruh dari B2B PT.KAI dengan kontrak pengguna jasa. Stasiun Merak pun akan di mundurkan dari pelabuhan, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan logistik kembali. Saran: untuk angkutan yang ada di Tanjung Priok dapat dilakukan 2x, dan untuk target dipindahkan dari presentase penumpang yang dinaikan, presentase barang yang dikurangkan.
- f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Bandung:

Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk)		Satuan Ikk	Target Pk 2025	Target Pk Revisi I 2025	Target Kinerja Triwulan II	Realisasi Kinerja Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,550	0,550	0,550	0,550	100%

	Kelas I Bandung						
IKK 2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88,380	88,380	88,380	83,501	94%
IKK 3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70,650	70,650	70,650	70,650	100%
IKK 4	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	18,000	18,000	7,480	7,112	95%
IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10,000	10,000			
IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100%
IKK 7	Nilai AKIP Balai Teknik	%	80,500	80,500			

	Perkeretaapian Kelas I Bandung						
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	15,000	15,000			
IKK 9	Nilai Kinerja Anggran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81,000	89,550	44,775	38,760	87%
IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	79,500	79,500			

- 2) Pada IKK Konektivitas sudah tidak ada pekerjaan pembangunan Jalur KA yang menghubungkan jalur yang belum terhubung sehingga IKK tercapai. Adapun kegiatan pendukung Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban tidak jadi dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi.
- 3) Pada IKK TQI, total panjang terukur BTP Bandung bertambah seiring telah beroperasi Jalur Ganda KA Kiaracondong – Cicalengka. Adanya penurunan nilai TQI kategori I dan II pada beberapa wilayah BTP Kelas I Bandung yang mengakibatkan adanya penurunan pada hasil perhitungan TQI nya. Akan dilakukan update perhitungan TQI tersebut. Direncanakan kontrak IMO dengan PT. KAI selaku pelaksana kegiatan IMO dilakukan terpisah antara IO (pengoperasian), IM berkala (perawatan berkala), dan IM perbaikan (pengembalian fungsi). Setelah IO dikontrakkan, berikutnya dilakukan koordinasi terkait kegiatan IM (berkala maupun pengembalian fungsi) dengan mengakomodasi keperluan penanganan longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah kerja BTP Bandung.
- 4) Pada IKK Fasop Handal progres fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong -

Cicalengka Tahap II sampai dengan akhir Desember 2024 aktual sebesar 100%. Selanjutnya akan dilakukan pengujian fasop Kiaracondong – Cicalengka Bersama Balai Pengujian Perkeretaapian dan didampingi oleh Direktorat Teknis.

- 5) Pada IKK Presentase Pemenuhan target angkutan KA jumlah kumulatif angkutan penumpang sebanyak 12.814.518 penumpang sedangkan angkutan barang sebanyak 130.595,00 ton sehingga realisasi kinerja IKK 4 sebesar 8,112%. Kedepannya akan dilaksanakan kegiatan pembuatan formulir isian online untuk para PPKA di seluruh stasiun di wilayah Jawa Barat untuk memantau langsung perjalanan KA secara realtime dan juga sebagai data dukung IMO di wilayah Jawa Barat serta kegiatan pemantauan pada stasiun di wilayah Jawa Barat dengan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum di Stasiun maupun di Kereta secara berkala setiap minimal per Triwulan diluar persiapan masa Libur Natal dan Tahun Baru.
- 6) Pada IKK Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang selama Triwulan II 2025 telah terjadi Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang sebanyak 7 kejadian. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring evaluasi perlintasan sebidang di Kabupaten Subang dan inspeksi keselamatan di daerah DAOP 2 dan 3 dalam rangka antisipasi libur Panjang Idul Adha bersama Direktorat Keselamatan.

Beberapa kegiatan pendukung antara lain:

- a) Pekerjaan Lanjutan Untuk Penyelesaian Pembangunan Skybridge Stasiun Bandung dimana telah dilakukan permohonan untuk relaksasi pembukaan blokir yang disertai dengan data dukung berupa justifikasi teknis, KAK dan RAB terkait kegiatan ini;
- b) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ciroyom antara Padalarang – Bandung yang terkena dampak kebijakan efisiensi;
- c) Penanganan Perlintasan Sebidang JPL 150A Km148+006 (Flyover JPO Pusdikpom) dengan progres dari bulan Januari 2025 s/d sekarang pelaksanaan pekerjaan belum dapat dilaksanakan kembali

dikarenakan masih menunggu surat persetujuan penggunaan sementara BMN TNI-AD dari Menhan.

- 7) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, sampai dengan Triwulan II 2025 (akhir Juni) tidak ada kecelakaan KA yang diakibatkan oleh Sarana KA sehingga capaian pada IKK 6 sebesar 100,00%.
- 8) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP Tahun 2025 BTP Kelas I Bandung dengan perolehan sementara 86,05 yang dilakukan sesuai KM 74 Tahun 2024 dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I terhadap Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian didapatkan nilai sementara BTP Bandung sebesar 83,50%.
- 9) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan:
 - a) Melakukan update dan pengisian data pada Aplikasi SIMARKO;
 - b) Telah dilakukan approval profil risiko oleh akun Kepala Balai;
 - c) Menghadiri Undangan Rapat Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan, dan Pelaporan terkait Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025;
 - d) Melakukan monitoring dan melengkapi data dukung rencana pemantauan triwulan II Tingkat Eselon I DJKA dan Balai.
 - e) Telah dilakukan update pengisian Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya pada data dukung BTP Bandung yang selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas SPIP bersama Inspektorat Jenderal.
- 10) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi kinerja Triwulan II 2025 sebesar 38,760 dengan capaian 87,00%. Adapun hasil evaluasi kegiatan pendukung sebagai berikut:
 - a) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal kegiatan yang telah dilaksanakan antara:
 - b) Pembuatan daftar arsip aktif;

- c) Penataan arsip BTP Bandung;
- d) Mengikuti sosialisasi lanjutan aplikasi srikandi dengan narasumber dari Biro Umum Kemenhub tentang rincian jumlah akun pengguna aplikasi srikandi yang aktif di BTP Bandung, yaitu 188 pengguna telah terdaftar;
- e) Membuat nota dinas terkait permohonan data arsip satuan kerja untuk diserahkan;
- f) Membuat nota dinas tentang sosialisasi penggunaan KM 41 tahun 2021 terkait tata naskah dinas.

11) Adapun BTP Kelas I Bandung belum melaksanakan pengisian pada aplikasi e-performance dikarenakan terdapat IKK pada Revisi Perjanjian Kinerja yang belum disetujui sehingga saat itu BTP Bandung belum bisa mengisi capaian terkait, saat ini sudah disetujui oleh akun pimpinan pusat dan bisa segera melakukan pengisian.

- g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Semarang:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET
				TW II	TW II	TW II	
SKT1. Meningkatkan KONEKTIVITAS Prasarana	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	RASIO	0,750	0,750	0,750	100,00%	●
SKT2. Meningkatkan KAPASITAS prasarana pendukung pelayanan kereta api	IKK T2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	99,073	99,073	99,073	100,00%	●
	IKK T3. Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja BTP Kelas I Semarang	%	87,500	87,500	87,500	100,00%	●
SKT3. Meningkatkan KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api	IKK T4. Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	18,340	9,207	9,194	99,86%	●
	IKK T5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	100,000	49,589	49,589	100,00%	●
	IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	11,765	-	-	-	-
SK T4. Meningkatkan KESELAMATAN transportasi kereta api	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Semarang	%	100,000	100,000	100,00	100,00%	●
SK T5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKK T8. Nilai AKIP BTP Semarang	NILAI	82,000	-	-	-	-
	IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	LEVEL	15,000	-	-	-	-
	IKK T10. Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	NILAI	81,000	38,000	31,996	84,20%	●
	IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,000	98,991	98,401	99,485%	●
	IKK T12. Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal BTP Semarang	NILAI	82,300	-	-	-	-

Keterangan: ● Tercapai (capaian sesuai target) 100%
 ● Partisipatif (capaian mendekati target) 80%
 ● Partisipatif (capaian mendekati target) 60%
 ● Partisipatif (capaian mendekati target) 40%

Sumber : e-Performance Kemenhub

- 2) Pada IKK konektivitas target BTP Semarang tercapai 0.75 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Perlu menjadi perhatian terkait target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- 3) Perihal temuan dari Pengujian Pertama Uji Rancang Bangun Fisik Jalur dan Bangunan maupun Fasilitas Operasi berupa JPL pada pekerjaan reaktivasi Pelabuhan Tanjung Emas, BTP Semarang berkomitmen untuk dapat

menyelesaikan pengujian tersebut di bulan Juli 2025 sehingga dapat dioperasikan di bulan September 2025.

- 4) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, total antara Kategori I dan II sebesar 1.641,146 Km'sp dari panjang jalur terukur sebesar 1.656,504 Km'sp, sehingga hasil yang didapatkan 99,073% dari target yang ditetapkan sebesar 99,073%.
- 5) Terdapat penurunan TQI di beberapa petak jalan rel, sebagai contoh:
 - a) Lintas Weleri - Tegal terdapat beberapa kondisi rel cacat sesuai dengan laporan Satpel Pekalongan;
 - b) Petak Gundih - Gambringan masih menggunakan R.42. Ada beberapa taspat yang masih terpasang contoh di Km 63+0 lintas GD-SBI (hilir) taspat 60km/jam, Km 70+2 s.d. 71+0 lintas GD-SBI (hulu) taspat 100km/jam;
 - c) Terdapat penambahan panjang jalur sepanjang 7.256 meter di lintas Kadipiro - Kalioso imbas dari pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Solo Semarang Fase I;
 - d) Perlu koordinasi lanjut dengan PT KAI terkait evaluasi pengukuran hasil TQI Triwulan I 2025 agar dapat ditindaklanjuti secara prioritas dengan melakukan penggantian rel maupun perawatan dengan skema IMO.
- 6) Pada IKK Fasop Handal, unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (105 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik. Perlu koordinasi lanjut dengan Direktorat Prasarana untuk pengesahan review design staging persinyalan, sementara kegiatan masih dalam tahap commissioning test untuk single track di tahun 2024. Pada Tahun 2025, akan dilanjutkan untuk staging ultimate signal double track.
- 7) Pada IKK persentase pemenuhan target angkutan KA, capaian angkutan penumpang sebanyak 3.109.721 penumpang dan angkutan barang sebanyak 231.470 ton barang sehingga realisasi kumulatif total 2025 sebesar 9,194% dari target 2025 sebesar 18,340%.

BTP Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan KA;

- b) Melakukan kolaborasi dengan operator terkait peningkatan pelayanan angkutan KA;
 - c) Melakukan program-program strategis demi terciptanya update database inventarisasi stasiun.
- 8) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, sampai dengan Juni 2025 dari 120 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 120 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 17.280 penumpang, dimana terdapat 16.890 penumpang yang menggunakan KA Perintis, adapun total pendapatan atas penjualan tiket adalah sebesar Rp 67.560.000.
- 9) Pada IKK Persentase Penurunan Gangguan Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang s.d Triwulan II 2025 terdapat 16 gangguan operasional di perlintasan sebidang, namun BTP Semarang belum mentargetkan persentase jumlah gangguan pada Triwulan II karena akan diakumulasikan di akhir tahun. Kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya, untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, antara lain:
 - a) Penutupan perlintasan sebidang tidak resmi yang telah masuk dalam program penutupan perlintasan di tahun 2025;
 - b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas solusi permasalahan;
 - c) Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang;
 - d) Sosialisasi dan Promosi Keselamatan di Perlintasan Sebidang.
- 10) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, untuk meningkatkan keselamatan, Seksi Sarana dan Keselamatan BTP keals I Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, antara lain:
 - a) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 4 Semarang;
 - b) Monitoring tindak lanjut inspeksi keselamatan di wilayah DAOP 4 Semarang;
 - c) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 6 Yogyakarta;
 - d) Pembahasan penyediaan dan pengawasan sarana milik negara;

e) Rapat pembahasan permohonan pembangunan underpass desa Kemiri;

11) Pada IKK Nilai AKIP, pada Triwulan II BTP Semarang belum mentargetkan Nilai AKIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penilaian Evaluasi AKIP Internal, dengan capaian nilai sebesar 83,20. Hasil ini telah dilaporkan dan akan dilakukan Penilaian di tingkat Eselon I. BTP Semarang akan akan menindaklanjuti dan melengkapi kekurangan data dukung untuk meningkatkan penilaian AKIP di tingkat eselon I serta melakukan penyusunan Triwulan II 2025.

12) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang tidak menetapkan target tingkat penerapan MR dikarenakan penilaian belum disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Namun BTP Semarang telah melaksanakan penilaian mandiri tingkat unit kerja dengan hasil yang didapatkan yaitu nilai sebesar 22 (managed).

13) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang s.d Juni 2025 Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan komponen realisasi Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA, antara lain NPA = 1,564 dan IKPA = 30,432, sehingga capaian NKA BTP Semarang sebesar $1,564 + 30,432 = 31,996$. Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA masih rendah dikarenakan CRO yang tercapai baru sedikit dan penyerapan anggaran rendah karena terdapat anggaran kegiatan luncuran yang baru muncul pada DIPA.

14) Pada IKK PNBPN, pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat penambahan PNBPN sebesar Rp.1.646.963.520. PNBPN antara lain berasal dari:

a) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Maos-Cilacap sebesar Rp477.236.1852;

b) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Elevated Antara Solo Balapan – Kadipiro sebesar Rp1.169.727.335;

Terdapat beberapa kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan PNBPN antara lain:

a) Penyusunan LPJ Bulanan;

b) Monitoring Aset tanah yang berpotensi PNBPN di wilayah Kab. Kendal;

15) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang BTP Semarang belum mentargetkan nilai pengawasan kearsipan karena masih akan dilakukan penilaian di Triwulan IV 2025.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Surabaya:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Kinerja TW II
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,10	97,04	98,90%
3	Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	37,900	37,900	100%
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	9,610	9,940	101,02%
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,000	10,000	100%
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,000	100,000	100%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	40,500	48,470	100%
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	9.521.738.500	100%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-

2) IKK 1 pada tahun 2025 tidak ada kegiatan Pembangunan yang bersifat konektivitas, namun telah dilakukan kegiatan:

a) Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Peningkatan Jalan KA Segmen Jember – Kalisat;

- b) Tinjauan Pekerjaan Geseran Jembatan BH.613 di KM.173+571 Segmen Kras -Ngadiluwih Lintas Blitar - Kertosono, agenda kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- 3) IKK 2 terkait TQI menggunakan hasil pengukuran TW I diperoleh hasil realisasi 97,023 dengan target 98,100 masih on the right track.
 - 4) IKK 3 terkait Fasop seperti IKK , belum terdapat kegiatan pembagunan persinyalan, sampai saat ini terdapat 44 fasop elektrik dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasop (tidak termasuk IB).
 - 5) Realisasi angkutan masih belum mendapatkan data real dari operator. Masih menggunakan data permoza.
 - 6) Kejadian dan gangguan sampai dengan bulan Juni TW II 2025 terdapat kecelakaan 26 kejadian, dengan target penurunan 10% dari target renstra sebelumnya menjadi 53 target kejadian.
 - 7) Keselamatan KA, sd TW II 2025 tidak ada kejadian kecelakaan KA hanya terdapat TW I anjlokkan di dahului oleh faktor eksternal.
 - 8) Nilai AKIP penialain sementara mendapat nilai 84,85 yag mana sudah sesuai dengan target.
 - 9) Penerapan MR sd Juni 2025 telah dilakukan kegiatan Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025, melengkapi data dukung SPIP 2025 dan pengisian datduk formulir 9 Manajemen Risiko DJKA TW II 2025.
 - 10)IKK 9 NKA tercapai
 - 11)Presentase PNBPN sebesar 9M yg mana telah disesuaikan dengan rekansi kemarin, sehingga capaian 100%.
 - 12)IKK 11 masih belum dilakukan, target pada TW IV dengan nilai target 89.
 - 13)Sudah dilaksanakan pengisian pada aplikasi eperformance sampai dengan bulan Juni, E SAKIP, emonev dan SILAKI.
 - 14)Guna menunjang TQI sama seperti balai lain sesuai surat Dit.Pras, di prioritaskan untuk poerawatan di TW selanjutnya. Sudah berkonfirmasi dengan operator sedang dilakukan perawatan di beberapa titik saat melakukan pengujian sehingga nilainya mengalami penurunan.

- 15) Belum ada kontak IMO. Terkait dengan TQI diperlukan konfirmasi terhadap lintas percabangan dengan Semarang pada batas 4 dan 8. Dimungkinkan ada lintasan yang belum masuk.
 - 16) Peningkatan yang dilakukan oleh PT KAI pada TW I sudah sesuai tetapi masih ada beberapa kegiatan perawatan jalur.
 - 17) Untuk meningkatkan konektivitas diperlukan peningkatan pada restrukturisasi 2025-2029 yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan.
 - 18) Hasil TQI TW II sudah mengikuti wilayah BTP.
 - 19) Diperlukan konfirmasi kembali terkait ada potongan lintas antara Stasiun Gundih Surabaya Pasarturi dipotong sehingga ada penambahan sepanjang kurang lebih 40 meter di wilayah Balai Surabaya. Mungkin batas stasiun Gundih pasar turi lintas 4 dan 8 perhitungan sementara masih di Semarang, nilai 97.023. Semarang sudah benar dipotong dibatas. Dimungkinkan ada lintas yang belum masuk.
 - 20) Terkait dengan penurunan gangguan perlu di konfirmasi Kembali target sudah pada TW II atau di akhir, dan perlu dicek kembali reaksi dan perhitungannya.
 - 21) Dimohon kehadirannya sebagai unit sampel di Balai Pengujian.
- i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Medan:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Rasio)	0,50	0,50	100,00
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	95,30	92,91	97,46
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	55,35	55,35	100
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	8,00	7,83	97,88

5	Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	93,44	93,44%
6	Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	-	-	-
7	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100,00	100,00	100,00
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Nilai)	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Nilai)	-	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Nilai)	40,5	32,15	79,38%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	100	100%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Level)	-	-	-

- 2) Pada IKK Rasio konektivitas BTP Medan dari total 18 PKN/PKW/Simpul Transportasi Terhubung, terdapat sebanyak 9 daerah telah terhubung..
Terkait progres Progres pekerjaan pada pengoperasian Jalur KA segmen Krueng Guekueh - Muara Satu saat ini telah bersurat kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait permohonan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi Jalur KA segmen Krueng Guekueh – Muara Satu pada tanggal 28 Mei 2025. Selain itu telah disampaikan Nota Dinas PPK Aceh tanggal 27 Mei 2025 terkait permohonan peminjaman dan pengoperasian TMC SR 3 21 02 untuk mendukung kegiatan uji coba ruang bebas, jalur kA pada lintas tersebut, sosialisasi kepada masyarakat serta meminimalisir vandalisme.
- 3) Pada IKK TQI, hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode I tahun 2025, diperoleh hasil yang didapatkan 92,91% dari target yang ditetapkan sebesar 95,33% dengan capaian 97,46%. Kegiatan pendukung IKK TQI yaitu:
 - a) Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai (MYC 2022-2025);
 - b) Peningkatan jembatan BH 343 segmen Kisaran-Tanjung Balai;

- c) Penggantian Penggantian dan Pemasangan Material Hilang dan Rusak Pada Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Binjai - Besitang termasuk Supervisi.
- 4) Pada IKK Fasop Handal, jumlah antara fasilitas operasi yang berbasis elektrik sebanyak 31 unit dengan jumlah keseluruhan fasilitas operasi yang beroperasi sebanyak 56 unit dengan rincian 31 sinyal elektrik dan 25 sinyal mekanik. Pada kegiatan Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi jalur KA antara Medan-Binjai keterlambatan terjadi dikarenakan menunggu selesainya seluruh paket JLKAMB untuk mengaktifkan sistem operasi persinyalan, Melihat dari progres dan kendala dilapangan masih membutuhkan perpanjangan MYC kembali di Tahun 2026 guna mendapatkan outcome dan dioperasikan sesuai dengan design yang direncanakan masih membutuhkan tambahan anggaran akan diusulkan pada tahun 2027.
- 5) Pada IKK pemenuhan target angkutan untuk realisasi pada TW II sampai dengan bulan Mei, realisasi angkutan penumpang sebanyak 2.628.385 orang dan angkutan barang sebanyak 352.995 ton barang. Pada bulan Mei target 8% dan realisasi 7,83% sehingga capaian bulan mei yaitu 97,88%. Telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
 - a) Rapat Pembahasan dengan PT Railink terkait perpanjangan KA Bandara Srilelawangsa sampai dengan stasiun Lubuk Pakam;
 - b) Pendampingan dari Tim Verifikasi DJKA (Ditlalin) terkait verifikasi lapangan Kewajiban Pembayaran PSO pada Triwulan II 2025;
 - c) Melakukan rampchcek kelengkapan SPM dalam perjalanan KA dan stasiun KA;
 - d) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap lalu lintas dan Angkutam Kereta Api pada TW 2 2025.

- 6) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, realisasi TW II 2025 sebesar 93,44 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Perjalanan KA perintis				
Nama KA	Bulan	Program	Realisasi	Capaian
Cut Mutia	Januari	248	248	100%
	Februari	224	201	96%
	Maret	248	248	100%
	April	240	240	100%
	Mei	248	248	100%
	Juni	240	168	70%
	Juli			
	Agustus			
	September			
Total		1448	1353	93,44%

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan setiap Triwulan untuk memastikan kegiatan keperintisan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

- 7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang jumlah kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang sampai dengan bulan Juni 2025 terjadi 13 kejadian. Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan bersama pada perlintasan sebidang dan rapat koordinasi upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Selain itu telah dilakukan kegiatan pemantauan perlintasan sebidang dan identifikasi ketinggian permukaan perlintasan. Terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang lintas Kisaran – Rantauprapat di wilayah kabupaten asahan dan lintas medan – binjai di wilayah kota binjai telah dilakukan rapat finalisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- 8) Pada IKK Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian sampai TW II 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan Kereta Api sehingga capaian di TW II 2025 sebesar 100%. Telah dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka periode libur nasional, cuti bersama dan hari raya idul adha Tahun 2025.
- 9) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengisian PM SAKIP Tahun 2025 pada Portal SILAKI, melakukan evaluasi internal oleh tim evaluator internal btp medan dan didapatkan nilai 81,55, melakukan rapat pemaparan SAKIP dan Evaluasi Bersama tim evaluator dari DJKA, dan didapatkan nilai sementara 80,35.

- 10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan penyusunan dokumen manajemen risiko tahun 2025, pengisian dokumen manajemen risiko ke dalam Aplikasi SIMARKO dan penyampaian laporan pemantauan perlakuan risiko pada TW I dan TW II 2025.
- 11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2025 sebesar 7% yaitu Rp 47.378.859.191 dari pagu efektif Rp. 676.179.241.000 dan realisasi nilai NKA BTP Medan Pada TW II 2025 yaitu 32,15 (target 40,5) sehingga capaian kinerja yaitu 79,38%. Telah dilakukan koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi rutin oleh Internal unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan teknis yang memadai. Terkait penyusunan RPD/prognosa realisasi anggaran yang valid guna selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi berkala (setiap bulan) termasuk penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran dan pencapaian output.
- 12) Pada IKK PNBPN realisasi sampai dengan TW II 2025 sebesar Rp711.343.418 (dari target Rp.600.634.570) bersumber dari pengembalian belanja modal dan belanja barang, hasil temuan dari BPK, pendapatan perintis cut mutia serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.
- 13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal progres kegiatan saat ini antara lain:
- Melakukan Persiapan penggunaan aplikasi Srikandi untuk seluruh pegawai BTP – Medan;
 - Menginventaris dan memastikan ASN memiliki email kedinasan;
 - Menginventaris dan memastikan pejabat memiliki TTE;
 - Melakukan mapping unit kerja dan jabatan pada unit kerja;
 - Melakukan pengaturan penomoran surat untuk naskah dinas;
 - Melakukan pendaftaran/registrasi akun pegawai sebanyak 165 akun;
 - Mempersiapkan Ruang Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan;
 - Melakukan pemindahan Arsip dari Gudang Menteng ke Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan.

- j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Padang:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BTP Kelas II Padang	0,5	0,5	100,00%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas II Padang	84,42	87,8	104,00%
3	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BTP Kelas II Padang	8,41	8,85	105,23%
4	Persentase realisasi perjalanan KA perintis di wilayah BTP Kelas II Padang	54,6	54,6	100,00%
5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada perlintasan sebidang	-	-	-
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah BTP Kelas II Padang	100	100	104,00%
7	Nilai AKIP BPKA BTP Kelas II Padang	-	-	105,23%
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Kelas II Padang	-	-	100,00%
9	Nilai Kinerja anggaran BTP Kelas II Padang	50	49,46	98,92%
10	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP Kelas II Padang	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BTP Kelas II Padang	100	99,96	99,96%

- 2) Rasio Konektivitas TW II sebesar 100% dengan 4 wilayah sudah terkoneksi.
- 3) TQI per TW II 87,8 dari hasil pengukuran pertama tahun 2025.
- 4) Pemenuhan angkutan diatas target dengan melihat trend capaian angkutan didapat analisa puncak peningkatan pada TW II ini dikarenakan momentum libur panjang. Sedangkan angkutan barang hanya ada 1 jenis dan 1 operator sehingga realisasi mengikuti kondisi pasar.
- 5) Pengoprasian KA Lembah Anai saat ini lintas Duku – Duku tanam dikarenakan sarana utamanya masih dalam keadaan rusak. Posisi terkahir untuk perbaikan kereta sudah diganti operator dari INKA ke GEN (Soetta).
- 6) Presentase gangguan oprasional per TW II terjadi 6 gangguan secara kumulatif sd juni 14 kejadian.

- 7) IKK 7 nilai AKIP berdasarkan penilaian mandiri nilai 83.35 dgn nilai akhir 82,5.
 - 8) IKK 8 terkait MR telah dilaksanakan dan sudah disampaikan kepada Setditjen secara berkala.
 - 9) NKA data diambil dari SMRAT kemeneku pada angka 49,46, jika mengacu pada excel yang pernah dibagikan NKA menjadi 17,46 akan dikoreksi kembali apakah ada miss pada excel atau tidak.
 - 10) Kearsipan telah melaksanakan inventaris arsip serta pengiriman arsip ke pusat arsip di Soreang. Selanjutnya menggunakan arsip srikandi.
 - 11) PNPB (indikator baru setelah revisi PK) 99,96 dengan nominal 6,7M.
 - 12) Pengisian aplikasi perlu dilengkapi dan ditingkatkan.
 - 13) Terkait dengan angkutan barang perlu dimonitor dikarenakan terdapat temuan dari Itjen perlu dilakukan SOP terkait dengan angkutan barang tersebut.
 - 14) Terkait nilai AKIP dalam penilaian mandiri yang sudah dilaksanakan kemarin, Jika ada perubahan nilai pada pelaksanaan evaluasi itjen nantinya, akan ada evaluasi ulang pada satker dengan penyesuaian.
 - 15) Kesepakatan mengenai pembulatan jumlah TQI menggunakan dua angka dibelakang koma.
- k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Palembang:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Rasio)	0,71	0,71	100,00
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	99,03	91,65	98,53
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	27,71	27,71	100
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	8,89	9,30	104,63

5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang (%)	-	-	-
6	Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100,00	89,94	89,94
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	60,00	44,92	74,86
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Nilai)	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Nilai)	-	-	-
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Nilai)	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100,00	100,00	100,00

2) Berdasarkan Konsep Naskah Hasil Evaluasi (NHE) Penyelenggaraan Infrastruktur Konektivitas prasarana KA BTP Palembang Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP, terdapat Evaluasi dari pemenuhan Rasio Konektivitas tidak menggambarkan sasaran konektivitas/Target < 0,710.

- 3) BTP Palembang akan melakukan upaya peningkatan kinerja antara lain:
- Melakukan tinjauan kembali terhadap Formula perhitungan Rasio Konektivitas dengan target dan formula yang realistis meliputi:
 - Audit kelayakan Proyek;
 - Penyesuaian Target jangka pendek dan jangka menengah;
 - Prioritas Proyek;
 - Percepatan dan efisiensi penyelesaian Lahan;
 - Peningkatan Kualitas Desain dan pengelolaan konstruksi;
 - Optimalisasi Anggaran dan keuangan.

4) Pada IKK TQI, capaian tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor antara lain:

- Divre III Palembang
 - Faktor Penambahan Panjang Jalur KA dimana panjang jalan rel bertambah 6,5 kmsp pada pembangunan investasi segmen I oleh PT.KAI yang sudah dilakukan uji coba operasi dan belum dilakukan sertifikasi uji pertama. Serta pada daerah rawan terdapat total 34

titik daerah rawan, dengan rincian 21 titik amblesan/tanah labil, 8 titik longsor dan 5 BH Rawan.

b) Divre IV Tanjung Karang

- Kondisi rel antara Stasiun Tegineneng - Stasiun Sukamerindu mengalami rel aus, dan defect sepanjang $\pm 33,8$ km'sp.
- Terdapat total 22 titik daerah rawan, dengan rincian 11 titik amblesan/tanah labil, 6 titik longsor, 1 BH Rawan dan 4 titik banjir.

- 5) Pada IKK persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal, untuk total realisasi Mekanik sebesar 60 dan Elektrik sebesar 23 sehingga posisi realisasi sampai dengan TW II 2025 telah mencapai angka tersebut.
- 6) Pada IKK pemenuhan target angkutan kereta api, pemenuhan target Angkutan Penumpang s.d. TW II sebesar 1.129.627 penumpang dan Pemenuhan Target Angkutan Barang s.d TW II sebesar 28.205.561 ton.
- 7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang periode TW II 2025, terdapat gangguan perjalanan Kereta Api sebanyak 9 kejadian:
 - a) 11 April 2025/Temperan/Perlindungan km 536+5/6;
 - b) 22 April 2025/Temperan/JPL 75 km 325+8/9;
 - c) 5 Mei 2025/Temperan/Perlindungan km 398+2;
 - d) 20 Mei 2025/Temperan/Perlindungan km 325+0/1;
 - e) 11 April 2025/Temperan/JPL 15 km 19+5/6;
 - f) 7 Mei 2025/Temperan/Perlindungan km 5+6/7;
 - g) 24 Mei 2025/Temperan/Perlindungan km 263+8/9;
 - h) 2 Juni 2025/Temperan/Perlindungan km 308+0/1;
 - i) 26 Juni 2025/Temperan/JPL 24A km 84+6/7/Palang pintu rusak.Penyebab gangguan tersebut antara lain:
 - a) Kelengkapan peralatan perlindungan sebidang;
 - b) Beberapa Pintu Perlindungan mengalami kerusakan;
 - c) Ketersediaan personil penjaga perlindungan;
 - d) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di perlindungan masih kurang.
- 8) Pada IKK persentase tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian terdapat kejadian kecelakaan tanggal 23 Juni 2025, anjlokkan KA di

emplasmen Jalur 3 ke arah wesel 5 pada Stasiun Banjarsari yang menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai dari target 100 dengan realisasi 89,94.

- 9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan data di Monev Kemenkeu untuk Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan TW II tahun 2025 sebesar 44,92 dengan target di akhir Tahun 2025 sebesar 81,00 sehingga capaian sebesar 74,86%. Akan dilakukan beberapa upaya peningkatan kinerja antara lain:
 - a) Melakukan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan;
 - b) Melakukan akselerasi realisasi belanja agar indikator penyerapan anggaran meningkat;
 - c) Melakukan penyampaian kontrak dengan tepat waktu yaitu dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak;
 - d) Melakukan ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual;
 - e) Melakukan perhitungan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP;
 - f) Memperhitungkan ketepatan waktu pelaporan dan ketercapaian output;
 - g) Melakukan Percepatan penyelesaian kontrak IMO.
- 10) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Tim Evaluasi AKIP tingkat Eselon I pada tanggal 16 dan 17 Juni 2025, terkait data dukung yang harus dipenuhi dari setiap komponen sesuai dengan KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP.
- 11) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko, telah dilakukan penilaian mandiri maturitas MR pada bulan April 2025 dengan nilai 23,5, selain itu dilakukan pemantauan rencana tindak pengendalian dan keterjadian risiko secara rutin setiap bulannya. Serta telah dilakukan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara intensif antara UPR dan UMR tingkat Eselon I, sebagai pembina dukungan manajemen agar pencatatan dan pelaporan serta pemenuhan data dukung risiko dilakukan dengan baik.

12) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, telah dilakukan penilaian Pengawasan Kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tahun 2024, adapun Unit Pengolah mendapatkan penilaian sebesar 35,22 kategori Kurang (C) dan Unit Kearsipan mendapatkan penilaian sebesar 56,36 Kategori Cukup (CC).

13) Pada IKK PNBP, total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga bulan Mei 2025 telah mencapai sebesar Rp28.461.930.367 dimana pada bulan Mei pada akun 425913 mendapatkan penerimaan kembali Belanja Modal TA yang lalu sebesar Rp65.423.960.

l. Balai Pengujian Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Pengujian Perkeretaapian:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Triwulan II	Capaian		KETERANGAN
		Tahun 2025	TW II		Tahun 2025	TW II	
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	19,738%	7,869%	7,813%	40,09%	100,18%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 70.262 Unit 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 13.868 Unit 3. Target triwulan II adalah 5.350 Unit 4. Realisasi triwulan II adalah 5.560 Unit
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	19,542%	8,781%	9,177%	46,96%	104,51%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 43.640 Orang 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 8.528 Orang 3. Target triwulan II adalah 3.832 Orang 4. Realisasi triwulan II adalah 4.005 Orang
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	18,261%	7,191%	7,223%	39,55%	100,45%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 1.363 Unit dan 1.165,522 km 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 261 Unit dan 202.664 km 3. Target triwulan II adalah 71 Unit dan 106.997 km 4. Realisasi triwulan II adalah 71 Unit dan 107.747 km
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,860 Nilai	3,860 Nilai	3,850 Nilai	99,74%	99,74%	Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi PPTB
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	80,350 Nilai	-	-	-	-	Hasil Evaluasi AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian di tingkat Eselon I yaitu 83,80
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	16,000 Nilai	-	-	-	-	Telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	81,000 Nilai	54,300 Nilai	54,870 Nilai	67,74%	101,05%	Realisasi dilihat pada aplikasi monvemenkemenku per 7 Juli 2025
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	100,000 %	30,500%	31,584%	31,58%	103,59%	1. Target penerimaan berdasarkan DIPA Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 adalah Rp60.330.699.000,00 2. Realisasi penerimaan hingga bulan Juni adalah Rp19.055.013.678,00
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	76,500 Nilai	-	-	-	-	melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Keuangan sesuai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip nomor BA-BP-UJI DJKA 13 Tahun 2025

2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian, target rancangan renstra tahun 2025-2029 adalah 70.262 unit, adapun target revisi PK Tahun 2025 adalah 13.868 unit. Untuk target Triwulan II adalah 5.350 unit dan realisasi Triwulan II sebesar 5.560 Unit. Hal ini dikarenakan:

- Ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai;
- Berhasil memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAPKA untuk mempermudah dalam proses permohonan pengujian hingga penginputan hasil pengujian untuk proses penerbitan sertifikat; dan
- Berhasil memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan dalam kondisi baik dan telah terkalibrasi.

3) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 43.640

orang dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8.528 orang. Adapun target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3.832 orang dengan realisasi Triwulan II sebesar 4.005 orang.

- 4) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 1.363 Unit dan 1.166,522 km, sedangkan pada target Revisi PK Tahun 2025 adalah 261 Unit dan 202,664 km. Untuk target Triwulan II adalah 71 Unit dan 106,997 km dan realisasi Triwulan II adalah 71 Unit dan 107,747 km.
- 5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi PPTB dan dapat melihat secara rinci dan jelas variabel-variabel yang diukur, dimana survey dilaksanakan secara rutin tiap selesai pelaksanaan pengujian. Realisasi pada IKK ini merupakan rata-rata dari bulan Januari-Maret dengan jumlah responden sebanyak 1.865 Orang.
- 6) Pada IKK Nilai AKIP, Balai Pengujian telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, selain itu telah dibentuk Tim Penyelenggara SAKIP dan Tim Evaluasi AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dan telah dilakukan Evaluasi AKIP di Internal Balai Pengujian Perkeretaapian dengan perolehan sementara 83,95.
- 7) Pada Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian telah disusun Piagam Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian.
- 8) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi dilihat pada aplikasi monev kemenkeu per 7 Juli 2025



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	IK Perencanaan Anggaran	IK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	010-0000000	010-0000000	14,90	94,83	94,87

- 9) Pada IKK PNBPN, realisasi pada OM SPAN merupakan pendapatan yang telah disahkan hingga bulan Mei, sedangkan pendapatan bulan Juni belum

disahkan. Pendapatan hingga bulan Juni yaitu Rp32.112.002.121,00 atau 53,227% yang saat ini sedang dalam proses pengesahan.

10) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa kegiatan:

- a) Melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Keuangan sesuai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip nomor BA-BP-UJI DJKA 13 Tahun 2025;
- b) Melaksanakan pemindahan arsip keuangan SP2D/SPM ke ruang transit sementara;
- c) Menghadiri Sosialisasi Lanjutan Aplikasi SRIKANDI oleh Biro Umum dan Sekretariat Ditjen Perkeretaapian;
- d) Melaksanakan Familiarisasi Aplikasi Srikandi di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
- e) Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif secara rutin di Central File.

m. Balai Perawatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Perawatan Perkeretaapian:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi Tw II 2025	Capaian TW II 2025
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100	85	85,00%
2	Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	85	85,16	100,19%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	40,695	66,85	164,27%
7	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	21,715	26,65	122,73%
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-

2) Capaian IKK 1 diperoleh 136 unit yang tertuang dalam DIPA POK Balai Perawatan tahun 2025, untuk hasil realisasi IKK 1 terdapat beberapa sarana yang TSO karena tidak tersedianya sparepart untuk melakukan perbaikan.

- 3) Realisasi IKK 2 dari jumlah asset-asset peralatan mesin dan gedung bangunan yang ada di depo Depok dan depo Solo Jebres.
 - 4) Terkait IKM pada TW II saat ini masih menyusun/ melakukan kajian.
 - 5) Tekait AKIP belum ada realisasi dan sudah ada upaya dalam pengisian aplikasi SILAKI, e-performance, emonev bappenas.
 - 6) Penerapan MR belum ada realisasi dengan upaya yang telah dilakukan menyusun SK satgas dan tim penilaian SPIP.
 - 7) NKA realisasi TW II 66,85 dengan capaian 164.25% dari app e-monev.
 - 8) PNPB realisasi 26,65% capaian 122,75%
 - 9) Nilai pengawasan kearsipan internal saat ini masih belum ada realisasi, namun upaya yang telah dilakukan menyusun SK tim pengelola arsip di Baperka.
 - 10)Terkait IKK 1, untuk sparepart ditargetkan pada TW IV.
 - 11)Terkait dengan IKK 5, target sudah di depo Depok dan Solo, diharapkan ada sarana lain yang ditargetkan sehingga dapat dipastikan target tercapai pada akhir tahun.
 - 12)Diperlukan percepatan terkait dengan IKM, dengan saran dapat mengutip contoh survey dari satker lain (balai pengujian).
 - 13)Terkait dengan IKM untuk layanan pada perawatan SMN, diperlukan penentuan siapa respondennya dan jumlah respondennya.
 - 14)Terkait indikator yang belum ada capaiannya diharapkan dapat didetailkan progress pada analisisnya.
- n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BPKARS Sumsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumatera Selatan	9,03	9,84	108,97%
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tepat waktu	99	99,76	100,77%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKAR Sumsel	3,58	3,58	100,00%

4	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian BPKAR Sumsel	100	100	100,00%
5	Nilai AKIP BPKAR Sumsel	-	-	-
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumsel	-	-	-
7	Nilai Kinerja anggaran BPKAR Sumsel	40,5	58,47	144,37%
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumsel	42,12	40,80	96,87%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP BPKAR Sumsel	-	-	-

- 2) Pada Tahun 2025 indikator yang terbaru merupakan indikator Tingkat penerapan MR dan pengarsipan internal. Pada saat TW I IKK 3 yang tidak tercapai, sedangkan pada TW II IKK 8 yang tidak tercapai 100%.
- 3) Pemenuhan target angkutan dengan capaian 108% persen Dimana dapat dilihat dari trend pada TW I mengalami penurunan, sedangkan pada TW II fluktuatif dan pada bulan Juni penyumbang pemenuhan target salah satunya dikarenakan HUT Palembang dengan biaya perjalanan Rp 1 rupiah.
- 4) Presentase kedatangan dan keberangkatan telah mencapai target 100,74% dengah OTP TW II yaitu 99,96% (diakumulasikan pada 2025).
- 5) IKM 2025 sesuai target capaian 100% total responden 1.120 rata-rata nilai 3,58 (Sangat baik).
- 6) Tingkat keselamatan target dapat dicapai 100% Dimana 17rb frekuensi KA tidak terdapat kecelakaan.
- 7) Nilai AKIP target pada TW IV, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa:
 - a) Telah Menyusun LKIP 2024;
 - b) Rutin melaksanakan input data pada e-performance;
 - c) Membuat laporan bulanan untuk dilaporkan kepada DJKA.
- 8) Tingkat penerapan MR akan ditargetkan pada TW IV dengan upaya yang telah dilakukan saat ini berupa:
 - a) Telah disusun laporan MR TW I 2025;
 - b) Telah diinput data pada aplikasi SIMARKO;
 - c) Telah disusun SPIP 2025.
- 9) Pesentase pelaksanaan anggaran (NKA) diatas target pada capaian 144,37% sesuai aplikasi e-monev Kemenkeu dengan nilai 58,47.

10)PNBP pada TW II 2024 dan 2025 masih belum mencapai target. TW II 2025 realisasi pada angka 40,80 dengan target 42,12 dikarenakan kendala yang dialami sebagai berikut:

- a) Masih terkendalanya pemanfaatan pilar LRT;
- b) Beberapa tenat bulan Juni tutup (akan ada pertukaran menjadi booth makanan);
- c) Pemanfaatan parapet masih dalam proses negosiasi;
- d) PKS (Perjanjian Kerjasama) berkaitan dengan penambahan jam operasional.

11)Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKK 9 akan dilaksanakan:

- a) Melakukan identifikasi arsip inaktif;
- b) Membuat SOP pemberkasan arsip aktif dan inaktif;
- c) Membuat SOP pelayanan peminjaman arsip;
- d) Melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsio inaktif;
- e) Melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta Menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan;
- f) Mengikuti pelatihan pengelolaan kearsipan;
- g) Mengikuti uji kompetensi sertifikasi kearsipan.

12)Perlu dipastikan upaya untuk kedepannya juga, bukan hanya upaya yang sudah dilakukan.

13)Perlu dikumulatitkan terkat data angkutann penumpang 2025 dan dikonfirmasi dengan data dari Dit.LLAKA

14)Perlu diperhatikan catatan TW I dan di tindak lanjuti.

15)*Crosscuting* sudah dikoordinasikan secara internal.

16)Terkait metode survey dapat dikombinasikan antara servey internal dan yang dari BTPB.

o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II BPKA Sulsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BPKA Sulsel	0,24	0,24	100,0%

2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BPKA Sulsel	99	99	100,0%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja BPKA Sulsel	100	100	100,0%
4	Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BPKA Sulsel	7	7,7	110,0%
5	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api di wilayah BPKA Sulsel	96,45	100,24	103,9%
6	IKM terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKA Sulsel	3,23	3,37	104,3%
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkerataapian di wilayah BPKA Sulsel	100	100	100,0%
8	Nilai AKIP BPKA Sulsel	80,5	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulsel	15	-	-
10	Nilai Kinerja anggaran BPKA Sulsel	48	49,65	103,4%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulsel	55	58	105,5%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan BPKA Sulsel	61	-	-

- 2) IKK 1 tercapai 100%, namun terdapat hambatan dokumen DPPT yang diajukan ke pemerintah setempat telah ditolak dan dikembalikan untuk disempurnakan. Dan juga keterlambatan pengiriman peralatan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan depo.
- 3) TQI tercapai 100%.
- 4) IKK 3 realisasi 100% dengan target fasop tahun 2025 sebesar 14, dimana tahun 2023 fasop di Mandai sudah terbangun sehingga target 14 fasop sudah terpenuhi.
- 5) Target pemenuhan angkutan perJuni 2025 realisasi mencapai 110% didukung oleh inovasi baru yaitu sudah diberlakukannya pemesanan tiket online mulai H-7, monitoring dan eval pelayanan penumpang berkesinambungan.
- 6) IKK 5 terkait dengan kedatangan dan keberangkatan sesuai waktu dengan realisasi 96,68% di dukung oleh koordinasi antar balai dan badan usaha sarana serta memonitoring perjalanan KA dan monitoring eval GAPEKA.
- 7) IKK 6 capaian kinerja 104%, didukung oleh meningkatkan standar pelayanan minimum yang ada di stasiun dan berkoordinasi dengan APS untuk meningkatkan pelayanan serta sistem pemesanan tiket mulai H-7.

- 8) IKK 7 realisasi 100% pada TWI II nihil, namun terdapat kejadian hewan tertemper sebanyak 5 kali.
- 9) IKK 10 NKA dari monev kemenkeu capaian 103% .
- 10)IKK 11 PNB target 55 realisasi 58, PNB Juni 2025 sebesar 1,4M.
- 11)Upaya peningkatan AKIP BPKA Sulsel:
 - a) Melakukan TL hasil evaluasi AKIP tahun 2024;
 - b) Mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat DJKA 2025;
 - c) Mengupload data dukung SAKIP pada aplikasi SILAKI DJKA;
- 12)Upaya peningkatan MR:
 - a) Melakukan finalisasi pengisian MR pada app SIMARKO;
 - b) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana pengendalian risiko BPKA Sulsel;
 - c) Menyusun Laporan Penyelenggaraan MR TW II.
- 13)Upaya peningkatan nilai kearsipan:
 - a) Melakukan pendaftaran/pembuatan daftar arsip aktif dan inaktif;
 - b) Penataan arsip aktif dan inaktif pada lemari arsip;
- 14)Pengisian pada aplikasi sudah lengkap hanya saja e-monev pada bulan April – Juni belum.
- 15)Pada saat melakukan survey IKM menggunakan metode dengan adanya tim langsung turun kelapangan menginterview penumpang, dengan responden sekitar 50 penumpang tersebar di seluruh stasiun. Diharapkan dapat di lampirkan metode serta detail dalam pelaksanaan pelaksanaan survey dalam laporan.
- 16)PNBP bersumber dari sewa tempat (asset) dan penjualan tiket.
- 17)TQI dilakukan pengukuran pada periode pertama 2025.
- 18)Perlu dikonfirmasi kepada pengelola data TQI untuk penjelasan pada laporan kinerja dan diperlukan SOP tata cara pengukurannya.

p. Setditjen KA

1) Bagian SDMO

a) Indeks Profesional ASN

- Secara target final dari biro SDMO pada TW IV. Data update sementara yang di dapatkan pada 8 Juli 2025 IP ASN bernilai 82,09 masih sama dengan data yang di dapat pada akhir Juni. Pada data

ini tidak terjadi kenaikan dikarenakan ada beberapa kendala terkait dengan sinkronisasi data yang mengalami error dari data SIK ke BKN. Para pegawai sudah ada yang mengupload data kompetensi dan kinerjanya tetapi ketika dilakukan sinkronisasi ke BKN gagal. Lalu ada data pegawai yang seharusnya sudah keluar tetapi masih terdata aktif sehingga mempengaruhi IP ASN tersebut.

- Upaya yang telah dilakukan secara berkala melakukan monitoring dan menginformasikan kepada masing-masing unit secara informal untuk meningkatkan kinerja dan performance, dikarenakan ada beberapa pegawai yang status kinerjanya masih 0 (dikarenakan belum melakukan aksi “klik terima penilaian”). Terkait dengan aksi terima penilaian tersebut, sudah dilakukan penyampaian surat pada TW I dan selanjutnya menyampaikan data excel kepada masing-masing unit kerja. Upaya lain yaitu dengan penawaran diklat, dan beasiswa. Pemutakhiran data SIK dan melakukan sosialisasi ke masing-masing unit kerja/admin untuk menjelaskan bagaimana proses sinkronisasi dari berbagai fitur.
- Diperlukan terkait data dukung SAKIP yang akan dikoordinasikan dengan pimpinan agar dapat bersurat secara formal.

b) Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian

- Sesuai Target pada TW IV, pertanggal 5 Juli 2025 kemarin Pusdatin mengundang terkait penyampaian SPBE dan penilaian SPBE dengan mengundang narasumber PanRB. Penilaian SPBE pada saat ini diubah menjadi Indeks Pemerintah Digital. Sudah dikonfirmasi kepada Pusdatin untuk detail penilaian/lembar penilaian belum ada info dari PanRB, dimungkinkan akan jadi penilaian di tahun 2026. Untuk tahun 2025, info dari PanRB, Kemenhub belum menjadi fokus dalam penilaian Indeks Pemerintahan Digital. Sehingga untuk penilaian 2025 masih disesuaikan menunggu arahan lebih lanjut dari Pusdatin.

- Upaya yang telah dilakukan pembahasan pendahuluan pelayanan portal pada 26 Juni 2025, *Kickoff* 3 Juli, follow up terhadap kejadian peretasan pada aplikasi SILAKI. Upaya kedepannya akan melanjutkan pembahasan terkait superapps, koordinasi perubahan yang terbaru dan merumuskan quisioner.
- Terkait dengan Tingkat kematangan layanan publik diharapkan tidak hanya menggunakan metode survey, tetapi dapat dikombinasikan dengan lainnya.

2) Bagian TU

- a) Pengawasan internal kearsipan beda dari tahun lalu dan berpengaruh dengan nilai karena instrumen penilaian terkait dengan SRIKANDI yang belum dipakai saat ini. Terkait ini akan menunggu surat dari Biro Umum dulu lalu akan menyesuaikan.
- b) Terkait dengan jika tidak tercapainya capaian pada tahun ini akan dilakukan konfrimasi terhadap kebijakan dahulu, untuk penyelesaian akhir tahun target terkait dengan perhitungan akan di hitung Kembali asalkan ada dasar hukumnya.
- c) SK Tim pengarsipan sampai TW II belum dibuat dikarenakan masih dalam audit Biro Umum. Untuk penyusunan program kerja akan dibuat setelah audit biro umum selesai.

3) Bagian Hukum

Pada TW II ini belum ada penertiban terkait dengan Perundang-Undangan, namun telah berproses 8 Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) PM Perhunungan tentang Sertifikasi Pengendalian Distribusi Listrik dengan status sudah dilakukan harmonisasi Bersama Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025 dan masih menunggu pengundangan;
- b) Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase dengan status masih menunggu dikarenakan RPM perlu dikaji kembali oleh Dit.LLAKA;
- c) Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur KA dengan Jalan dengan status akan dilakukan pembahasan pada tanggal 15-16 Juli 2025;

- d) Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengajuan Lokomotif dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
- e) Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas KA dengan status pembahsan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025 dengan kesimpulan perlu dilakukan koordinasi antara Dit. Prasarana dan Dit. LLAKA terkait pengoprasian Fasop KA;
- f) Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif NAgkutan Orang dengan KA dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
- g) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api dengan status pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025, dan masih akan dilakukan pembahasan kembali;
- h) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api dengan status Telah dilakukan pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025. Lampiran sedang disusun oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan masih adanya beberapa peraturan yang masih berproses diharapkan dapat ada yang disahkan pada TW III kedepannya. Dari Tim Hukum masih belum dipastikan kapan akan disahkan karena ada beberapa kendala seperti dikembalikannya peraturan ke Direktorat terkait dan diperlukan kajian ulang oleh Direktorat terkait.

4) Bagian Humas

- a) Penialian 2025 akan dimulai pada bulan Agustus, untuk prose sekarang masih dalam inventaris terhadap data dukung antara lain:
 - PPID;
 - Akses Pelayanan;
 - DIP (Daftar Informasi Publik) yang sudah disusun namun belum disahkan. Progres sampai saat ini sudah diserahkan kepada Biro KIP.

- b) DIK (Daftar Informasi Dikecualikan) terdapat 2 tambahan baru hasil update tahun lalu, progress saat ini sedang dilakukan uji konsekuensi dan belum ada info lebih lanjut terkait uji tersebut.
 - c) DIK dan DIP yang digunakan untuk penilaian masih belum mendapat kepastian apakah yang digunakan DIK dan DIP tahun 2024 atau 2025.
 - d) Pengisian terkait dengan pelayanan di kantor pusat masih diperlukan penambahan responden (saat ini baru 75 responden dengan history tahun lalu 105 responden).
 - e) Revisi anggaran sudah diajukan kepada Pak Ses.
 - f) Sosialisasi penanggulangan bencana darurat sudah dikoordinasikan dengan Biro Umum. Namun belum terlaksana dikarenakan belum ada anggaran sehingga masih menunggu revisi anggaran.
- 5) Bagian Keuangan
- a) Menindaklanjuti IKK terkait temuan keuangan, rekomendasi untuk dikombinasikan temuan Itjen dan BPK dengan rincian:
 - Temuan Itjen 498 temuan, sudah tuntas sebanyak 421 belum tuntas 77;
 - ADTT 3 temuan, dan sudah tuntas semua;
 - Temuan BPK 157 temuan, sudah selesai 151, hanya 6 yang saat ini masih proses.
 - b) Dari pihak Keuangan menginfokan untuk data temuan BPK hanya berjalan per semester, jika di ikutkan dalam capaian kinerja dikhawatirkan tidak akan ada progress untuk TW selanjutnya. Temuan BPK tidak semudah pemantauan audit dari Itjen, dikarenakan BPK tidak meninfokan kepada sub sektor tetapi kepada Itjen. Keputusan untuk substansi capaian kinerja indikator temuan akan menunggu keputusan dari Tim Verifikasi Keuangan.

D. KESIMPULAN

1. Pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada *output* kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi

KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

- b) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
 - c) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang *diinput* menjadi data riil;
 - d) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
 - 1) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
 - 2) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
 - 3) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
 - e) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat pada aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;
 - f) Diperlukan percepatan terkait pengisian komponen dan RO Renja agar tidak ada lagi progres yang masih kosong.
2. Pembahasan capaian kinerja unit kerja Direktorat, Bagian dan Balai telah dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan validasi data kinerja antar unit kerja, diantaranya:
- a) Data realisasi angkutan kereta api baik penumpang dan barang perlu sinkronisasi antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan Direktorat LLAKA;
 - b) Data terkait dengan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II diperlukan koordinasi dengan Direktorat Prasarana dikarenakan banyak Balai yang mengalami penurunan nilai TQI;
 - c) Sampai dengan bulan Juni 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang berdasarkan data Direktorat Keselamatan. Realisasi perjalanan kereta api

pada bulan Januari – Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%;

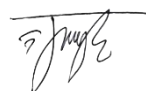
- d) Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menggunakan sumber data pada aplikasi Monev Kemenkeu, sedangkan capaian PNBK mengacu pada realisasi pada aplikasi SPAN Kemenkeu serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian guna proses monitoring dan evaluasi berkala;
 - e) Terkait dengan renaksi setelah revisi PK didasarkan pada Pagu Efektif.
3. Diperlukan untuk para unit kerja untuk memenuhi pengisian aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Bappenas (e-Monev), Kementerian Keuangan (SAKTI/Monev Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Portal Aplikasi DJKA).
 4. Terkait dengan konsep pelaporan TW II, perlu ditekankan jika Analisa keberhasilan/kegagalan merupakan upaya yang telah dilakukan sedangkan Upaya Peningkatan Kinerja merupakan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.
 5. Masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan analisis keberhasilan/kegagalan, rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya dan data dukung capaian masing-masing indikator kinerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2025

NOTULENSI



(TIM NOTULENSI)

Dokumentasi





NOTA DINAS PENYAMPAIAN DATA DUKUNG



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 72/K53/VII/2025

Yth : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal : Penyampaian Data Kecelakaan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/2/22/KI/DJKA/2025 pada tanggal 1 Juli 2025 perihal Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 :

A. Rincian kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April – Juni 2025).

NO	TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	LOKASI KEJADIAN	KORBAN	TIM INVESTIGASI
1.	Senin, 23 Juni 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokkan	Emplasemen Banjarsari	Nihil	DJKA / KNKT

* Detail Kejadian Terlampir

B. Rekapitulasi Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April – Juni 2025).

NO	JENIS KECELAKAAN	JUMLAH KECELAKAAN	JUMLAH KORBAN		
			LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL
1.	Tabrakan antar KA	0	0	0	0
2.	KA Terguling	0	0	0	0
3.	KA Anjlok	1	0	0	0
4.	KA Terbakar	0	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0

C. Penyebab Kecelakaan Kereta Api Triwulan ke II Tahun 2025 (April - Juni 2025).

NO	JENIS KECELAKAAN	JUMLAH KECELAKAAN	PENYEBAB			
			SARANA	PRASARANA	SDM	MASIH DALAM ANALISIS
1.	Tabrakan antar KA	0	0	0	0	0
2.	KA Terguling	0	0	0	0	0
3.	KA Anjlok	1	0	0	0	1
4.	KA Terbakar	0	0	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0	1

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur, kami ucapkan terimakasih.



Riovano
NIP 198509062010121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA
10110

TEL: 0813 6001 3838

WEBSITE: <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0103/K2.2/VII/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di
Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : Juli 2025

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0264/K2/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 104,28%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 95,60%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:
 - 1) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
 - 2) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
 - 3) Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d. Juni 2025.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
Capaian secara kumulatif hingga Juni 2025 sebesar 97,80%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 96,20%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama April s.d. Juni 2025 pada MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,85%), dan LRT Jabodebek (99,66%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Bulan Juni 2025 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.



 Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenuhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 241/ND/K2.3/DJKA/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kepala Sub Direktorat Angkutan
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 21 Juli 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: 0264/K2/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Juni di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, bersama ini kami sampaikan data dukung kinerja Triwulan II Tahun 2025 di Subdirektorat Angkutan sebagai berikut:

1. Data Capaian Kinerja Triwulan II 2025

Uraian	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Persentase
Angkutan Penumpang	249.486.471 Penumpang	262.891.369 Penumpang	105%
Angkutan Barang	16.959.136 Ton	17.262.808 Ton	102%

Rincian data angkutan terlampir.

2. Matriks Analisa Keberhasilan/Kegagalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II	Realisasi Per Juni 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	249.486.471 Penumpang	262.891.369 Penumpang	1. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 166.432.692 penumpang dengan rata-rata penumpang <i>weekday</i> sebesar 1.032.790 penumpang. 2. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2.936.345 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.250 penumpang;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II	Realisasi Per Juni 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
				3. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan II Tahun 2025 sebesar 13.040.406 penumpang dengan rata-rata penumpang <i>weekday</i> sebesar 93.471 penumpang; 4. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 105%.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	16.959.136 Ton	17.262.808 Ton	1. Realisasi Angkutan Barang Triwulan II Tahun 2025 sebesar 17.262.808 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 37.758 Ton. Dan juga bila dibandingkan dengan program yang ada di 2025, telah mencapai target. 2. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada triwulan II mengakibatkan naiknya volume angkutan dari triwulan I, khususnya pada angkutan Batubara dan BBM.

3. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda	1. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial untuk meningkatkan pengguna transportasi kereta api; 2. Telah dilakukan tinjauan Kepadatan Lalu Lintas JPL 78, 81 dan Stasiun Bekasi pada tanggal 30 April 2025; 3. Telah dilakukan <i>joint inspection</i> rencana pengoperasian

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			<i>skybridge</i> dalam rangka integrasi Stasiun Bogor Paledang dan Stasiun Bogor pada tanggal 22 Mei 2025; 4. Telah dilakukan Survei Lokasi untuk Kunjungan Kerja Indonesia-China <i>Bilateral Government-to Government South-South Exchanges on Green Finance and Circular Economy</i> ke Stasiun Manggarai pada tanggal 23 Mei 2025 5. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana pemberian stimulus pertumbuhan ekonomi: diskon tarif KA pada tanggal 27 Mei 2025; 6. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pengembangan Kartu Disabilitas Pelanggan LRT Jabodebek pada tanggal 5 Juni 2025.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang.	1. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial dengan memberikan informasi kelebihan angkutan barang dengan moda KA untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda KA; 2. Telah melakukan koordinasi Upaya peningkatan angkutan barang dengan KA serta mendukung Penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional

4. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan	Realisasi Per Juni 2025	Kriteria Upaya	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	249.486.471 Penumpang	262.891.369 Penumpang	Aktivitas	Meningkatkan fasilitas pelayanan baik di stasiun maupun dalam perjalanan kereta.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	16.959.136 Ton	17.262.808 Ton	Aktivitas	Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.

Atas arahan dan petunjuk lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001